

# MEMAHAMI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI

Thriwaty Aرسال



# MEMAHAMI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI

**Penulis:**

Thriwaty Aرسال

**ISBN: 978-623-167-412-8**

**Design Cover:**

Yanu Fariska Dewi

**Layout:**

Eka Safitry

**PT. Pena Persada Kerta Utama**

**Redaksi:**

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas  
Jawa Tengah.

Email: [penerbit.penapersada@gmail.com](mailto:penerbit.penapersada@gmail.com)

Website: [penapersada.id](http://penapersada.id). Phone: (0281) 7771388

**Anggota IKAPI: 178/JTE/2019**

All right reserved

Cetakan pertama: 2024

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang  
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun  
tanpa izin penerbit

## PRAKATA

Manusia terlahir di dunia dengan dibekali akal budi oleh Tuhan. Melalui akalnya itu, manusia dapat berpikir sehingga ia bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Apakah yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan terdiri dari dua kata yaitu ilmu dan pengetahuan. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan diperoleh dari aktivitas berpikir manusia melalui metode tertentu yang bisa diuji kebenarannya. Sedangkan pengetahuan adalah kesan dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan pancaindranya. Jadi Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pikiran yang dapat diperiksa, ditelaah, ataupun dikontrol secara kritis oleh siapapun yang ingin mengetahuinya.

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang hubungan manusia dalam bermasyarakat. Perkembangan ilmu sosiologi adalah berdasarkan pada teori-teori yang telah ada. Namun terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang semakin majemuk. Maka setiap manusia hendaknya selalu dapat menempatkan dirinya dalam hubungan dengan manusia yang lain secara bijaksana. Pada mulanya seseorang mengkaji suatu masyarakat hanya tertarik pada masalah-masalah yang menarik perhatian umum. Kemudian perhatian orang menjadi meningkat pada filsafat kemasyarakatan, barulah orang menguraikan harapan-harapan tentang susunan dan kehidupan masyarakat yang diinginkan.

Pada mulanya dapat dikatakan bahwa sebetulnya setiap orang mempunyai pengetahuan secara sosiologis karena setiap orang sejak lahir di dunia sudah hidup berdampingan dengan orang lain dan sudah berhubungan dengan orang di sekelilingnya; pertama-tama dengan orang tuanya. Semakin meningkat usianya, semakin luas pula pergaulannya dengan manusia di dalam masyarakat. Dia juga menyadari bahwa kebudayaan dan peradaban yang ada dewasa ini, merupakan hasil pengalaman masa silam. Di samping itu ia ikut serta dalam hubungan sosial

dan menyadari bahwa dia tidak dapat bertingkah laku semaunya, karena adanya norma atau peraturan yang mengatur dan mengontrol perbuatannya itu. Tetapi semuanya itu belum berarti bahwa ia adalah seorang ahli sosiologi. Pasti dia belum mengetahui apa sesungguhnya ilmu sosiologi itu.

Berhubung dengan kenyataan ini, maka tugas sosiologi umum adalah mendapatkan unsur-unsur yang umum berlaku bagi masyarakat manapun juga, agar dapat memenuhi panggilan sosiologi sebagai ilmu. Studi atau penyelidikan mengenai bentuk-bentuk, serta proses masyarakat yang tumbuh dan berkembang menurut coraknya masing-masing. Maka dalam bahan ajar ini kita membahas dulu sosiologi umum, baru pada materi selanjutnya, khusus membicarakan sosiologi Indonesia.

Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis menyusun buku ajar ini hingga terselesaikan secara baik, karena itu atas budi baiknya semoga Allah SWT meridhai dan menjadikannya sebagai amal soleh. Berbagai masukan, koreksi untuk penyempurnaan bahan ajar/diktat selanjutnya akan diterima dengan senang hati. Semoga bahan ajar/ diktat ini dapat bermanfaat.

Semarang, Januari 2024

Penulis,

# DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PERKEMBANGAN SOSIOLOGI.....	1
A. PENDAHULUAN.....	1
1. Pertumbuhan Sosiologi.....	4
2. Arti Sosiologi.....	5
3. Definisi.....	5
4. Tahun Kelahiran Sosiologi.....	5
5. Sosiologi Berbeda Menurut Bangsa dan Daerahnya.....	6
B. ILMU PENGETAHUAN SOSIOLOGI.....	7
1. Cabang-cabang Ilmu Pengetahuan.....	10
2. Sosiologi sebagai Ilmu Pengetahuan.....	11
3. Objek dan Metode dalam Sosiologi.....	13
4. Perbedaan Ilmu Sosiologi dengan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya.....	16
C. PERKEMBANGAN SOSIOLOGI DI INDONESIA.....	17
1. Tata Hubungan Antar Manusia dengan Pendidikan.....	18
2. Perkuliahan Sosiologi pada Perguruan Tinggi di Indonesia.....	19
BAB II ARTI, FUNGSI DAN TUJUAN MEMAHAMI MASYARAKAT.....	22
A. PENDAHULUAN.....	22
1. Tujuan Instruksional Umum.....	23
2. Tujuan Intruksional Khusus.....	23
B. PENGERTIAN MASYARAKAT.....	24
1. Uraian dan Contoh.....	24
2. Arti Masyarakat.....	26
3. Macam-macam Masyarakat.....	28
4. FUNGSI MASYARAKAT.....	29
5. Tipe-tipe Lembaga Kemasyarakatan.....	32

6. TUJUAN MEMAHAMI MASYARAKAT .....	32
7. Kehidupan Bermasyarakat.....	34
8. Konsekuensi Hidup Bermasyarakat .....	34
9. Tujuan Memahami Masyarakat.....	36
C. MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN .....	38
1. Hubungan Masyarakat dan Kebudayaan .....	38
2. Arti Kebudayaan.....	39
3. Definisi Kebudayaan.....	39
4. Unsur-unsur Kebudayaan .....	40
D. Konsep kebudayaan.....	43
1. Kebudayaan Indonesia .....	47
2. Pranata Sosial .....	48
3. Pengertian Lembaga atau Institusi.....	52
4. Perbedaan Lembaga, Asosiasi dan Organisasi. ....	55
5. Proses Tumbuhnya Lembaga Sosial .....	56
6. Fungsi dan Manfaat Lembaga Sosial .....	62
7. Karakteristik atau Ciri -Ciri Lembaga Sosial.....	63
8. Aspek-Aspek Lembaga Sosial.....	66
E. Jenis-Jenis Lembaga Sosial .....	67
1. Metode Mempelajari Lembaga Sosial .....	68
2. Peradaban .....	69
<b>BAB III MASYARAKAT INDONESIA .....</b>	<b>70</b>
A. PENDAHULUAN .....	70
B. MASYARAKAT INDONESIA ADALAH MASYARAKAT MAJEMUK .....	72
1. Lingkungan Masyarakat Budaya Indonesia .....	75
2. Nasion Indonesia .....	78
3. Masyarakat-masyarakat Daerah: Nasion-nasion yang Lebih Tua Daripada Nasion Indonesia .....	80
4. Golongan Keturunan Asing .....	82
5. Persatuan Atas Dasar Agama .....	83
6. Kebudayaan Nasional, Puncak-puncak Kebudayaan Daerah.....	85

C.	INTEGRASI NASIONAL INDONESIA .....	88
1.	Aneka Warna Bangsa Indonesia .....	91
2.	Mayoritas-Minoritas .....	95
3.	Ketimpangan Perkembangan Kebudayaan.....	98
4.	Prospek Integrasi Nasional.....	100
BAB IV	MASYARAKAT KOTA DAN DESA .....	106
A.	PENDAHULUAN .....	106
1.	Tujuan Instruksional Umum .....	107
2.	Tujuan Instruksional Khusus .....	108
B.	MASYARAKAT DESA DAN KOTA .....	108
1.	Masyarakat Setempat (Community) .....	109
2.	Masyarakat Perkotaan ( Urban community ).....	112
3.	Masyarakat Pedesaan ( Rural Community ) .....	116
4.	Masyarakat Pedesaan Indonesia.....	119
5.	Terjadinya Masyarakat Desa .....	120
6.	Perkembangan Desa .....	121
7.	Urbanisasi .....	121
C.	PERUBAHAN MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN.....	127
1.	Hubungan Masyarakat Kebudayaan dan Nilai .....	127
2.	Perubahan Masyarakat.....	127
3.	Pembatasan Pengertian Perubahan Masyarakat dan Kebudayaan.....	129
4.	Hubungan antara perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan kebudayaan.....	130
5.	Beberapa Bentuk Perubahan Masyarakat dan Kebudayaan. ....	132
6.	Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan-perubahan masyarakat dan kebudayaan.....	138
7.	Pertentangan (conflicts) dalam Masyarakat .....	139
D.	PERUBAHAN DAN PERGESERAN NILAI.....	144
1.	Pengertian Nilai .....	144

2. Macam - macam Nilai .....	145
3. Sistem Nilai Budaya .....	146
4. Sebab dan Akibat Perubahan dan Pergesaran Nilai.....	147
5. Modernisasi .....	148
6. Disorganisasi (Disintegrasi) dan Reorganisasi .....	151
7. Ketidakseimbangan dalam Perubahan dan Cultural Log .....	155
8. Kepincangan dan Keterbelakangan .....	157
9. Generation Gap.....	159

BAB V	ARTI, PERANAN SOSIALISME PEMBANGUNAN DAN PERANAN SIKAP MENTAL DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT .....	161
A.	PENDAHULUAN .....	161
1.	Tujuan Instruksional Umum.....	162
2.	Tujuan Instruksional Khusus.....	163
B.	SISTEM EKONOMI DI INDONESIA .....	163
1.	Sistem Ekonomi Berencana .....	165
2.	Konsep Ekonomi dalam Pancasila .....	168
3.	Prinsip-prinsip Ekonomi dalam Pancasila .....	168
4.	Demokrasi Ekonomi.....	173
C.	SOSIALISME PEMBANGUNAN.....	177
1.	Pembangunan sebagai Jawaban Ampera.....	178
D.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN.....	185
E.	HAKIKAT PEMBANGUNAN .....	188
F.	TUJUAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN.....	189
G.	PERANAN SIKAP MENTAL DALAM PEMBANGUNAN .....	190
1.	Kebangkitan Orde Baru, Orde Pembangunan .....	193
2.	Masyarakat Indonesia dalam Negara Pancasila .....	198
3.	Sikap Mental dan Pembangunan .....	202



BAB VI	TRANSMIGRASI DAN KELUARGA	
	BERENCANA .....	205
A.	PENDAHULUAN .....	205
1.	Tujuan Instruksional Khusus .....	206
B.	MASALAH PERKEMBANGAN PENDUDUK .....	207
1.	Demografi .....	211
2.	Kebijaksanaan Kependudukan .....	213
3.	Pembangunan dan Faktor Kenaikan penduduk.....	214
C.	TRANSMIGRASI DAN PENYEBARAN PENDUDUK YANG MERATA .....	218
1.	Tujuan Transmigrasi.....	220
2.	Pengertian dan Jenis-jenis Transmigrasi.....	221
3.	Syarat-syarat Transmigrasi .....	222
4.	Kebijaksanaan dan Program Transmigrasi .....	223
5.	Pelaksanaan Transmigrasi .....	226
6.	Kesulitan dalam Pelaksanaan Transmigrasi .....	227
D.	KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA .....	228
1.	Keadaan dan Masalah .....	232
2.	Pertumbuhan penduduk.....	232
3.	Struktur Umur Penduduk .....	234
4.	Penyebaran dan Kepadatan Penduduk .....	235
5.	Kualitas Penduduk .....	239
6.	Keluarga Berencana .....	240
7.	Kebijaksanaan dan Langkah-langkah di Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana .....	243
	DAFTAR PUSTAKA.....	247

**MEMAHAMI MASYARAKAT DALAM  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI**

# BAB I

## PERKEMBANGAN SOSIOLOGI

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan sosiologi maksudnya adalah tahap-tahap yang dilalui oleh ilmu sosiologi, mulai dari sosiologi melepaskan dirinya dari filsafat dan akhirnya menjadi dan diakui sebagai ilmu yang berdiri sendiri.

Pada mulanya dapat dikatakan bahwa sebetulnya setiap orang mempunyai pengetahuan secara sosiologis karena setiap orang sejak lahir di dunia sudah hidup berdampingan dengan orang lain dan sudah berhubungan dengan orang di sekelilingnya; pertama-tama dengan orang tuanya. Semakin meningkat usianya, semakin luas pula pergaulannya dengan manusia di dalam masyarakat. Dia juga menyadari bahwa kebudayaan dan peradaban yang ada dewasa ini, merupakan hasil pengalaman masa silam. Di samping itu ia ikut serta dalam hubungan sosial dan menyadari bahwa dia tidak dapat bertingkah laku semaunya, karena adanya norma atau peraturan yang mengatur dan mengontrol perbuatannya itu. Tetapi semuanya itu belum berarti bahwa ia adalah seorang ahli sosiologi. Pasti dia belum mengetahui apa sesungguhnya ilmu sosiologi itu.

Contoh: dalam harian Kompas, Senin tanggal 7 Januari 1985 pada halaman pertama bagian bawah ada tulisan berjudul "Meningkatnya Kecenderungan Kehamilan Sebelum Nikah".

Jika gejala ini diteliti, diselidiki, didiskusikan, diseminarkan dan sebagainya, pekerjaan ini adalah lapangan seorang ahli sosiologi dan ahli-ahli lainnya. Tetapi setiap orang menyadari dan mengetahui bahwa gejala meningkatnya kecenderungan hamil sebelum nikah di dalam masyarakatnya, hanya merupakan pengetahuan secara sosiologis saja.

Sejak manusia mengenal kebudayaan dan peradaban, mengenai masyarakat manusia sebagai proses pergaulan hidup telah menarik perhatian. Awal mulanya orang-orang meninjau masyarakat hanya tertarik pada masalah-masalah yang menonjol dalam masyarakat, yang menarik perhatian umum seperti masalah kejahatan, perang, prostitusi, dan lain-lain. Kemudian perhatian orang meningkat pada filsafat kemasyarakatan; orang menguraikan harapan-harapan tentang susunan serta kehidupan masyarakat yang diinginkan. Untuk mencapainya orang harus menaati kaidah-kaidah, akan tetapi orang harus mengakui kaidah-kaidah masyarakat yang diidam-idamkan (*dassollen*) tidak sesuai dengan kenyataan yang ada (*das sein*) dalam masyarakat pada suatu waktu tertentu. Malah sering menimbulkan pertentangan antara *das sollen* dengan *das sein*, sehingga memaksa para ahli pikir untuk mencari sebab-sebabnya dengan jalan mempelajari kenyataan dalam masyarakat. Lambat laun teori tersebut dipelajari dan dihubungkan secara sistematis dan objektif, terlepas dari harapan-harapan pribadi para sarjana yang mempelajarinya dan terlepas pula dari penilaian baik atau buruk mengenai gejala atau unsur yang dijumpai di dalam tubuh masyarakat, sehingga timbullah ilmu pengetahuan sosiologi.

Kita ketahui bahwa pada zaman purbakala pertamata filsafat dipandang sebagai satu-satunya ilmu untuk pengetahuan umum. Baru beberapa abad sesudah itu timbullah beberapa ilmu yang memisahkan dari Ilmu Filsafat Umum.

Karena semua ilmu pengetahuan yang dikenal pada dewasa ini pernah menjadi bagian dari filsafat, maka filsafat dianggap sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan atau *materi scientiarum* dan filsafat masa itu mencakup pula segala usaha pemikiran tentang masyarakat. Lama-kelamaan dengan perkembangan zaman dan tumbuhnya peradaban manusia, perbagai ilmu pengetahuan yang semula tergabung dalam filsafat memisahkan diri dan mengejar tujuan masing-masing.

Contoh: seperti manusia, juga ilmu pengetahuan termasuk sosiologi karena sudah merasa dewasa dan sanggup mengatur diri sendiri dan merdeka menentukan tujuan hidup, ingin memisahkan diri dari orang tua (induk). Induk dari segala ilmu pengetahuan adalah filsafat.

Pada abad ke 17 ilmu alam menjadi ilmu merdeka; pada abad ke-18 ilmu ekonomi, sedangkan ilmu masyarakat atau sosiologi baru dikenal sebagai ilmu yang berdiri sendiri, ilmu yang paling muda, karena paling terakhir memisahkan diri dari induknya (bungsu), yaitu sejak permulaan abad ke-19 Masehi.

Sebagai ilmu, sosiologi baru mulai dikenal pada abad ke-19 dengan nama yang diberikan dan berasal dari August Comte (1789-1857). Beliau adalah seseorang ahli filsafat bangsa Perancis yang menulis beberapa buku yang berisikan pendekatan umum untuk mempelajari masyarakat. Beliau berpendapat bahwa ilmu pengetahuan mempunyai urutan tertentu berdasarkan logika, dan bahwa setiap penelitian dilakukan melalui tahap-tahap, untuk kemudian mencapai tahap terakhir, yaitu tahap soal-soal kemasyarakatan dan gejala-gejala masyarakat, memasuki tahap terakhir adalah tahap ilmiah. Oleh sebab itu dia menegaskan agar semua penelitian terhadap masyarakat ditingkatkan menjadi suatu ilmu tentang masyarakat.

Ilmu yang mula-mula memisahkan diri dari filsafat adalah astronomi, yang pada mulanya termasuk filsafat kosmologi, disusul oleh fisika atau ilmu alam yang pada mulanya termasuk filsafat alamiah, dan kemudian disusul oleh ilmu kimia, biologi, dan geologi.

Di dalam abad ke-19 dua ilmu pengetahuan baru muncul yaitu psikologi yang pada mulanya termasuk filsafat kejiwaan dan sosiologi yang pada mulanya termasuk filsafat sosial atau kemasyarakatan. Dengan demikian maka timbullah ilmu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang di dalam proses pertumbuhannya dapat dipisahkan dari ilmu-ilmu kemasyarakatan lainnya seperti ekonomi, sejarah, hukum, ilmu jiwa sosial.

## 1. Pertumbuhan Sosiologi

Pemikiran terhadap masyarakat lambat laun mendapat bentuk sebagai suatu ilmu pengetahuan yang dinamakan sosiologi yang pertama kali terjadi di benua Eropa. Banyak usaha baik yang bersifat ilmiah maupun yang bersifat non ilmiah telah membentuk sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang lambat laun mendapat bentuk sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Beberapa pendorong utama adalah meningkatnya perhatian :

- a. Terhadap kesejahteraan masyarakat
- b. Terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat

Pada tahun 1839 lahir nama ilmu sosiologi yang diberikan oleh August Comte. Tetapi seorang ahli filsafat dan ahli pikir kemasyarakatan Inggris yaitu John Stuart Mills mengusulkan istilah "Ethology" bagi ilmu pengetahuan yang baru itu. Akan tetapi istilah tersebut tidak pernah populer.

Selanjutnya Herbert Spencer (1820-1903) juga seorang ahli filsafat Inggris, pemikir, dan ahli kemasyarakatan mengemukakan suatu sistematika penelitian masyarakat dalam bukunya yang berjudul *Principles of Sociology*. Setengah abad kemudian maka istilah sosiologi populer dan karena jasa Herbert Spencer sosiologi berkembang dengan pesat walaupun John Stuart Mills dan Herbert Spencer orang Inggris, namun ilmu tersebut tidak begitu pesat perkembangannya di negara tersebut; berbeda dengan keadaan di Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Sosiologi sangat berkembang, apalagi pada abad ke-20 ini.

Berbeda dengan di Eropa, ilmu sosiologi di Amerika Serikat menyangkut dan dihubungkan dengan:

- a. Usaha-usaha untuk meningkatkan keadaan sosial manusia.
- b. Sebagai timbul pendorong untuk menyelesaikan persoalan yang ditimbulkan oleh kejahatan, pelanggaran,

pelacuran, pengangguran, kemiskinan, konflik, dan peperangan.

## 2. Arti Sosiologi

Sosiologi berasal dari kata latin terdiri dari dua suku kata yaitu : socius berarti teman, kawan ; logis berarti berbicara. Jadi Sosiologi artinya adalah berbicara mengenai masyarakat.

Contoh lainnya :

Geologi (geo = bumi) geologi berarti berbicara tentang bumi. Biologi (bio= hidup) jadi biologi berarti berbicara tentang kehidupan.

## 3. Definisi

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antarmanusia yang menjamin kehidupan itu. Ia mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama itu, cara terbentuk, dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta pula kepercayaan, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia.

Karena sosiologi itu mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat, maka dengan sendirinya meliputi atau sedikitnya rapat bertalian dengan ilmu-ilmu masyarakat lainnya seperti hukum, politik, ekonomi, ilmu jiwa, antropologi.

## 4. Tahun Kelahiran Sosiologi

Sosiologi merupakan hasil terakhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena sosiologi didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya Comte berkata bahwa sosiologi harus dibentuk berdasarkan observasi dan tidak pada spekulasi-spekulasi perihal

keadaan masyarakat, dengan penyelidikan yang nyata berdasarkan kenyataan, pengalaman, statistik, dan sebagainya untuk mencapai ilmu yang positif, yaitu ilmu yang tidak hanya berisi angan-angan saja. Dapat disimpulkan bahwa Sosiologi mempunyai ibu yaitu "filsafat", bapaknya August Comte dan dilahirkan pada tahun 1842, tetapi namanya diberikan pada tahun 1839.

Contohnya: kumpul kebo atau free sex merupakan suatu model kehidupan bersama para artis. Sosiologi dalam hal ini harus mencari datanya dengan observasi, penelitian, bukan hanya terkaan-terkaan saja atau hanya berdasarkan prasangka. Tetapi harus dibuktikan kebenarannya dengan cara observasi, dan hasilnya disusun secara sistematis.

Lahirnya sosiologi dianggap tahun 1842 tatkala Comte menerbitkan jilid terakhirnya dari buku yang berjudul "Positive Philosophy". Buku tersebut ada enam jilid.

#### 5. **Sosiologi Berbeda Menurut Bangsa dan Daerahnya**

Sebagai juga sejarah berbeda dalam perkembangannya, bagi tiap bangsa, maka juga corak kemasyarakatan yang tidak lain dari buah sejarah bangsa itu, masing-masing berbeda satu dengan lain. Tiap masyarakat hidup dan bergerak merdeka, tidak tergantung pada masyarakat lainnya, sekalipun tetap pengaruh-mempengaruhi baik secara nasional maupun internasional melewati media massa, radio, televisi, koran, majalah, dan sebagainya

Contoh: Walaupun Indonesia terletak dalam posisi silang dan telah mengadakan hubungan dengan negara-negara lain secara internasional, tetapi Indonesia tetap mempunyai kepribadian sendiri yang membedakan dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Sistem nilai budaya barat berbeda dengan sistem nilai budaya Indonesia walaupun bangsa barat pernah menjajah Indonesia dalam beberapa abad.



Berhubung dengan kenyataan ini, maka tugas sosiologi umum adalah mendapatkan unsur-unsur yang umum berlaku bagi masyarakat manapun juga, agar dapat memenuhi panggilan sosiologi sebagai ilmu. Studi atau penyelidikan itu mengenai bentuk-bentuk, serta proses masyarakat yang tumbuh dan berkembang menurut coraknya masing-masing. Maka dalam modul satu ini kita membahas dulu sosiologi umum, baru pada modul selanjutnya, khusus membicarakan sosiologi Indonesia.

## B. ILMU PENGETAHUAN SOSIOLOGI

Sosiologi adalah ilmu pengetahuan. Untuk membuktikan marilah terlebih dahulu dirumuskan apakah yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan atau *science*, sebagai pegangan kita dalam mempelajari setiap ilmu pengetahuan, yang tujuannya agar kita dapat mengetahui, memahami mengenal apa ilmu yang kita pelajari itu.

Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan itu selalu dapat diperiksa, dan ditelaah, dikontrol dengan kritis oleh setiap orang lain yang ingin mengetahuinya.

Perumusan di atas sebenarnya tidak begitu sempurna, tetapi yang terpenting adalah bahwa perumusan tersebut mencakup beberapa unsur yang pokok dan unsur-unsur tersebut merupakan bagian-bagian yang tergolong dalam suatu kebulatan, yaitu

1. pengetahuan atau *knowledge*.
2. tersusun secara sistematis
3. menggunakan pemikiran
4. dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum (objektif)

Yang dimaksud dengan pengetahuan adalah kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca indera. Pengetahuan sosiologis hanya berupa kesan sebagai hasil penglihatan pengalaman saja.

Contoh : banyak orang desa pergi ke kota dan menetap, menambah jumlah penduduk di kota. Pengetahuan kita hanya sampai di situ, hanya sampai pada kenyataan yang kita lihat, kita alami.

Oleh karena itu pengetahuan berbeda dengan kepercayaan dan takhayul dan penerangan – penerangan yang keliru atau *mis information*.

Contoh :

1. kepercayaan adalah sesuatu yang dimulai dengan pemikiran, bukan kenyataan seperti pengetahuan. Kita percaya Tuhan ada, karena kita yakini, bukan karena kita melihatnya.
2. Sedangkan takhayul juga dimulai hanya dengan mempercayai, buktinya tidak dapat kita temukan kebenarannya, adalah tahayul bila kita ingin kaya dengan cara memelihara tuyul.
3. Banyak anak, banyak rejeki adalah suatu pandangan yang tidak sesuai lagi, pada saat sekarang merupakan pandangan yang keliru.

Tidak semua pengetahuan merupakan ilmu, tetapi hanya pengetahuan yang tersusun secara sistematis saja yang merupakan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya ada tata urutannya yang berupa unsur-unsur yang merupakan suatu kesatuan sehingga dengan adanya sistematika tersebut akan jelas tergambar apa yang merupakan garis besar dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sistem tadi adalah konstruksi yang abstrak dan teratur, artinya setiap bagian dari satu keseluruhan dapat dihubungkan satu dengan lainnya. Abstrak artinya bahwa konstruksi tersebut hanya ada dalam pikiran tidak dapat diraba ataupun dipegang. Sistem dalam ilmu pengetahuan harus bersifat terbuka, dapat ditelaah kebenarannya oleh orang lain dan harus pula dinamis artinya sistem tersebut harus menggunakan cara-cara yang selalu disesuaikan dengan taraf perkembangan ilmu pengetahuan pada suatu saat.

Menggunakan pemikiran berarti mempergunakan otak, artinya mulai pengetahuan itu memperoleh melalui kenyataan (fakta) dengan memakai panca indera, melihat, dan mendengar sendiri serta melalui alat komunikasi, kemudian diterima otak.

Contoh: kita memperoleh pengetahuan sebagai akibat dari hubungan dengan orang tua, kakak, adik, tetangga, kawan-kawan sekolah, dan lain-lain. Apabila pengaruh dan pengalaman tadi disusun secara sistematis oleh otak, maka hasilnya adalah ilmu pengetahuan.

Penyusunan secara sistematis dilakukan dengan pemikiran bukan oleh perasaan, semua pengaruh dan pengalaman tersebut harus dipikirkan dahulu sedalam-dalamnya, tidak boleh diterima atau dirasakan belaka. Kita harus bertanya mengapa demikian, bagaimana persoalannya, akibatnya apa dan seterusnya. Dengan mengetahui bagian-bagiannya, sifat-sifatnya, dan unsur-unsur pengetahuan yang diterima secara sistematis, barulah kita mempunyai ilmu pengetahuan. Selanjutnya ilmu pengetahuan tersebut harus dapat dikemukakan, harus diketahui umum, sehingga dapat diperiksa dan dikontrol oleh orang lain atau umum. Jadi, sebenarnya dalam ilmu pengetahuan orang tidak boleh merahasiakan segala sesuatunya. Seorang ilmuwan atau *scencetist* selalu harus menjelaskan dengan jujur segala pengetahuannya, rahasia-rahasia dalam pembuatan tidak boleh disembunyikan. Akan tetapi dalam kenyataannya demi kepentingan pertahanan negara, maka pemerintah harus merahasiakan hasil pengetahuan.

Contoh: penemuan dan ilmu pengetahuan mengenai senjata baru dirahasiakan oleh negara demi pertahanan negaranya, bukanlah kehendak si pencipta.

Karena ilmu pengetahuan dapat dikontrol oleh umum, maka ilmu pengetahuan selalu berkembang. Selanjutnya jika ilmu pengetahuan tersebut diterima oleh umum, maka ilmu pengetahuan tadi harus ditujukan pada suatu sasaran tertentu.

Contoh : ilmu pengetahuan sosiologi dapat dijadikan pedoman bagi orang tertentu untuk menelaah suatu masyarakat sehingga masalah yang ada dapat dipecahkan.

### 1. Cabang-cabang Ilmu Pengetahuan.

Ilmu pengetahuan bermanfaat karena tujuannya agar kita lebih mengetahui dan mendalami segala segi kehidupan. Dengan demikian kita harus dapat meramalkan atau *prediction* apa yang akan terjadi di kemudian hari.

Contoh: terjadinya urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Maka di kota berkumpul manusia dari segala macam suku, watak, kepercayaan, agama, adat, bahasa, keahlian, dan lain-lain. Maka dengan ilmu pengetahuan ini kita dapat ramalkan apa yang akan terjadi di kota, antara lain, akan terjadinya pengangguran, gelandangan, kejahatan dan lain-lain.

*Prediction* atau meramalkan adalah suatu kemampuan untuk menetapkan kecenderungan dan kemungkinan-kemungkinan pada masa datang. Tetapi ilmu pengetahuan secara umum dapat dipisah-pisahkan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kepada adanya perbedaan objeknya, yang menyangkut penelitian dan lapangan kerjanya. Secara umum ilmu pengetahuan dapat dibagi tiga kelompok :

#### a. Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS

Ilmu pengetahuan sosial adalah kelompok ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya yaitu kehidupan sosial pergaulan hidup manusia dalam masyarakatnya. Sosiologi termasuk kelompok ilmu pengetahuan ilmu sosial ini. Ilmu pengetahuan sosial juga meliputi ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu jiwa sosial, antropologi budaya, sejarah dan lain-lainnya.

#### b. Ilmu Pengetahuan Alam atau *Natural Sciences*

Ilmu pengetahuan alam adalah kelompok ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala alam baik

yang hayati atau biologi maupun yang tidak hayati atau fisika.

c. Ilmu Pengetahuan Kerohanian atau Humanities-Humaniora

Ilmu pengetahuan kerohanian adalah kelompok ilmu pengetahuan yang mempelajari perwujudan dari perwujudan spiritual dari kehidupan bersama, misalnya ilmu bahasa, agama, filsafat, kesusastraan, dan kesenian.

## 2. Sosiologi sebagai Ilmu Pengetahuan

Jika kita tinjau dari segi syarat-syarat ilmu pengetahuan, maka dapat dikatakan di sini bahwa sosiologi sudah merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sosiologi :

- a. Ilmu pengetahuan sosial berbeda dengan ilmu alam dan ilmu humaniora, karena sosiologi berhubungan dengan gejala kemasyarakatan.
- b. Ilmu murni atau *pure science*, bukan ilmu terapan atau *applied science*, karena tujuan ilmu pengetahuan sosiologi ialah untuk mendapatkan pengetahuan sedalam-dalamnya tentang masyarakat sehingga dapat berguna bagi orang lain. Bukan mencoba memperbaiki masyarakat, tetapi hanya membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, hanya mempertinggi mutunya tanpa menggunakannya dalam masyarakat. Jadi hanya cukup mempelajari dan mengerti hubungan -hubungan manusia dalam masyarakat.

Contoh : dengan mempelajari sosiologi sebagai ilmu, maka lebih mudah dibuat rencana pembangunan untuk mencari jalan menuju perbaikan masyarakat umum, umpamanya dengan memperbaiki hubungan antarmanusia dalam agama. Juga coba mengurangi sebab-sebab kejahatan, mengurangi atau mengatasi kemiskinan dengan melaksanakan sistem Keluarga Berencana.

- c. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak, yang diperhatikan adalah bentuk-bentuk, pola-pola, peristiwa-peristiwa dalam masyarakat, tetapi bukan wujudnya yang konkret.  
Contoh : ada istilah *Social Control* atau sistem pengendalian sosial atau masyarakat merupakan suatu sistem pengawasan terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Social control itu ada tetapi tidak kelihatan.
- d. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional yang berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan kepada observasi dan menggunakan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Ciri-ciri ini menyangkut soal metode yang digunakan.  
Contoh: Stratifikasi Sosial (pelapisan masyarakat) nyata terdapat dalam masyarakat. Hal tersebut diperoleh berdasarkan observasi dengan pengamatan terhadap masyarakat
- e. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis, selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tertanam secara logis serta bertujuan menjelaskan hubungan - hubungan sebab akibat
- f. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat kumulatif yang berarti teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti sosiologi hanya memperbaiki, memperluas, serta memperjelas teori yang sudah ada atau yang lama.
- g. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat netral, yang dipersoalkan dalam ilmu sosiologi bukanlah buruk baiknya fakta tertentu, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut.
- h. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat umum, bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus, sehingga sosiologi mempelajari gejala yang umum yang ada pada setiap interaksi manusia.

Contoh : di dalam semua bidang/ gejala kehidupan seperti bidang ekonomi, politik, agama. Pada unsurnya yang merupakan faktor sosial yang dipunyai bidang kehidupan secara umum. Faktor sosial tadi yang juga diselidiki sosiologi.

- i. Sosiologi bukan merupakan disiplin yang normatif, akan tetapi suatu disiplin yang kategoris, artinya sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini, bukan mengenai apa yang terjadi dan seharusnya terjadi. Sosiologi dapat menetapkan bahwa pandangan-pandangan sosiologi akan berguna bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan kemasyarakatan dan politik. Tetapi pandangan sosiologi tidak dapat menilai apa yang baik dan yang buruk.
- j. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip atau bahan-bahan umum dari interaksi antarmanusia dan juga sifat hakikat bentuk, isi dan struktur masyarakat.

### **3. Objek dan Metode dalam Sosiologi**

Objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Sedangkan mengenai arti dan definisi masyarakat itu sendiri ada beberapa pendapat para ahli. Penjelasan mengenai masyarakat akan kita uraikan nanti panjang lebar di dalam modul 2.

Mengenai metode dalam sosiologi yang dipergunakan untuk mempelajari objeknya yaitu masyarakat, ada beberapa macam seperti lazimnya metode-metode yang dipakai oleh ilmu pengetahuan sosial lainnya.

Pada dasarnya terdapat dua jenis cara kerja atau metode, yaitu :

a. Metode Kualitatif

Dipakai metode kualitatif karena bahan atau fakta sukar dapat diukur dengan angka-angka atau dengan ukuran-ukuran lain yang eksak, walaupun fakta atau bahan tersebut terdapat dengan nyata di dalam masyarakat.

Contoh: meningkatnya gejala kejahatan, stabilnya ekonomi, berkurangnya minat, dapat diketahui dengan penelitian dengan memakai metode kualitatif.

1) *Metode Historis*: metode yang mempergunakan analisis peristiwa-peristiwa dalam masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum.

Contoh : dengan menyelidiki akibat-akibat adanya perang atau secara umum, akan menggunakan bahan-bahan sejarah untuk meneliti revolusi-revolusi penting yang terjadi dalam masa silam.

2) *Metode Komparatif*: metode yang memetingkan perbandingan antara bermacam-macam masyarakat beserta bidang-bidangnya, untuk memperoleh perbedaan dan persamaan-persamaan. Perbedaan dan persamaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk mengenai perilaku masyarakat. Metode tersebut dapat diterapkan untuk meneliti masyarakat pada masa silam dan masa sekarang.

Contoh: aspek gotong royong merupakan ciri khas kehidupan bersama bangsa Indonesia. Kesimpulan ini diperoleh dengan membandingkan ciri-ciri kehidupan antar suku daerah di Indonesia dan diperoleh ada persamaan diantara perbedaan-perbedaannya.

3) *Metode Kombinasi*: historis-komparatif. Pada kenyataannya dalam praktek sering dipergunakan oleh si peneliti ialah kombinasi kedua metode diatas.

4) *Metode Case study*, dapat dipergunakan untuk menelaah suatu badan, kelompok masyarakat,



tempat, lembaga-lembaga atau individu-individu. Dasarnya ialah penelaahan suatu persoalan khusus yang merupakan gejala umum dari persoalan-persoalan lainnya dapat menghasilkan dalil-dalil umum. Makna *case study* bertujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

Contoh : adanya gejala kegilaan break - dance (tarian kejang) para remaja di kota besar. Kita pelajari sedalam-dalamnya gejala ini, kita adakan observasi.

Alat yang dikumpulkan untuk mengumpulkan data ialah :

- 1) Wawancara -interview
- 2) Pertanyaan / angket / questionairs
- 3) Daftar pertanyaan - schedulls.
- 4) Datang sendiri dan menyebarkan diri dalam suatu masyarakat untuk mendapatkan keterangan tentang gejala kehidupan masyarakat participant observer technique

b. Metode Kuantitatif

Metode ini mengutamakan bahan-bahan keterangan dengan angka, sehingga gejala yang ditelitinya dapat diukur dengan menggunakan skala-skala, indeks, tabel-tabel dan formula yang semuanya itu sedikit banyaknya menggunakan ilmu pasti.

Yang termasuk jenis metode kuantitatif adalah :

- 1) *Metode statistik* yang bertujuan menelaah gejala-gejala sosial secara sistematis.

Contoh: statistik mengenai kenaikan jumlah penduduk Indonesia sejak orde baru.

- 2) *Sosiometri*, yaitu himpunan konsep-konsep dan metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan meneliti hubungan antarmanusia dalam masyarakat secara kuantitatif. Caranya ialah dengan mempergunakan skala-skala dan angka-angka untuk mempelajari hubungan-hubungan antarmanusia

dalam masyarakat, jadi berusaha meneliti masyarakat secara kuantitatif.

Demikian antara lain metode-metode yang sering dipergunakan sosiologi dalam mempelajari objeknya yaitu masyarakat. Dalam hal ini telah kita bahas secara terperinci biasanya dalam pelaksanaannya pemakaian metode-metode ini untuk mendapatkan data sesungguhnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam sosiologi banyak dipergunakan metode kualitatif, tapi kuantitatif juga dipakai.

#### **4. Perbedaan Ilmu Sosiologi dengan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya**

Mengenai persoalan tersebut masih banyak kesimpangsiuran pendapat, karena perbedaan ilmu sosiologi dengan ilmu sosial lainnya tidak tegas dan bukan hanya menyangkut perbedaan-perbedaan dalam isi atau objek penyelidikan, akan tetapi juga menyangkut perbedaan tekanan pada unsur-unsur objek yang sama atau lebih jelasnya pendekatan yang berbeda terhadap objek yang sama. Masyarakat yang menjadi objek ilmu sosial dapat dilihat dari beberapa segi, secara singkat dapat dikemukakan bahwa :

- a. Ilmu sosiologi mempelajari masyarakat dalam keseluruhannya dan hubungan –hubungan antara orang-orang dalam masyarakat tadi. Sosiologi mempelajari unsur-unsur kemasyarakatan secara keseluruhan.
- b. ilmu ekonomi mempelajari bagian duniawi dan kebutuhan duniawi, sedangkan sosiologi mempelajari jiwa dan bentuk masyarakat. Jadi ilmu ekonomi mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan materialnya dari bahan yang terbatas tersedianya.
- c. Ilmu politik mempelajari suatu segi khusus pula dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Yang dipelajari ilmu politik adalah

bagaimana daya upaya untuk memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaannya, penggunaan kekuasaan tersebut dan juga bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan, dan sebagainya.

- d. ilmu jiwa sosial, merupakan bagian dari ilmu jiwa yang mempelajari atau meneliti perilaku manusia sebagai individu sedangkan ilmu jiwa sosial mempelajari perilaku individu dalam kehidupan bersama yaitu bagaimana pergaulannya atau hubungan sosialnya bagaimana pembentukan kepribadiannya, dalam suatu lingkungan dan sebagainya.

Maka dapat dikatakan bahwa ilmu jiwa sosial adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari pergaulan dan tingkah laku individu sebagaimana telah dipengaruhi atau ditimbulkan oleh situasi-situasi sosial.

- e. Antropologi sosial atau budaya, agak sulit dibedakan dengan sosiologi pada masa sekarang.  
contoh: kalau melihat perkembangan masyarakat, maka antropologi bertitik tolak pada unsur-unsur tradisional, sedangkan sosiologi terutama memperhatikan unsur-unsur yang baru (modern).
- f. Sejarah, terutama mempelajari dan memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa silam, berusaha mendapatkan gambaran yang teliti mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi, kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dari masa silam dan juga ingin menemukan sebab-sebab terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut untuk mendapatkan pengertian yang mendalam tentang kejadian-kejadian itu dan terutama mengapa kejadian tersebut terjadi.

### **C. PERKEMBANGAN SOSIOLOGI DI INDONESIA**

Walaupun pada hakikatnya belum pernah mempelajari teori-teori formal dari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, namun banyak di antara pujangga dan pemimpin-pemimpin

bangsa Indonesia yang memasukkan unsur-unsur Sosiologi dalam ajarannya. Terutama yang berhubungan dengan pendidikan

### 1. Tata Hubungan Antar Manusia dengan Pendidikan

- a. Ajaran Wulang Reh yang diciptakan oleh Sri Mangkunegara IV dari Surakarta, mengajarkan tata hubungan antara para anggota masyarakat Jawa yang berasal dari golongan-golongan yang berbeda banyak mengandung aspek sosiologi terutama dalam bidang *Intergroup relations*.
- b. Ajaran Empu Tantular, yang tertera dalam bukunya Sutasoma dan oleh Prapanca dalam bukunya Negarakertagama antara lain ajarannya yang bernama Pancasila Krama yang berarti kesusilaan yang lima, yaitu :
  - 1) Tidak boleh melakukan kekerasan
  - 2) Tidak boleh mencuri
  - 3) Tidak boleh berjiwa dengki.
  - 4) Tidak boleh berbohong
  - 5) Tidak boleh mabuk minuman kerasDisamping itu juga Pancasila Krama berarti berbatu sendi yang lima (*consisting of five rock*)
- c. Ajaran Ki Hajar Dewantara, pelopor utama meletakkan dasar-dasar bagi Pendidikan Nasional di Indonesia, memberikan sumbangan yang sangat banyak pada sosiologi dengan konsepsinya mengenai kepentingan kekeluargaan di Indonesia yang dengan nyata dipraktekkan dalam Pendidikan Taman Siswa. Menurut ajaran Ki Hajar Dewantara ada tiga prinsip utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menjalankan atau melaksanakan kepemimpinannya, yaitu :
  - 1) *Ing ngarso sung tulodo*, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu lewat sikap dan perbuatannya, menjadikan dirinya pada anutan dan

ikutan atau teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Maka dalam sosiologi disebut *front-leader* artinya pemimpin berdiri di depan.

- 2) *Ing madya mangun karsa*, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berwakarsa dan berkreasi pada orang yang dibimbingnya. Dalam sosiologi disebut pemimpin yang demikian berada ditengah-tengah orang yang dipimpinnya, disebut *social leader*.
- 3) *Tut Wuri Handayani*, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu mendorong orang yang diasuhnya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Dalam sosiologi pemimpin yang bersifat demikian disebut *year-leader*.

## **2. Perkuliahan Sosiologi pada Perguruan Tinggi di Indonesia.**

Pertama-tama sosiologi menjadi bahan perkuliahan di Sekolah Tinggi Hukum (STH) di Jakarta, hanya sebagai pelengkap bagi mata pelajaran ilmu hukum, dan tentu diberikan oleh dosen yang bukan spesialisasi. Baik di negara Belanda maupun di Indonesia pada waktu itu belum ada spesialisasi dalam sosiologi. Materi perkuliahan sosiologi pada waktu itu sebagian besar hanya mengenai filsafat sosial dan teoritis.

Pada tahun 1934/1935 kuliah sosiologi pada STH tersebut malah ditiadakan karena waktu itu dipentingkan untuk diketahui adalah hukum positif, yaitu peraturan-peraturan yang berlaku sah pada masyarakat pada suatu tempat tertentu. Sedangkan menurut para guru besar yang memegang tanggung jawab dalam menyusun daftar perkuliahan berpendapat bahwa pengetahuan tentang bentuk susunan masyarakat serta proses-proses yang terjadi di dalamnya tidak diperlukan dalam hubungan dengan pelajaran hukum.

Setelah proklamasi Kemerdekaan RI yaitu pada tahun 1948, sosiologi mulai diberikan lagi dalam perkuliahan, sebagai mata kuliah tersendiri pada Akademi Ilmu Politik di Yogyakarta oleh Prof. Dr. Sunarjo Kolopaking. Beliau memberikan kuliah dalam bahasa Indonesia. Hal ini merupakan suatu kejadian baru, oleh karena itu sebelum Perang Dunia II semua perkuliahan pada Perguruan Tinggi di Indonesia diberikan dalam bahasa Belanda.

Pada tahun 1950, mulai ada sarjana Indonesia yang memperdalam pengetahuan spesialisasi sosiologi dengan belajar ke luar negeri. Bahkan di antaranya itulah sekarang masih dianggap ahli sosiologi Indonesia.

Bertambahnya orang-orang yang memperdalam dan mengkhususkan diri dalam sosiologi tidak hanya dorongan untuk berkembangnya dan meluasnya ilmu pengetahuan tadi, akan tetapi sekaligus membawa perubahan dalam sifat dan sosiologi di Indonesia.

Buku sosiologi dalam bahasa Indonesia mulai diterbitkan sejak satu tahun setelah pecahnya revolusi fisik, yaitu Sosiologi Indonesia oleh Mr. Djody Gondokusumo yang isinya memuat beberapa pengertian elementer dan sosiologi teoritis dan bersifat sebagai filsafat. Buku itu pada saat tersebut mendapatkan sambutan yang baik karena suasana revolusi politik waktu itu, mulai terasa suatu keharusan pada golongan terpelajar dalam ilmu pengetahuan yang mungkin dapat membantu mereka dalam usaha-usaha untuk memahami perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat dalam masyarakat.

Selanjutnya dapatlah dikemukakan buku karangan Hasan Shadely, MA. dengan judul Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia, yang cetakan pertamanya diterbitkan tahun 1952 oleh PT. Pembangunan. Buku ini merupakan buku sosiologi pertama yang disusun oleh orang Indonesia yang mencoba mempelajari masyarakat Indonesia, memaut bahan-bahan sosiologi yang modern. Besar jasa beliau (lulusan Cornell University di AS) dalam memenuhi

keperluan para mahasiswa yang mulai belajar ilmu pengetahuan tersebut, sesuai dengan suasana perkembangan perguruan tinggi di Indonesia, juga kurangnya buku-buku sosiologi dalam bahasa Indonesia maupun yang diimpor dari luar negeri, ditambah pula kekurangan dalam kemampuan yang ada pada para mahasiswa tingkat persiapan.

Buku sosiologi yang dikarang oleh orang Indonesia dapat disebutkan lagi yaitu berjudul *Setangkai Bunga Sosiologi* yang diterbitkan tahun 1964 karangan Selo Soemardjan dan Sulaeman Soemardi. Juga buku *Social Changes in Yogyakarta*, hasil karya Selo Soemardjan yang diterbitkan tahun 1968, yang ditulis dalam bahasa Inggris, yang merupakan *disertasi* penulis untuk mendapatkan gelar *Doctor* pada Cornell University di AS.

Pada dewasa ini telah ada sejumlah universitas negeri yang mempunyai Fakultas Sospol atau Fakultas Ilmu Sosial yang memberikan mata kuliah sosiologi sampai tingkat yang lebih tinggi. Namun belum ada universitas yang mempunyai Fakultas tersendiri khusus untuk Sosiologi. Yang telah ada ialah jurusan Sosiologi pada beberapa Fakultas/ Universitas yaitu pada FISIP Universitas Gajah Mada, pada FISIP UI dan Fakultas Sospol Unpad. dan jurusan sosiologi itulah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan dan dorongan lebih besar untuk mempercepat dan memperluas perkembangan ilmu sosial di Indonesia.

Bahan ajar ini ditutup dengan pertanyaan bahwa perkuliahan hanya akan berguna kalau memberi sumbangan pada penyelesaian Pembangunan Indonesia. Bahan apa pun dan dari mana pun hanya berfungsi sebagai perangsang pemikiran untuk tujuan tersebut di atas (Selo Soemardjan, Sulaeman, dari kata pengantar *Setangkai Bunga Sosiologi*).

## BAB II

### ARTI, FUNGSI DAN TUJUAN MEMAHAMI MASYARAKAT

#### A. PENDAHULUAN

Masyarakat secara keseluruhan merupakan objek ilmu sosiologi. Masyarakat adalah satu kesatuan hidup bersama yang terdiri dari beberapa orang manusia, berkumpul untuk waktu yang cukup lama. Adanya kesadaran bahwa mereka mempunyai ikatan sebagai satu kesatuan, oleh karena itu masyarakat merupakan satu sistem hidup bersama.

Aristoteles mengatakan bahwa manusia *Zoon politicon*, makhluk bermasyarakat, manusia tidak dapat hidup tanpa ada manusia lainnya. Manusia tercipta dengan sendirinya oleh karena dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu besar fungsi masyarakat bagi kepentingan manusia (individu). Dengan adanya masyarakat, kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan rohaninya dapat terpenuhi. Dengan demikian fungsi masyarakat bagi seseorang sangatlah vital, mutlak harus ada dan besar manfaat yang diperolehnya dapat hidup bermasyarakat.

Dalam setiap masyarakat baik yang mempunyai taraf kebudayaan sederhana maupun modern, terdapat lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lembaga ini kadang-kadang disebut lembaga sosial atau pranata sosial yang mengatur tentang kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.

Besar sekali fungsi masyarakat bagi kepentingan kehidupan seseorang, maka sepantasnyalah disadari bahwa dalam hidup bermasyarakat yang berarti kita hidup bersama-sama dengan orang lain, sama-sama mempunyai kepentingan yang kadang-kadang ada pertentangan kepentingan satu sama lain. Maka di sinilah kita dituntut untuk harus mempunyai jiwa toleransi tenggang rasa, suka bekerja sama, selain mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan



sendiri. Solider, agar tercapai tujuan hidup bermasyarakat, yaitu dapat hendaknya tercipta suatu masyarakat aman, tenteram, bahagia, sejahtera.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa masyarakat dengan mempergunakan akalnyapun dapat menghasilkan kebudayaan, baik yang berwujud, maupun yang tidak berwujud. Kebudayaan sangat menentukan corak dan bentuk masyarakat. Sistem nilai budaya adalah suatu wujud kebudayaan yang bersifat abstrak tetapi ada dalam kehidupan setiap masyarakat dimana pun berada. Sistem nilai budaya suatu masyarakat atau bangsa berbeda dengan sistem nilai budaya masyarakat atau bangsa lainnya. Tetapi dapat dijelaskan bahwa ada tujuh unsur kebudayaan yang pokok (besar), yang sama-sama dipunyai ini, yang biasa disebut Cultural Universal.

Kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologinya telah tinggi atau maju dan kebudayaan itu sudah maju, sudah halus misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan-santun pergaulan dan lain-lainnya, biasa disebut peradaban atau civilization.

Dalam buku ajar ini dibahas secara singkatnya mengenai *cultural universal*, sedangkan pembahasan secara panjang lebar dalam modul 5 yang isinya mengenai pembangunan, ada beberapa dari ke 7 unsur kebudayaan itu, bangsa Indonesia masih ketinggalan. Ketinggalan itu dikejar dengan pembangunan.

### **1. Tujuan Instruksional Umum**

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat memahami arti, fungsi, dan tujuan masyarakat.

### **2. Tujuan Intruksional Khusus**

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat

- a. menjelaskan bagaimana arti masyarakat;
- b. menjelaskan mengapa manusia hidup termasyarakat;
- c. menjelaskan fungsi masyarakat bagi seseorang;
- d. menjelaskan tujuan manusia hidup bermasyarakat;
- e. menjelaskan apa tujuan memahami masyarakat;

- f. menjelaskan pendapat Bergson tentang masyarakat;
- g. menjelaskan pendapat Aristoteles tentang manusia sebagai Zoon politican;
- h. menjelaskan pendapat Hertert Spencer tentang kehidupan manusia;
- i. menjelaskan cara terbentuknya masyarakat;
- j. menjelaskan hubungan masyarakat dengan kebudayaan menurut Broniclow Malinowski;
- k. menjelaskan hubungan masyarakat dengan kebudayaan menurut pendapat Hersnovit;
- l. menjelaskan tujuan memahami masyarakat;
- m. bersikap toleransi, solider, tenggang rasa;
- n. bersikap suka bekerja sama;
- o. bersikap mendahulukan kepentingan umum (negara) daripada kepentingan sendiri;
- p. menyebutkan tiga wujud kebudayaan;
- q. menjelaskan berapa sistem nilai budaya suatu bangsa sulit diubah (diganti)
- r. mencintai/menghargai sistem nilai budaya bangsa sendiri;
- s. menjelaskan arti Cultural Universal;
- t. menyebutkan 7 unsur kebudayaan yang disebut Cultural Universal

## **B. PENGERTIAN MASYARAKAT**

### **1. Uraian dan Contoh**

Tidak hanya makhluk manusia saja, melainkan juga banyak jenis makhluk lain hidup bersama individu-individu sejenisnya dalam gabungan. Tetapi kehidupan kolektif binatang bersifat naluri, yaitu merupakan suatu kemampuan yang telah terencana oleh alam dan terkandung dalam gen jenis binatang yang bersangkutan.

Contoh: Semut adalah binatang yang dapat kita lihat sangat kuat semangat kerja sesamanya.

Sedangkan dalam kehidupan kolektif, ciri manusia bukan disebabkan naluri, terlepas dari ciri ras, melainkan berdasarkan karena manusia mempunyai akal. Akal manusia mampu untuk membayangkan dirinya serta peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi terhadap dirinya. Dengan demikian manusia dapat mengadakan pilihan serta seleksi terhadap berbagai alternatif dalam tingkah lakunya untuk mencapai efektivitas yang optimal dalam mempertahankan hidupnya terhadap kekejaman alam sekelilingnya.

Apabila ditemukan suatu tingkah laku yang efektif dalam hal menanggulangi suatu masalah hidup, maka tingkah laku itu tentu diulangnya untuk mengatasi setiap masalah, serupa itu yang muncul. Kemudian orang mengomunikasikan pula tingkah laku baru tadi kepada individual lain dalam kolektif dan terutama kepada keturunannya, sehingga pola itu menjadi mantap, menjadi suatu adat yang dilaksanakan oleh sebagian, besar warga masyarakat (kolektif) itu. Dengan demikian banyak pola tingkah laku, manusia yang telah menjadi adat istiadat itu dijadikan milik dirinya dengan melalui belajar. Oleh karena itu pola-pola tingkah laku dan tindakan manusia adalah hasil belajar.

Pola-pola tindakan dapat berubah dan perubahan di tiap-tiap masyarakat tidak sama cepatnya, ada yang lambat ada yang cepat. Proses perubahan yang berbeda di berbagai tempat di muka bumi yang berbeda-beda itu menyebabkan timbulnya keanekaragaman yang besar sekali antara beribu-ribu kesatuan hidup manusia.

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat yang menyebabkan perubahan itu. Dalam zaman, biasa masyarakat mengenal kehidupan yang teratur dan aman, disebabkan oleh pengorbanan sebagian kemerdekaan untuk anggota-anggota, baik dengan secara paksa maupun sukarela. Pengorbanan disini dimaksudkan menahan nafsu

atau kehendak sewenang-wenang untuk mengutamakan kepentingan dan keamanan bersama. Dengan paksa berarti tunduk kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan (negara, perkumpulan). Dengan, sukarela berarti menurut adat dan berdasarkan keinsyafan akan pesandaran dalam kehidupan bersama itu.

## 2. Arti Masyarakat

Seperti disebut di atas, istilah paling lazim dipakai untuk menyebut kesatuan hidup manusia baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari adalah "masyarakat". Dalam bahasa Inggris dipakai istilah Society, yang berasal dari bahasa latin *societas* artinya kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari bahasa Arab "syaroka" yang berarti ikut serta berpartisipasi. Kata Arab "masyarakat" berarti saling bergaul atau dengan istilah ilmiah, saling berinteraksi. Suatu satuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui apa? Warga negaranya saling berinteraksi.

Sebetulnya agak sukar untuk memberikan suatu batasan, atau deifinisi tentang masyarakat oleh karena istilah masyarakat menyangkut berbagai faktor, sehingga walaupun diberikan definisi yang berusaha mencakup keseluruhannya, masih ada juga yang tidak memenuhi unsur-unsurnya.

Beberapa sarjana telah mencoba memberikan definisi masyarakat, seperti

- a. Selo Soemardjono mengatakan,  
"Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan"
- b. Kansil  
"Masyarakat adalah persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama".
- c. Koentjaraningrat  
"Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu

yang bersifat kontinyu, dan terlihat oleh suatu rasa, identitas yang sama”

d. Hasan Shodely

“Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari berbagai manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain”.

e. Ralph Linton

“Masyarakat merupakan sikap kelompok manusia yang telah hidup bersama cukup lama, sehingga mereka dapat; mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas”.

Walaupun definisi sarjana-sarjana tersebut berlainan, tetapi pada dasarnya isinya sama, bahwa masyarakat mencakup beberapa unsur, yaitu:

a. Manusia yang hidup bersama.

Di dalam ilmu sosial tidak ada ukuran yang mutlak ataupun yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang disebut masyarakat. Tetapi secara teoritis paling sedikit dua orang yang berlainan jenis hidup bersama dapat disebut masyarakat atau keluarga.

b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama.

Sebagai akibat hidup bersama itu timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.

c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.

d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama dan menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan lainnya.

Contoh: Satu keluarga seperti bapak dan ibu tanpa anak-anak dapat disebut masyarakat karena telah memenuhi syarat-syarat seperti disebut di atas.

### 3. Macam-macam Masyarakat

Melihat cara terbentuknya ada beberapa macam masyarakat:

- a. Terbentuk dengan cara sengaja atau dipaksakan.  
Contoh: negara di bentuk dengan sengaja: masyarakat pengungsi, masyarakat pelarian, masyarakat dalam tempat tahanan.
- b. Terbentuk dengan sendirinya secara merdeka.  
Contoh 1: suku, golongan, masyarakat yang masih sederhana terbentuk karena alam dan dengan sendirinya.  
Contoh 2: masyarakat budidaya, terjadi karena kepentingan keduniawian, atau kepercayaan (keagamaan), seperti masyarakat atau jemaah gereja, jemaah mesjid, kongsi, koperasi.

Macam wujud kesatuan hidup kolektif manusia ada beberapa istilah, untuk membeda-bedakannya. Ada kesatuan-kesatuan, khusus untuk menyebutnya yang merupakan unsur-unsur masyarakat yaitu:

- a. Kategori Sosial, yaitu kesatuan manusia yang terwujudkan karena adanya suatu ciri atau suatu kompleks. Ciri-ciri objektif yang dapat dikenakan kepada manusia itu.  
Contoh: Seorang warga negara Indonesia sudah boleh mengikuti Pemilu jika telah berumur 18 tahun atau lebih.
- b. Golongan sosial, yang merupakan satu kesatuan manusia yang ditandai lebih oleh ciri tertentu.  
Contoh: Golongan pemuda, adalah seseorang yang ditandai oleh sifat muda, penuh idealisme, penuh semangat dan vitalitas, belum terikat oleh kewajiban-kewajiban hidup yang membebaninya; karena itu mereka, sanggup mengabdikan dan berkorban kepada masyarakat.
- c. Kelompok yang merupakan suatu masyarakat yang memenuhi syarat-syaratnya seperti adanya interaksi antara anggota; ada adat istiadat serta sistem norma yang mengatur interaksi itu atau dengan adanya: kontinuitas

serta rasa identitas yang mempersatukan semua anggota tadi. Kelompok merupakan organisasi dan mempunyai sistem pimpinan.

Contoh: Suku, marga pada daerah tertentu (Batak, Minangkabau).

Kelompok pencinta alam, kelompok senimm/PARFI.

- d. Perkumpulan; hampir sama dengan kelompok, tetapi ada perbedaannya dalam hal solidaritasnya. Perkumpulan dijiwai oleh solidaritas organisasi. Kelompok dijiwai oleh solidaritas mechanical.

Piritim Sorokin mengatakan; "Hubungan kekeluargaan yang mendasari pergaulan manusia dalam kelompok, hubungan kontrak yang mendasari pergaulan manusia dalam perkumpulan".

Contoh: Perkumpulan simpan-pinjam didasari oleh perjanjian atau kontrak.

- e. Komunitas atau Community, sebagai suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata, dan yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat serta terikat oleh suatu rasa identitas komunitas. Sering juga disebut masyarakat setempat karena komunitas bersifat khusus. Ciri-cirinya ialah ikatan lokasi dan kesadaran wilayah.

Contoh: Masyarakat desa (rural community) dan masyarakat kota (urban community) dibedakan ialah karena wilayah atau lokasi dan kesadaran wilayahnya.

#### 4. FUNGSI MASYARAKAT

Apakah gerangan yang menyebabkan manusia umumnya lebih suka hidup berteman. Beberapa ahli sosiologi telah mengadakan penyelidikannya antara lain mereka berpendapat bahwa hidup berteman itu disebabkan oleh:

- a. Naluri, ialah kehendak yang menggerakkan tiap manusia dan hewan terlepas dari perhitungan akal. Kehendak itu

timbul dengan sendirinya, teristimewa dalam waktu bahaya dan manusia mencari keselamatan badan.

Contoh: Orang berusaha membela, dan mempertahankan dirinya jika ada. bahaya yang mengancamnya.

Contoh 2: Orang ingin memiliki apa yang belum dimilikinya.

- b. Karena perasaan badan; panas, dingin, lapar, dan lain-lain.

Contoh: Orang lapar tidak dapat memperoleh makanan tanpa ada orang lain, juga untuk mendapatkan api untuk memanaskan badannya yang dingin.

- c. Karena perhitungan untuk mencapai suatu keuntungan biasanya dalam perekonomian bagi manusia yang telah maju cara hidupnya.

Contoh: Pedagang dapat menjual langsung kalau ada pembeli. Pembeli banyak dan dagangannya laku tentu dia dapat memperoleh untung besar. Dapat berlangsung jika dalam bermasyarakat.

Dari uraian tersebut di atas dan terdasarkan definisi-definisi apa itu masyarakat, apa itu kelompok, perkumpulan dari lain-lainnya dapat diperoleh suatu bukti bahwa masyarakat besar sekali fungsinya bagi kehidupan manusia di mana pun dia berada antara lain dapat dikatakan:

- a. Untuk melindungi anggota masyarakat atau untuk menghindari segala penderitaan, perpecahan, perselisihan dan segala bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh individu maupun kelompok yang ada dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat itu sendiri.
- b. Untuk menyusun kelangsungan hidup, manusia, menuju tertib dan damai sesuai dengan yang diidam-idamkan oleh warga masyarakat bersangkutan yang mudah bersatu dalam masyarakat.
- c. Semakin kuat pertahanannya sehingga segala kepentingan, keselamatan serta kebutuhan hidupnya akan lebih terjamin tidak akan mendapat gangguan



secara nyata dari individu atau kelompok yang ada dalam masyarakat itu sendiri maupun di luar masyarakat itu.

- d. Sistem komunikasi akan lebih lancar jika dibandingkan dalam bentuk individu, karena masyarakatnya itu dapat bercakap mempergunakan bahasa, mengetahui adat istiadat.
- e. Stabilitas pribadi akan lebih terarah dalam bentuk positif sehingga tujuan dari terbentuknya masyarakat itu akan tercapai.
- f. Seseorang mempunyai identitas dari dirinya sendiri ia baru menjadi seseorang dalam hidup jika dia hidup dalam masyarakat.
- g. Dalam masyarakat, terdapat lembaga kemasyarakatan. Lembaga ini diciptakan dengan sengaja mampu tumbuh dengan sendirinya, menyangkut masalah kebutuhan hidup anggota masyarakat. Maka dalam Lembaga Kemasyarakatan ini ada norma yang mengatur pergaulan hidup dengan tujuan untuk mencapai suatu tata-tertib. Nama lain lembaga ini adalah Pranata Sosial, yang fungsinya secara tidak langsung berarti juga fungsi masyarakat yaitu:
  - 1) Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertindak, bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan.
  - 2) Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.
  - 3) Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau Social - Control yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

## 5. Tipe-tipe Lembaga Kemasyarakatan

- a. Crescive institution da enocted institutions
- b. Basic institutions dan subsidiary institutions
- c. Approved dan unfunctioned institutions
- d. General institutions dan restri institutions
- e. Operative institutions dan regulative institutions.

## 6. TUJUAN MEMAHAMI MASYARAKAT

Masyarakat luas adalah seluruh manusia yang hidup bersama di suatu tempat pada suatu waktu, seperti masyarakat di Jakarta dan di kota-kota lainnya, di dalamnya terdapat kelompok-kelompok, dan golongan-golongan lainnya yang dinamakan keluarga, kelas, mungkin juga ada sedikit kasta, dimana terdapat aksi-reaksi dan kesadaran akan adanya anggota-anggota lain yang menyebabkan orang-orang itu berhati-hati terhadap kepentingan-kepentingan sesamanya di dalam kelompok itu masing-masing dan terhadap masyarakat luas.

Baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan golongan, dan sebagainya orang pada umumnya hidup menurut yang diharapkan oleh golongan itu yakni mengikuti atau mentaati adat, kebiasaan dan undang-undang resmi yang berlaku. Masyarakat seluruhnya itu memang merupakan wadah dimana kebudayaan seluruhnya tercipta dan tumbuh dan yang sekaligus membatasi pribadi anggotanya.

Golongan-golongan yang merupakan bagian-bagian kecil dari, masyarakat seluruhnya itu, baik masyarakat itu terdapat di desa, di kota ataupun di seluruh dunia, menurut cara terjadi dan cara pertumbuhannya bisa di bagi dalam dua macam dan di antaranya terdapat variasi-variasi campuran. Yang satu terjadi dan tumbuh dengan sendirinya atau secara normal yang menurut istilah Ferdinand Fonnics dinamakan *Gemeinschaft* dalam sifatnya, yang lain dibentuk oleh manusia secara sadar mutlak mengejar suatu maksud atau keuntungan seperti perkumpulan dagang,

olahraga, suku bangsa, keturunan di kampung, belajar bersama, yang dinamakan bersifat *Gesellschaft*, terbentuk secara formal dengan sengaja untuk mencapai sesuatu maksud.

Sifat-sifat golongan seperti suku bangsa atau golongan-golongan yang lebih kecil bilamana telah hidup beberapa lama selalu memiliki.

- a. rasa senasib dan rasa keanggotaan kepada golongan itu, yang dinamai kesadaran golongan itu atau *Group Consciousness*
- b. *in-group feeling*, yakni rasa yang selalu membela kebenaran golongan itu, membenci dan mencurigai segala apa yang datang dari golongan luar, perasaan ini yang mendatangkan prasangka atau praduga yang tidak mudah hilang terhadap golongan-golongan lain yang biasanya bersifat negatif dan merugikan.

Contoh: Penilaian dan perasaan suku Sunda terhadap suku Jawa dan sebaliknya.

Ada lagi pengumpulan atau pengelompokan orang-orang menurut penghasilan, keahlian, kesalehan, kekayaan, keturunan dan sebagainya yang disebut lapisan masyarakat atau *Social Stratification*. Sebelum bisa disebut golongan bilamana belum terdapat sifat golongan proses aksi-reaksi, sebab belum ada hubungan yang erat di antara anggota-anggota itu.

Contoh: buruh, tani, kaum intelektual teknokrat, bangsawan, ulama, orang kaya, orang miskin.

Setelah diketahui bentuk-bentuk penggolongan manusia, seperti diuraikan di atas yang dianggap sebagai proses kemasyarakatan, maka yang penting bagi kita ialah mempelajari proses itu sendiri dan peranan yang dijelaskan oleh manusia di dalam masyarakat itu. Dilihat juga apa pengaruh agama Islam, Kristen, Budha terhadap proses itu, pemerintah yang formal, dan sebagainya, yang akan diuraikan lebih dalam modul selanjutnya.

## 7. Kehidupan Bermasyarakat

Selanjutnya di sini perlu ditambahkan lagi mengapa manusia selalu akan tertarik kepada hidup bersama dalam masyarakat.

- a. Hasrat yang berdasar naluri atau biologis.

Untuk mencari teman hidup, pertama untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sifatnya biologis.

- b. Kelemahan manusia selalu mendesak untuk mencari kekuatan bersama, yang terdapat dalam berserikat dengan orang lain sehingga dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan usaha bersama.

Sejak lahirnya sebagai manusia, telah tampak dalam kelemahannya. Kebutuhan untuk perlindungan sebagai yang diterima dari ibu, bapak selalu diharapkan.

- c. Aristoteles berpendapat, bahwa: manusia adalah Zoon Politicon, makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan.

- d. Bergson berpendapat bahwa manusia ini hidup bersama bukan oleh karena persamaan, melainkan oleh karena perbedaan yang terdapat dalam sifat kedudukan dan sebagainya. Menurut Bersou kenyataan hidup baru terasa dengan perbedaan antara manusia masing-masing itu dalam kehidupan bergolongan.

Pendapat Aristoteles yang telah kuno itu tidak bertentangan dengan pendapat Bergeou yang bersifat modern, kedua-duanya dapat diakui kebenaran dasar pemikirannya, kalau kita mengetahui bahwa golongan sosial itu tergerak atas proses asosiasi, integrasi dan differensiasi atau dengan singkatnya atas proses mengikat dan memisah.

## 8. Konsekuensi Hidup Bermasyarakat

Berdasarkan adat, sifat meniru dan sebagainya, perasaan solidaritas dalam golongan keluarga, suku bangsa, negara dan seterusnya akan menjadi kuat dan luas, dan ikatan ini akan bertambah kuat dalam menghadapi bahaya.

Dengan meluasnya pertalian dari keluarga kepada satu bangsa, kepada negara dan sebagainya, maka pertalian dalam ikatan yang terkecil akan lebih lemah terasanya.

Contoh: Demi persatuan dan kesatuan bangsa kita harus menghilangkan paham kesukuan yang kuat (ekstrim), jika rasa kebangsaan makin kuat (toleransi) maka dapat melemahkan rasa kesukuan.

Baik juga diperhatikan bahwa ikatan solidaritas ini berlainan sifatnya ke dalam dan ke luar, yang ke dalam merupakan ikatan di antara anggota-anggotanya, sedangkan ikatan keluar, artinya terhadap lain golongan, sering terdapat permusuhan terhadap golongan lain.

Ikatan kebangsaan yang meliputi golongan-golongan semuanya, melemahkan ikatan tiap golongan, tetapi sebaliknya juga menghilangkan permusuhan antara golongan masing-masing, malahan mengikat mereka bersama menjadi persatuan yang lebih luas menghadapi pihak luar.

Contoh: Dengan lahirnya Negara Republik Indonesia berdasarkan persamaan nasib, sepenenderitaan karena penjajahan, maka rakyat Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku daerah, memeluk bermacam-macam agama, mempunyai kebudayaan yang berbeda, merasa diri satu yang terikat dalam satu negara. Akibatnya dapat menghilangkan permusuhan antara suku-suku daerah yang selama masa penjajahan dipergunakan oleh si penjajah untuk politik pemecah-belahnya.

Demikian juga agama yang bersifat meliputi bangsa-bangsa dapat kiranya mempersatukan manusia segala bangsa untuk keamanan seluruh dunia jika sekiranya tiap-tiap manusia benar-benar memperhatikan anjuran persatuan pendapat dalam agama itu, dan tidak selalu mengemukakan kepentingan sendiri dan kepentingan bangsa dan agamanya masing-masing belaka.

Contoh: Orang Indonesia adalah pemeluk agama yang takwa, maka sejak dulu umat yang berlainan agama tetap hidup berdampingan secara damai, toleransinya kuat. Karena agama apapun mengajarkan bahwa manusia itu sederajat di sisi Tuhan.

Tipisnya rasa kebangsaan akan diganti dengan tebalnya persaudaraan sedunia yang dalam teori dan pertimbangannya dengan sendirinya akan, melenyapkan perpecahan yang ada di antara bangsa. Tetapi karena manusia itu penuh dengan segala kekurangan, maka dalam kenyataannya bahwa persaudaraan atau hubungan persahabatan antara, bangsa dalam PBB sukar direalisasikan karena kenyataannya perang masih tetap mengamuk dimana-mana. Setelah PD I dan II dan perang nuklir yang amat ditakuti itu sedang dicoba dihindarkan sekalipun senjata nuklir tetap diperbanyak di Rusia maupun di Amerika Serikat. Malah politik terakhir dari Presiden Amerika yang terkenal dengan nama "Star Wars", perang di antariksa atau perang bintang.

Juga terjadinya orang-orang seagama antara Irak-Iran di bawah pimpinan Saddam Husein dan Khomeini membuktikan bahwa sesama pengikut agama Islam dapat saling menyerang dalam perebutan kekuasaan politik atas sebuah daerah. Agama yang sama bukan garansi untuk mendatangkan suatu perdamaian.

## **9. Tujuan Memahami Masyarakat.**

Dengan uraian-uraian yang disebutkan di atas dapat diharapkan agar dipahami apa sebenarnya masyarakat itu, apa fungsinya bagi manusia kegunaannya dan apa perlunya hidup bermasyarakat. Setelah hal itu semua diketahui dan dipahami dapatlah hendaknya dijelaskan selanjutnya apa tujuan kita memahaminya.

Sebetulnya dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tujuan memahami masyarakat sudah dapat ditarik kesimpulannya dari uraian di atas antara lain adalah:

- a. Agar kita lebih mempunyai rasa senasib sepenanggungan.  
Contoh: Rasa senasib sepenanggunganlah bangsa Indonesia yang berbeda di dalam segalanya dapat disatukan untuk memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan.
- b. Agar kita mempunyai rasa toleransi, sebab manusia hanya akan mempunyai arti apabila ia hidup bersama-sama manusia lainnya di dalam masyarakat. Tanpa ada manusia lainnya atau tanpa hidup bermasyarakat seseorang tidak akan dapat berbuat apa-apa.
- c. Agar menyadari manusia perlu mendapat bantuan atau bekerja sama dengan manusia lain dalam masyarakat ketika mempertahankan hidup, dan usaha mengejar kehidupan yang lebih baik, maka mustahil hal itu dikerjakan sendiri tanpa bantuan dari bekerja sama dengan orang lain.
- d. Tidak hanya dari segi badaniah saja maka manusia harus ditolong dan harus bekerja sama dengan manusia lain akan tetapi sebagai makhluk, yang berperasaan, sebagai makhluk yang memiliki emosi, manusia memerlukan tanggapan emosional dari orang lain, manusia sangat memerlukan pengertian kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan-tanggapan emosional, yang sangat penting artinya bagi pergaulan dan kesejahteraan hidup yang sehat, maka harus disadari sekali.
- e. Harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Sudah kodrat manusia, sebagai makhluk Tuhan, adalah makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial yang merupakan kesatuan bakat yang harus dikembangkan secara seimbang, selaras, dan serasi.
- f. Harus diakui bahwa kekuatan manusia pada hakikatnya, tidak terletak pada kemampuan fisiknya atau kemampuan jiwanya semata-mata, melainkan kekuatan manusia terletak dalam kemampuannya untuk

bekerjasama dengan manusia lainnya. Dengan manusia lainnya dalam, masyarakat itulah manusia menciptakan kebudayaan yang pada akhirnya membedakan manusia dari segenap makhluk hidup yang lain. Yang mengantarkan umat manusia pada tingkat, suatu martabat dan harkatnya sebagaimana manusia yang hidup pada zaman sekarang dan zaman yang akan datang

- g. Kebahagiaan manusia akan tercapai jika dikembangkan hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara manusia dengan masyarakat.
- h. Terakhir harus disadari dan harus diamalkan yaitu kemampuan dan kemauan dalam mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warganegara dan warga masyarakat. Sehingga segala pertikaian dalam masyarakat dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat.
- i. Saling harga menghargai pendapat orang lain, sehingga tercipta sistem Demokrasi dalam masyarakat.

## **C. MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN**

### **1. Hubungan Masyarakat dan Kebudayaan**

Dalam kehidupan yang nyata, antara masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dan dapat dikatakan merupakan dwitunggal. Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya. Walaupun untuk kepentingan analitis dan memang secara teoritis kedua persoalan tersebut dapat dibedakan dan dipelajari secara terpisah.

Mengenai hubungan masyarakat dengan kebudayaan ada pendapat beberapa sarjana antara lain.

- a. Melville J. Herkovits dan Bronislaw Malinowski, keduanya anthropolog bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan adanya oleh



kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu, maka itu kebudayaan sangat menentukan Cultural determinism.

- b. Kebudayaan sebagai super organik dikemukakan oleh M.J. Herkovits artinya berada di atas badan karena kebudayaan turun-temurun dari generasi ke generasi tetap hidup terus, meskipun orang-orang yang menjadi anggota masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan kematian dan kelahiran.
- c. Selo Soemardjan menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

## 2. Arti Kebudayaan

Kata Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta "budhayah", bentuk jamak dari kata "budhi" yang artinya akal atau budi. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal atau budi dengan lain pengertian, kebudayaan adalah segala yang dihasilkan oleh manusia berdasarkan akalunya.

Dalam bahasa Inggris kebudayaan adalah Culture. Culture berasal dari kata colere dari bahasa latin yang artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Pengertiannya *colere-culture* adalah segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan merubah alam.

## 3. Definisi Kebudayaan

Hassan Shadely dalam bukunya, "Sosiologi untuk masyarakat Indonesia" berpendapat sebagai berikut: "kebudayaan atau Culture berarti keseluruhan dari hasil manusia hidup bermasyarakat, beirisi aksi-aksi terhadap dari oleh sesama manusia sebagai anggota masyarakat yang merupakan kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, kebiasaan, dan lain-lain kepandaian.

Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi dalam buku "Setangkai Bunga Sosiologi" merumuskan,

“kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Prof. Dr. Koentjaraningrat dalam buku Pengantar Ilmu Anthropologi, berpendapat sebagai berikut, “Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar”.

EB Tylor dalam bukunya, “Primitive Culture” berpendapat “Kebudayaan adalah kompleks, yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan, lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

#### 4. Unsur-unsur Kebudayaan

Kebudayaan dari setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur baik besar maupun unsur-unsur kecil yang merupakan bagian dari suatu kebulatan yang bersifat kesatuan.

Contoh: Kesenian adalah kebudayaan hasil rasa merupakan kebudayaan pokok (besar) sedangkan seni musik, seni lukis dan sebagainya, unsur kecil dan kecapi suling unsur yang lebih kecil lagi dari musik.

Mengenai hal ini ada beberapa macam pendapat para ahli sosiologi, maupun ahli anthropologi yang telah mencoba merumuskan unsur-unsur pokok dari kebudayaan tadi, tetapi pendapat-pendapat para ahli ini kemudian, dikumpulkan oleh C. Kluckhohn seorang anthropolog, kerjanya berjudul *Universal Categories of Culture* telah menguraikan ulasan-ulasan para sarjana mengenai hal *cultural universal* yaitu yaitu unsur pokok (besar) dari kebudayaan yang bersifat universal, yaitu dapat dijumpai pada setiap kebudayaan dimanapun di dunia ini. Dijumpai ada 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai sebagai *cultural universal*, yaitu.

- a. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transpor, dan sebagainya). Koentjaraningrat menyebutkan; Sistem peralatan dan teknologi.
- b. Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya); Sistem mata pencaharian hidup.
- c. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan); Organisasi Sosial
- d. Bahasa (lisan maupun tulisan),
- e. Kesenian (seni rupa, seni suara, gerak)
- f. Sistem pengetahuan.
- g. Religi (Sistem Kepercayaan),

Tiap unsur kebudayaan universal dapat diperinci dalam unsur-unsur yang lebih kecil sampai beberapa kali. Dengan mengikuti metode pemerincian dari seorang ahli antropologi bernama R. Linton maka pemerincian itu akan dilakukan sampai empat kali. Karena serupa dengan kebudayaan dalam keseluruhan tiap unsur kebudayaan universal itu juga mempunyai tiga wujud, yaitu wujud sistem budaya, wujud sistem sosial, wujud kebudayaan fisik.

Wujud sistem budaya dari suatu unsur kebudayaan universal berupa adat, dan pada tahap pertamanya adalah dapat diperinci ke dalam beberapa kompleks kebudayaan. Tiap kompleks budaya dapat diperinci lebih lanjut ke dalam beberapa tema budaya dan dapat diperinci lagi menjadi gagasan sistem sosial dari suatu unsur kebudayaan universal yang berupa aktivitas sosial dapat kita, perinci pada tahap pertamanya ke dalam berbagai kompleks sosial, kemudian diperinci ke dalam berbagai pola sosial dan, diperinci lebih khusus ke dalam berbagai tindakan.

Ketujuh unsur kebudayaan universal itu masing-masing tentu juga mempunyai wujud fisik, walaupun tidak ada satu wujud fisik untuk keseluruhan dari unsur

kebudayaan universal. Unsur-unsur kebudayaan pisik secara khusus terdiri dari benda-benda kebudayaan.

Masyarakat merupakan komponen penting dalam kebudayaan, karena kebudayaan merupakan hasil dari buah pikiran dan kebiasaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Kekayaan ragam budaya yang ada di Negara Indonesia menjadi cikal bakal suatu kearifan lokal dan juga ciri khas suatu bangsa. Setiap masyarakat akan menghasilkan kebudayaan masing-masing yang menjadi suatu ciri khas bagi masyarakat tersebut, kemudian hal inilah yang menyebabkan adanya multikulturalisme. Proses terjadinya multikulturalisme didasari oleh suatu hubungan yang tak terpisahkan antara masyarakat dan kebudayaan.

Soemardjan (Setiadi dan Kolip, 2011) mengartikan bahwa masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Penjabaran tersebut secara langsung mengungkapkan bahwa masyarakat memiliki peran sebagai pencipta sekaligus pelaku kebudayaan. Terkait dengan pengertian mengenai masyarakat tersebut maka subkultur diartikan sebagai bagian dari kebudayaan yakni suatu cabang dari perwujudan kebudayaan tersebut. Subkultur berasal dari bahasa Inggris yaitu *subculture* yang berarti cabang kebudayaan (Echols dan Sadily, 2000).

Secara sosiologis, sebuah subkultur adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Horton mengatakan bahwa masyarakat adalah organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Penjelasan tersebut selaras dengan pengungkapan bahwa masyarakat merupakan pencipta sekaligus pelaku kebudayaan. Setiap masyarakat memiliki aturan-aturan tertentu yang disepakati dalam menjalani kehidupan bersama.

Herskovits (Setiadi dan Kolip, 2011) masyarakat merupakan sekelompok individu yang terorganisir dan

hidup dengan mengikuti suatu cara tertentu. Cara hidup masyarakat tersebut merupakan pedoman dan menjadi suatu kebiasaan yang disebut sebagai kebudayaan.

Secara geografis, masyarakat dibedakan menjadi dua jenis yaitu: masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Setiadi dan Kolip (2011) menjabarkan bahwa masyarakat pedesaan adalah sekelompok orang yang hidup bersama, bekerjasama dan berhubungan erat dengan sifat-sifat yang hampir sama. Kehidupan masyarakat pedesaan cenderung masih berdasar pada tata cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang diwariskan dari nenek moyangnya. Kebudayaan yang ada dalam masyarakat pedesaan merupakan hasil dari adaptasi terhadap lingkungan alam dan sosial di sekitarnya tanpa menerima pengaruh dari luar. Keadaan masyarakat pedesaan dewasa ini telah berubah dan cenderung lebih maju menuju masyarakat modern.

Pola berpikir masyarakat tidak lagi kolot dan kaku. Salah satu faktor yang mendasari perubahan tersebut adalah terjadinya kemajuan zaman, kemudahan dalam mengakses internet memungkinkan masyarakat untuk melihat dan mengenal dunia modern ala masyarakat perkotaan. Dampak dari berubahnya pola pikir masyarakat dapat mempengaruhi kebudayaan dan pola kehidupan masyarakat.

#### **D. Konsep kebudayaan**

Kata “Budaya” berasal dari Bahasa Sanskerta, budaya berarti segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu kata budaya juga berarti “budi dan daya” atau daya dari budi. Jadi budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa dan karsa (Ary H. Gunawan, 2000). Arti lain budaya adalah pikiran, akal budi, hasil adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.

Berdasarkan pendapat tersebut, budaya merupakan sebuah nilai kehidupan yang diwariskan dari satu generasi kegenerasi lain yang secara nilai merupakan suatu cara

pandang hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh anggota masyarakat yang dapat diwariskan. Secara perkembangannya budaya manusia terbentuk dari berbagai unsur-unsur kehidupan manusia itu sendiri seperti; sistem kepercayaan, adat-istiadat, bahasa, pakaian, karya seni, dan bangunan. Unsur-unsur budaya manusia akan membentuk jaringan dan kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas manusia terdahulu didalam kajian ilmu pengetahuan yang menjadi kebutuhan manusia untuk menyelesaikan persoalan hidup masyarakat. Maka budaya perlu warisan karena secara nilai ini memiliki makna dan arti yang besar bagi perkembangan manusia.

Salah satu budaya yang ada dalam masyarakat adalah gotong royong, Nilai budaya yang begitu banyak dimiliki oleh masyarakat Indonesia perlu di jaga dan dilestarikan serta dapat ditanamkan nilainya kepada masyarakat luas. Pelestarian warisan budaya perlu ada usaha dan upaya didalam melestarikan nilai budaya didalam setiap generasi masyarakat. Agar nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya menjadi tradisi budaya turun menurun terus terjaga dan mampu dikembangkan. Secara keyakinan manusia, budaya memiliki sebuah manfaat yang baik untuk menjawab permasalahan hidup masyarakat. Maka diperlukan sebuah ikhtiar kita bersama dalam usaha melestarikan nilai budaya karena hal ini akan menjadi keniscayaan nilai budaya akan dapat diwarisi oleh generasi selanjutnya.

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat (Soekanto, 2009:). Merumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (*material culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat (Soemardjan dan Soemardi, 1964).

Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran didalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.

Kesadaran masyarakat terhadap nilai tradisi budaya diperlukan agar masyarakat paham dan memiliki pengetahuan dalam bersikap dan bertindak. Usaha menjaga dan melestarikan ini tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat adat kenegerian tetapi juga perlu dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi bahkan pemerintah pusat.

Dasar hukum peran pemerintah pusat didalam menjaga kearifan lokal masyarakat tertuang dalam Permen LHK No. 34/2017 sebagai aturan pelaksana pengakuan dan perlindungan kearifan lokal, memuat lima pokok pengaturan yaitu: 1). Penegasan masyarakat adat sebagai pengampu kearifan lokal di wilayah adat. 2). Pengaturan jenis dan kriteria kearifan lokal. 3). Pengaturan ruang lingkup obyek kearifan local. 4). Pengaturan tentang akses "pihak ketiga" terhadap kearifan lokal, dan 5). Prosedur pengakuan masyarakat adat dan kearifan local.

Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta *buddhayah* yang merupakan jamak dari kata *buddhi* yang berarti "budi" atau "akal" yang kemudian dapat diartikan sebagai "hal-hal yang bersangkutan dengan akal". Makna dari kebudayaan menurut Koentjaraningrat (2009) merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dengan belajar.

Menurut Geertz (1992), kebudayaan merupakan suatu sistem makna dan simbol yang disusun dalam pengertian di mana individu-individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannyadan memberikan penilaian-penilaiannya, suatu pola makna yang ditransmisikan secara historik diwujudkan dalam bentuk-bentuk simbolik melalui saran orang-orang

mengkomunikasikan, mengabadikannya dan mengembangkan pengetahuan dan sikap-sikapnya kearah kehidupan. Suatu kumpulan peralatan simbolik untuk mengatur perilaku, sumber informasi yang ekstrasomatik.

Menurut Koentjaraningrat (2009) unsur-unsur kebudayaan secara universal meliputi: (1) sistem religi dan upacara keagamaan, (2) sistem, dan organisasi masyarakat, (3) sistem pengetahuan, (4) bahasa, (5) kesenian, (6) sistem mata pencaharian hidup, dan (7) sistem teknologi dan peralatan. Budaya lokal adalah ciri khas budaya sebuah kelompok masyarakat lokal. Budaya lokal tersebut dapat berupa hasil seni, tradisi, pola pikir atau hukum adat. Kebudayaan dimiliki oleh masyarakat.muncul dan berkembang di dalam suatu masyarakat yang merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu.

Kebudayaan selalu bertumbuh, baik dalam bentuk prinsip-prinsip berpikir maupun dalam berperilaku. Perubahan yang terjadi pada kebudayaan disebabkan oleh hal-hal yang terjadi dalam masyarakat dan kebudayaan itu sendiri, selain itu dapat pula disebabkan oleh adanya perubahan lingkungan alam dan fisik tempat manusia hidup (Rosana 2017).

Setiap kebudayaan akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dalam masyarakat yang menjadi wadah dari kebudayaan tersebut. Masyarakat dan kebudayaan memiliki hubungan yang saling terkait di mana masyarakat merupakan penghasil kebudayaan dan kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat memiliki corak yang menyesuaikan dengan masyarakat tersebut. Salah satu penyebab berubahnya kebudayaan pada suatu waktu disebabkan oleh perubahan lingkungan yang menuntut kebudayaan untuk bersifat adaptif.

Menurut Koentjaraningrat (2009) kebudayaan sebagai seluruh gagasan, perbuatan serta hasil cipta dalam kehidupan masyarakat yang diciptakan oleh manusia dengan menjadikannya milik diri melalui belajar. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sebagian besar tindakan dan perbuatan manusia dalam kehidupannya merupakan bagian dari



kebudayaan. Sehubungan dengan hal tersebut Tylor dalam Ranjabar (2006) mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan hal kompleks yang terdiri atas adat istiadat, hukum, moral, pengetahuan, kesenian, kepercayaan, kekuatan dan keberanian, serta tradisi yang sudah menjadi kebiasaan yang telah lama dijalankan oleh manusia sebagai bagian dari kelompok suatu masyarakat.

## 1. Kebudayaan Indonesia

Lalu lintas dunia ikut serta membentuk baik fisik maupun kultural bangsa Indonesia. Lalu lintas kultural menyangkut ke tujuh unsur kebudayaan ini. Sejarah menunjukkan bahwa berbagai sistem tersebut (ketujuh unsur kebudayaan masuk ke dalam kebudayaan Indonesia). Maka dari itu kebudayaan nusantara pada dasarnya menjadi kebudayaan terbuka karena ia hidup dengan lalu lintas yang lewat dan dilewatinya.

Masyarakat nusantara berusaha agar semua yang bersentuhan dengan dirinya mempunyai arti atau nilai yang produktif, fungsional, dan konstruktif bagi hidupnya. Mungkin karena situasi yang demikian maka corak sythesa dan akulturasi menjadi berkembang dan merupakan kekuatan pokok bagi masyarakat dan budaya nusantara. Sifat nusantara yang demikian itu maka membuat masyarakat Indonesia selalu terjalin dengan kehidupan masyarakat sekitarnya dan kehidupan dunia luas.

Sebelum Hindu masuk sudah ada unsur kebudayaan bangsa Indonesia. Pada waktu Hindu dan Islam masuk memang banyak yang terjadi yaitu: akulturasi I, bukan Hindunisasi atau Arabisasi, sehingga bangsa kita di dalam perjalanan sejarah budayanya tidak pernah kehilangan watak kepribadiannya itu tumbuh dan berkembang, menuju kedewasaan dengan diperkaya dengan unsur dari luar. Dari ketujuh unsur kebudayaan; jelas mengalami perubahan atau perkembangan adalah sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian dan religi.

Contoh: Sistem kemasyarakatan terutama adalah lahirnya kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia.

Bahasa Indonesia tidak mengenal bahasa tulisan, datang agama Hindu dan Islam, berkembang bahasa tulisan (sansekerta dan arab)

Kesenian, Hindu dan Islam membawa juga keseniannya (ukiran, pahatan, nyanyian, dan lain-lainnya)

Religi, Bangsa Indonesia Purba yang mempunyai kepercayaan animisme, dinamisme datang Hindu dan Islam mereka mengenal adanya Tuhan,

Datangnya bangsa Barat ke Indonesia juga membawa kebudayaan dan terjadilah akulturasi ke II. Namun dari ke 7 unsur yang tersebut di atas. Maka ketiga unsur kebudayaan yaitu: Teknologi, Ilmu Pengetahuan dan Sistem ekonomi sampai kita telah mencapai kemerdekaan tetap ketinggalan, maka itulah sebabnya perlu menyusun rencana pembangunan yang terutama menyangkut ketiga unsur tersebut. Pembahasan yang lebih lanjut akan dibicarakan dalam modul berikutnya.

## 2. **Pranata Sosial**

Untuk memenuhi kebutuhan pokok warga masyarakat, maka tumbuh dan berkembang dalam masyarakat lembaga-lembag yang dinamakan Pranata Sosial, adalah istilah yang dipergunakan oleh Koentjaraningrat.

Contoh: Kebutuhan akan pendidikan, lahir lembaga pendidikan.

Kebutuhan akan pernikahan, lahir lembaga pernikahan.

Kebutuhan akan hak milik lahir lembaga hak milik.

Istilah Pranata Sosial dipergunakan oleh Koentjaraningrat untuk menterjemahkan istilah "Social Institution". Alasan Koentjaraningrat dengan istilah Pranata karena lembaga kemasyarakatan ini menjawab pada adanya

unsur-unsur yang mengatur perilaku para anggota masyarakat.

Contoh: Dalam lembaga pendidikan (sekolah) ada peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap siswa, guru-guru, pegawai tata-usaha, pesuruh dan; lain-lainnya. Misalnya, seorang siswa harus bayar SPP, harus pakai pakaian seragam. Jadi, sekolah disamping memberikan pelajaran juga dididik untuk mematuhi peraturan-peraturan dan norma-norma.

Istilah yang dipergunakan oleh Soerjono Soekanto untuk *Social Institution* ini adalah Lembaga Kemasyarakatan, karena Institution sama, dengan Lembaga. Definisi Lembaga Kemasyarakatan merupakan himpunan daripada norma-norma, daripada segala tingkatan, yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.

Pranata Sosial (Koentjaraningrat) adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktifitas-aktifitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.

Contoh: Koperasi simpan pinjam di RT mempunyai peraturan, bahwa yang boleh menjadi anggotnya adalah warga RT tersebut. Setiap anggota harus menyetorkan uang simpanan pokok, dan iuran setiap bulan. Jika telah terpenuhi syarat-syaratnya baru boleh meminjam uang ke koperasi. Koperasi adalah Lembaga Kemasyarakatan (Pranata Sosial). Tetapi pinjam meminjam dengan tetangga tidak ada peraturan yang resmi atau syarat resmi, maka berarti bukan Pranata Sosial.

Upaya diciptakannya berbagai lembaga tidak lain adalah untuk memenuhi beraneka ragam kebutuhan manusia, agar manusia tetap *survive*. Semua kebutuhan manusia harus terpenuhi. H. Maslow menyebutkan lima kebutuhan pokok manusia (*basic need*) meliputi :

- a. Kebutuhan fisiologi
- b. Kebutuhan akan keamanan
- c. Kebutuhan sosial

- d. Kebutuhan sistem
- e. Kebutuhan aktualisasi diri

Profesor Joyodiguno mengungkapkan lima kebutuhan pokok manusia yaitu

- a. Kebutuhan akan biologis
- b. Kebutuhan mencari nafkah
- c. Kebutuhan memperoleh perlindungan dan perasaan aman
- d. Kebutuhan akan pengakuan moral
- e. Kebutuhan akan kepandaian.

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia di atas diperlukan wadah atau lembaga sebagai tempat pemenuhan kebutuhan. Wadah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut antara lain:

- a. Kebutuhan akan biologis dibutuhkan lembaga perkawinan

Setiap manusia mempunyai hasrat dan nafsu. Agar dan hasratnya dapat tersalurkan secara sehat, beretika serta bermoral, maka manusia ingin memiliki pasangan sebagai tempat pelampiasan. Pasangan ini diperoleh dengan cara adat istiadat, syah secara agama (halal) dan syah secara hukum pemerintah, sehingga dampak dari proses perkawinan akan memperoleh suatu keturunan yang dapat diterima oleh masyarakat hukum, masyarakat adat dan syah secara hukum agama.

- b. Kebutuhan mencari nafkah diperlukan wadah/ lembaga perekonomian

Sebagai aksesibilitas hidup manusia dituntut oleh sejumlah kebutuhan ekonomi. Ekonomi dapat diperoleh dengan cara manusia melakukan suatu jenis pekerjaan. Dari pekerjaan ini manusia berharap memperoleh imbalan/upah. Baik upah barang atau upah uang nantinya dapat dijadikan sebagai sarana hidup

manusia. Oleh sebab itu lembaga ekonomi erat kaitannya dengan lapangan pekerjaan.

c. Kebutuhan akan perasaan aman dan perlindungan

Perkumpulan sejumlah manusia dalam arti tidak terbatas pada suatu wilayah tertentu akan membentuk suatu komunitas dan antar komunitas akan saling muncul hasrat untuk memperoleh ekonomi. Dari proses perkawinan dan terkumpulnya harta/kekayaan akibat dari bekerja mereka butuh keamanan akan anggota keluarga, kekayaan dan keselamatan selama melakukan pekerjaan. Perlindungan yang paling kuat dan terjamin stab ilitasnya adalah perlindungan keamanan dari pemerintah. Untuk itu komunitas manusia membutuhkan lembaga pemerintahan sebagai jaminan keamanan.

d. Kebutuhan akan pengakuan moral

Setiap manusia suatu ketika akan mengalami suatu kebingangan, keraguraguan dan setiap manusia mempunyai kebutuhan akan harga diri serta jati diri. Guna mengatasi keraguan, kebingangan dan kesulitan manusia akan mengadu kepada sang pencipta (Tuhan). Cara yang ditempuh dalam mengadu kepada Tuhan adalah menurut ajaran agama yang dianut oleh agama masing-masing manusia, sehingga manusia membutuhkan suatu agama tertentu sebagai pondasi kepercayaan moral. Kita sadari atau tidak bahwa dengan memilih salah satu ajaran agama yang kita anut kita memiliki jati diri dan harga diri yang menguatkan moral di mata masyarakat dan di hadapan Tuhannya. Sebagai ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari manusia akan sakit hati dan sedih ketika diberi lebel oleh manusia lain sebagai manusia yang tidak beragama.

e. Kebutuhan akan kepandaian

Hasrat ingin tahu pada setiap manusia akan selalu muncul dibarengi dengan perkembangan umur. Oleh sebab itu setiap bertambah umur manusia ingin

bertambah tahu tentang berbagai hal yang selalu dihadapi dalam kehidupannya. Di sisi lain manusia selalu dihadapkan pada permasalahan yang kompleks di antaranya ingin beribadah yang lebih baik, ingin mengembangkan harta/kekayaannya, ingin mempunyai fasilitas hidup yang lengkap dan ingin serba kecukupan serta meraih kesempurnaan hidup. Untuk dapat memenuhi semua keinginan dan harapan tersebut manusia dituntut untuk selalu belajar. Agar belajarnya tersruktur, maka manusia membutuhkan lembaga pendidikan.

### 3. Pengertian Lembaga atau Institusi

Pengertian lembaga dan institusi dapat ditelusuri melalui pendekatan bahasa, pendekatan kebudayaan dan pendekatan state/negara sebagai berikut :

#### a. Pendekatan Bahasa

Lembaga ( bahasa Indonesia ) merupakan terjemahan dari dua istilah/ kata yaitu *institute* dan *institution*, keduanya mempunyai arti yang berbedanya. *Institute* merupakan wujud konkritnya/ nyata dari sebuah lembaga, misalnya Universitas Negeri Semarang, Institut Agama Islam Negeri.

*Institution* merupakan wujud abstrak dari suatu lembaga sebab merupakan sekumpulan norma-norma pengatur perilaku dalam aktivitas hidup tertentu. Koentjaraningrat mempertegas bahwa lembaga kemasyarakatan sebagai pranata sosial yang diartikan sebagai suatu sistem tata kelakuan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam hidup bersama. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan dari norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan di dalam kehidupan masyarakat.

b. Pendekatan Budaya

Lembaga mempunyai arti yang beraneka ragam, mulai dari kehidupan keluarga hingga kehidupan desa dan negara. Dalam ilmu ekonomi terdapat lembaga jual beli, sewa-menyewa, kredit dan sebagainya. Dalam ilmu sosial dikenal lembaga perkawinan, keluarga, perkumpulan, perserikatan dan masih banyak lagi. Dalam ilmu politik ada lembaga yang dinamakan desa, negara, partai politik dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa gambaran di atas, maka lembaga dapat diartikan sebagai tingkah laku (*behavior*) orang-orang. Pengertian ini dipertegas oleh Gillin dan Gillin sebagai *social Institution* yang merupakan suatu konfigurasi fungsional dari pada pola-pola kebudayaan berupa perbuatan, ide, sikap dan perlengkapannya serta peralatan kebudayaan yang permanen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Summer, lembaga sosial dari sudut kebudayaan merupakan wujud perbuatan cita-cita sikap, dan perlengkapan kebudayaan yang punya sifat kekal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

John R. Commons, *collective action in control of individual action*. Inti lembaga adalah action atau tindakan positif berbuat sesuatu yang dibenarkan atau tidak berbuat sesuatu, yaitu menahan diri, mengekang diri untuk tidak berbuat sesuatu yang dilarang. *Collective action*, sebagai pengawasan artinya lembaga dapat berarti pula peraturan yang mengendalikan atau mengawasi tindakan bersama-sama. *In control* artinya yang mengawasi dan dilakukan bersama-sama.

Prinsip umum lembaga adalah pengawasan, pengendalian, pembatasan perbuatan perseorangan oleh tindakan kolektif dengan pemberian sanksi bagi orang yang melanggar. Dalam lembaga apapun para anggotanya tidak dibenarkan bertindak semaunya tanpa mengikuti aturan-aturan yang dibuat bersama,

pemahaman hukum atau mentaati semua bentuk peraturan merupakan kewajiban guna kebaikan dan mencapai manfaat bersama.

c. Pendekatan state atau negara

berbicara masalah institusi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Susetian (1999) pelaksanaan pelayanan pada garis besarnya dibedakan menjadi dua, yaitu :

Pertama, pelayanan negara terhadap masyarakat yang dilakukan oleh aparatur negara (state apparatus), contohnya Pengadilan, PLN, PAM, Telkom, Rumah Sakit, pemerintah, Perumka dan lain sebagainya.

Kedua, pelayanan yang dilakukan oleh organisasi swasta yang berhubungan dengan produksi, perdagangan dan jasa pelayanan umum.

Koentarianingrat menekankan bahwa pranata selalu berhubungan dengan kelakuan yang berpola dari manusia dalam kebudayaan.

d. Pengertian Institusi

institusi adalah kelakuan tidak menekan kepada individu tetapi menekan kepada kelompok atau masyarakat yang terangkai dalam pola hubungan sosial ( *the patter of social relationship* ) Up Hoff ( 1986 ) membagi tiga institusi sebagai berikut :

**1) Lembaga sekaligus institusi dan institusi sekaligus lembaga**

Lembaga sebagai institusi menjelaskan bagaimana memelihara dan ditegakkan agar nilainya dapat ditaati oleh masyarakat.. Nilai ditegakkan dalam lembaga formal yang mempunyai aturan mengikat dan menjamin danya sanksi bagi semua yang melakukan pelanggaran.

**2) Lembaga yang bukan institusi atau belum tentu membentuk institusi.**

Walaupun ada lembaga atau organisasi yang menetapkan aturan untuk mencapai tujuan lembaga



atau organisasi , kelakuan orang dan hubungan sosial tidak terbentuk menurut aturan yang ada. Aturan lembaga hanya tertulis dan tidak memberi dampak pada tindakan, sedang pelanggaran tindakan telah tercetak oleh sebuah nilai tersendiri.

**3) Ada institusi yang tegak tanpa terikat oleh organisasi.**

Institusi ini tidak terikat oleh lembaga atau organisasi , tetapi institusi ini berkembang berdasarkan adat-istiadat kebiasaan dalam pergaulan hidup.

**4. Perbedaan Lembaga, Asosiasi dan Organisasi.**

Hernes, asosiasi dan organisasi merupakan alat yang digunakan untuk melaksanakan fungsinya

Bacoum dan Zel Chick, lembaga atau asosiasi sebagai bentuk organisasi sosial yang memiliki perbedaan secara jelas. Lembaga bersifat umum dan asosiasi bersifat khusus.

Roucek dan Warren, perbedaan lembaga dan asosiasi. Lembaga adalah pola yang organis untuk memenuhi berbagai keperluan manusia yang lahir dengan adanya berbagai budaya sebagai suatu ketetapan ( menggunakan dan melahirkan struktur ), sedang asosiasi adalah suatu kelompok yang teratur yang bertujuan untuk menjalankan satu atau lebih pola-pola lembaga ( mempunyai organisasi formal ). Dengan kata lain asosiasi merupakan wujud konkrit dari lembaga.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan perbedaan lembaga, asosiasi dan organisasi sebagai berikut :

- a. Lembaga merupakan norma-norma yang sifatnya universal atau umum.
- b. Asosiasi merupakan hal yang diatur dalam lembaga dan organisasi yang bersifat spesifik atau khusus.

- c. Organisasi merupakan wadah atau tempat untuk melaksanakan norma-norma, baik yang bersifat universal maupun yang bersifat spesifik.

## 5. Proses Tumbuhnya Lembaga Sosial

Terjadinya lembaga sosial bermula dari tumbuhnya suatu ikatan hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat. Ikatan hubungan antara manusia tersebut sangat erat kaitannya dengan kebutuhan hidup, seperti kebutuhan akan rasa keamanan dan perlindungan, keadilan, keindahan, pendidikan, ketenteraman, keluarga dan sebagainya. Kebutuhan akan pendidikan kemudian menimbulkan lembaga pendidikan, seperti sekolah-sekolah dasar, pesantren sampai pada perguruan tinggi. Kebutuhan akan keindahan kemudian menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya seperti seni rupa, seni tari seni suara dan begitu seterusnya proses pelembagaan kebutuhan-kebutuhan lainnya

Menurut Soerjono Soekanto ( 1990 ), bahwa tumbuhnya lembaga sosial oleh karena manusia dalam hidupnya memerlukan keteraturan, maka dirumuskan normanorma dalam masyarakat. Mula-mula norma-norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja, namun lama kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Misalnya dahulu di dalam jual beli, seorang perantara tidak harus diberi bagian dari keuntungan, akan tetapi lama kelamaan terjadi kebiasaan bahwa perantara tersebut harus mendapat bagiannya, di mana sekaligus ditetapkan siapa yang menanggung itu, yaitu pembeli atautah penjual.

Proses terjadinya lembaga sosial melalui beberapa tahap yaitu :

### a. Lembaga lahir

Lembaga yang baru lahir pada umumnya belum mampu membuktikan bahwa dirinya telah memfungsikan komponen-komponen lembaga

sedemikian rupa sehingga dapat secara aktif dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Aktivitas kengan yang berulang-ulang lama-kelamaan menjadikan cara untuk memperoleh jodoh, aktivitas gotong-royong lama kelamaan menjadi sebuah kebiasaan yang melembaga. Jadi cara yang dikondisikan atau disetujui, dilegalisasikan melalui praktek-praktek dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat tertentu lama-kelamaan akan melembaga. Proses ini bermakna telah melahirkan sebuah lembaga baru.

b. Lembaga tumbuh

Lembaga yang telah lahir tersebut bila terpelihara dalam kehidupan masyarakat akan tumbuh dan diterima oleh masyarakat, sehingga cirinya akan semakin jelas, misalnya orang pada jaman nenek moyang sudah ada tetapihanya sebatas saling kenal mengenal. Sekarang orang pacaran banyak diterjemahkan oleh pemuda-pemudi dengan bergaul/berpacaran secara bebas tanpa melihat batas-batas yang pantas/tidak pantas, layak/tidak layak menurut norma-norma yang berlaku sehingga tidak jarang kita menyaksikan adanya pernikahan sistem kredit, artinya calon mempelai wanita hamil dulu baru menikah.

c. Lembaga berkembang

Lembaga mulai berkembang sejalan dengan waktu, bagaimanapun lembaga menjadi semakin teratur dan muncul kesepakatan yang makin kompak diantara anggota masyarakat. Pada tahap ini sudah mulai dibangun kinerja, program dan perluasan bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Contoh lembaga pendidikan, dulu hanya sekolah formal. Sekarang lembaga pendidikan berkembang baik pengelolaannya dan tersebar sampai ke desa-desa.

d. Lembaga berubah

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia yang menyesuaikan dengan peradaban, maka lembaga-lembagapun turut menyesuaikan sehingga ada suatu keharusan untuk mengalami perubahan, misalnya lembaga kepolisian. Dulu lembaga kepolisian masuk dalam lembaga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sekarang berubah dan masuk dalam lembaga Departemen Dalam Negeri. Jadi lembagapun dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

e. Lembaga Mati

Lembaga mati tidak harus diterjemahkan tidak ada sama sekali atau punah, tetapi mati disini diartikan juga hilang sehingga suatu ketika lembaga ini akan muncul kembali. Misalnya, lembaga Departemen Sosial dan Departemen Penerangan pada pemerintahan Gus Dur dihapus atau dibubarkan artinya lembaga ini hilang, tetapi ketika Megawati ataupun Susilo Bambang Yudoyono terpilih menjadi Presiden Departemen Sosial muncul kembali.

Setelah memperhatikan uraian lahir, tumbuh, berkembang dan matinya lembaga, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lahir, tumbuh, berkembang dan matinya sebuah lembaga sangat tergantung pada manusia sebagai pelakunya. Oleh karena manusia sebagai pelaku dalam lembaga, maka yang diatur secara abstrak hanyalah norma bagaimana manusia atau kelompok masyarakat melakukan suatu komunikasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan.. Pada awalnya norma-norma tersebut terbentuk dengan cara yang tidak disengaja, lama-kelamaan norma-norma dibentuk dengan sadar dan sengaja, misalnya perantara pembeli ( makelar ) dulu tidak pernah dip erhitungkan dan pelaku makelar sendiri tidak pernah menuntut adanya suatu komisi. Sekarang sebagai

seorang perantara jual-beli selalu mendapat komisi tanpa diawali dengan perjanjian lebih dahulu.

Dalam proses pelebagaan dikenal ada empat tingkatan yaitu :

a. Cara (*Usage*)

Cara menunjuk pada suatu bentuk perbuatan yang mempunyai sanksi atau kekuatan mengikat yang paling lemah terhadap perilaku yang dianggap menyimpang di dalam masyarakat.. Cara adalah kebiasaan yang umum yang dilakukan seseorang. Bagi individu yang melakukan penyimpangan tidak mendapat sanksi hukuman yang tegas. Hukuman yang diterima sangat ringan seperti ocehan, sindiran, atau celaan. Contoh sanksi yang berupa celaan atau sindiran, bagi orang yang makan dengan mulut berdecak atau misalnya makan dengan menggunakan tangan kiri, cara makan yang benar dan sesuai dengan norma adalah harus menggunakan dengan tangan kanan, maka individu tersebut sudah dikategorikan menyimpang.

b. Kebiasaan (*Folkways*)

Kebiasaan adalah suatu cara yang menunjuk pada suatu bentuk perilaku yang berulang-ulang dilakukan dalam bentuk yang sama sehingga penyimpangan terhadap perilaku tersebut tidak memberikan sanksi yang agak berat seperti teguran dari masyarakat. Misalnya, teguran bagi orang yang naik kendaraan di gang kampung atau teguran bagi orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Kebiasaan merupakan perilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Jadi kebiasaan tidak semata-mata dianggap sebagai cara berperilaku saja, tetapi diterima sebagai norma pengatur.

c. Tata Kelakuan (*Mores*)

Tata kelakuan merupakan perilaku atau kebiasaan yang tidak semata-mata merupakan cara bertingkah laku, tetapi merupakan norma yang

mengatur, menyuruh atau melarang sesuatu perbuatan yang dilakukan. . Pelanggaran terhadap perilaku tersebut mempunyai sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan usage dan folkways.

Ciri dari tata kelakuan adalah mencerminkan sikap hidup kelompok sebagai alat pengawas, memaksa suatu perbuatan, melarang dan menuntut anggota masyarakat untuk beradaptasi. Contoh kebiasaan meminjam buku teman tanpa meminta izin lebih dahulu sebab si pemilik buku tersebut sudah akrab. Jika kebiasaan meminjam buku tidak izin terus-menerus secara berulang-ulang pelakunya lama-kelamaan bisa menjadi pencuri. Jadi izin merupakan sifat dan sikap hidup dalam kelompok masyarakat. Pinjam tanpa izin konotasinya mencuri.. Agar tidak disebut pencuri, maka setiap orang yang akan meminjam dipaksa harus minta izin.

Dalam kehidupan sehari-hari tata kelakuan ( mores ) berfungsi sebagai :

- a. Memberikan batas-batas bagi tingkah laku seseorang/individu. Dalam setiap masyarakat mempunyai tata kelakuan yang berbeda-beda, sebab tata kelakuan muncul dari pengalaman yang berbeda-beda dari masyarakat yang bersangkutan. Misalnya: di masyarakat Mataram seorang laki-laki yang masih bujangan apabila hendak menikah diharuskan membawa lari seorang gadis yang hendak dinikahi. Sedangkan pada masyarakat Bugis-Makassar membawa lari seorang gadis adalah merupakan aib ( siri" )
- b. Tata kelakuan mengidentifikasi seseorang dengan kelompoknya  
Seseorang dipaksa oleh mores untuk menyesuaikan diri dengan tata kelakuan kelompok/masyarakatnya dan dengan penyesuaian seseorang identik dengan kelompoknya , atau harus diakui sah sebagai anggota kelompok yang bersangkutan.

- c. Mengikat rasa solidaritas anggota kelompok/ masyarakat.

Makna menjaga solidaritas adalah setiap anggota masyarakat selalu berupaya untuk menjaga keutuhan dan kerjasama, misalnya sejak dini ditanamkan bahwa pekerjaan halus lebih pantas dikerjakan wanita dan pekerjaan yang sifatnya kasar lebih pantas dikerjakan laki-laki. Sampai remaja, dewasa dan tua norma ini selalu berlaku dimana-mana. Tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat-istiadat.

- d. Adat-istiadat (*Custom*)

Tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat yang telah melembaga dalam masyarakat yang lama-kelamaan meningkat kekuatan mengikatnya menjadi adat istiadat. Bagi individu/kelompok yang melanggar adat-istiadat akan mendapat sanksi yang tegas dan keras dari masyarakat. Adat-istiadat memiliki sanksi yang berat bagi pelanggarnya. Misalnya, adanya hubungan kumpul kebo antara pria dan wanita yang membuat masyarakat dilingkungan tersebut menjadi resah.

Gambar 2. Diagram Tumbuhnya Lembaga Sosial

Norma	Pola-pola Kebudayaan	Proses Melembaga	Pedoman Masyarakat
Usage	Institusionalisation	Diketahui	Karena memiliki
Folk Ways	Institusionalized	Dimengerti	Manfaat
Mores	Internalized	Dipahami	Fungsi
Custom		Ditaati	Dihargai

Keterangan :

Pola-pola membudaya :

a. Institutionalisation

Suatu proses yang dilewati oleh semua norma-norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu norma lembaga kemasyarakatan sehingga norma tersebut dikenal, diakui, dihargai dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari.

b. Institutionalized.

Suatu tahap pengenalan dan penerimaan ide-ide pada masyarakat.

c. Internalized = pendarah-dagingan

Suatu tahap penerimaan norma terhadap masyarakat sehingga masyarakat berkeinginan untuk selalu berbuat atau bertingkah-laku sejalan dengan apa yang sudah dimengerti.

## 6. Fungsi dan Manfaat Lembaga Sosial

Fungsi lembaga sosial yaitu:

- Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan
- Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan
- Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian social (social control )

Fungsi lembaga sosial dibedakan menjadi 2 ( dua )

yaitu :

a. Fungsi manifes ( nyata )

Fungsi manifes adalah fungsi lembaga yang disadari banyak orang.

Contoh : Lembaga keluarga berfungsi sebagai internalisasi ( pelembagaan ) nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, lembaga ekonomi berfungsi mengatur sistem produksi,



distribusi dan konsumsi barang yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat.

b. Fungsi laten ( tidak nyata )

Fungsi laten adalah fungsi lembaga yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Dengan kata lain, fungsi laten adalah fungsi yang tidak nampak dipermukaan, namun ada.

Contoh : Dalam lembaga keluarga, perkawinan dijadikan sarana untuk menutup rasa malu dari anggapan masyarakat tidak menikah berarti tidak laku. Dalam lembaga politik, pemilu dijadikan sarana mendapatkan kekuasaan semata karena dengan kekuasaan seseorang dapat menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya.

2 Manfaat lembaga sosial yaitu :

- Sebagai pengawas atas konsekuensi hidup orang banyak
- Merupakan badan pembina terhadap sosial budaya yang terjamin stabilitas sosial dan kelangsungannya. Menyediakan peranan-peranan sosial dan sikap yang sesuai dengan institusi tersebut sehingga setiap orang dapat memilih lembaga mana yang sesuai dengan keinginan individu.

## 7. Karakteristik atau Ciri -Ciri Lembaga Sosial

Untuk lebih memantapkan pemahaman tentang lembaga sosial, dibawah ini disajikan tentang karakteristik atau ciri-ciri lembaga sosial yaitu :

a. Lembaga sosial mempunyai simbol atau lambang

Setiap lembaga sosial memiliki simbol tersendiri yang digunakan untuk menandai suatu kekhasan atau memberi cirir khusus dari setiap lembaga

Contoh : Dalam lembaga hukum terdapat simbol seorang wanita memegang timbangan dan pedang dengan mata tertutup. Simbol ini berarti bahwa hukum tidak mengenal status, seseorang akan dijatuhi

hukuman sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukan Dalam lembaga perkawinan terdapat simbol cincin kawin. Dalam lembaga pendidikan , misalnya perguruan tinggi terdapat logo universitas

- b. Lembaga sosial memiliki tata tertib dan tradisi  
Lembaga sosial memiliki tata tertib dan tradisi yang tertulis naupun tidak tertulis yang dijadikan panutan bagi pengikutnya dalam kehidupan bermasyarakat..  
Contoh : Dalam lembaga keluarga terdapat aturan tentang bagaimana menghormati orang yang lebih tua dan melindungi orang yang lebih muda.
- c. Lembaga sosial usianya lebih lama  
Pada umumnya usia lembaga sosial lebih lama dibandingkan usia orang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contoh : Dalam lembaga keluarga, sistem pertunangan atau pewarisan sudah ada sejak dahulu dan hingga sekarang masih dianut oleh masyarakat.
- d. Lembaga sosial memiliki alat kelengkapan  
Lembaga sosial memiliki alat kelengkapan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan lembaga sosial tersebut.  
Contoh : Lembaga pendidikan memiliki gedung dan fasilitas lainnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
- e. Lembaga sosial memiliki ideologi  
Lembaga sosial memiliki ideologi sendiri yang dimiliki bersama dan dianggap ideal bagi para pendukung lembaga.
- f. Lembaga sosial memiliki tingkat kekebalan/ daya tahan  
Lembaga yang sudah terbentuk tidak akan lenyap begitu saja.  
Contoh : Lembaga pendidikan memiliki kurikulum yang mengatur kegiatan belajar mengajar agar tujuan belajar dapat diwujudkan.

Karakteristik lembaga sosial menurut Mayor Polak terdiri dari :

- a. Lembaga sosial merupakan simbol kebudayaan  
Artinya berupa tanda-tanda pengenal yang digunakan untuk menandai suatu lembaga yang dapat bersifat materi atau non materi. Contoh logo, lambang, bendera dan sebagainya.
- b. Lembaga sosial sebagai tata krama atau perilaku  
Aturan formal mengenai tingkah-laku dan kebiasaan-kebiasaan informal yang sesuai dengan peranan-peranan tertentu. Contohnya setiap guru atau dosen harus mematuhi kode etik atau aturan sebagai seorang guru/dosen.
- c. Lembaga sosial sebagai ideologi  
Suatu pemikiran yang interdependen yang dianut oleh suatu kelompok. Contohnya ideologi negara Indonesia adalah Pancasila.

Secara empirik lembaga sosial (*local*) yang ada dan berkembang di masyarakat pada kenyataannya ada yang bersifat formal dan informal. Ciri lembaga yang bersifat informal terbentuk atas kehendak masyarakat yang bersangkutan, manajemennya lemah, dinamika aktivitas tidak teratur, terbentuk atas norma dan nilai yang dikembangkan atas dasar *trust*, pengurus dipilih lembaga bersifat monoton, dan menolak campur tangan pihak luar. Contoh lembaga lumbung padi di pedesaan dan lembaga sinoman.

Ciri lembaga sosial yang bersifat formal adalah terbentuk atas dasar campur tangan pihak luar (pemerintah), ada dasar hukum untuk membentuk lembaga secara legal, pengurus dipilih atas dasar pertimbangan kebutuhan dan masa kepengurusannya jelas, struktur bersifat normal dan mudah dipengaruhi oleh pihak luar (hegemoni). Contoh Karang Taruna, Dasa Wisma, Kelompok Tani Wanita dan lain sebagainya.

## 8. Aspek-Aspek Lembaga Sosial

Menurut Soerjono Soekanto, aspek-aspek lembaga sosial sosial dapat ditinjau dari berbagai sudut sebagai berikut :

- a. Menurut pertumbuhannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
  - 1) Crescive institution, lembaga sosial yang paling primer dan biasanya tidak sengaja tumbuh (muncul dengan sendirinya ) dari adat istiadat masyarakat. Contoh : lembaga perkawinan, lembaga hak milik, lembaga pertunangan dsb.
  - 2) Enacted institution, lembaga yang sengaja tumbuh di dalam masyarakat untuk tujuan tertentu  
Contoh : Lembaga hutang- piutang, lembaga pendidikan, lembaga politik dsb.
- b. Menurut sistem nilai-nilai masyarakat, dibedakan menjadi dua yaitu :
  - 1) Basic institution ( pokok ) merupakan lembaga sosial yang dianggap penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contoh : lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga hukum dan lembaga keamanan
  - 2) Subsidiary institution ( tidak mutlak ada ) merupakan lembaga sosial yang dianggap kurang begitu penting dan hanya sebagai pendukung  
Contoh : rekreasi ( piknik ), hiburan
- c. Menurut penerimaan masyarakat dapat dibedakan menjadi dua yaitu :
  - 1) Sancitioned institution ( diterima ) merupakan lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai/norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat  
Contoh : sekolah, perusahaan, ekonomi, politik, agama.
  - 2) Unsacitioned institution ( ditolak ) merupakan lembaga yang ditolak masyarakat, karena

bertentangan dengan norma-norma/aturan-aturan di dalam masyarakat walaupun masyarakat tidak berhasil memberantasnya.

Contoh : kelompok penjahat, geng, berandalan.

d. Menurut penyebarannya, dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) General institution ( umum ) merupakan lembaga sosial yang hampir dikenal oleh semua masyarakat dunia dan secara luas diterima oleh masyarakat  
Contoh : agama
- 2) Restricted institution ( terbatas ) merupakan lembaga sosial yang dikenal oleh sebagian masyarakat dunia yang hanya terbatas pada satu kelompok tertentu dalam masyarakat.

Contoh : agama Islam, agama Budha, agama Katolik

e. Menurut fungsinya dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Operative institution , merupakan lembaga sosial yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan., karena langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia. Contoh : lembaga industrialisasi, rumah sakit, koperasi, bank.
- 2) Regulative institution, merupakan lembaga yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak daripada lembaga itu sendiri.

Contoh : Lembaga peradilan/hukum, kejaksaan.

## E. Jenis-Jenis Lembaga Sosial

Di dalam kehidupan masyarakat, kita mengenal berbagai jenis lembaga sosial yang diciptakan oleh masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya.

Jenis-jenis lembaga sosial dapat dibagi lima ( 5 ) yaitu :

1. Lembaga keluarga ( *Kinship, Domestic Institution* )
2. Lembaga Agama
3. Lembaga Pendidikan

4. Lembaga Ekonomi
5. Lembaga Politik

### 1. Metode Mempelajari Lembaga Sosial

Ada tiga metode pendekatan yang dapat dimanfaatkan untuk mempelajari/mengkaji dalam menelusuri keberadaan lembaga-lembaga sosial yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat.

Ketiga pendekatan tersebut adalah :

#### a. Pendekatan Historis

Mengkaji keberadaan lembaga ditelusuri melalui sejarah lahirnya lembaga sosial dan perkembangan suatu lembaga sosial, misalnya kita menyelidiki/melakukan penelitian tentang lahir dan perkembangan lembaga perkawinan, lembaga keluarga (keluarga batih) dan lembaga pemerintahan (demokrasi desa).

#### b. Pendekatan Komperatif

Penekatan ini dilakukan dengan cara melakukan analisa komperatif yang bertujuan untuk menelaah suatu lembaga tertentu dalam masyarakat yang berlainan temp atnya dan dalam berbagai lapisan, misalnya melakukan penelitian tentang bentuk-bentuk milik/pembagian warisan di lingkungan kerajaan, melakukan penelitian praktek-praktek pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan di propinsi Sulawesi Selatan.

#### c. Pendekatan Hubungan

Pendekatan ini lebih menekankan pada hubungan fungsional artinya suatu lembaga tidak mungkin hidup sendiri tanpa ada hubungan /kait-mengkait lembaga satu dengan lembaga lainnya, sehingga dalam analisa ini tidak menutup kemungkinan memadukan analisa komperatif dan analisa historis. Misalnya seseorang akan meneliti lembaga perkawinan, maka mau tidak

mau juga akan meneliti lembaga keluarga, lembaga warisan dan lembaga agama.

Pranata Sosial dapat terkentuk dengan sendirinya misalnv lembaga perkawinan, lembaga hak milik dan agama, tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat.

Tetapi lembaga hutang piutang, lembaga perdagangan, lembaga pendidikan, sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu.

## 2. Peradaban

Perbedaan kebudayaan dengan peradaban hanya mengenai soal istilah saja adapun istilah peradaban dapat kita sejajarkan dengan kata asing civilization. Istilah ini dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah, seperti: kesenian, ilmu pengetahuan, serta sopan-santun dan sistem pergaulan yang kompleks dalam suatu masyarakat yang kompleks pula. (Koentjaraningrat)

Sering juga istilah peradaban dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan dan ilmu, pengetahuan yang maju, dan komplek.

Menurut Arnold Toynbee, civilization atau peradaban adalah kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang sudah maju.

Contoh: Candi Borobudur suatu contoh bentuk peradaban Bangsa Indonesia yang sebetulnya suatu unsur kebudayaan kesenian, Candi Borobudur merupakan seni bangunan yang paling megah dan termasuk salah satu dari 7 keajaiban dunia.

## BAB III

### MASYARAKAT INDONESIA

#### A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk berbhineka dalam segala hal. Kenyataan bahwa di kepulauan Indonesia terdapat bersuku bangsa sebagai nasion pribumi yang biasa disebut masyarakat daerah, yang merupakan nasion tersendiri, kesatuan solidaritas sendiri yang mempunyai wilayah tempat tinggal sendiri, mempunyai bahasa sendiri, kebudayaan sendiri dan identitas sendiri.

Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, merupakan suatu itikad dan tekad pemuda Indonesia, untuk menyatakan diri menjadi satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan mendapat dukungan seluruh rakyat Indonesia, dan malah dinyatakan dengan pengorbanan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru ini terhadap usaha-usaha bekas jajahan untuk kembali berkuasa di kepulauan Indonesia.

Berbagai negara baru, negara yang didirikan sesudah Perang Dunia Kedua berakhir, menghadapi masalah integrasi nasional, karena penduduk wilayah negara yang bersangkutan terdiri dari suku-suku daerah, memeluk agama yang berbeda-beda, mempunyai adat istiadat yang beragam, sistem kekerabatan, struktur kekuasaan, bentuk tempat tinggal yang berbeda.

Orang Indonesia beruntung dapat menciptakan dan mengembangkan suatu nasion baru bangsa Indonesia, yang merupakan satu kesatuan sosial yang sungguh-sungguh baru dan mewujudkan ikatan-ikatan solidaritas, mempunyai kebudayaan sendiri, bahasa sendiri, identitas sendiri, ciri khas sendiri dan pandangan hidup sendiri. Pandangan hidup bangsanya adalah Pancasila, nilai-nilai untuk seluruh rakyat



Indonesia, tidak merupakan nilai-nilai sadar dari golongan penduduk manapun.

Meskipun telah terbentuk bangsa negara Republik Indonesia yang mendiami wilayah nusantara Indonesia yang dinamakan nasion Indonesia merupakan kesatuan sosial yang baru, sedangkan suku-suku bangsa yang merupakan nasion lama tidak dihilangkan, nasion lama tetap dipertahankan dan akan tetap terus ada, yang tidak mungkin dihilangkan. Dalam pemersatuan para penduduk yang merupakan warga negara Republik Indonesia, persoalan integrasi nasional masih merupakan masalah. Perlu diusahakan untuk mengatasi masalah initegrasi nasional ini, karena sangat menentukan masa depan bangsa dan negara kita. Harus diselesaikan dengan kepala dingin dan wawasan yang realistis. Tidak cukup dengan sekedar toleransi dan kebesaran hati, yang diperlukan saat sekarang ini adalah pendobrakan terhadap masalah yang hakiki. Tidak ada sistem monopoli, tidak ada lagi sistem, dominan minoritas-mayoritas

Integrasi nasional, pembinaan kesatuan bangsa dapat diwujudkan dalam rangka Bhineka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila secara politis. Maka realisasinya dapat dengan meningkatkan pendidikan, pemerataan pembangunan dan hasilnya, pemerintah yang kuat dan bijaksana hilangkan rasa kecurigaan antar agama, intensifkan usaha asimilasi (perkawinan campuran), perkawinan antar suku, dan lain sebagainya. Pada pokoknya pemecahan integrasi nasional harus didekati secara bulat dan utuh dan tekad politik dari semua pihak. Karena tanpa itu, integrasi nasional tidak akan terwujud secara nyata, hanya baru pada tahap selogan saja.

### **Tujuan Instruksional Umum**

Dengan mempelajari buku ajar ini, mahasiswa diharapkan dapat menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah masyarakat majemuk.

### **Tujuan Instruksional Khusus**

Setelah mempelajari modul ini, Anda dapat:

1. menjelaskan artinya masyarakat Indonesia masyarakat majemuk;
2. menjelaskan dalam segi apa saja adanya kemajemukan itu;
3. menyebutkan beberapa kira-kira jumlah kelompok etnis di Indonesia;
4. menyebutkan agama-agama apa saja yang diakui oleh pemerintah;
5. membedakan nasion lama dengan nasion baru;
6. menjelaskan lingkungan geografis wilayah Indonesia;
7. menyebutkan sejak kapan secara resmi bangsa Indonesia (nasion baru) terbentuk;
8. menyebutkan sejak kapan secara ikrar nasion Indonesia terbentuk;
9. menjelaskan mengapa masyarakat Indonesia menjadi masyarakat pertanian
10. menjelaskan bahwa suku bangsa merupakan nasion yang lebih tua daripada nasion Indonesia;
11. menyebutkan bangsa-bangsa apa saja yang termasuk golongan timur asing;
12. menjelaskan apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan integrasi nasional;
13. menjelaskan akibatnya jika terjadi bentrokan antar suku bangsa, atau antar golongan;
14. bedakan dua kategori masalah mayoritas minoritas di Indonesia;
15. menyebutkan cara-cara yang dapat dilaksanakan dalam mewujudkan integrasi, nasional secara utuh.

### **B. MASYARAKAT INDONESIA ADALAH MASYARAKAT MAJEMUK**

Kita menyadari bahwa negara kita ini terdiri dari beribu-ribu pulau besar kecil tersebar di atas bentangan laut yang semuanya merupakan satu rangkaian kepulauan yang dihuni oleh lebih kurang seratus lima puluh juta manusia, terdiri dari

berpuluh-puluh suku bangsa. Tiap suku bangsa mempunyai adat-istiadat, nilai-nilai, keyakinan, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda pula.

Keseluruhan wilayah negara mewujudkan lingkungan alam yang berbeda-beda bila lingkungan alam satu daerah dibanding dengan lingkungan alam daerah lain. Lingkungan daerah Kalimantan Tengah jauh berbeda dengan dari pada lingkungan alam di Jawa Tengah, lingkungan alam di Sumatera Barat berbeda daripada lingkungan alam di Nusa Tenggara Timur. Perbedaan lingkungan alam ini banyak mempengaruhi keadaan jasmaniah penduduk di masing-masing daerah yang bersangkutan, sehingga penduduk kepulauan Indonesia mewujudkan perbedaan-perbedaan dalam ciri-ciri jasmaniah antara berbagai golongan penduduk.

Bagaimana ciri-ciri jasmaniah penduduk Indonesia? Tidak ada ciri-ciri tertentu yang terdapat pada sekalian penduduk di kepulauan kita yang amat luas ini. Setiap daftar ciri-ciri jasmaniah yang dianggap merupakan ciri-ciri jasmaniah orang-orang Indonesia mengakibatkan sejumlah kesan orang-orang Indonesia tidak dapat digolongkani sebagai orang Indonesia karena mewujudkan ciri-ciri jasmaniah yang lain daripada yang tercantum pada daftar yang bersangkutan. Apakah warna kulit orang-orang Indonesia adalah warna coklat? Dalam kenyataan orang-orang yang jelas, adalah orang-orang Indonesia tidak berwarna kulit coklat melainkan kekuning-kuningan atau sebaliknya kehitam-hitaman. Apakah perawakan orang-orang Indonesia sedang-sedang saja? Dalam kenyataan banyak orang-orang Indonesia yang jelas ada yang berperawakan pendek atau sebaliknya tinggi. Apakah rambut orang-orang Indonesia bergelombang? Dalam kenyataan banyak orang-orang Indonesia yang jelas adalah orang-orang yang berambut kaku atau kriting. Dan demikian seterusnya.

Penduduk di kepulauan Indonesia mewujudkan perbedaan-perbedaan ciri-ciri jasmaniah yang amat besar. Dan tentulah ada kecenderungan pada masing-masing golongan penduduk yang berciri-ciri jasmaniah yang serupa untuk

menganggap ciri-ciri jasmaniah yang mereka wujudkan sebagai ciri-ciri yang lebih baik daripada ciri-ciri jasmaniah yang lain, kalau mereka tidak terpengaruh oleh nilai-nilai asing seperti yang berasal dari India atau Amerika (Hollywood).

Dalam hal kebudayaan, bahasa, kepercayaan adat, sistem kekerabatan kehidupan keluarga (termasuk pola-pola hubungan antara yang tua dan anak-anak mereka), struktur kekuasaan, bentuk tempat tinggal, dan sebagainya, perbedaan-perbedaan yang diwujudkan oleh penduduk di kepulauan Indonesia lebih besar dan lebih banyak lagi daripada perbedaan-perbedaan ciri-ciri jasmaniah mereka.

Bahasa Aceh sangat berbeda daripada bahasa Batak sehingga orang Aceh tidak mengerti bahasa Batak, dan orang Batak tidak mengerti bahasa Aceh. Bahasa pribumi di Lembah Bolim, Irian Jaya, sangat berbeda daripada bahasa Timor Timur, di Deli, sehingga orang-orang pribumi di lembah Bolim, tidak mengerti bahasa pribumi orang-orang Timor Timur dan sebaliknya orang pribumi Timor Timur tidak mengerti bahasa pribumi orang lembah Bolim. Orang Jawa tidak mengerti bahasa Bugis, orang Bugis tidak mengerti bahasa Jawa.

Umat Islam menyatakan hormat pada tempat ibadah pada waktu memasuki mesjid dengan mengenakan pici dan menanggalkan sepatu atau sandal, umat Kristen sebaliknya, menyatakan hormat pada tempat ibadah pada waktu memasuki gereja dengan membuka topi, baret, atau tutup kepala lain dan mengenakan sepatu. Dua pola tindakan yang bertentangan tapi yang mengandung makna yang sama.

Hal tersebut merupakan kenyataan yang tidak dapat kita hindari, tetapi harus kita terima dengan rasa bangga dan penuh tanggungjawab. Keadaan yang serba majemuk itu dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, bila kita melepaskan rasa tanggungjawab kita sebagai warga bangsa. Tetapi sebaliknya kalau kita sebagai warga bangsa yang penuh tanggung jawab terhadap kehidupan bangsa, maka keadaan yang demikian itu, dapat dijadikan sumber kekuatan bangsa, untuk memperkaya khasanah budaya bangsa. Dalam

keanekaragaman dan kemajemukan yang berbeda-beda itu dapat ditemukan, sejumlah nilai yang sama yang dapat dijadikan kekuatan bagi kehidupan bangsa, sebagai penopang atau penyangga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu keanekaragaman, atau istilah Mpu Tantular, kebhinekaan itu perlu dibina dan dikembangkan guna mewujudkan kebudayaan bangsa yang mencerminkan pribadi bangsa.

Dalam rangka mewujudkan, membina, dan mengembangkan kebudayaan bangsa ini perlu kita bina kebudayaan tradisional yang hidup dikalangan, suku bangsa itu agar tidak mati atau punah. Dengan demikian kebudayaan bangsa yang mencerminkan identitas bangsa itu hidup di taman sarinya kebudayaan tradisional yang hidup di dalam masyarakat suku bangsa itu. Kebudayaan yang demikian justru akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebaliknya jika kebudayaan tradisional ini mati atau punah, maka kebudayaan bangsa yang memancarkan sifat atau corak masyarakat bangsa akan tambah kerdil dan gersang, karena tidak mendapat kekuatan dari lubuk yang terdalam dari hidupnya bangsa. Karena itu sebaiknya janganlah sampai terputus bubungan tradisional dan kebudayaan nasional itu, pembinaan terhadap keduanya harus dijaga secara, harmonis jangan sampai menimbulkan akibat negatif terhadap keduanya.

Agar di dalam membina pertumbuhan kebudayaan daerah yang tradisional ini tidak disharmonis, dengan pembinaan budaya nasional, perlu lebih dahulu diketahui keadaan dan masyarakat Indonesia dari masa ke masa. Dengan demikian kita mengetahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan suatu masyarakat pada suatu masa tidak dapat lepas dari kondisi masa yang mendahuluinya.

## **1. Lingkungan Masyarakat Budaya Indonesia**

Untuk dapat menelusuri pertumbuhan dan perkembangan masyarakat budaya bangsa Indonesia dari masa ke masa lebih dahulu kiranya dijelaskan apakah yang dinamakan masyarakat Indonesia itu? Siapakah subjek

kebudayaan Indonesia itu? Dengan menentukan pertimbangan dan perkembangannya kita akan menemukan sistemnya yaitu Sistem Sosial Budayanya.

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan konstitusinya yaitu UUD 1945 telah memberikan pengertian tentang siapa bangsa Indonesia. Proklamasi dan Kontitusi telah membuat bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia menjadi subjek budaya yang memiliki prinsip identitas dan prinsip integritas. Sehingga bangsa Indonesia menjadi mampu mempersatukan dan menyatukan segala keanekaragaman menjadi suatu kekuatan nasional yang utuh, manunggal, tangguh, menuju titik cita-cita bersama. Tanpa identitas dan integritas tersebut pastilah subjek budaya itu akan menjadi terpecah belah dari dalam tubuhnya sendiri. Dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 itu pula telah ditentukan wilayah pemukiman bangsa Indonesia dan batas wewenang kekuasaan negara Republik Indonesia. Wilayah pemukiman bangsa Indonesia itu merupakan suatu lingkungan tempat bangsa Indonesia menanggapi alamnya dan berkomunikasi dengan sesamanya serta dengan Maha Penciptanya. Di dalam lingkungan itulah bangsa Indonesia melaksanakan kehidupannya yang berisi pembuatan rencana dan pengambilan keputusan.

Lingkungan kehidupan bangsa Indonesia itu merupakan lingkungan budaya yaitu lingkungan yang memberikan pengaruh timbal balik dengan kehidupan bangsa Indonesia yang menjelma dalam karya kehidupannya. Lingkungan budaya bangsa Indonesia itu, tidak lain adalah seluruh tanah air kita ini dengan segala situasi dan kondisinya. Kandisi lingkungan ini menyangkut berbagai aspek yaitu aspek geografisnya, aspek kekayaan alamnya, aspek posisi geografisnya, dan aspek demografinya.

Dari aspek geografisnya lingkungan, ini memilihi flora, fauna, dan potensi hidrografinya, sehingga lingkungan ini terdiri dari beribu-ribu pulau dan perairan,

dengan situasi yang khas merupakan lingkungan nusantara yang sekalipun terpisah-pisah oleh laut, tetapi masih merupakan kesatuan. Karena itu masyarakat Indonesia sebagai subjek budaya memiliki corak Bhineka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalimat itu pernah dipakai oleh seorang pujangga Indonesia yang terkenal Empu Tantular, dalam arti, diantara puspa ragam adalah kesatuan.

Dari aspek kekayaan alamnya, lingkungan tanah air kita mempunyai potensi yang amat tinggi baik itu di dalam lingkungan daratannya maupun dalam lingkungan airnya, lingkungan tumbuh-tumbuhannya, lingkungan masyarakatnya maupun lingkungan iklimnya. Sedangkan dari aspek posisi geografis, lingkungan masyarakat budaya Indonesia ada di posisi silang di antara samudra-samudra dan di antara dua benua.

Penduduk sebagai penghuni lingkungan tanah air, itu merupakan bagian dari alamnya, tetapi yang namanya manusia itu adalah mahluk yang amat potensial berkat adanya kesadaran akan hidupnya. Mereka memiliki kesadaran akan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Mereka membuat jarak antara dirinya dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Manusia yang menjadi penghuni tanah air kita yang selanjutnya disebut bangsa Indonesia itu, membuat komunikasi dengan alamnya, menanggapi alam sekitarnya berupa karya. Kekayaan merupakan pencerminan keluar dari potensi manusia tersebut di atas dalam hidupnya secara terus menerus. Hasil karya ini merupakan khasanah kehidupan manusia yang memberi pengaruh kepada hidupnya sendiri juga. Hasil karya yang merupakan khasanah kehidupan manusia itu disebut kebudayaan. Lingkungan hidup yang coraknya seperti disebutkan atas tadi tentu saja mempengaruhi bentuk dan pertumbuhan serta perhubungan kebudayaan Indonesia. Lingkungan alam yang sarwa nusantara itu menyebabkan kebudayaan yang

berkembang di dalam lingkungan itu mempunyai corak dan bentuk yang nusantara yang berbeda dengan corak dan bentuk kebudayaan daratan atau continental culture.

Suburnya tanah nusantara mengakibatkan masyarakat nusantara berkembang menjadi masyarakat pertanian. Hubungan manusia dengan tanah merupakan faktor yang sangat penting. Pertanian dalam arti luas merupakan sendi pokok bagi kebudayaan Indonesia. Hal itu disebabkan oleh pertama-tama lingkungan nusantara terdiri dari lingkungan pulau-pulau, dan laut-laut; kedua, di wilayah ini terdapat air sungai dan air danau, dan ketiga pengelolaan tanah juga memerlukan air sebagai sarannya yang sangat penting. Karena itu kebudayaan Indonesia hidup dalam lingkungan agraris yang mengandung unsur tanah dan air dimana kedua unsur itu sangat tinggi nilainya bagi proses humanisasi. Dapat dipahami bila gejala kebudayaan Indonesia bersifat kebudayaan tanah di samping kebudayaan air. Perkembangan selanjutnya amat dipengaruhi oleh kondisi tanah dan air yang menantang kebutuhan hidup manusia Indonesia. Manakah yang dinamakan tanah tumpah darah Indonesia, tanah air kita? Menurut geopolitik maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatra saja atau Borneo saja, atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah SWT menjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua samudra itulah tanah air kita! (Pidato Presiden Ir Soekarno 1 Juni 1945).

## 2. Nasion Indonesia

Orang-orang Indonesia beruntung dapat menciptakan dan mengembangkan suatu nation baru yang tidak hanya merupakan suatu federasi antara golongan-golongan penduduk yang masing-masing merupakan kesatuan tersendiri, dan dalam federasi ini tetap mempertahankan



kesatuan mereka masing-masing, seperti dijumpai di banyak negara-negara baru.

Nasion Indonesia merupakan satu kesatuan sosial yang sungguh-sungguh baru dan mewujudkan ikatan-ikatan solidaritas yang meliputi sekalian anggota-anggotanya. Nasion Indonesia tidak merupakan kumpulan golongan-golongan masing-masing mempunyai kebudayaan sendiri dan identitas sendiri. Nasion Indonesia mempunyai kebudayaan sendiri, bahasa sendiri, dan identitas sendiri. Nilai-nilai dasarnya dinyatakan sebagai azas-azas Pancasila, nilai-nilai yang sebagai keseluruhan, sebelum diterima sebagai nilai-nilai dasar nasion Indonesia, tidak merupakan nilai-nilai dasar golongan penduduk manapun.

Nasion Indonesia mempunyai bahasa sendiri yang tidak terdiri dari bahasa asing yang terpaksa digunakan untuk memungkinkan komunikasi antara berbagai golongan yang masing-masing mempunyai bahasa sendiri. Bahasa nasion baru ini juga tidak lagi sama dengan bahasa asalnya bahasa Melayu, melainkan telah dapat dikembangkan menjadi bahasa tersendiri. Dengarkan saja orang Melayu berbicara dan bandingkan dengan orang yang berbahasa Indonesia. Tak begitu sukar membedakan kedua bahasa itu satu dari yang lain. Ujaran yang satu adalah jelas ujaran bahasa Indonesia. Begitupun halnya dengan kesusasteraan. Nasion Indonesia punya kesusasteraan sendiri, ciptaan sastrawan-sastrawan seperti Sutan Takdir Alisyahbana, M. Yamin, Chairil Anwar, WS Rendra dan lain sebagainya. Kesusasteraan Indonesia meskipun terpengaruh oleh kesusasteraan asing, tidak sama dengan kesusasteraan daerah manapun dan tidak pula sama dengan kesusasteraan asing tertentu. Kesusasteraan Indonesia merupakan kesusasteraan tersendiri.

Nasion Indonesia mempunyai seni lukis sendiri, seni pahat sendiri, seni arsitektur sendiri, seni tari sendiri, seni berpakaian seni berpakaian sendiri, dan sebagainya. Nasion

Indonesia mempunyai aturan-aturan tingkah laku sendiri yang berbeda daripada aturan adat manapun, sehingga banyak kegiatan-kegiatan sosial, tertentu, seperti kegiatan-kegiatan pendidikan, politik, administrasi; olahraga dan lain-lain dihubungkan dengan aturan-aturan nasion Indonesia dan tidak dengan aturan-aturan masyarakat daerah manapun. Anggota nasion Indonesia merupakan satu kesatuan solidaritas yang besar yang makin lama makin kuat. Akan tetapi, belum semua orang-orang yang menurut undang-undang yang berlaku adalah warga negara Republik Indonesia dalam kenyataan telah menjadi anggota kesatuan solidaritas yang besar ini, kesatuan solidaritas yang dikenal sebagai nasion Indonesia, Bangsa Indonesia.

### **3. Masyarakat-masyarakat Daerah: Nasion-nasion yang Lebih Tua Daripada Nasion Indonesia**

Nasion Indonesia tidak satu-satunya nasion di kepulauan Indonesia. Lama sebelum nasion Indonesia terbentuk, di kepulauan Indonesia telah terdapat berbagai nasion pribumi yang sekarang biasa disebut suku bangsa ataupun masyarakat daerah.

Masing-masing daerah ini merupakan nasion tersendiri, kesatuan solidaritas tersendiri yang mempunyai wilayah tempat tinggal sendiri. Masing-masing masyarakat daerah ini mewujudkan sekalian ciri-ciri yang biasanya dianggap merupakan ciri-ciri suatu nasion, seperti kebudayaan sendiri, bahasa sendiri, identitas sendiri, dan yang terpenting, perasaan solidaritas antara anggota-anggota, warga-warga, masyarakat daerah yang bersangkutan.

Nasion Batak tersendiri dari orang-orang yang terikat satu sama lain oleh keanggotaan dalam sistem marga. Keanggotaan dalam suatu marga yang biasanya diperoleh karena ayah, yang bersangkutan adalah anggota marga tersebut, menjadikan seseorang anggota kesatuan solidaritas besar yang diwujudkan oleh nasion Batak. Orang-orang

yang bukan anggota marga tertentu adalah orang luar. Nasion Minangkabau terdiri dari orang-orang yang terikat satu sama lain oleh keanggotaan dalam sistem suku. Keanggotaan dalam suku tertentu yang biasanya diperoleh karena ibu yang bersangkutan adalah anggota suku tersebut, menjadikan seseorang anggota kesatuan solidaritas besar yang diwujudkan oleh nasion Minangkabau. Nasion Jawa terdiri dari orang-orang Jawa, Wong Jawa. Nasion Bugis terdiri dari Ana Karung dan Tomoradeka, kaum bangsawan dan orang biasa.

Setiap nasion lama membatasi dengan jelas siapa yang dianggap merupakan bagian dari kesatuan solidaritasnya dan siapa yang dianggap orang luar. Meskipun telah terbentuk kesatuan sosial baru yang dikenal sebagai nasion Indonesia, nasion-nasion lama tidak menghilang, kecuali mungkin nasion-nasion yang sangat kecil, yang bersatu dengan nasion-nasion yang lebih besar. Nasion-nasion lama tetap bertahan dan akan terus bertahan.

Dalam pembentukan dan pertumbuhan nasion Indonesia, anggota-anggota nasion baru ini diperoleh dari nasion-nasion lama akan tetapi pada umumnya orang-orang yang menjadi anggota nasion Indonesia yang baru tetap mempertahankan keanggotaan dalam nasion lama asal masing-masing. Hanya di kota-kota besar, seperti Jakarta, ikatan-ikatan nasion lama bisa menjadi lemah, terutama di kalangan keturunan perkawinan campuran antara pria dari suatu nasion lama tertentu wanita dari nasion lama yang lain. Jumlah orang-orang demikian banyak dibanding dengan orang-orang yang tetap mengidentifikasi diri, di samping sebagai orang Indonesia anggota nasion Indonesia sebagai anggota nasion lama tertentu: orang Aceh, orang Minahasa Ambon, orang Bali, orang Sunda, orang Jawa, dan sebagainya. Dalam keadaan-keadaan tertentu, terutama di kalangan keluarga sendiri, kesatuan solidaritas amat penting! Kebanyakan penduduk di kepulauan Indonesia masih bertindak sebagai anggota nasion lama tertentu,

keadaan yang tidak akan banyak mengalami perubahan meskipun orang-orang yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta mungkin memperoleh kesan lain. Malah penduduk yang hanya merupakan anggota nasion-nasion lama asal masing-masing dan belum sungguh-sungguh menjadi bagian dari nasion Indonesia yang baru masih amat banyak.

#### 4. Golongan Keturunan Asing

Sudah lama sebelum masa jajahan Belanda terdapat pendatang-pendatang asing yang menetap di kepulauan Indonesia: orang-orang India, Arab, Cina dan sebagainya, meskipun jumlah mereka pada waktu itu tidak begitu besar. Dalam masa jajahan Belanda, jumlah pendatang-pendatang asing lebih banyak sehingga, terbentuk perkampungan-perkampungan seperti kampung Cina, kampung Arab, kampung Keling, dan kota-kota Eropa yang terutama terdiri dari orang-orang Belanda. Sebagian dari para pendatang asing ini menikah atau hidup bersama sebagai keluarga dengan orang-orang pribumi, sehingga terbentuk suatu golongan penduduk baru, golongan peranakan, turunan dari perkawinan campuran antara orang-orang pribumi dan pendatang-pendatang asing.

Golongan peranakan yang terutama meliputi golongan peranakan Cina, Eropa, dan Arab, lambat laun mengembangkan kebudayaan-kebudayaan tersendiri yang mewujudkan baik unsur-unsur kebudayaan-kebudayaan pribumi maupun unsur-unsur kebudayaan asing tapi yang sebagai keseluruhan merupakan kebudayaan-kebudayaan tersendiri, berbeda dari pada kebudayaan pribumi dan berbeda daripada kebudayaan asing. Kebudayaan-kebudayaan peranakan merupakan kebudayaan yang pada hakekatnya sama dengan kebudayaan pribumi di kepulauan Indonesia.

Bersamaan dengan pertumbuhan kebudayaan-kebudayaan yang ini, golongan peranakan ini mengembangkan identitas tersendiri, identitas sebagai orang peranakan yang tidak pribumi tapi juga tidak asing.

Meskipun demikian, golongan sebenarnya tidak merupakan golongan ras, seperti orang-orang Cina totok, orang-orang Belanda totok, dan sebagainya, karena orang-orang peranakan yang ayahnya pribumi biasanya dianggap orang-orang pribumi.

Golongan penduduk yang dikenal sebagai golongan peranakan lebih merupakan golongan sosial daripada golongan ras. Mereka merupakan tersendiri atas dasar nama asing keluarga mereka masing-masing, seperti Gan, Alatas, de Brayn, atas kebudayaan khas yang mereka wujudkan dan atas dasar identitas diri.

## 5. Persatuan Atas Dasar Agama

Agama-agama besar, seperti agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik Roma, agama Hindu Darma, dan agama BU merupakan sumber-sumber daya pemersatu yang ampuh. Masing-masing agama ini menarik penganut dari berbagai masyarakat daerah, dari berbagai nasion lama.

Jemaah Jumat di mesjid tertentu bisa terdiri dari orang-orang Aceh dan orang-orang Maluku, orang-orang Sunda dan orang-orang Minangkabau, orang-orang Jawa dan orang-orang Banjar. Bersama-sama mereka mencuci diri, bersama-sama mereka sembahyang bersama-sama mereka mendengarkan khotbah. Kesadaran sebagai sesama umat Islam menguasai tingkah laku mereka lebih daripada kesadaran bahwa jemaah yang bersangkutan sebenarnya terdiri dari orang-orang yang asalnya dari masyarakat-masyarakat daerah yang berbeda satu dari yang lain. Jemaah geraja tertentu bisa juga terdiri dari orang-orang yang asalnya dari nasion-nasion lama yang berbeda-beda, seperti orang Maluku, orang Sunda, orang Minahasa, orang

Batak, orang Jawa, orang Dayak, dan sebagainya. Mereka merasa bersatu sebagai sesama umat agama Kristen. Mereka merasa setia kawan dalam hubungan mereka satu sama lain sebab mereka menganut kepercayaan yang sama, berpedoman ajaran-ajaran agama yang sama.

Agama-agama yang besar mempersatukan anggota-anggota dari nasion-nasion lama yang berbeda, sehingga merupakan dasar yang kuat untuk menanam dan memupuk perasaan solidaritas yang tidak terbatas Pada nasion lama asal masing-masing saja, tapi mencakup seluruh penduduk wilayah negara Republik Indonesia yang bersama-sama merupakan perwujudan nasion Indonesia.

Malah, pertentangan antara agama-agama besar ini tidak mutlak merugikan integrasi nasional bila diterima, kenyataan bahwa masalah yang paling membahayakan kesatuan Nasional adalah masalah hubungan antara nasion-nasion lama dan nasion, Indonesia serta hubungan antara masing-masing nasion lama ini satu sama lain, karena seperti telah dikemukakan masing-masing nasion lama mempunyai wilayah tempat tinggal daerah asal sendiri. Suatu nasion lama bisa, bilamana tidak sungguh-sungguh terintegrasi dengan nasion Indonesia pada suatu waktu memisahkan diri dari organisasi politik, negara, tersendiri. Agama-agama besar di Indonesia tidak mempunyai wilayah tersendiri bagi para penganut-penganut masing-masing, sehingga tidak bisa memisahkan diri dari negara Indonesia dengan mendirikan negara tersendiri khusus penganut-penganut agama bersangkutan. Malah sebaliknya, agama-agama besar ini justru mempersatukan sejumlah anggota-anggota satu nasion lama dengan anggota-anggota nasion lain yang juga menganut agama yang bersangkutan, sedangkan mungkin sekali, anggota-anggota lain dari nasion yang pertama menganut agama besar yang lain sehingga terikat bersatu dengan anggota-anggota nasion-nasion lain yang juga menganut agama ini.

Pertentangan antara agama, yang tentu tidak terkendalikan oleh siapapun, cenderung memperkuat perasaan setia kawan, di antara para penganut agama yang bersangkutan, perasaan setia kawan dengan seagama umat dari nasion-nasion lama yang lain. Perbedaan antara nasion-nasion lama menjadi kurang penting, persatuan antara nasion-nasion lama, meskipun terbatas pada penganut agama yang sama menjadi sangat penting.

#### **6. Kebudayaan Nasional, Puncak-puncak Kebudayaan Daerah**

Konsepsi Ki Hajar Dewantoro tentang Kebudayaan Nasional bahwa kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah, artinya kebudayaan nasional terdiri dari unsur-unsur kebudayaan daerah, sepanjang kebudayaan daerah tidak bersifat kontroversial, cepat atau lambat secara nasional ia akan dapat diterima. Jelas kebudayaan nasional adalah sangat diwarnai oleh kebudayaan-kebudayaan daerah. Namun dilihat dari, segi kemajemukan unsur kebudayaan nasional, persaingan antara unsur-unsur tersebut sangat keras. Persaingan dalam arti ingin menonjol lebih daripada unsur yang lain sehingga dengan demikian dapat mewarnai mosaik kebudayaan nasional, pada akhirnya memunculkan suatu konflik antara budaya.

Perwujudan atas adanya persaingan ini seperti terjadi akhir-akhir ini, kendatipun dapat diartikan lain, biasanya ditandai dengan munculnya sementara pihak yang berusaha untuk memperlihatkan kembali kebudayaan-kebudayaan daerah tertentu secara gegap gempita hal ini tidak saja tercermin dalam kegiatan kebudayaan yang terbatas pada tari dan musik, bahkan telah pula merembes pada kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, seperti pernikahan, selamat, kehamilan, dan sebagainya.

Dominasi sebuah kebudayaan atas kebudayaan lain merupakan suatu realitas. Namun, hal ini merupakan suatu persoalan alami. Sebab mengandung pengertian bahwa, terdapat suatu kebudayaan dari satu suku bangsa yang besar yang diterima oleh suku-suku lain. Di dalam sebuah masyarakat yang pluralitis, kenyataan demikian memang sering dianggap sebagai bentuk dominasi.

Kenyataan demikian, tentu bukan merupakan persoalan pelik, hanya saja yang muncul menjadi persoalan besar adalah apakah dominasi ini dijalankan oleh pemilik kebudayaan besar atau tidak. Untuk Indonesia faktanya tidak demikian. Sebab yang terjadi adalah suatu proses difusi kebudayaan, dimana proses tak dapat dihindarkan oleh masyarakat yang lahir dan besar bukan pada daerah asalnya.

Memang dalam kondisi demikian persoalannya dapat pula ditafsirkan secara lain. Misalnya, munculnya isu jawanisasi. Karena, untuk mencegah isu demikian, perlu suatu penyuluhan budaya atau komunikasi antar kebudayaan (Dr. Nico S. Kalungi, staf pengajar Fakultas Sastra UI Majalah Panji Masyarakat no 456. Tahun XXVI. 21 Januari 1985, hal 15). Pendapat serupa dikatakan oleh Dr. Budhisantoso Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional, terlebih pendapat yang mengatakan bahwa kebudayaan Indonesia didominasi kebudayaan Jawa. Kecenderungan demikian terjadi karena adanya subjektivitas yang hanya melihat unsur lahiriah, suatu kebudayaan. Misalnya, nilai sopan santun, ini merupakan nilai yang tidak hanya dimiliki oleh orang-orang Jawa. Hanya barangkali cara mewujudkannya berbeda.

Menurut Budhisantoso, nilai yang disajikan kebudayaan Jawa relatif lebih mudah diterima. Hal ini mungkin juga dipengaruhi oleh elite politik. Sebab memang dalam bahasa kebudayaan dikenal simbol prestise. Faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam melihat apakah ada suatu dominasi atau tidak adalah masalah arena sosial. Jika



arena sosialnya itu maritim culture atau kebudayaan laut, maka budaya Bugis barangkali akan lebih dominan. Dalam kebudayaan kepemimpinan, orang Jawa relatif sudah hidup dalam organisasi kenegaraan yang kompleks. Karenanya mereka lebih dominan. Sementara itu di bidang perdagangan, kebudayaan tidak dapat ditiru, sebab jika ditiru, akan dapat menyebabkan kebangkrutan. Dalam perspektif demikian, tidak dapat dikatakan, adanya suatu dominan. Jika ada itu tidak menyangkut seluruh aspek, hanya pada arena-arena tertentu.

Usaha-usaha yang sedang dilakukan sekarang untuk mengembangkan kebudayaan daerah, pihak Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, tengah melakukan suatu inventarisasi kekuatan budaya. Hal itu dilakukan semata-mata untuk melihat kekuatan-kekuatan atau esensi budaya-budaya daerah. Kegiatan itu dilakukan terutama melalui cerita-cerita rakyat, legenda, mite, dan lain sebagainya.

Kegiatan demikianlah dianggap penting, bahan-bahan itu mengandung pesan-pesan yang terselubung yang sebenarnya mengandung nilai, norma atau pandangan hidup suatu masyarakat. Dari kegiatan itu perlu adanya suatu upaya penyaringan, dimana hanya nilai-nilai relevan yang ditawarkan kepada masyarakat.

Perlu adanya wadah pengembangan kebudayaan daerah dan nasional. Misalnya, proyek Javanologi, sepanjang hal itu tidak merupakan suatu lembaga yang memaksakan suatu kebudayaan tertentu, maka bolehlah lembaga itu berjalan. Hanya perlu diimbangi dengan proyek-proyek lain. Misalnya: Batakologi, Sundanologi dan sebagainya atau proyek Indonesianologi yang mengembangkan kebudayaan-kebudayaan daerah. Tapi sekarang ini yang penting adalah bagaimana munculnya suatu sikap dinamik pada kalangan masyarakat luas untuk mengembangkan kebudayaan-kebudayaan daerah.

### C. INTEGRASI NASIONAL INDONESIA

Keanekaan menyenangkan, kata orang Romawi Kuno. Dengan semangat yang sama orang Perancis berseru: Hiduplah perbedaan! Perbedaan memang menyenangkan memang menyenangkan bilamana dalam perbedaan terdapat benih pertemuan. Perbedaan akan merusak bila benih konflik tersebut. dikobarkan-kobarkan. Semuanya bukanlah mustahil bagi Indonesia yang terdiri dari 300 suku bangsa (kelompok ethnics) dengan ratusan daerah, lima agama resmi dan puluhan agama suku dan kepercayaan. Tetapi masalahnya bagaimana mempertahankan kesatuan dan tidak menghancurkan keanekaan? Atau sebaliknya, bagaimana mengakui perbedaan dan tidak mengorbankan harmoni? Kesatuan bisa dipaksakan sampai ketitik ekstrim akan terjadi keseragaman. Namun keseragaman tidak memecahkan masalah. Persoalan hanya dipecahkan bila ditemukan akarnya yang terdalam pada persepsi dan sikap antar suku, antar agama dan kebudayaan.

Empat puluh tahun telah berlalu sejak sejumlah cendekiawan berkumpul di jalan Penggangsaan Timur 56, Jakarta untuk bersama-sama, atas nama rakyat Indonesia, mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pengumuman mereka, yang ditanda tangani oleh Soekarno dan Mohammad Hatta, tersebar luas di kepulauan Indonesia dan menyebabkan amat banyak orang menyatakan dukungan mereka pada pengumuman amat singkat tapi amat penting ini, dukungan yang kemudian malah dinyatakan dengan pengorbanan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru ini terhadap usaha bekas penjajahan untuk kembali berkuasa di kepulauan Indonesia. Malah lima puluh tujuh tahun telah berlalu sejak sejumlah pemuda, sejumlah cendekiawan muda berkumpul di Jalan Kramat 106, Jakarta, untuk bersama-sama menyatakan keputusan mereka yang berbunyi

1. Kami poetra dan poetri Indonesia, mengaku bertoempah, darah yang satoe, tanah Indonesia,

2. Kami poetra dan poetri Indonesia mengaku berbangsa yang satoe, bangsa Indonesia.
3. Kami poetra dan poetri Indonesia menjunjung bahaga persatoean bahasa Indonesia.

Keputusan ini dibacakan pada hari terakhir Kongres Pemuda II yang berlangsung pada tanggal 27 - 28 Oktober 1928. Dan sebagai keputusan penting ini terkenal dengan nama Sumpah Pemuda. Keputusan ini sangat terpengaruhi perkembangan lanjutan dari masyarakat Indonesia, malah menjadi pedoman pokok dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan penduduk daerah jajahan Hindia Belanda dan kemudian usaha mempersatukan para warga negara Republik Indonesia.

Tapi, persatuan para penduduk yang menurut undang-undang yang berlaku adalah warga negara Republik Indonesia - integrasi nasional masih merupakan masalah. Tentu kebanyakan orang tidak sadar bahwa integrasi nasional merupakan masalah. Tentu banyak orang tidak bersedia menerima kenyataan bahwa masih ada masalah integrasi nasional yang belum teratasi sepenuhnya. Tentu juga cukup banyak orang yang malah membantah dengan tegas bahwa nasion Indonesia, bangsa Indonesia, menghadapi masalah integrasi nasional dan malah menuduh orang-orang yang menunjuk pada kenyataan yang bersangkutan sebagai pengacau, penghianat.

Marilah kita perhatikan bagaimana perwujudan masalah integrasi nasional di kepulauan kita agar supaya bersama-sama kita ikut berusaha mengatasi masalah yang sebenarnya menentukan masa depan bangsa dan negara kita.

Perlu dijelaskan bukan negara kita saja yang menghadapi masalah integrasi nasional ini juga berbagai negara baru, negara yang didirikan sesudah Perang Dunia II berakhir, karena penduduk wilayah negara-negara yang bersangkutan tidak sungguh-sungguh merupakan masyarakat yang sudah sejak amat lama merupakan suatu kesatuan. Penduduk negara Guinea terdiri dari orang-orang Fulani, orang Malinbe, dan

orang Susu, yang masing-masing mendiami daerah asal tersenliri. Penduduk negara Birma, Korea, dan Shin, dan sejumlah suku bangsa lain. Banyak orang Korea, yang mempunyai wilayah kediaman sendiri, masih menolak untuk dianggap sebagai orang Birma dalam pengertian baru, pengertian yang lebih menyeluruh sehingga tidak hanya, mencakup suku bangsa Birma. India bekas jajahan Inggris, tak berhasil mempertahankan kesatuan pada waktu memperoleh kemerdekaannya dalam tahun 1947 sehingga terbentuk dua negara yang masing-masing berdiri sendiri, Republik India dan Dominion Pakistan dengan daerah dan penduduk Jumina dan Kashmir sebagai masalah sengketa. Negara Pakistan yang terbagi dalam dua wilayah yang terpisah satu dari yang lain oleh wilayah India dan sejak tahun 1956 merupakan Republik Islam, tidak dapat mempertahankan kesatuannya ketika penduduk di daerah Timur memberontak, memisahkan diri dari Pakistan dan mendirikan negara Bangladesh dalam tahun 1971.

Tapi, tidak hanya negara-negara baru, bekas jajahan yang dapat membebaskan diri, mewujudkan penduduk yang sebenarnya terdiri dari lebih dari satu kesatuan penduduk, melainkan juga sejumlah negara lama, seperti Inggris, Spanyol, Belanda, Belgia, Switzerland, Yugoslavia, Muangthai, dan sebagainya. Negara-negara lama inipun merupakan negara-negara Bhineka, sehingga juga menghadapi masalah integrasi nasional.

Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada dan Australia merupakan negara bhineka yang bermasalah integrasi nasional yang sangat berlainan sifatnya dibanding dengan masalah integrasi nasional yang dihadapi oleh negara-negara baru, seperti Nigeria dan Birma; atau negara-negara India, seperti Belgia dan Spanyol. Negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia adalah negara. integrasi, sehingga, kecuali orang-orang pribumi yang jumlahnya tak begitu besar dibandingi dengan jumlah orang-orang atau golongan-golongan penduduk pendatang, masing-masing

golongan penduduk yang bisa dibedakan dan membedakan diri atas dasar ras, kebudayaan atau agama tidak mempunyai tanah asal sendiri di wilayah negara yang bersangkutan. Kenyataan ini berarti bahwa negara-negara imigran, meski sering mewujudkan pertentangan-pertentangan yang amat hebat, tidak sungguh-sungguh terancam kemungkinan pemisahan salah satu golongan sebagai negara tersendiri dengan wilayah sendiri, kecuali di luar wilayah negara asal yang bersangkutan (Harsya W. Bachtiar, Masalah Integrasi Nasional di Indonesia Prisma Agustus 1976, no 8)

### **1. Aneka Warna Bangsa Indonesia**

Mengenai masalah aneka warna, suku bangsa negara kita dalam keadaan satu tingkat lebih maju daripada negara-negara lain yang juga berpenduduk suku, bangsa pluralistis seperti India, Birma, Filipina bahkan Srilangka. Ini disebabkan karena kita sudah memiliki bahasa nasional sehingga kita tinggal mengembangkan suatu kebudayaan nasional, yang sebaliknya prosesnya dapat sangat dibantu oleh keadaan telah adanya suatu bahasa nasional itu.

Untunglah bahwa hubungan antar suku, bangsa dan golongan dalam masyarakat negara kita itu, belum seburuk seperti di beberapa negara lain dengan suatu masyarakat majemuk, tetapi toh potensi terpendam untuk konflik karena masalah ketegangan antar suku dan golongan tidak bisa kita abaikan demikian saja. Dalam zaman kolonial, konflik itu seolah-olah hanya ada secara terbatas sekali dan hanya berdasarkan atas permusuhan-permusuhan adat antara suku-suku bangsa atau sub-sub suku bangsa yang mudah dapat diatasi dengan kewibawaan dari pemerintah pusat. Namun sifat terbatas dari adanya konflik antar suku bangsa dan golongan itu, disebabkan karena masing-masing suku bangsa, memang sudah menerima kedudukannya dan hanya berorientasi terhadap otoritet pemerintah asing itu, juga karena ruang lingkup kehidupan kita waktu itu masih amat terbatas dan juga karena kesempatan bagi kita untuk

pergi dari satu daerah ke daerah lain di Indonesia masih amat terbatas. Sesudah otoritet asing itu hilang, maka terpaksa kita saling berorientasi satu terhadap yang lain dan terpaksa kita berusaha untuk dapat bekerja sama dan bersatu dalam masyarakat negara Indonesia ini.

Proses untuk mengembangkan hubungan yang selaras antara suku bangsa dan golongan yang berbeda itu memang tidak mudah, makan waktu dan menurut perkir logika membutuhkan satu generasi lagi, sebelum kita berani mengatakan bahwa potensi konflik itu sudah hilang sama sekali. Karena proses hubungan yang selaras antara suku bangsa dan golongan di negara kita pada waktu ini, masih ada di tengah-tengah perkembangannya, maka perlu kita tahu sedikit tentang aspek-aspek dan teori-teori dari hubungan antara suku-bangsa dan golongan itu, agar kita bisa menganalisa dan ikut membina proses itu. Aspek yang harus kita perhatikan dalam hal menganalisa hubungan suku bangsa dan golongan, adalah:

- a. Sumber-sumber konflik;
- b. Potensi untuk toleransi;
- c. Sikap dan pandangan dari suku-bangsa atau golongan terhadap suku atau golongan
- d. Tingkat masyarakat dimana hubungan dan pergaulan antara bangsa atau golongan tadi berlangsung.

Sumber-sumber untuk konflik antara suku-suku bangsa atau golongan pada umumnya dalam negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ada paling sedikit lima macam yaitu:

- a. Konflik bisa terjadi kalau warga dari dua suku-bangsa masing-masing bersaing dalam hal mendapatkan lapangan mata pencaharian hidup yang sama.
- b. Konflik bisa juga terjadi, kalau warga dari satu suku-bangsa mencoba memaksakan unsur-unsur kebudayaannya kepada warga dari suatu suku-bangsa lain.

- c. Konflik yang sama dasarnya, tetapi lebih fanatik dalam wujudnya, bisa terjadi kalau warga dari satu suku-bangsa memaksakan konsep-konsep agamanya terhadap warga dari suku-bangsa lain yang berbeda agama.
- d. Konflik sering akan terjadi kalau satu suku-bangsa berusaha-mendominasi suatu suku-bangsa lain secara palitis.
- e. Potensi konflik terpendam adat dalam hubungan antar suku-bangsa yang telah bermusuhan secara adat.

(Prof. Dr. Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* Jakarta: Penerbit Jembatan, 1983, hal 378).

Potensi untuk bersatu atau paling sedikit untuk kerjasama tentu ada dalam tiap-tiap hubungan antara suku bangsa dan golongan. Potensi itu ada dua:

- a. Warga dari dua suku-bangsa yang berbeda dapat saling bekerjasama secara sosial-ekonomi, kalau mereka masing-masing bisa mendapatkan lapangan-lapangan mata pencaharian hidup yang berbeda dan yang saling lengkap-melengkapi. Dalam keadaan saling membutuhkan itu, akan berkembang suatu hubungan yang dalam ilmu antropologi sering disebut hubungan simbiotik. Dalam hal ini sikap para warga dari satu bangsa terhadap yang lain dijiwai oleh suasana toleransi
- b. Warga dari dua suku-bangsa yang berbeda dapat juga hidup berdampingan tanpa konflik, kalau ada orientasi ke arah suatu golongan ketiga yang dapat menetralisasi hubungan antara kedua suku-bangsa tadi. Di Indonesia contohnya adalah kecenderungan dari sementara orang dari golongan Tionghoa Peranakan dalam zaman kolonial, untuk mengorientasikan diri terhadap kebudayaan Belanda dengan mendidik anak-anak mereka di sekolah-sekolah Belanda dengan bicara bahasa Belanda dalam lingkungan keluarga mereka dan sebagainya. Sebaliknya dengan demikian mereka menjauhkan diri dari orang Indonesia asli.

Sikap dan pandangan dari suku-bangsa atau golongan terhadap sesama bangsa atau golongan secara lebih khusus dapat diperinci ke dalam sikap antara dua suku-bangsa yang sepadan, sikap dari suatu suku-bangsa dominan terhadap suatu suku-bangsa minoritas dan sebaliknya sikap dari suatu suku-bangsa minoritas terhadap suatu suku bangsa yang dominan.

Akhirnya tingkat masyarakat dimana hubungan antara suku-bangsa itu berlangsung, bisa di tingkat masyarakat pedesaan, tingkat masyarakat perkotaan atau di tingkat nasional.

Konflik antara suku-suku bangsa dan golongan yang beraneka warna, kalau meledak bisa mengganggu ketenangan yang kita butuhkan untuk membangun, tetapi seperti tersebut di atas aneka warna, suku-bangsa dan golongan itu, bisa juga menyebabkan hambatan terhadap pembangunan karena, kesukaran untuk menyusun suatu kebijaksanaan yang seragam, dan karena kesukaran untuk berkomunikasi dengan aneka warna rakyat yang mempunyai bahasa, sistem nilai budaya dan aspirasi yang berbeda-beda.

Memang sudah terang bahwa suatu negara besar yang beraneka warna itu jauh lebih sukar diurus daripada suatu negara yang kecil dan seragam, hal itu tidak ada yang akan menyangkal; tetapi toh suatu kenyataan adalah bahwa banyak orang yang berwenang menentukan kebijaksanaan dalam negara kita ini masih menggampangkan, bahkan menyangkal adanya masalah potensi, konflik karena hubungan antar suku-bangsa dan antar golongan dengan cara membiarkannya. Padahal masalah itu tidak akan hilang dengan sendirinya, kalau kita dengan berpolitik kurang atau mencoba mengingkarinya. Masalah itu hanya bisa kita hindari, justru kalau kita menerima aneka warna suku-bangsa dalam negara kita itu sebagai suatu faktat yang harus dipelajari secara mendalam. Hal itu agar suatu



pengertian serta toleransi sesamanya dan suatu kebutuhan untuk kerjasama dapat dikembangkan.

## 2. Mayoritas-Minoritas

Di Indonesia dapat dibedakan antara dua kategori masalah mayoritas-minoritas:

- a. Masalah mayoritas-minoritas yang menjadi ciri khas dari suatu negara sedang berkembang yaitu mayoritas masyarakat desa dan minoritas masyarakat kota, mayoritas masyarakat yang tidak terdidik dan minoritas masyarakat yang terdidik, mayoritas masyarakat yang miskin dan minoritas masyarakat yang kaya.
- b. Masalah mayoritas-minoritas yang erat hubungannya dengan komposisi penduduk, yaitu dalam sifat majemuknya masyarakat. Ini disebabkan oleh keanekaan jenis etnis (terdapat kurang lebih 300 kelompok etnis di Indonesia) dan oleh keanekaan keagamaan (ada 5 agama yang telah resmi diakui: Islam, Protestan, Katholik, Budha dan Hindu).

Ada perbedaan yang pokok diantara kedua kategori ini. Kategori pertama lebih fleksibel sifatnya, ada kemungkinan berpindah kelompok dari satu kelompok ke kelompok lain, dari desa ke kota, dari kelompok yang tidak terdidik ke kelompok yang terdidik bahkan dari miskin ke kaya. Kategori kedua lebih kaku sifatnya: Seseorang yang dilahirkan sebagai anggota kelompok etnis tertentu, sering sangat sukar untuk tidak mengatakan mustahil berpindah ke kelompok lain dan sungguh-sungguh diterima di dalam kelompok yang baru.

Di sini perlu diadakan perbedaan lagi di antara kategori-kategori masalah mayoritas-minoritas. Dalam kategori pertama, ketidak samarataan bermula dari kenyataan bahwa golongan minoritas yang hidup di daerah-daerah perkotaan, yang berpendidikan dan yang mampu mempunyai segala keuntungan dan oleh sebab itu berada dalam kedudukan untuk menguasai distribusi dan alokasi

sumber-sumber yang terdapat di dalam masyarakat. Di dalam kategori kedua ketidak samarataan bermula dari kenyataan bahwa, anggota-anggota kelompok etnis dan kelompok keagamaan tertentu lebih dapat berkembang dari kelompok lainnya, karena lebih dinamis, lebih kreatif dan lebih panjang akal.

Kedua kategori dari masalah ini mempunyai kaitan yang erat. Pertikaian dalam satu situasi akan menjadi sumber pertikaian dalam situasi lain, karena di dalam masyarakat majemuk terdapat kecenderungan bahwa kelompok etnis tertentu diidentifikasi dengan kelompok yang makmur, kelompok kota atau kelompok yang ekonominya kuat, dan dengan demikian dengan kelompok yang kaya. (Mely G. Tan, Masalah Mayoritas-Minoritas di Indonesia Prisma no 8 Agustus 1976, hal 24)

Menurut Sudomo, Laksamana TNI, dahulu sebagai Kepala Staf Kopkamtib (sekarang Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia) kesetiaan kepada suku adalah wajar sebagai suatu produk sejarah, yang sesungguhnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari kesetiaan kepada keluarga, berdasarkan hubungan-hubungan kekerabatan atau hubungan geneologis serta sikap-sikap efektif seperti, kecintaan dan kesayangan dan ini group feeling. Sejak kita memproklamasikan kemerdekaan dengan sengaja dan secara sistematis, kita menumbuhkan dan mengembangkan kesetiaan nasional, yang harus melandasi kehidupan kebangsaan kita. Dalam rangka nation building Indonesia itu, kita tetap mengakui eksistensi kehidupan kesukuan dan golongan. Lambang negara kita menunjukkan adanya kebhinekaan akan tetapi juga melukiskan keikaan. Karena kemajuan teknologi komunikasi, semakin pesatnya pendidikan dan komunikasi massa dan semakin meluasnya kehidupan perkotaan, perasaan sebagai warga bangsa akan lebih kuat daripada perasaan sebagai warga suku bangsa. Kesetiaan ke pada bangsa akan lebih kuat, apabila bangsa Indonesia

dihadapkan dalam hubungan kompetitif ataupun konflik dengan bangsa lain. Demokrasi Pancasila yang hendak kita kembangkan adalah demokrasi yang memberikan tempat yang pantas dan layak kepada suku bangsa maupun golongan minoritas. Kita tidak membenarkan adanya dominasi mayoritas, akan tetapi sebaliknya kita juga tidak menginginkan dominasi minoritas Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dapat digunakan sebagai sumber normatif dari mana kita menjabarkan konsepsi-konsepsi tersebut di atas.

Yang menjadi masalah mayoritas-minoritas di Indonesia, salah satu yang paling menyolok ialah masalah yang ditimbulkan oleh adanya minoritas etnis Tionghoa. Namun ini juga hanyalah salah satu masalah mayoritas-minoritas yang terdapat di Indonesia. Penggolongan yang dibuat pemerintah kolonial dulu yaitu:

- a. Golongan Eropa.
- b. Golongan Timur Asing.
- c. Golongan Pribumi.

Pada saat sekarang ini secara formil sudah tidak ada lagi, namun esensinya masih tetap berjalan sampai sekarang, malah makin bertambah banyak. Misalnya saja kini dikenal golongan kaya dan miskin, penguasa dan rakyat. Memang ada kaitannya antara penggolongan yang dibuat Belanda, dulu dengan sikap masyarakat keturunan Cina sekarang umpamanya saja, kelihatan dalam gejala penggantian nama; mereka akan mengambil nama-nama aristokrat. Begitu juga dalam memilih agama. Pasti agama Kristen atau Katolik jadi yang dipilihannya. Bukan Islam yang dianut sebagian besar pribumi. Karena di zaman kolonial dulu, Kristen dan Katolik identik dengan bangsa Eropa, sedangkan Islam identik dengan inlander atau pribumi. Masyarakat keturunan Cina memang sulit untuk mengintegrasikan diri. Ini disebabkan karena latar belakang kultural mereka. Misalnya saja dalam hukum Cina dikenal: walaupun hanya ada beberapa tetes darah Cina, mereka

tetap diakui sebagai salah seorang warganya. Dulu di Indonesia wujud dari hukum itu dikenal dalam kenyataan dwi-kewarganegaraan. Lain daripada bangsa Arab. Masyarakat ini lebih cepat dapat berintegrasi dengan pribumi. Nama-nama Arab bisa diterima dalam lingkungan kebudayaan mereka. Malah lebih jauh lagi, kebudayaan Arab telah banyak mempengaruhi kebudayaan kita. Hal ini, karena ada persamaan agama, yakni agama Islam. Dan kebetulan agama ini lahir di Arab, dan banyak mempergunakan bahasa itu dalam upacara keagamaan. (Moh. Said Reksohadipudjo, Ketua Taman Siswa Jakarta. Pertahanan Keaneka Ragaman Kebudayaan, Prisma no 8. Agustus 1976, hal 56).

### 3. **Ketimpangan Perkembangan Kebudayaan**

Integrasi nasional merupakan suatu masalah yang transkultural. Ia selalu hadir baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, persoalannya merupakan suatu tantangan zaman yang harus diperjuangkan dan di tangani oleh setiap negara dan setiap warganya. Sebab-sebab keberadaannya adalah akibat proses perkembangan masyarakat sendiri yang pada dasarnya tidak pernah serasi.

Proses integrasi adalah proses peleburan dan menggabungkan semua jala sistem-sistem sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat hingga terwujudnya suatu sistem sebagai identitas dan pola orientasi bersama (Oleh J. Goring, Ambivalensi agama, antara Dominan dan Toleransi, Prisma no 8 Agustus 1976, Jakarta, LP3ES, 1976).

Syarat dasar untuk membentuk suatu integrasi yang harmonis bertitik tolak pada konsep keseimbangan, yaitu keseimbangan antara perkembangan kebudayaan fisik dan non fisik. Ketidakseimbangan jalannya perkembangan antara keduanya, maka akan terjadi masalah dua pembenturan nilai-nilai yang berbeda-beda dalam masyarakat. Bertambah majemuk masyarakat suatu negara

bertambah banyak pula titik-titik pergesekan sosialnya. Masyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk dengan permintaan yang majemuk pula. Soal Integrasi adalah soal manusia, manusia dan weltanschauung nya, pandangan dan hubungannya terhadap sesamanya.

Syarat utama dari integrasi nasional ialah adanya empati pada diri seseorang yaitu kesanggupannya untuk menempatkan diri pada keadaan orang lain karena atas dasar yang bersifat kemanusiaan atau human inilah akan tumbuh rasa kesatuan, tercipta suasana saling harga-menghargai dan hormat-menghormati integritas masing-masing.

Proses ini erat sekali hubungannya dengan struktur dan pertumbuhan kesadaran pada diri seseorang; satu proses transformasi dari kesadaran subjektif ke yang objektif. Individu hanya akan merubah pandangannya semula jika ia mengetahui mengapa ia harus merubahnya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Setiap suku bangsa di seluruh pelosok dunia tanpa pengecualian mengenal dan mempunyai tanda batas, sebagai identitas atau sebagai simbol seuerenitas diri. Dan kesadaran kolektif, yaitu sesuatu yang datang dari dalam hanya bisa dihayati oleh anggota-anggota kelompok tersebut, kesadaran kolektif inilah kemudian membentuk tapal batas antara we-group dan they-group. Proses integrasi sering tertumbuk pada "tapal batas" nilai-nilai berbagai kelompok yang selalu memandang nilainya sebagai yang terbaik satu-satunya yang benar. Kita telah mengalami berbagai kegoncangan dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh DI TII, PRRI, RMS, G30S. Peristiwa-peristiwa tersebut sedikit banyaknya bersangkut-paut dengan masalah *group mind* seperti disebut di atas. Permasalahan integrasi menyangkut masalah ketimpangan perkembangan kebudayaan tersebut di atas.

#### 4. Prospek Integrasi Nasional

- a. Masalah integrasi nasional yang penting-penting bukanlah masalah pengintegrasian keturunan asing, melainkan masalah pengintegrasian sekalian penduduk pribumi menjadi anggota-anggota nasion Indonesia sebelum timbul kaum cendikiawan yang bisa mengarahkan anggota nasion lama asal mereka masing-masing, memisahkan diri sebagai negara tersendiri di daerah tempat asal mereka, seperti orang Ibo di Nigeria, kaum pemberontak Moro di Pilipina, orang-orang Irlandia di Inggris,
- b. Asas “tunggal ika” harus diberi perhatian yang utama. Kenyataan yang dicakup oleh asas “tunggal ika”, ini harus sungguh-sungguh diketahui dan dimengerti agar dapat dikembangkan lebih lanjut, sehingga kenyataan-kenyataan yang dicakup oleh asas “tunggal ika” ini selalu lebih kuat daripada dicakup oleh asas “bhineka”. Nasion Indonesia harus selalu merupakan kesatuan solidaritas yang lebih kuat, lebih agung, lebih mulia, dari nasion lama manapun. Masyarakat Indonesia akan terintegrasi dan jaya bilamana masyarakat ini sungguh-sungguh merupakan masyarakat bhineka tunggal ika.
- c. Wawasan Nusantara adalah sasaran yang baik dalam rangka melaksanakan usaha integrasi nasional. Integrasi nasional dan pembinaan kesatuan bangsa dapat terlaksana dalam rangka Bhineka Tunggal Ika, berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan peningkatan pendidikan rakyat, pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan, pemerintah yang kuat dan bijaksana.
- d. Adanya lima agama memang harus kita terima suatu fakta yang nyata dalam masyarakat, yang tidak mungkin dapat kita abaikan. Oleh karena itu kebijaksanaan dalam hal ini tidak lain hanyalah menghilangkan rasa “curiga” dan pandangan stereotip negatif terhadap agama lain, dengan mencoba mencapai pengertian tentang agama

lain atau paling sedikit mengambil suatu sikap toleransi terhadap agama lain dan tidak berusaha melaksanakan agama kepada orang Indonesia lain yang kebetulan memeluk agama lain. Stereotip negatif artinya pandangan-pandangan tidak wajar.

- e. Masalah integrasi nasional mengenai keturunan Cina memerlukan kebijaksanaan yang agak berbeda. Kebijakan yang sebaiknya ialah untuk tidak mendorong berkembangnya suatu kebudayaan suku, Cina di Indonesia, karena kebudayaannya mempunyai induk kebudayaan di luar negara kita, dengan konsekwensi-konsekwensi politis dan ekonomis yang akan merugikan kesatuan nasional kita. Itulah kebijakan yang diambil dalam masalah integrasi nasional ini adalah agaknya mengintensifkan usaha asimilasi atau percampuran perkawinan, sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah pribumi. Namun harus dibedakan antara beberapa pengertian asimilasi kulturil dan amalgamasi. Dalam asimilasi secara kulturil lebih kelihatan saling pengertian, pemahaman sikap satu sama lain, sedangkan dalam asimilasi amalgamasi hanya kelihatan pendekatan secara fisik. Akan tetapi yang jauh lebih menentukan adalah asimilasi secara kulturil. Tanpa itu usaha-usaha lain akan sia-sia belaka.
- f. Terjadinya kericuhan atau bentrokan dan lain-lain dalam masyarakat oleh karena kekuatan pemikiran individuil tidak sama. Oleh karena itu sangat penting agar di dalam masyarakat di dorong usaha untuk membangkitkan kekuatan pemikiran individual. Demi kelancaran sistem Demokrasi Pancasila, diperlukan supaya perbedaan di dalam kemampuan berpikir di antara warga negara itu tidak terlalu besar.
- g. Selanjutnya dapat dikatakan pemecahan integrasi nasional harus didekati secara bulat dan utuh, dan tergantung pada kebijaksanaan yang diambil pemerintah. Selain itu harus dibarengi dengan tekad

politik dari semua pihak. Tanpa itu integrasi nasional baru pada tahap hiasan bibir. Maka penghayatan akan arti Pancasila dalam kehidupan kebangsaan kita yang merupakan filsafat persatuan memang harus diedukasikan, disosialisasikan dan dibudayakan dalam masyarakat kita secara sistematis melalui lembaga-lembaga pendidikan dan sarana-sarana media komunikasi yang lain. Dengan penghayatan semacam itu kita hanya mengenal satu politik tentang kewarganegaraan Indonesia secara prinsipil. Kita hanya mengenal warga negara Indonesia dan warga negara asing. Ini adalah aspek politik dan aspek hukumnya. Akan tetapi tujuan kita adalah mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pulalah tujuan kemerdekaan kita sebagai bagian integral daripada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

- h. Pada dasarnya revolusi Indonesia menonjolkan kemenangan ide “sentralisme uniter” dan bukan integrasi communiter. Hal ini terbukti ketika kita memilih bentuk Negara Kesatuan. Dan setiap usaha untuk membawa negara kepada bentuk lain, misalnya federalisme dianggap sebagai penyimpangan malah pengkhianatan. Dan kita lihat pula timbal simbul negara “Bhineka Tunggal Ika” memang betul bahwa dalam masyarakat yang multi etnis seperti di Indonesia di mana kehidupan masih berdasarkan suku-suku dan clan-clan sumber konflik memang cukup potensial namun demikian disamping terdapat benih-benih konflik tersebut, juga ada benih-benih pertemuan: Kita lihat sekarang seringkali terjadi perkawinan antar suku dan terutama dikalangan pemuda berjalan cukup lancar. Dan yang tidak senang, biasanya memang dari golongan tua. (Daoed Joesoep, Ketua Dewan Redaktur CSIS, Sentralisme Uniter, Prisma no 8, Agustus 1976, hal 48)
- i. Kebudayaan-kebudayaan daerah dan kebudayaan-kebudayaan peranakan seperti juga kebudayaan yang



berakar pada agama-agama besar yang dianut oleh penduduk di kepulauan Indonesia perlu dikembangkan, agar supaya sumber-sumber unsur-unsur kebudayaan untuk pengembangan kebudayaan nasional Indonesia dan oleh sebab itu kekuatan nasion Indonesia dapat terus-menerus diperkaya.

- j. Sudah waktunya untuk mendefinisi kebudayaan nasional yang kita miliki. Dengan adanya upaya ini, usaha untuk memantapkan pengertian dasar kebudayaan nasional menjadi jelas. Dengan demikian jelas pula kedudukan dan fungsi budaya daerah, serta budaya-budaya asing yang masuk ke tengah-tengah masyarakat, bersama derasnya arus perkembangan sains dan teknologi.

Untuk melakukan hal ini, idealnya sebaiknya kebudayaan daerah dibiarkan tumbuh dan diberi api dalam identitasnya sendiri sehingga kebudayaan daerah mempunyai kedudukan yang kuat. Munculnya kebudayaan daerah yang kuat, tak perlu menimbulkan rasa cemas, akan timbulnya dominasi yang merugikan perkembangan kebudayaan nasional dan yang mengancam integrasi nasional justru dengan membiarkan kebudayaan daerah melebarkan sayapnya dengan coraknya yang tersendiri, hal ini akan merupakan sumbangan bagi terbentuknya kebudayaan nasional yang standar. Menurut H.B Jassin, sejalan dengan semangat Bhineka Tunggal Ika, maka kebudayaan daerah harus dikembangkan. Sebab jika tidak, hal itu justru bertentangan dengan semangat kebhinekaan itu sendiri.

Sementara itu Muchtar Lubis beranggapan bahwa untuk melakukan definisi ulang atas kebudayaan nasional, diperlukan suatu sikap berani untuk membongkar khasanah kebudayaan kita. Baginya, langkah pertama untuk membangun kebudayaan nasional kita, diperlukan suatu sikap yang demokratis, dan terbuka. Dan kita harus berani melihat unsur-unsur kebudayaan mana yang menghambat

dan mana yang mendukung kearah terciptanya suatu kebudayaan nasional yang kokoh. Tolak ukur yang dipakai untuk melakukan verifikasi kebudayaan itu, haruslah bersumber dari Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian, mencari kebudayaan daerah ke dalam kebudayaan nasional haruslah dibiarkan berjalan secara alami. Terlebih jika dilihat dari dimensi kesadaran dan wawasan kebudayaan masyarakat yang semakin hari semakin terbuka. Dengan kata lain, pemaksaan kebudayaan dalam bentuk apapun harus dihindari.

Tampaknya konsep kebudayaan Ki Hajar Dewantoro akan tetap dianut. Hingga kini masih terdapat kecenderungan banyak tokoh budayawan kita untuk mengikuti konsep kebudayaan nasional merupakan puncak-puncak kebudayaan daerah, antara lain Prof. Dr. Koentjaraningrat dalam ceramahnya di hadapan mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Udayana, Bali (Majalah Panji Masyarakat no 461, Tahun XXVI, 11 Maret 1985). Menurut beliau kebudayaan nasional kita telah mampu berperan sebagai penguat solidaritas dan identitas nasional. Selanjutnya dikatakan, bahwa kita belum menangani secara serius politik kebudayaan nasional kita. Misalnya, seringnya kita membangga-banggakan warisan nenek moyang, daripada menghasilkan karya-karya kebudayaan yang besar yang memungkinkan kita untuk mendapatkan hadiah nobel.

Masalah pengintegrasian orang-orang keturunan asing, baik peranakan maupun totok, pada hakekatnya agak berbeda daripada masalah pengintegrasian orang-orang pribumi. Pertama, golongan keturunan asing tidak mempunyai wilayah tersendiri di kepulauan Indonesia sehingga, berlainan dan pada masyarakat-masyarakat daerah, nasion-nasion lama pribumi tidak merupakan ancaman yang melihat kemungkinan pemisahan diri sebagai negara tersendiri. Sebaliknya karena keturunan asing juga mempunyai nenek moyang di luar wilayah

Republik Indonesia, dalam keadaan-keadaan tertentu mereka bisa dianggap sebagai orang asing yang sebenarnya berkediaman di daerah luar Indonesia, di daerah keluarga asing mereka masing-masing. Dalam keadaan-keadaan yang gawat, malah kadang-kadang hak mereka untuk berdiam di Indonesia tidak diakui sehingga mereka terpaksa meninggalkan tempat kediaman mereka di Indonesia untuk pindah ke daerah kediaman baru yang sebenarnya asing bagi mereka. Kedua, pada umumnya masalah pengintegrasian orang-orang keturunan asing tidak terwujud sebagai tak adanya keinginan untuk menjadi bagian dan nasion Indonesia, melainkan terwujud sebagai penolakan oleh orang-orang yang merupakan anggota-anggota nasion Indonesia untuk menjadikan orang-orang keturunan asing bagian dari kesatuan solidaritas besar mereka. Bagi orang-orang keturunan asing termasuk golongan peranakan, sering masih sukar untuk sungguh-sungguh menjadi anggota kelompok-kelompok pribumi yang bersama-sama merupakan perwujudan nasion Indonesia.

## BAB IV MASYARAKAT KOTA DAN DESA

### A. PENDAHULUAN

Berdasarkan komunitasnya, masyarakat dapat dibagi atas masyarakat kota dan masyarakat desa. Perbedaan keduanya bukan berdasarkan atas perbedaan tradisional dan modern, karena pada dasarnya, masyarakat desa sudah dipengaruhi kota. Jadi perbedaannya hanya bersifat relatif saja.

Baik masyarakat kota maupun masyarakat desa yang mempunyai tempat tinggal yang tetap, mempunyai ikatan solidaritas ( kesetiakawanan ) yang kuat, sebagai pengaruh kesatuan tempat tinggalnya.

Walaupun sekarang sudah maju baik dalam transportasi maupun komunikasi sedikit banyaknya dapat menggoyahkan ikatan tempat tinggal, akan tetapi masyarakat pedesaan tetap mempertahankan tradisinya, karena kuatnya hubungan manusia dengan tanahnya, karena tanah memberikan kehidupan padanya. Di samping itu pula adanya peranan saling memerlukan, seperasaan, ini merupakan identitas mereka.

Masyarakat kota karena terdiri dari orang-orang dari segala daerah, segala suku bangsa, berbeda agama, berbeda temperamenya dan sebagainya, maka ikatan sesama anggota masyarakat kurang akrab, sifatnya individual, sangat rasional, cenderung kearah kehidupan keduniawian.

Sebagian besar penduduk Indonesia berada di pedesaan dengan segala kehidupannya yang sangat tergantung pada pertanian, selalu diliputi suasana kegotong royongan, akrab, saling tolong menolong, taat kepada agama dan sebagian besar hidupnya sederhana.

Karena di kota tempat berkumpulnya dari segala suku dan bangsa maka corak kehidupan di kota sangat berbeda sekali jika dibandingkan dengan kehidupan di desa. Orang

kota kurang akrab, cenderung mengabaikan agama. Tetapi karena di kota serba ada, gemerlapan. Apalagi di kota-kota besar, ini merupakan daya penarik dan penyedot orang di desa untuk pergi ke kota, bahkan menetap di kota, meninggalkan desanya. Ini disebut urbanisasi.

Urbanisasi menimbulkan masalah di kota, seperti terjadinya pengangguran, kriminalitas, kenakalan anak-anak dan lain sebagainya. Pemerintah telah berusaha untuk mencegah arus urbanisasi ini, dengan cara transmigrasi, memberi kredit modal kepada petani, mendirikan sekolah-sekolah dan pusat kesehatan masyarakat, memberikan penyuluhan pertanian, mendirikan koperasi dan lain sebagainya usaha pemerintah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai negara yang sedang berkembang maka masyarakat Indonesia berada dalam keadaan sedang mengalami perubahan-perubahan, dari masyarakat sederhana, tradisional menuju kearah masyarakat yang kompleks modern. Jadi masyarakat Indonesia sedang dalam proses modernisasi, yang mana keadaan ini sangat mempengaruhi, menggoncangkan bahkan menggoyahkan nilai-nilai yang telah berurat berakar, bahkan telah mendarah daging dengan masyarakatnya. Maka itu masyarakat Indonesia saat sekarang ini berada dalam proses modernisasi, di mana terjadi pula perubahan-perubahan serta pergeseran-pergeseran nilai, yang akibatnya menimbulkan bermacam-macam masalah lagi, antara lain; disorganisasi, miskonsepsi, mispersepsi, generation gap.

#### **1. Tujuan Instruksional Umum**

Dengan mempelajari modul ini anda diharapkan dapat mengetahui masyarakat Indonesia baik yang berada di kota maupun di desa sedang dalam proses urbanisasi.

## 2. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mempelajari modul ini, anda diharapkan dapat :

- a. Menjelaskan faktor apa yang membedakan masyarakat kota dengan masyarakat desa;
- b. Menjelaskan ciri-ciri masyarakat kota dan masyarakat desa;
- c. Menjelaskan perbedaan perkembangan kota dengan desa;
- d. Merumuskan arti urbanisasi;
- e. Menjelaskan sebab-sebab terjadinya urbanisasi;
- f. Menjelaskan arti *community sentiment*;
- g. Membedakan *gemeinschaft* dengan *gesselschaft*;
- h. Menjelaskan arti *deviation* dan *konformit*;
- i. Menjelaskan cara terbentuknya desa;
- j. Menjelaskan akibat - akibat urbanisasi;
- k. Menjelaskan hubungan antara masyarakat, kebudayaan dan nilai
- l. Menjelaskan arti perubahan sosial;
- m. Menjelaskan arti dan macam-macam nilai
- n. Menjelaskan penyebab terjadinya perubahan dan pergeseran nilai;
- o. Menyebutkan ciri-ciri manusia modern; dan
- p. Menjelaskan arit " *cultural lag*".

## B. MASYARAKAT DESA DAN KOTA

Di dalam menelaah masyarakat, akan banyak berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial, baik yang kecil seperti misalnya kelompok keluarga, kelompok siswa-siswa disekolah, ataupun kelompok-kelompok yang besar seperti umpamanya masyarakat desa, masyarakat kota, bangsa dan lain-lain. Hampir semua manusia, pada awalnya merupakan anggota kelompok sosial yang dinamakan keluarga. Di dalam kehidupan berkelompok terbentuk kepribadian orang yang menjadi anggota kelompok. Oleh karena itu suatu kelompok sosial tidak merupakan kelompok yang statis, akan tetapi justru berkembang serta mengalami

perubahan-perubahan baik dalam aktivitas maupun bentuknya.

Berdasarkan kriteria kepentingan dan wilayah ( lokalitas) yang tertentu kelompok sosial dapat dibagi atas dua kelompok sosial, yaitu masyarakat kota, sering dipakai istilah urban community dan masyarakat desa atau rural community.

### 1. Masyarakat Setempat (Community)

Istilah community dapat diterjemahkan dengan " masyarakat setempat", (Soerjono Soekanto) tetapi Koentjaraningrat menyebutkan komunitas saja. Menurut istilah ini yang dimaksud dengan komunitas adalah sebagai suatu kesatuan hidup manusia, yang menempati suatu wilayah yang nyata, dan yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat, serta terikat oleh suatu rasa identitas komunitas.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa masyarakat setempat (community) menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu, dimana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota-anggotanya, dibandingkan dengan interaksi mereka dengan penduduk diluar batas wilayahnya ( Selo Soemardjan, *Social Changes in Yogyakarta*, New York, Cornell University Press, Ithaca, 1962 halaman XX ).

Menurut R.M. Mac Iver and Charles H. Page; masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Dasar-dasar daripada masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan semasyarakat setempat. ( Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1970 halaman 102 )

Suatu masyarakat setempat pasti mempunyai lokalitas atau tempat tinggal ( wilayah ) tertentu. Walaupun sekelompok manusia merupakan masyarakat pengembara akan tetapi pada saat-saat tertentu anggota-anggotanya

pasti berkumpul pada suatu tempat tertentu, misalnya kita mengadakan upacara tradisional.

Masyarakat-masyarakat setempat yang mempunyai tempat tinggal tetap dan permanen, biasanya mempunyai ikatan solidaritas yang kuat sebagai pengaruh kesatuan tempat tinggalnya. Memang dalam masyarakat-masyarakat modern, karena perkembangan teknologi alat-alat perhubungan, ikatan pada tempat tinggal agak berkurang, akan tetapi sebaliknya hal itu bahkan memperluas wilayah masyarakat setempat yang bersangkutan. Secara garis besar masyarakat-masyarakat setempat berfungsi sebagai ukuran untuk menggaris bawahi hubungan antara hubungan-hubungan sosial dengan suatu wilayah geografis tertentu. Sebagai suatu contoh, betapapun kuatnya pengaruh luar, misalnya dalam bidang pertanian mengenai soal cara-cara penanaman bibit yang lebih efisien, penggunaan pupuk dan sebagainya, akan tetapi masyarakat suatu desa masih tetap mempertahankan tradisinya, yaitu adanya hubungan yang erat dengan tanahnya, oleh karena tanah itulah yang memberikan kehidupan kepadanya, akan tetapi tempat tinggal tertentu saja, walaupun merupakan suatu dasar pokok, tidak cukup untuk membentuk masyarakat setempat. Di samping itu harus ada suatu perasaan diantara anggota-anggotanya bahwa mereka saling memerlukan dan bahwa tanah yang mereka tinggali memberikan kehidupan kepada mereka semuanya. Perasaan demikian yang pada hakikatnya merupakan identifikasi dengan tempat tinggal, dinamakan *community sentiment*. Unsur-unsur *community sentiment* adalah :

- a. Seperasaan; unsur seperasaan akibat bahwa seseorang berusaha untuk mengidentifikasi dirinya dengan sebanyak mungkin orang dalam kelompok tersebut, sehingga kesemuanya dapat menyebutkan dirinya sebagai "kelompok kita" dan lain sebagainya. Pada unsur seperasaan, kepentingan-kepentingan individu diselaraskan dengan kepentingan-kepentingan



kelompoknya, sehingga dia merasakan kelompoknya sebagai darah dagingnya sendiri.

- b. Sepenanggungan; setiap individu sadar akan peranannya dalam kelompok dan keadaan masyarakat sendiri memungkinkan bahwa peranannya tadi dijalankan, sehingga dia mempunyai kedudukan yang pasti dalam struktur sosial masyarakat.
- c. Saling memerlukan; individu yang tergabung dalam masyarakat setempat merasakan dirinya tergantung pada "community"-nya yang meliputi kebutuhan fisik maupun kebutuhan-kebutuhan psikologinya. Kelompok yang tergabung dalam masyarakat setempat tadi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik seseorang; misalnya atas makanan dan perumahan. Secara psikologis, individu akan mencari perlindungan pada kelompoknya apabila dia berada dalam ketakutan dan lain sebagainya.

Perwujudan yang nyata dari perasaan individu terhadap kelompoknya, yaitu masyarakat setempat adalah pelbagai kebiasaan masyarakat seperti perilaku-perilaku tertentu yang secara khas merupakan ciri masyarakat itu. Suatu contoh yang mungkin dapat memberikan penjelasan yang lebih terang adalah aneka macam logat bahasa masing-masing masyarakat setempat itu.

Melalui logat bahasa yang khas, kita dapat mengetahui dari mana seseorang itu berasal. Walaupun perkembangan komunikasi agak mengurangi fungsi ciri itu, akan tetapi setiap masyarakat setempat, baik yang berupa desa maupun kota, pasti mempunyai logat bahasa sendiri. Kecuali daripada itu, masing-masing masyarakat setempat mempunyai juga cerita-cerita rakyat masing-masing yang mempunyai variasi tersendiri. Orang-orang Lampung percaya bahwa nenek moyang mereka berasal dari Segalaberah dan bernama Raja Lampung; akan tetapi masyarakat-masyarakat setempat mempunyai versi tersendiri mengenai sejarah nenek moyangnya. Demikian

pula misalnya cerita Nyai Loro Kidul mempunyai bermacam-macam versi sesuai dengan daerah di mana cerita tadi berkembang.

Dalam masyarakat-masyarakat modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan ( rural community ) dengan masyarakat perkotaan ( urban community ). Perbedaan tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan pengertian masyarakat sederhana dan masyarakat modern. Karena dalam masyarakat modern sekarang ini, betapapun kecilnya suatu desa, pasti ada pengaruh-pengaruh dari kota. Sebaliknya pada masyarakat-masyarakat sederhana ( tradisional ) pengaruh dari kota relatif tidak ada. Perbedaan antara masyarakat-masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan pada hakekatnya hanya bersifat graduil relatif saja. Agak sulit untuk memberikan batasan apa yang dimaksud dengan perkotaan, oleh karena adanya hubungan antara konsentrasi penduduk dengan gejala-gejala sosial yang dinamakan urbanisme, yaitu orang desa yang bergaya hidup seperti orang kota, karena orang ini pernah ke kota dan tinggal di kota, kemudian sekali-sekali pulang ke desa, beberapa unsur kehidupan di kota dibawanya serta, sehingga ada pula rekan-rekannya warga desa yang meniru gaya kehidupan orang di kota. Ada yang berpendapat bahwa semua tempat dengan kepadatan penduduk yang tinggi, merupakan masyarakat perkotaan. Hal itu kurang benar, karena banyak pula daerah yang berpenduduk padat, tak dapat digolongkan dalam masyarakat perkotaan.

## 2. Masyarakat Perkotaan ( Urban community )

Tekanan pengertian “kota”, terletak pada sifat sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan, bukan ditentukan oleh jumlah penduduknya.

Antara warga masyarakat pedesaan dan masyarakatnya perkotaan, juga terdapat perbedaan dalam perhatian, khususnya terhadap keperluan-keperluan hidup. Di desa-desa, yang diutamakan adalah perhatian khusus terhadap keperluan utama daripada kehidupan, hubungan-hubungan untuk mempertahankan hidupnya, makanan dan selanjutnya, orang-orang desa lebih memperhatikan fungsi pakaian, makanan, rumah dan sebagainya. Lain dengan orang kota yang mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda. Orang-orang kota dalam memandang kebutuhan hidupnya, bukan dari segi fungsinya tetapi untuk kebutuhan sehubungan dengan pandangan masyarakat sekitarnya ( status sosial ). Kalau menghidangkan makanan misalnya, yang diutamakan bahwa dengan menghidangkan makanan itu, (makanan, minuman dalam kaleng) dapat memberikan kesan bahwa yang menghidangkannya mempunyai kedudukan sosial tinggi. Pada orang-orang desa, hal itu tidak diperdulikan; mereka masak makanan sendiri tanpa memperdulikan apakah tamu-tamunya suka atau tidak. Pada orang kota, makanan yang dihidangkan harus kelihatan mewah dan tempat menghidangkannya juga harus mewah dan terhormat. Dapat dikatakan terlihat perbedaan penilaian; orang desa menilai makanan sebagai suatu alat untuk memenuhi kebutuhan biologis, sedangkan pada orang-orang kota, sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial ( gensi, prestise, martabat ).

Begitu pula soal pakaian; bagi orang-orang desa, bentuk dan warna pakaian tidak menjadi soal, karena yang terpenting adalah bahwa pakaian tersebut dapat melindungi dirinya terhadap panas dan dingin. Bagi orang-orang kota, nilai pakaian adalah alat kebutuhan sosial; mahalnnya bahan pakaian yang dipakai merupakan perwujudan dari kedudukan sosial pemakai.

Ciri-ciri yang menonjol pada masyarakat kota, yaitu:

- a. Kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan agama di desa. Hal ini disebabkan

adanya cara berpikir yang rational, yang didasarkan pada perhitungan eksak yang berhubungan dengan realita masyarakat. Memang di kota-kota orang-orang juga beragama, akan tetapi pada umumnya pusat kegiatan hanya tampak di tempat-tempat beribadat seperti misalnya, masjid, gereja dan sebagainya. Di luar itu, kehidupan masyarakat berada dalam lingkungan ekonomi, perdagangan dan sebagainya. Cara kehidupan demikian mempunyai arah keduniawian ( secular trend ), dibandingkan dengan kehidupan warga desa yang cenderung ke arah agama ( Religius trend ).

- b. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Yang penting di sini adalah manusia perseorangan atau individu. Di desa orang lebih mementingkan kelompok atau keluarganya. Di kota-kota kehidupan keluarga sering sukar untuk disatukan, karena perbedaan kepentingan, perbedaan faham politik, perbedaan agama dan sebagainya. " Di kota-kota para individu kurang berani untuk seorang diri menghadapi orang-orang lain dengan latar belakang yang berbeda, pendidikan yang tak sama, kepentingan yang berbeda dan lain-lain. Nyata bahwa kebiasaan yang diberikan kepada individu, tak dapat memberikan kebebasan yang sebenarnya kepada yang bersangkutan.
- c. Pembagaian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata, Di kota-kota, tinggal orang-orang dengan aneka warna latar belakang sosial dan pendidikan yang menyebabkan individu mendalami suatu bidang kehidupan khusus yang menyebabkan suatu gejala bahwa warga kota tak mungkin hidup sendirian secara individualitas.
- d. Kemungkinan-kemungkinan mendapatkan pekerjaan, juga lebih banyak diperoleh warga kota daripada warga desa, karena adanya sistem pembagian kerja yang tegas tersebut diatas.

- e. Pada umumnya masyarakat perkotaan, jalan pikirannya rasional, menyebabkan bahwa interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor pribadi.
- f. Jalan kehidupan yang cepat di kota-kota mengakibatkan pentingnya faktor waktu bagi warga kota, sehingga pembagian waktu yang sangat teliti sangat penting untuk dapat mengejar kebutuhan-kebutuhan seorang individu.
- g. Perubahan-perubahan sosial tampak nyata di kota-kota, karena kota-kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh dari luar. Hal ini sering menimbulkan pertentangan antara golongan tua dengan golongan muda. Oleh karena golongan muda yang belum sepenuhnya terwujud kepribadiannya, lebih sering mengikuti pola-pola baru dalam kehidupan.
- h. Sistem keluarga di masyarakat perkotaan adalah berbeda. Kota-kota besar adalah kelanjutan pola budaya global. Dari pola budaya global itu yang menjangkau Indonesia sudah tentu ialah pola hidup kota-kota besar pula yang biasa disebut pola budaya modern. Di kota-kota besar seorang anak tidak lagi mengenal betul siapa nenek, kakek, paman, bibi, kemenakan dan kerabatnya yang lain.
- i. Orang-orang kota tentu saja tidak semuanya mengalami apa yang disebut kompartementalisasi jiwa. Mereka mengenal dua lingkungan dengan masing-masing nilai yang berlainan: lingkungan kerja dengan nilai-nilai informasi. Sebagai penganut nilai formal di tempat kerja (diharapkan) orang menjadi serius, praktis, dingin, efektif dan impersonal kepada orang-orang sekelilingnya. Dan sebagai pengamal nilai-nilai informal, di rumah (jika diharapkan) orang menjadi hangat, responsif dan berperasaan kepada orang-orang sekelilingnya yaitu istri dan anak-anak.

### 3. Masyarakat Pedesaan ( Rural Community )

Warga-warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam daripada hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya, di luar batas-batas wilayahnya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan, Konsep keluarga di masyarakat pedesaan meliputi ruang lingkup yang lebih luas. Selain mencakup ayah, ibu dan anak, pengertian keluarga juga menyangkut kakek, paman, bibi, kemenakan dan seterusnya sampai kepada kerabat-kerabat yang jauh dari beberapa generasi. Di desa seseorang dikenal dalam hubungannya dengan keseluruhan anggota keluarga itu.

Pengertian kekeluargaan yang luas itu diperkeras oleh adanya kenyataan fisik bahwa rumah-rumah anggota keluarga berada dalam satu lingkungan dan berdekatan satu sama lain. Di situ seorang anak dibesarkan dalam suasana keterikatan tertentu dengan orang-orang yang dilihatnya sehari-hari, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hubungan kekeluargaan yang mengenal kedudukan dan tingkat tertentu untuk masing-masing orang.

- a. Penduduk masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian, walaupun kita mengenal adanya tukang kayu, tukang genteng dan bata, tukang membuat gula dan bahkan tukang catut akan tetapi inti pekerjaan penduduknya adalah pertanian. Pekerjaan-pekerjaan di samping pertanian, hanya merupakan pekerjaan sambilan saja, oleh sebab bila tiba masa panen atau masa menanam padi, pekerjaan-pekerjaan sambilan tadi segera ditinggalkannya, Namun demikian hal itu tidaklah berarti bahwa setiap orang mempunyai tanah.
- b. Pada umumnya penduduk pedesaan di Indonesia ini apabila ditinjau dari segi kehidupannya sangat terikat dan sangat tergantung dari tanah / Earth bound. Karena mereka sama-sama tergantung pada tanah, maka mereka sama-sama mempunyai kepentingan pokok yang sama,

- sehingga mereka juga akan bekerjasama untuk mencapai kepentingan-kepentingannya. Misalnya pada musim pembukaan tanah atau pada waktu menanam tiba, mereka akan bersama-sama mengerjakan tanahnya. Sebagai akibat kerjasama tadi, timbullah lembaga kemasyarakatan yang dikenal dengan nama gotong royong. Bukan merupakan lembaga yang sengaja dibuat. Oleh karena itu, pada masyarakat-masyarakat pedesaan tidak akan dijumpai pembagian kerja berdasarkan keahlian, akan tetapi biasanya pembagian kerja didasarkan pada usia, mengingat kemampuan fisik masing-masing dan juga atas dasar perbedaan kelamin.
- c. Cara-cara bertani sangat tradisional dan tidak efisien, karena belum dikenalnya mekanisasi dalam pertanian. Biasanya mereka bertani semata-mata untuk mencukupi kehidupannya sendiri dan tidak untuk dijual. Cara bertani yang demikian lazimnya dinamakan subsistence farmin. Mereka cukup puas apabila kebutuhan keluarga telah terpenuhi.
  - d. Golongan orang-orang tua pada masyarakat pedesaan, pada umumnya memegang peranan yang penting. Orang-orang akan selalu meminta nasehat-nasehat kepada mereka, apabila ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kesukarannya adalah golongan orang-orang tua itu mempunyai pandangan yang didasarkan pada tradisi yang kuat, sehingga sukar untuk mengadakan perubahan-perubahan yang nyata.
  - e. Pengendalian sosial ( social control ) masyarakat terasa sangat kuat, sehingga perkembangan jiwa individu sangat sukar untuk dilaksanakan. Itulah sebabnya mengapa sulit sekali untuk merubah jalan pikiran sosial kearah jalan pikiran yang ekonomis yang mana juga disebabkan karena kurangnya alat-alat komunikasi.
  - f. Rasa persatuan erat sekali, yang kemudian menimbulkan saling kenal mengenal saling tolong menolong yang akrab ( gemeinshcraft ).

- g. Apabila ditinjau dari sudut pemerintahannya, hubungan antara penguasa dengan rakyat berlangsung secara tidak resmi. Segala sesuatunya dijalankan atas dasar musyawarah.
- h. Dalam masyarakat pedesaan yang homogen dan tradisional, conformity dari anggota-anggota masyarakat desa tersebut tidak mempunyai pilihan lain daripada mengadakan conformity terhadap kaidah-kaidah serta tidak mempunyai pilihan lain daripada mengadakan conformity terhadap kaidah-kaidah serta nilai-nilai yang berlaku, ( conformity terhadap kaidah-kaidah serta nilai-nilai yang berlaku, ( conformity terhadap kaidah-kaidah serta nilai-nilai yang berlaku, ( conformity : penyesuaian diri ). Contoh : dalam cara berpakaian dan model pakaian, bentuk rumah.
- i. Deviasi atau penyimpangan dalam masyarakat-masyarakat pedesaan yang relatif statis itu tidak akan disukai. Deviasi terhadap kaedah-kaedah dalam masyarakat memerlukan suatu keberanian dan kebijaksanaan tersendiri. Namun, apabila masyarakat pedesaan ( tradisional ) merasakan manfaat dari suatu deviasi tertentu, maka penyimpangan itu akan diterimanya. Biasanya proses tersebut dimulai oleh generasi muda yang pernah merantau. Kebiasaan yang dibawanya dari luar, mulai ditiru oleh orang-orang sekitarnya untuk kemudian menjalar ke seluruh masyarakat, contoh : kebiasaan memakai sarung diganti dengan memakai celana panjang. Dalam kehidupan masyarakat pedesaan sehari-hari masih banyak dijumpai sikap dan tingkah laku tradisional yang negatif, misalnya kurang rasional, bekerja tanpa perhitungan ekonomis, menggantungkan nasib pada saudara, karena kurang percaya pada diri sendiri, lebih mementingkan status daripada tindakan efektif, kurang menghargai waktu, bekerja tanpa rencana, tidak ada orientasi masa depan, senang berbasa-basi dan lain-lain sebagainya.



Dalam hal kepemimpinan ( leadership) di desa dapat dibedakan antara kepemimpinan legal ( resmi ) yaitu yang disebut formal-leadership dengan sanksi yang nyata. Tokoh kepemimpinan yang berstatus formal adalah kepala desa. Kepala desa, oleh kewenangan pemerintah menguasai lebih banyak aktifitas-aktifitas desa sehingga ia lebih banyak mempunyai kesempatan untuk melaksanakan pembangunan. Tokoh-tokoh partai secara hierarkis mempunyai kewenangan atas organisasi massanya.

Dalam hal kepemimpinan yang berlandaskan tradisi, yaitu kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai sosial yang mendalam, dapat dilihat pada tokoh-tokoh di bidang kepercayaan (kyai, pendeta, dukun, orang tua, orang tua desa) yang biasa disebut kepemimpinan tidak resmi (informal-leadership).

#### 4. Masyarakat Pedesaan Indonesia

Pengertian Desa

Kata desa berasal dari bahasa sansekerta *deca*. Yang pada mulanya pengertian desa sama dengan desa di Jawa. Desa terdiri dari dukuh ( kampung ).

Dengan keluarnya peraturan negara pada zaman Hindia Belanda yang bernama *Indische Stoolsregelisag*, yang bunyinya ( pasal 128 ) : " desa diakui dan dianggap sebagai kesatuan ketatanegaraan yang mempunyai ciri-ciri hukumnya " maka Prof. Dr.J.H Boeke berpendapat bahwa; desa merupakan persekutuan hukum pribumi yang terkecil yang mempunyai:

- a. Kekuasaan sendiri
- b. Territorium ( daerah ) sendiri
- c. Kekayaan / pendapatan sendiri

Desa yang tidak mempunyai syarat-syarat yang demikian hanya dianggap sebagai tempat orang-orang berkumpul untuk tempat tinggal. Istilah persekutuan hukum pribumi yang terkenal dapat diartikan bahwa ini adalah sebagian daripada pengertian yang lebih luas, yaitu

persekutuan hukum pribumi pada umumnya. Di dalamnya tercakup pengertian:

- a. Masyarakat hukum adat yang tumbuh dengan sendirinya di dalam masyarakat pribumi dan mempunyai dasar yang tradisional.
- b. hukum, dimana banyak penduduk pribumi setidaknya sebagian besar daripada penduduk pribumi menjadi anggotanya.

## 5. Terjadinya Masyarakat Desa

Tentu ada prinsip-prinsip yang mengikat warga desa menjadi kesatuan hidup bersama. Dalam hal ini ada beberapa pendapat para ahli antara lain:

- a. Menurut para ahli hukum adat, prinsip terjadinya desa karena
  - 1) Adanya hubungan kekerabatan keturunan ( geneologis )
  - 2) Adanya hubungan tempat tinggal / tinggal dekat ( territorial )
- b. Koentjaraningrat  
Disamping dua prinsip di atas tadi yaitu geneologis dan territorial juga karena;
  - 1) Prinsip tujuan khusus, dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari.
  - 2) Prinsip karena ikatan dari atas. Batas desa diatur dalam pemerintah melalui undang-undang.
- c. Boebe  
Disamping prinsip geneologis dan territorial beliau menambahkan prinsip-prinsip lain terbentuknya suatu desa yaitu sub clan ( kelompok-kelompok lain ).
- d. Vergouwen  
Menambahkan di samping asas hubungan daerah dan asas territorial, alasan keagamaan sebagai suatu perekat dalam perkembangan desa di negeri batak.

## 6. Perkembangan Desa

Dengan bertambahnya penduduk, suatu desa berkembang dengan lahirnya desa-desa baru, lain dengan kota; pertumbuhan penduduk di kota akan mengakibatkan bertambah luasnya kota tersebut yang pada mulanya hanya kota pinggiran; lambat laun menjadi bagian dari kota tersebut.

## 7. Urbanisasi

Sehubungan dengan perbedaan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan, kiranya perlu pula disinggung perihal urbanisasi.

Pengertian Urbanisasi adalah :

- a. Suatu proses berpindahnya penduduk dari desa ke kota
- b. Proses terjadinya masyarakat perkotaan.

Proses Urbanisasi boleh dikatakan terjadi di seluruh dunia, baik pada negara-negara yang sudah maju industrinya, maupun yang secara relatif belum memiliki industri. Urbanisasi mempunyai akibat-akibat yang negatif terutama dirasakan oleh negara seperti Indonesia ini. Hal ini terutama disebabkan karena pada umumnya produksi pertanian sangat rendah apabila dibandingkan dengan jumlah manusia yang dipergunakan dalam produksi tersebut dan boleh dikatakan bahwa faktor kebanyakan penduduk dalam suatu daerah " Over Population ", merupakan gejala yang umum di negara-negara agraris yang secara ekonomis masih terbelakang. Proses urbanisasi dapat terjadi dengan lambat maupun cepat, hal ini tergantung dari keadaan masyarakat yang bersangkutan. Proses tersebut terjadi dengan menyangkut dua aspek, yaitu :

- a. Berubahnya masyarakat desa menjadi masyarakat kota
- b. Bertambahnya penduduk kota yang disebabkan oleh mengalirnya penduduk yang berasal dari desa-desa.

Sehubungan dengan proses tersebut diatas, maka ada beberapa sebab yang mengakibatkan suatu daerah tempat tinggal mempunyai penduduk yang banyak. Artinya, suatu daerah mempunyai daya tarik sedemikian rupa, sehingga orang-orang pendatang semakin banyak. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebab-sebabnya adalah sebagai berikut.

- a. Daerah yang dimaksud, menjadi pusat pemerintahan atau menjadi ibukota ( Jakarta )
- b. Tempat tersebut letaknya strategis sekali untuk usaha-usaha perdagangan, seperti misalnya sebuah kota pelabuhan, atau sebuah kota yang letaknya dekat dengan sumber-sumber bahan-bahan mentah.
- c. Timbulnya industri di daerah itu, yang memproduksi barang-barang maupun jasa-jasa.

Secara analisis maka terdapat kota pemerintahan, kota perdagangan, kota industri dan sebagainya. Apakah fungsi sebuah kota di dalam rangka masyarakat secara keseluruhan?

Sebuah kota pada hakekatnya merupakan suatu tempat pertemuan antara bangsa. Di desa, lapangan gerak tidak terlalu luas, hal ini disebabkan oleh adanya ikatan adat-istiadat yang kuat serta sistem pengendalian social ( social control ) yang agak kuat sehingga hubungan antara desa dengan daerah sekitarnya sangat terbatas. Kota menjadi pemimpin dari daerah disekitarnya di dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi yang mempunyai pengaruh yang aktif. Walaupun kota memiliki fungsi demikian terhadap daerah sekitarnya akan tetapi kehidupan fisik dari kota tergantung pada daerah sekitarnya.

Sebab-sebab terjadinya urbanisasi, dapat diperlihatkan dari dua sudut, yaitu :

- a. Faktor-faktor yang mendorong penduduk desa untuk meninggalkan tempat daerah kediamannya, biasa disebut push factors.

- b. Faktor-faktor yang ada di kota yang menarik penduduk desa untuk pindah dan menetap di kota-kota, biasa disebut pull factors.

Bila dianalisa sebab-sebab yang mendorong orang-orang desa meninggalkan tempat tinggalnya secara umum, adalah sebagai berikut :

- a. Di desa-desa, lapangan pekerjaan pada umumnya kurang, yang dapat dikerjakan terutama kesemuanya berhubungan dengan kesulitan-kesulitan di bidang irigasi serta areal tanah yang kemudian secara paralel disertai gejala kebanyakan penduduk. Keadaan tersebut menimbulkan pengangguran yang tersamar "disquised unemployment".
- b. Penduduk desa, terutama kaum muda-mudi merasa tertekan oleh adat istiadat yang ketat yang mengakibatkan suatu cara hidup yang monoton. Untuk mengembangkan pertumbuhan jiwanya ( bakat ), banyak yang pergi ke kota.
- c. Di desa-desa tidak banyak kesempatan untuk menambah pengetahuan. Orang-orang yang ingin maju, kemudian meninggalkan desanya untuk menambah pengetahuannya di kota.
- d. Rekreasi kurang sekali, padahal merupakan salah satu faktor penting.
- e. Bagi penduduk desa yang mempunyai keahlian selain bertani, seperti misalnya kerajinan tangan, tentu mengingini pasaran yang lebih luas bagi hasil produksinya. Ini tidak mungkin didapat di desa.

Beberapa faktor penarik di kota, ialah :

- a. Adanya anggapan orang desa, di kota banyak pekerjaan serta banyak penghasilan ( uang ).
- b. Di kota-kota lebih banyak kesempatan untuk mendirikan perusahaan, industri dan lainnya, karena lebih mudah mendapatkan izin dan kredit dari Bank

- c. Kelebihan uang ( modal ) di kota, karena sirkulasi ( peredaran ) uang di kota jauh lebih cepat, lebih besar dan lebih banyak.
- d. Sekolah lanjutan ( sarana pendidikan ) lebih banyak di kota dan dengan mudah didapat.
- e. Kota merupakan tempat yang lebih menguntungkan untuk mengembangkan bakat dengan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya.
- f. Kota dianggap mempunyai tingkat kebudayaan yang lebih tinggi dan merupakan tempat pergaulan dengan segala macam orang dan dari segala lapisan.

Beberapa sebab yang telah disebutkan diatas, menyebabkan terjadinya urbanisasi. Dan orang yang sudah meninggalkan tempat tinggalnya di desa, mempunyai kecenderungan untuk tetap tinggal di kota. Terutama faktor transportasi yang menjadi penghambat bagi mereka untuk pulang balik dari desa ke kota; mereka hanya akan kembali apabila ada keperluan penting seperti akan menengok anak keluarga misalnya. Di dalam rangka ini kemungkinan besar urbanisasi tersebut mengakibatkan perluasan kota, oleh karena pusat kota tidak akan mungkin menampung perpindahan penduduk desa yang begitu banyak. Timbul tempat-tempat tinggal baru di pinggiran kota. Proses tersebut di dalam sosiologi dikenal dengan proses pembentukan sub-urbanisasi, kota pinggiran, contohnya, kota Jakarta, Pulo Gadung dulunya adalah kota pinggiran, sekarang menjadi wilayah kota Jakarta Timur.

Sebaliknya, hubungan dengan kota-kota, menyebabkan pula terjadinya perubahan-perubahan di desa-desa, oleh karena orang-orang yang kemudian tinggal di kota sesekali kembali ( pulang ) ke desanya. Beberapa unsur kehidupan di kota akan dibawanya serta, sehingga ada pula rekan-rekannya warga desa yang meniru gaya kehidupan yang di kota, proses demikian disebut urbanisme. Akibat negatif daripada urbanisasi yang terlalu cepat adalah antara lain :

- a. Pengangguran, disebabkan tidak seimbangnya tenaga kerja yang ada dengan daya tampung. Penduduk desa yang berbondong-bondong mencari pekerjaan di kota, menyimpan kekecewaan yang besar, karena besarnya jumlah mereka yang mencari pekerjaan maka timbul persaingan antara mereka sendiri ditambah pula dengan persaingan yang datang dari penduduk kota itu sendiri. Orang-orang desa tidak mengerti bahwa mereka harus berjuang sendiri. Orang-orang desa tidak mengerti bahwa mereka harus berjuang sendiri, di kota tidak akan ada orang lain yang mau membantunya, cita-cita yang muluk akhirnya terhambat, maka timbullah pengangguran atau tuna karya.
- b. Meningkatnya kriminalitas, karena meningkatnya tuna karya secara korelatif mengakibatkan meningkatnya kejahatan ( tuna susila ). Karena persoalan tuna karya ini sesungguhnya sangat pelik, oleh karena mempertajam perbedaan antara golongan yang mampu dengan golongan yang tidak mampu, dimana kalau di desa hal ini tidak begitu menjadi persoalan. Kriminalitas yang mula-mula didorong oleh rasa lapar, dapat berubah menjadi suatu pekerjaan tetap, sehingga timbullah organisasi penjahat yang sangat sukar untuk dapat diberantas. Gejala semacam ini banyak dijumpai di kota-kota besar seperti misalnya Jakarta, Surabaya, Medan dan lain sebagainya.
- c. Persoalan perumahan (perwisamaan)
- d. Pertambahan penduduk kota yang pesat, mengakibatkan pula persoalan perumahan, gelandangan. Orang tinggal bersempit- sempitan dalam rumah-rumah yang tidak memenuhi persyaratan sosial maupun kesehatan.
- e. Timbulnya kenakalan (kejahatan) anak-anak, karena keadaan lingkungannya tidak sehat dan kehidupan yang tidak menentu (gelandangan), maka pendidikan anak-anak terlantar bahkan tidak ada sama sekali, akhirnya

anak-anak jadi peminta-minta, akhirnya berbuat kenakalan-kenakalan dan berbuat jahat (mencuri, dsb).

- f. Menimbulkan persoalan rekreasi, dijumpai kekecewaan karena besarnya biaya.

Usaha-usaha yang dilaksanakan pemerintah dalam membendung urbanisasi.

- a. Mendirikan industri-industri di luar kota, dengan tujuan dapat menyerap tenaga kerja yang ada di pedesaan.
- b. Mendirikan sekolah-sekolah inpres tingkat sekolah dasar sampai ke pelosok-pelosok desa, bahkan sekolah tingkat lanjutan sudah ada di kecamatan-kecamatan.
- c. Membangun dan memperbaiki jalan-jalan ke kampung-kampung, sehingga hubungan dengan kota dapat dilaksanakan secara lancar, orang yang bekerja di kot, tidak usah menetap di kota.
- d. Membangun perumahan di luar kota, sama tujuannya dengan nomor 3.
- e. Mendirikan puskesmas-puskesmas sampai tingkat kelurahan dan menggalakkan kegiatan Program Keluarga Berencana.
- f. Listrik masuk desa, sehingga orang-orang desa dapat menikmati, dimana di desa-desa sudah terang-benderang, dapat menikmati hiburan-hiburan melalui siaran televisi dan siaran radio. Termasuk juga disini koran masuk desa.
- g. Menggiatkan program PKK ( Pendidikan Ketrampilan Keluarga ) dan Karang Taruna
- h. Pemerintah menyediakan modal dengan yang dinamakan KIK ( Kredit Investasi Kecil ) untuk warga yang ingin berusaha ( wiraswasta ) dan KMKP ( Kredit Modal Kerja Permanen )
- i. Mendirikan KUD ( Koperasi Unit Desa ) baik koperasi produksi maupun konsumsi.
- j. Memberikan penyuluhan dan bimbingan dalam pertanian.
- k. Transmigrasi.



## **C. PERUBAHAN MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN**

### **1. Hubungan Masyarakat Kebudayaan dan Nilai**

Sebagaimana telah diketahui bahwa antara masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, merupakan dwitunggal, dimana dalam kehidupan yang nyata dapat dibuktikan bahwa tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tak ada kebudayaan tak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya. Selanjutnya segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu (cultural determinism).

Karena kebudayaan merupakan segala hasil karya masyarakat, hasil gagasannya dan hasil ciptanya. Maka dalam wujudnya kebudayaan dapat berupa wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks

### **2. Perubahan Masyarakat**

Setiap masyarakat selama hidupnya, pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan tersebut bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang menelaahnya, dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang menyolok dan ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali, akan tetapi ada juga yang berjalan dengan cepat. Dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat ada gejala-gejala dan kejadian-kejadian sosial-budaya sekeliling kita sebagai proses yang sedang berjalan dan bergeser.

Semua konsep yang kita perlukan apabila ingin menganalisis proses-proses pergeseran masyarakat dan kebudayaan termasuk lapangan penelitian ilmu sosiologi dan antropologi yang disebut dinamik masyarakat (social dynamic).

Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat berupa nilai-nilai social, norma-norma social, pola-pola perlakuan, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat,

kekuasaan dan wewenang, interaksi social dan lain sebagainya. Oleh karena luasnya bidang dimana mungkin terjadi perubahan-perubahan tersebut, perlu terlebih dahulu ditentukan secara tegas, perubahan mengenai hal apa yang dimaksudkan.

Dengan diakui dinamika sebagai inti jiwa masyarakat, maka banyak sarjana sosiologi modern yang mencurahkan perhatiannya pada masalah-masalah perubahan-perubahan social dan kebudayaan dalam masyarakat. Masalah ini menjadi lebih penting lagi dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi yang diusahakan oleh banyak masyarakat-masyarakat dari negara-negara yang sedang berkembang yang baru memperoleh kemerdekaannya setelah Perang Dunia Kedua.

Perubahan-perubahan pada masyarakat-masyarakat didunia dewasa ini merupakan gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat kebagian-bagian dunia lainnya, antara lain berkat komunikasi yang modern. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadinya suatu revolusi, modernisasi pendidikan dan sebagainya yang terjadi di suatu tempat, dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain yang jauh dari tempat lain.

Perubahan-perubahan dalam masyarakat memang sudah ada sejak zaman dahulu, namun dewasa ini perubahan-perubahan tersebut berjalan dengan cepat, sehingga seolah-olah membingungkan manusia yang menghadapinya. Sehingga, di dalam masyarakat-masyarakat didunia ini kita lihat sering terjadi perubahan-perubahan atau suatu keadaan dimana perubahan-perubahan tersebut memang terikat oleh waktu dan tempat, akan tetapi karena sifatnya yang merantai, maka keadaan tersebut berlangsung terus, walaupun kadang-kadang diselingi keadaan masyarakat yang bersangkutan mengadakan reorganisasi unsur-unsur struktur masyarakat yang terkena oleh proses perubahan tadi.

### 3. Pembatasan Pengertian Perubahan Masyarakat dan Kebudayaan

#### a. William F. Ogburn

Ia berusaha memberikan suatu pengertian, walaupun dia tidak memberi definisi tentang perubahan-perubahan sosial tersebut. Dia terutama mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan-perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun immaterial, dengan terutama menekankan pengaruh yang besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial.

#### b. Kingsley Davis

Perubahan-perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis, mengakibatkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan yang kemudian menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik.

#### c. Mac Iver

Perubahan-perubahan sosial dikatakannya sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan-hubungan sosial ( social relationships ) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan ( Equilibrium ) hubungan sosial tersebut.

#### d. Gillin dan Gillin

Mereka mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya *diffuse* atau pun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut.

e. Samuel Koenig

Ia mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial menunjukkan pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi tersebut terjadi karena sebab-sebab yang intern maupun sebab-sebab ekstern.

f. Selo Soemardjan

Perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi system sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai sikap-sikap dan pola-pola kelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tekanan pada definisi tersebut terletak pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan kebutuhan pokok manusia, perubahan-perubahan mana kemudian mempengaruhi segi-segi lainnya dari struktur masyarakat.

g. Koentjaraningrat

Semua konsep yang diperlukan untuk menganalisis proses-proses pergeseran masyarakat dan kebudayaan, disebut dinamika sosial (social dynamics). Di antara konsep-konsep yang terpenting adalah proses-proses internalisasi, sosialisasi, enkulturasi, evolusi kebudayaan, difusi, akulturasi, asimilasi, inovasi dan penemuan baru (discovery and invention).

**4. Hubungan antara perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan kebudayaan.**

Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan-perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan-perubahan dalam kebudayaan. Perubahan-perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian kebudayaan termasuk di dalamnya kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lain sebagainya, maupun perubahan-perubahan dalam bentuk serta aturan-aturan organisasi sosial. Sebagai contoh dikemukakanya perihal perubahan-

perubahan logat bahasa yang terjadi pada bahasa-bahasa Aria, setelah terpisah dari induknya. Akan tetapi perubahan-perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi-organisasi sosial dari masyarakat-masyarakat yang telah menggunakan bahasa tersebut. Perubahan-perubahan tersebut lebih merupakan perubahan dalam kebudayaan, ruang lingkupnya lebih luas. Sudah tentu ada unsur-unsur kebudayaan yang dapat dipisahkan dari masyarakat, akan tetapi perubahan-perubahan dalam kebudayaan tidak perlu mempengaruhi sistem sosial. Seorang Sosiolog akan lebih memperhatikan perubahan-perubahan dalam kebudayaan yang bertitik tolak dan timbul dari organisasi sosial serta yang mempengaruhi organisasi sosial. Pendapatnya tersebut dapat dikembalikan pada definisi-definisinya tentang masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat menurut Kingsley Davis adalah sistem hubungan-hubungan dalam arti hubungan antara organisasi-organisasi, dan bukan hubungan antara sel-sel. Kebudayaan dikatakannya mencakup segenap cara-cara berpikir dan bertindak laku, yang timbul karena interaksi yang bersifat komunikatif seperti misalnya diambil definisi kebudayaan dari E.B Taylor, yang mengatakan bahwa kebudayaan adalah suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hokum, adat istiadat dan setiap kemampuan serta kebiasaan dari manusia sebagai warga masyarakat maka perubahan-perubahan kebudayaan adalah setiap perubahan dari unsur-unsur tersebut.

Sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari, acapkali tidak mudah untuk menentukan letaknya garis pemisah antara perubahan-perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Karena tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tidak mungkin ada kebudayaan yang tidak menjelma dalam suatu masyarakat. Sehingga walaupun secara teoritis dan analisis pemisahan antara pengertian-pengertian tersebut dapat dirumuskan,

namun didalam kehidupan yang nyata, garis pemisah tersebut sukar dapat dipertahankan. Akan tetapi perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan mempunyai satu aspek yang sama, yaitu kedua-duanya bersangkut paut dengan suatu penerimaan dari cara-cara baru atau suatu perbaikan dari cara-cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Biasanya antara kedua gejala itu dapat ditemukan hubungan timbal balik sebagai sebab dan akibat. Akan tetapi suatu kemungkinan dapat terjadi, yaitu bahwa suatu perubahan kebudayaan tidak menyebabkan perubahan sosial. Misalnya perubahan-perubahan dalam model pakaian, dalam kesenian, tari-tarian dapat terjadi tanpa mempengaruhi lembaga kemasyarakatan atau sistem sosial. Akan tetapi sebaliknya, sukar untuk membayangkan terjadinya perubahan-perubahan sosial tanpa didahului oleh suatu perubahan kebudayaan. Suatu lembaga misalnya keluarga, perkawinan, hak milik perguruan tinggi atau negara tidak akan mengalami perubahan sosial dalam bidang kehidupan tertentu juga tidak berhenti pada suatu titik dalam arti bahwa perubahan sosial yang bersangkutan berdiri sendiri, perubahan-perubahan dibidang-bidang lain akan mengikutinya. Hal ini disebabkan oleh karena struktur lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat yang sifatnya jalin menjalin. Apabila suatu negara mengubah undang-undang dasarnya atau bentuk pemerintahannya, perubahan-perubahan yang kemudian terjadi tidak hanya terbatas ada lembaga-lembaga politik saja. Perubahan-perubahan akan terjadi dalam bidang ekonomi, struktur kelas-kelas sosial, pola-pola berpikir dan seterusnya.

##### **5. Beberapa Bentuk Perubahan Masyarakat dan Kebudayaan.**

Perubahan masyarakat dan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu :

a. Perubahan-perubahan yang terjadi secara lambat (evolusi) dan perubahan-perubahan yang terjadi secara (revolusi).

1) Perubahan yang terjadi secara evolusi ialah perubahan-perubahan yang memerlukan waktu yang lama, dimana terdapat suatu rentetan perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Perubahan-perubahan terjadi dengan sendirinya, tanpa suatu rencana ataupun suatu kehendak tertentu. Perubahan-perubahan tersebut terjadi oleh karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi baru, yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Rentetan perubahan-perubahan tersebut, tidak perlu sejalan dengan rentetan peristiwa-peristiwa di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan. Perihal evolusi masyarakat terdapat bermacam-macam teori yang dapat digolongkan dalam kategori-kategori sebagai berikut :

a) *Unilinear theories of evolution*, yang ada pada pokoknya berpendapat bahwa manusia dan masyarakat ( termasuk kebudayaannya ) mengalami perkembangannya sesuai dengan tahap-tahap tertentu, semula dari bentuk sederhana, kemudian bentuk yang kompleks sampai pada tahap yang sempurna. Pelopor teori ini adalah Auguste Comte, Herbert Spencer dan lain-lain. Suatu variasi dari teori tersebut adalah *Cyclical theories* yang dipelopori oleh Vilfredo Pareto, yang berpendapat bahwa masyarakat dan kebudayaan mempunyai tahap-tahap perkembangan yang merupakan lingkaran, dimana suatu tahap tertentu dapat dinilai berulang-ulang. Teori ini didukung oleh Pitirin A. Sorokin yang pernah pula mengemukakan perihal

teori dinamika social dan kebudayaan. Sorokin mengatakan bahwa masyarakat berkembang melalui tahap-tahap yang masing-masing didasarkan pada suatu sistem kebenaran. Dalam tahap pertama dasarnya kepercayaan, tahap kedua dasarnya indera manusia, dan tahap terakhir dasarnya adalah kebenaran.

- b) *Universal theory of evolution*, yang mengatakan bahwa perkembangan masyarakat tidaklah perlu melalui tahap-tahap yang tetap. Teori tersebut mengemukakan bahwa kebudayaan manusia, telah mengikuti suatu garis evolusi yang tertentu. Prinsip-prinsip teori ini diuraikan oleh Herbert Spencer yang antara lain mengatakan bahwa masyarakat itu merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen ke kelompok heterogen
- c) *Multileneal theories of evolution*, lebih menekankan pada penelitian-penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan yang tertentu dalam evolusi masyarakat, misalnya mengadakan penelitian perihwal pengaruh perubahan system pencaharian dari system berburu ke system pertanian, terhadap system kekeluargaan dalam masyarakat yang bersangkutan dan seterusnya

Dewasa ini agak sulit menentukan apakah suatu masyarakat berkembang melalui tahap-tahap. Lagi pula adalah sangat sukar untuk memastikan bahwa tahap yang telah dicapai dewasa ini, merupakan tahap terakhir dan sebaliknya juga sulit untuk menentukan ke arah mana masyarakat akan berkembang secara pasti, apakah pasti menuju bentuk kehidupan sosial yang lebih sempurna bila dibandingkan dengan keadaan dewasa ini, atau bahkan sebaliknya.



- 2) Perubahan yang terjadi secara cepat mengenai dasar-dasar atau sendi-sendi pokok daripada kehidupan masyarakat (yaitu lembaga-lembaga kemasyarakatan) dinamakan revolusi. Unsur-unsur yang pokok daripada suatu revolusi adalah adanya perubahan yang cepat dan bahwa perubahan tersebut mengenai dasar-dasar atau sendi-sendi pokok dari kehidupan masyarakat. Dalam revolusi perubahan-perubahan yang terjadi dapat direncanakan terlebih dahulu maupun tanpa rencana. Perubahan tersebut dianggap cepat, karena mengubah sendi-sendi pokok dari kehidupan masyarakat, misalnya system kekeluargaan, system negara, bentuk negara. Suatu revolusi dapat dijalankan tanpa kekerasan ( revolusi industri ), akan tetapi tidak jarang proses tersebut dijalankan dengan dilalui pemberontakan ( revolt, rebellion ) yang kemudian menjelma menjadi revolusi.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan contoh daripada suatu revolusi yang tepat momentumnya. Pada waktu itu, perasaan tidak puas di kalangan bangsa Indonesia telah mencapai puncaknya dan ada pemimpin-pemimpin yang mampu menampung keinginan-keinginan tersebut serta sekaligus merumuskan tujuannya. Saatnya adalah bertepatan dengan kekalahan kerajaan Jepang, sehingga saatnya tepat untuk memulai suatu revolusi yang diawali dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

- b. Perubahan-perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan-perubahan yang besar pengaruhnya.

Perubahan-perubahan yang kecil pengaruhnya adalah perubahan-perubahan pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung (berarti) bagi masyarakat. Misalnya, perubahan mode pakaian tidak akan membawa pengaruh yang berarti bagi

masyarakat dalam keseluruhannya, oleh Karena tidak mengakibatkan perubahan-perubahan dalam lembaga kemasyarakatan. Sebaliknya suatu proses industrialisasi pada masyarakat agraris, merupakan perubahan yang membawa pengaruh besar pada masyarakat. Pelbagai lembaga kemasyarakatan akan terpengaruh olehnya seperti hubungan kerja, sistem kepemilikan tanah, hubungan-hubungan kekeluargaan, nilai-nilai, stratifikasi masyarakat dan seterusnya.

Kepadatan penduduk yang besar sekali di pulau Jawa, menyebabkan pula perubahan-perubahan dengan pengaruh yang besar. Areal tanah yang dapat diusahakan menjadi lebih sempit, sedangkan angka kelahiran tetap tinggi, sehingga pengangguran tersamar tampak di desa-desa. Mereka yang tidak mempunyai tanah, menjadi buruh tani. Sejalan dengan itu, terjadi pula, terjadi pula proses individualisasi milik tanah, hak-hak rakyat dari desa semakin luntur karena areal tanah tidak seimbang dengan kepadatan penduduk. Maka timbullah bermacam-macam lembaga hubungan kerja, lembaga gadai tanah, lembaga bagi hasil dan seterusnya.

- c. Perubahan yang dikehendaki ( intended-change ) atau perubahan yang direncanakan ( planned-change ) dan perubahan yang tidak dikehendaki ( unintended change) atau perubahan yang tidak direncanakan ( unplanned-change ).

Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang ada di dalam masyarakat. Misalnya yang menyangkut bidang politik dan administrasi dalam pemerintahan contohnya dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, merubah sistem pemerintahannya dari sistem sentralisme yang otokratis kepada sistem desentralisasi yang demokratis. Sebagai akibatnya timbul suatu perubahan tetapi telah

diperhitungkan terlebih dahulu, yaitu para petugas pamong praja kehilangan wewenang atas pemerintahan desa. Suatu keadaan yang tidak diharapkan adalah bertambah pentingnya peranan dukuh yang menyebabkan berkurangnya ikatan antara ikatan sosial yang merupakan masyarakat desa. Suatu akibat lain yang juga tidak diharapkan adalah hilangnya peranan kaum bangsawan sebagai warga kelas sosial yang tinggi dalam masyarakat secara berangsur-angsur.

Suatu perubahan yang dikehendaki dapat timbul sebagai suatu reaksi (yang direncanakan) terhadap perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi sebelumnya baik yang merupakan perubahan yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Bila sebelumnya terjadi perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki berarti sebagai suatu pengakuan terhadap perubahan-perubahan itu kemudian diterima secara luas oleh masyarakat. Contohnya, hukum waris menurut hukum adat di Batak yang hanya mengakui laki-laki saja sebagai penerus keturunan, jadi anak laki-laki saja yang dapat menjadi ahli waris. Tetapi pada waktu belakangan ini, perasaan keadilan masyarakat mengalami perubahan, tidak terlalu mempersoalkan perbedaan seks para warisnya. Perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki tersebut diakhiri oleh pengadilan yang dapat dilihat dari keputusan-keputusannya mengenai hukum waris adat. Keadaan tersebut kemudian disahkan oleh ketetapan MPRS No. II/tahun 1960 yang antara lain menegaskan bahwa semua warisan adalah untuk anak-anak ( tanpa membedakan antara anak laki-laki dan perempuan ) dan janda, apabila si pewaris meninggal dan mempunyai anak-anak dan istri.

**6. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan-perubahan masyarakat dan kebudayaan.**

Untuk mempelajari suatu perubahan dalam masyarakat, maka perlu diketahui sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan itu. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab tersebut sumbernya ada yang terletak di dalam masyarakat itu sendiri dan ada yang di luar masyarakat itu. Sebab-sebab yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri adalah:

a. Bertambahnya atau berkurangnya penduduk.

Bertambahnya penduduk yang sangat cepat, menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama yang menyangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lembaga sistem hak milik atas tanah mengalami perubahan-perubahan, orang mengenal hak milik individual atas tanah, sewa tanah, gadai tanah, bagi hasil dan lain-lain. Contoh, di Indonesia, karena pertambahan penduduk yang sangat melonjak sedangkan kita sedang dalam keadaan membangun, maka terjadi perubahan dalam lembaga kemasyarakatan yaitu lahir lembaga Keluarga Berencana yang disebut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional).

Berkurangnya penduduk juga mengakibatkan perubahan terhadap masyarakat dan kebudayaan. Contoh : karena berpindahnya penduduk desa ke kota (urbanisasi) mengakibatkan kekosongan, antara lain tenaga kerja di desa, pembagian kerja, stratifikasi sosial dan lain-lainnya yang mempengaruhi lembaga kemasyarakatan.

b. Penemuan-penemuan baru atau inovasi

Inovasi adalah suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi dan modal, pengaturan baru dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru yang semua akan menyebabkan adanya sistem produksi, dan dibuatnya produk-produk yang

baru. Dengan demikian inovasi ini mengenai pembaruan kebudayaan yang khusus mengenai unsur teknologi dan ekonomi.

Proses inovasi sudah tentu sangat erat sangkut pautnya dengan penemuan baru dalam teknologi. Suatu penemuan biasanya juga merupakan proses sosial yang panjang yang melalui dua tahap khusus, yaitu *discovery* dan *invention*.

Suatu *discovery* adalah suatu penemuan dari suatu unsur kebudayaan yang baru, baik yang berupa alat baru, suatu ide baru, yang diciptakan oleh seorang individu, atau suatu rangkaian dari beberapa individu dalam masyarakat bersangkutan. *Discovery* baru menjadi *invention* apabila masyarakat sudah mengakui, menerima dan menerapkan penemuan itu. Proses dari *discovery* hingga ke *invention* seringkali memerlukan tidak hanya seorang individu, yaitu penciptanya saja, melainkan satu rangkaian yang terdiri dari beberapa orang pencipta. Contoh, penemuan dari mobil dimulai dari aktivitas seorang yang bernama S. Marcus tahun 1875, berbangsa amerika mengembangkan motor gas yang pertama. Sebetulnya sistem motor gas tersebut juga telah merupakan suatu hasil dari rangkaian ide-ide yang telah dikembangkan sebelum Marcus. Tetapi Marcuslah yang telah membulatkan penemuan tersebut dan yang untuk pertama kalinya menghubungkan motor gas dengan sebuah kereta sehingga kereta ditarik oleh seekor kuda. Tahun 1911 mendapat hak paten di Amerika Serikat.

## **7. Pertentangan (conflicts) dalam Masyarakat**

Pertentangan tersebut mungkin terjadi antara orang perseorangan dengan kelompoknya atau pertentangan antar kelompok.

- a. Masyarakat tradisional di Indonesia, pada umumnya bersifat kolektif. Segala kegiatan didasarkan pada

kepentingan-kepentingan masyarakat, kepentingan individu walaupun diakui, mempunyai fungsi sosial. Tidak jarang timbul pertentangan antara kepentingan-kepentingan individu dengan kelompoknya tersebut, yang dalam hal-hal tertentu dapat menimbulkan perubahan-perubahan. Misalnya : masyarakat Minangkabau yang mempunyai sistem kekeluargaan adalah matrilineal, yang menurut adat-istiadatnya, jika ibu meninggal, maka anak-anaknya berada dibawah kekuasaan keluarga ibu. Tetapi dalam prakteknya terjadi penyimpangan terutama keluarga tersebut yang berada di perantauan. Anak-anak tetap tinggal dengan bapaknya, walaupun ibunya telah meninggal, dan hubungan antara bapak dengan keluarga almarhum istrinya telah putus. Keadaan tersebut membawa perubahan besar pada peranan bapak.

- b. Pertentangan antar kelompok mungkin terjadi antara generasi tua dengan generasi muda. Pertentangan-pertentangan kerap kali terjadi apabila pada masyarakat-masyarakat yang sedang berkembang dari tahap tradisional ke tahap modern. Generasi muda yang belum terbentuk kepribadiannya lebih mudah untuk menerima unsur-unsur kebudayaan asing (misalnya kebudayaan barat) yang dalam beberapa hal mempunyai taraf yang lebih tinggi. Keadaan tersebut dapat menimbulkan perubahan-perubahan tertentu dalam masyarakat, misalnya pergaulan yang lebih bebas antara laki-laki dan wanita, kedudukan wanita yang sederajat dengan laki-laki di dalam masyarakat dan lain-lainnya.
- c. Pertentangan antara golongan yang mempertahankan hukum adat yang tradisional dengan golongan yang memasukan agama islam ( hukum islam ). Keadaan ini pernah terjadi di Indonesia pada masa lalu. Dalam hal-hal tertentu, pertentangan tersebut menghasilkan akomodasi, misalnya perihal perkawinan, pewarisan dan sebagainya. Menurut hukum adat perkawinan

merupakan suatu "crisis rite" yaitu suatu upacara berhubung meningkatnya seseorang dari tahap kehidupan tertentu menuju ke tahap kehidupan selanjutnya. Perpindahan tersebut memerlukan suatu upacara tertentu, karena orang tadi pindah ke dalam lingkungan sosial yang baru dan juga untuk mengumumkan pada khalayak ramai mengenai kedudukan social orang tersebut. Tapi menurut hukum islam perkawinan merupakan suatu kontrak yang disebut akad - nikah dan ijab Kabul. Timbul pertentangan mengenai sahnya perkawinan, yaitu apakah pada saat upacara adat dilakukan atau pada saat ijab Kabul. Pada umumnya tercapai suatu akomodasi; terutama bagi orang-orang Indonesia yang beragama islam, aqad nikah merupakan hukum agama yang kemudian diikuti dengan upacara menurut adat masing-masing. Akomodasi tersebut menimbulkan lembaga kemasyarakatan yang baru di bidang perkawinan.

- d. Terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri Revolusi yang terjadi pada bulan Oktober 1917 di Rusia, menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan besar di sana. Negara tersebut yang mula-mula berbentuk kerajaan yang absolute, berubah menjadi dictator proletariat yang didasarkan pada doktrin Marxisme. Maka segenap lembaga kemasyarakatan, mulai dari bentuk Negara sampai ke dalam system keluarga mengalami perubahan-perubahan yang besar sampai ke akar-akarnya.

Suatu perubahan sosial dan kebudayaan dapat pula bersumber pada sebab-sebab yang antara lain berasal dari luar masyarakat itu sendiri.

- a. Sebab-Sebab yang Berasal dari Lingkungan Alam Fisik yang Ada di Sekitar Manusia

Terjadinya gempa bumi, taufan, banjir besar dan lain-lain, yang menyebabkan masyarakat-masyarakat yang mendiami daerah-daerah tersebut terpaksa

meninggalkan tempat tinggalnya. Apabila masyarakat tersebut mendiami tempat tinggalnya yang baru, maka mereka harus menyesuaikan dengan keadaan alam yang baru tersebut. Kemungkinan hal tersebut mengakibatkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Suatu masyarakat yang mula-mula hidup dari berburu, kemudian meninggalkan tempat tinggalnya karena tempat tersebut dilanda banjir besar, kemudian menetap di suatu daerah yang memungkinkan mereka untuk bertani. Hal ini mengakibatkan perubahan-perubahan dalam diri masyarakat tadi, misalnya timbulnya lembaga kemasyarakatan baru yaitu lembaga hak milik atas tanah, sistem mata pencaharian yang baru yaitu pertanian dan selanjutnya.

Kadang-kadang sebab-sebab bersumber pada lingkungan alam fisik, disebabkan oleh tindakan-tindakan masyarakat itu sendiri. Misalnya karena penggunaan tanah secara besar-besaran tanpa memperhitungkan lapisan-lapisan humus tanah tersebut, penebangan hutan-hutan yang menyebabkan banjir, hal-hal tersebut dapat mengakibatkan bahwa masyarakat yang bersangkutan terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya untuk menetap di wilayah yang lain.

b. Peperangan

Peperangan dengan negara lain dapat pula menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan, oleh karena biasanya negara yang akan memaksakan negara yang takluk, untuk menerima kebudayaannya yang dianggap sebagai kebudayaan yang lebih tinggi tarafnya. Negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua seperti Jerman dan Jepang mengalami perubahan-perubahan yang menyangkut bidang kenegaraan, Jerman akhirnya dipecah dua yaitu Jerman Barat (Republik Federasi Jerman) dan Jerman Timur (Republik Demokrasi Jerman) yang masing-masing berorientasi



pada Blok Barat dan Blok Timur. Hal ini tidak saja mengakibatkan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di bidang politik dan pemerintahan, akan tetapi juga di bidang-bidang lain. Jepang setelah kalah perang juga mengalami perubahan-perubahan, dari negara agraris militer, Jepang secara berangsur-angsur berubah menjadi negara industri.

c. Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain

Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. Namun bila hubungan tersebut berjalan melalui alat-alat komunikasi massa seperti radio, televisi, film, majalah, dan surat kabar, maka ada kemungkinan pengaruh datangnya hanya dari satu pihak saja yaitu dari masyarakat yang secara aktif menggunakan alat-alat komunikasi tersebut, sedangkan pihak lain hanya menerima pengaruh itu dengan tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat lain yang mempengaruhinya itu. Apabila pengaruh tersebut diterima tidak karena paksaan dari pihak yang mempengaruhi maka terjadi proses akulturasi.

Ada pula di dalam proses pertemuan kebudayaan tersebut, tidak selalu terjadi saling pengaruh-mempengaruhi, kadang kala kebudayaan tersebut yang seimbang tarafnya saling menolak.

Apabila dua kebudayaan bertemu, sedangkan salah satu kebudayaan dalam unsur-unsur mempunyai taraf teknologi yang lebih tinggi, maka mungkin terjadi proses imitasi peniruan terhadap unsur-unsur kebudayaan lain. Mula-mula unsur tersebut ditambahkan pada kebudayaan asli, akan tetapi lambat laun unsur-unsur kebudayaan aslinya yang diubah dan diganti oleh unsur-unsur kebudayaan asing tersebut.

Contoh:

*Orang Indonesia dewasa ini, pada umumnya memakai pakaian yang bercorak Barat, oleh karena lebih praktis. Jarang orang memakai pakaian tradisional kecuali pada kesempatan-kesempatan tertentu misalnya pada upacara-upacara resmi.*

#### **D. PERUBAHAN DAN PERGESERAN NILAI**

Perubahan masyarakat merupakan bagian dari perubahan kebudayaan, karena pada umumnya lembaga-lembaga kemasyarakatan mengalami perubahan pula, sehingga mengakibatkan terjadi perubahan-perubahan dan pergeseran nilai-nilai.

Sebagaimana dikatakan oleh Selo Soemardjan bahwa perubahan-perubahan social adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi system sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola kelakuan di antara kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan-perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan-perubahan dalam kebudayaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perubahan dan pergeseran nilai terjadi karena telah terjadinya perubahan-perubahan kebudayaan dalam masyarakat. Apalagi Koentjaraningrat telah mengatakan bahwa nilai-nilai termasuk wujud kebudayaan yang bersifat ideal abstrak.

Sebelum kita membahas mengenai perubahan dan pergeseran nilai yang terjadi dalam masyarakat, sebab-sebab dan akibatnya, maka terlebih dahulu dibahas apa arti nilai itu sebenarnya, macam-macam nilai, dan lain-lainnya.

##### **1. Pengertian Nilai**

Istilah nilai (value) termasuk bidang kefilosofatan. Yaitu bidang Axiologi. Sedangkan pengertian *axiology* berasal dari bahasa Yunani, *axios* yang berarti nilai suatu yang berharga dan *logos* berarti perhitungan, alas an akal budi dan teori. Istilah modern teori nilai ( yaitu suatu yang

diingini, disukai, baik yang menyelidiki kodrat, criteria dan kedudukan metafisis nilai-nilai ).

Berdasarkan pengertian demikian bernilai berarti berharga. Nilai dan harga adalah suatu hasil penilaian, hasil pertimbangan, hasil keputusan manusia tentang hubungan antar sesuatu di dalam alam semesta ini (benda mati, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, pengalaman dan sebagainya) dengan kepentingan-kepentingan manusia baik langsung dinikmati di dunia sekarang, maupun tidak langsung untuk hidup yang kekal kemudian.

Nilai dalam pengertian bahasa, berasal dari bahasa Yunani yaitu *valere* yang artinya kuat dan baik, dalam bahasa Inggris dinamakan Value.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Purwadarminta dikatakan bahwa

*“nilai mempunyai arti harga, mutu, kadar, angka kepandaian, sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Yang dimaksud dengan nilai adalah sesuatu sifat yang menyenangkan (pleasant), memuaskan (satisfyin), menarik (interesting), berguna (useful), menguntungkan (profitable)”*.

Menurut standar penentuan tingkah laku dalam menentukan apa yang indah, efisien dan berharga atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan menurut Milton Baheah, nilai ialah sesuatu kepercayaan atau keyakinan (belief) yang bersumber pada sistem nilai seseorang atau mengenai apa yang berharga atau tidak berharga.

## 2. Macam - macam Nilai

Menurut Prof. Dr. Drs. Mr. Notonegoro, nilai dapat dibagi dalam tiga golongan:

- a. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia.
- b. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktifitas.

- c. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia

Nilai kerohanian ini dibedakan menjadi empat macam :

- a. Nilai kebenaran / kenyataan, yang bersumberkan pada unsur akal manusia ( rasio, budi, cipta )
- b. keindahan yang bersumberkan pada unsur rasa manusia ( gevoel, perasaan, aestheis )
- c. Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumberkan kepada kehendak/ kemauan manusia (will, karsa, ethis).
- d. Nilai religius yang merupakan nilai-nilai ketuhanan, kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai religius bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia.

### 3. **Sistem Nilai Budaya**

Pada tiap-tiap golongan nilai terdiri dari nilai-nilai atau norma-norma nilai yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Norma-norma nilai ada pada adat dan kebudayaan, karena adapt dan kebudayaan itu sendiri tidak lain adalah norma-norma nilai-nilai itu. Nilai yang terdapat dalam masyarakat, tidak saling bertentangan, terdapat kaitan antara bagian yang satu dengan yang lain serta ada kerja sama antara bagian-bagian yang satu dengan yang lain serta ada kerja sama antara bagian-bagian nilai secara serasi dan seimbang. Sehingga nilai-nilai itu merupakan suatu system nilai. Para ahli antropologi dan sosiologi menyebut sistem ini sistem nilai budaya.

Sistem nilai budaya ini dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat. Manusia bertindak laku dan bersikap pada dasarnya dilatarbelakangi dengan motivasi nilai-nilai tertentu. Bahkan suatu tindakan dinilai berdasarkan motivasi atau itikad atau niat. Dengan demikian, tingkah laku seseorang adalah produk dan

perwujudan nilai-nilai. Nilai lebih abstrak daripada norma. Norma adalah perwujudan dari nilai-nilai.

Bagi bangsa Indonesia, meskipun terdapat beberapa lingkungan hukum adat dan berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesatuan nilai telah tercapai, karena adanya Pancasila yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945.

#### **4. Sebab dan Akibat Perubahan dan Pergeseran Nilai**

Keseimbangan dalam masyarakat merupakan keadaan yang diidam – idamkan dalam setiap masyarakat. Dengan keseimbangan dalam masyarakat dimaksudkan sebagai suatu keadaan dimana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok dalam masyarakat berfungsi dan saling mengisi. Dalam keadaan demikian individu secara psikologi merasakan adanya suatu ketentraman oleh karena tidak adanya pertentangan dalam norma-norma dan nilai-nilai, setiap kali terjadi suatu gangguan terhadap keadaan keseimbangan tersebut maka masyarakat dapat menolaknya atau mengubah susunan lembaga-lembaga kemasyarakatannya dengan maksud untuk menerima suatu unsur yang baru. Akan tetapi kadang-kadang suatu masyarakat tidak dapat menolaknya, oleh karena unsur-unsur baru tersebut dipaksakan masuknya oleh suatu kekuatan. Apabila masuknya unsur baru tersebut tidak menimbulkan kegoncangan, pengaruhnya tetap ada, akan tetapi sifatnya dangkal dan hanya terbatas pada bentuk luarnya. Norma-norma dan nilai sosial tidak akan terpengaruh olehnya.

Adakalanya unsur-unsur baru dan lama yang bertentangan, secara bersamaan mempengaruhi norma-norma dan nilai-nilai yang kemudian berpengaruh pula pada warga-warga masyarakat. Hal itu berarti bahwa ketegangan-ketegangan serta kekecewaan-kekecewaan di antara para warga masyarakat, tidak mempunyai saluran ke

arah suatu pemecahan atau penyelesaian. Apabila ketidak seimbangan tersebut dapat dipulihkan kembali, setelah terjadinya suatu perubahan, maka keadaan tersebut dinamakan (adjustment). Bila sebaliknya yang terjadi; maka keadaan tersebut dinamakan ketidaksesuaian social (maladjustment )

## 5. Modernisasi

Kiranya perlu disadari sedalam-dalamnya, bahwa kita hidup dalam suatu masyarakat yang sedang berkembang atau suatu masyarakat yang masih kurang berkembang. Masyarakat seperti masyarakat kita ini sering kali juga disebut masyarakat yang sedang ada dalam proses modernisasi-*Developing Country*.

Apakah gerangan yang disebut modernisasi itu? salah satu definisi yang relevan bagi kedudukan kita sebagai orang akademik, adalah bahwa modernisasi merupakan proses yang mengadaptasi institusi-institusi yang berkembang dalam sejarah kepada fungsi-fungsi yang berubah dengan cepat, yang mencerminkan pertambahan pengetahuan manusia tentang suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sedangkan gejala itu menyertai terjadinya revolusi ilmiah, khususnya dibidang ilmu, ilmu alam. Pertambahan pengetahuannya itu memberikan kepada manusia kemampuan untuk menguasai lingkungannya. Namun jangan sampai timbul kesan bahwa modernisasi itu serta merta membawa kebahagiaan bagi umat manusia. Karena ada pula gejala yang pernah disebut "the agony of modernization" atau azab sengsara yang disebabkan oleh modernisasi.

Pada dasarnya di dalam pengertian modernisasi mencakup suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi social, kearah pola-pola ekonomis dan praktis yang menandai Negara-negara barat yang stabil ( Wilbert E. Moore ).

Modernisasi adalah suatu bentuk perubahan social, yang biasanya merupakan perubahan social yang terarah (directed change) yang didasarkan pada suatu perencanaan yang biasa disebut social planning.

Masyarakat-masyarakat yang mengalami perubahan sosial yang cepat menyebabkan warganya kehilangan identitasnya. Semakin modern suatu masyarakat, semakin bertambah intensitas dan ekstentitas pelbagai kategori disorganisasi sosial seperti kejahatan, perceraian, bunuh diri, sakit jiwa dan lain sebagainya. Juga kekerasan terasa meningkat dalam masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami modernisasi. Perongrongan terhadap warisan budaya tradisional, menimbulkan ketidakpastian fundamental di bidang norma dan nilai.

Keadaan modern merupakan sesuatu yang diinginkan. Juga di Indonesia, keadaan modern dianggap hal yang patut diinginkan. Apabila sudah terdapat wawasan, bahwa proses modernisasi besar kemungkinannya diikuti oleh ekses-eksesnya, oleh the agony of modernization, maka harapan itu dapat di kualifikasi sebagai pendorong proses modernisasi.

Supaya berjalan lebih cepat dengan berusaha sejauh mungkin mencegah ekses-eksesnya. Kepincangan-kepincangan itu bagi suatu masyarakat berkembang adalah "lazim" dan harus secara sadar diusahakan mengatasinya. Dan selanjutnya, bahwa cara mengatasinya adalah dengan jalan mengatasi keterbelakangan yang merupakan kondisinya, yakni dengan mendorong proses modernisasi. Dalam pada itu perlu disadari, bahwa "obat" bagi kepincangan itu jika kurang berhati-hati "meminumnya" dapat menyebabkan "side effect" berupa ekses-ekses.

Namun disini perlu disadar adanya masalah hubungan antara pembaratan atau westernisasi dan modernisasi. Bagi bangsa Indonesia (modernisasi) tidak berarti "westernisasi", atau sikap "kebarat-baratan", tetapi membangun berdasarkan kepribadian sendiri. Pembaruan

tidak lain adalah usaha bangsa untuk mengembangkan kepribadian sendiri, dengan membuang yang buruk dan memperkuat yang baik mengadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern. Akan tetapi harus jelas, bahwa masyarakat modern itu tetap masyarakat Indonesia juga, yang bertambah kokoh dan berkembang diatas kepribadiannya sendiri. Membangun masyarakat modern berarti membuka diri bangsa yang menutup rapat-rapat dirinya akan ditinggal oleh kemajuan zaman dan kemajuan bangsa-bangsa lain.

Dalam usaha untuk meletakkan dasar-dasar masyarakat modern, bukan saja menyerap masuk modal, teknologi, ilmu pengetahuan dan keterampilan dari luar, akan tetapi terbawa masuk pula nilai-nilai sosial dan politik yang berasal dari kebudayaan lain. Masuknya nilai-nilai kebudayaan lain ini makin deras mengalir sejalan dengan kebebasan yang dengan sadar juga dibuka kembali. Yang penting ialah agar mampu menjalin nilai-nilai dari luar tadi, agar nilai-nilai yang baik dan sesuai dengan kepribadian sendirilah yang diserap. Nilai-nilai yang tidak sesuai, lebih-lebih yang dapat merusak kepribadian bangsa harus mampu kita tolak. Karena itu adalah salah satu persoalan pokok bangsa adalah bagaimana kita memelihara nilai-nilai yang kita anggap luhur yang menjadi kepribadian sendiri, meneruskannya dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya dengan segala proses penyesuaian menuju masyarakat modern.

Sekali proses penyesuaian dan penerusan itu berhasil terlampaui dengan selamat, maka timbulah masyarakat Indonesia yang kuat, bersatu dan dinamis. Proses penyesuaian ini tidak selamanya berjalan dengan mudah karena tetap membuka kemungkinan-kemungkinan guncangan sosial dan psikologis. Ia dapat memakan waktu yang lama, ia juga meminta segala ketabahan, kesabaran dan kebijaksanaan. Dalam proses penyesuaian ini keadaan masyarakat umumnya rawan, karena nilai-nilai lama mulai



ditinggalkan, sedangkan nilai baru belum melembaga. Disinilah letak penghayatan dan pengamalan Pancasila, agar nilai baru yang kita perlukan untuk membangun masyarakat modern tetap berkembang di atas kepribadian sendiri. Ini mengharuskan Pancasila dihayati dan diamalkan secara kreatif. Ini mengharuskan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila membatasi dirinya pada hal yang pokok, pada intinya yang tak berubah.

Sehubungan dengan modernisasi ini barang kali ada gunanya untuk menyampaikan sesuatu persepektif sosiologi mengenai ciri-ciri pribadi manusia modern. Ciri-ciri itu adalah:

- a. Sikap terbuka terhadap pengalaman baru.
- b. Kesediaan menerima baik perubahan social.
- c. Kecendrungan untuk mempunyai pendapat mengenai sejumlah besar persoalan.
- d. Lebih giat mencari fakta dan informasi untuk mengetahui sesuatu persoalan.
- e. Menghargai waktu.
- f. Berhasil guna (efficacy).
- g. Berorientasi terhadap perencanaan atau plening.
- h. Percaya bahwa dunia berjalan cukup sesuai dengan hukum serta dibawa pengendalian manusia.
- i. Menilai tinggi keterampilan teknis serta berpendapat bahwa imbalan harus diberikan sesuai dengan aturan dan tidak berdasarkan sikap semau-maunya.
- j. Menilai tinggi pendidikan formal dalam bidang seperti baca, tulis dan berhitung serta pekerjaan yang menyangkut hal-hal baru.
- k. Menyadari serta menghargai martabat orang lain.
- l. Mengerti hakekat produksi.

## **6. Disorganisasi (Disintegrasi) dan Reorganisasi**

### **a. Pengertian**

Organisasi merupakan artikulasi dari bagian-bagian yang merupakan bagian dari bagian-bagian yang

merupakan bagian dari suatu kebulatan, yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tubuh manusia misalnya, terdiri dari bagian-bagian yang masing-masing mempunyai fungsi dalam rangka kehidupan seluruh tubuh manusia sebagai suatu kesatuan. Demikian juga kehidupan dalam kota, desa merupakan suatu organisasi tersendiri. Maka, apa yang dinamakan disorganisasi?

Disorganisasi adalah suatu keadaan tidak adanya keserasian pada bagian-bagian dari suatu kebulatan. Misalnya dalam masyarakat, agar dapat berfungsi sebagai organisasi, harus ada keserasian antar bagian-bagiannya seperti lembaga kemasyarakatan, norma-norma, nilai-nilai dan sebagainya.

Kreteria terjadinya disorganisasi terletak pada persoalan apakah organisasi tersebut berfungsi secara semestinya atau tidak, karena keseimbangan bagian-bagiannya dalam melaksanakan fungsinya masing-masing. Suatu mesin ketik tertentu bekerja lebih baik dari yang lainnya karena keseimbangan antara bagian-bagiannya didalam melaksanakan fungsinya lebih baik.

Suatu persoalan lain timbul bahwa disorganisasi dalam masyarakat acapkali dihubungkan dengan moral, dalam arti angapan-angapan tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Sedangkan reorganisasi atau reintegrasikan adalah suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. Tahap reorganisasi dilaksanakan apa bila norma-norma dan nilai-nilai yang baru telah institutionalized dalam diri warga-warga masyarakat.

b. Bentuk-bentuk disorganisasi

Gambaran mengenai disorganisasi dalam masyarakat yang tradisional maupun masyarakat modern berpengaruh terhadap jiwa para anggotanya. Karena watak dan jiwa seseorang sedikit banyak merupakan pencerminan dari kebudayaan

masyarakatnya. Pada masyarakat-masyarakat tradisional, aktifitas-aktifitas seseorang seumpama berada dibawah kepentingan masyarakatnya. Segala sesuatu didasarkan pada tradisi dan setiap usaha-usaha untuk mengubah satu unsur saja, berarti pula struktur masyarakat seluruhnya. Struktur masyarakat tersebut dianggap sesuatu yang suci, yang tidak dapat diubah-ubah. Perubahan kecil mungkin saja terjadi, akan tetapi yang tidak terlalu menyolok dan berjalan dengan lambat sekali. Perubahan mengakibatkan perubahan dalam jiwa setiap anggota masyarakat.

Apabila disorganisasi terjadi dengan sangat cepat, misalnya karena meletusnya revolusi, maka akan timbul hal-hal yang sukar untuk dikendalikan. Dalam pada itu reorganisasi tidak dapat terjadi dengan cepat, oleh karena terlebih dahulu harus menyesuaikan diri dengan masyarakat. Kemungkinan akan terjadi suatu keadaan dimana norma-norma yang baru belum terbentuk, keadaan mana yang merupakan keadaan kritis dalam masyarakat. Pada keadaan demikian dijumpai suatu "anomie" yaitu suatu keadaan dimana tak ada pegangan terhadap apa yang baik dan apa yang tidak baik., sehingga anggota-anggota masyarakat tidak mampu mengukur tindakan-tindakan, oleh karena batas-batas tak ada. Anomie tersebut mungkin pula terjadi pada waktu suatu disorganisasi maningkat ketahanan reorganisasi. Contohnya, norma-norma dalam lalu lintas, terutama dikota-kota besar di Indonesia (Jakarta). Sopan santun berlalu lintas yang secara minimal mengangkat ketaatan seorang pengemudi atau orang jalan kaki, sering peraturan-peraturan lalu lintas dilanggar, atau cenderung untuk dilanggar, padahal peraturan tersebut bertujuan menjaga keselamatan masyarakat, termasuk pengemudi dan pejalan kaki. Hal itu dapat dijadikan tolak ukur terhadap keadaan sampai dimana

disorganisasi masih berlangsung, apabila telah ada suatu reorganisasi.

## 7. Ketidakseimbangan dalam Perubahan dan Cultural Lag

Pada masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami perubahan-perubahan, tidak selalu perubahan-perubahan pada unsur-unsur masyarakat dan kebudayaan mengalami kelajuan yang seimbang. Didalam masyarakat, ada unsure-unsur yang sukar untuk berubah. Biasanya unsure-unsur kebudayaan kebendaan lebih mudah berubah dari pada unsur-unsur kebudayaan rohaniannya. Misalnya, mengenai sistem pendidikan anak-anak mempunyai hubungan yang erat dengan dipekerjakannya tenaga-tenaga wanita pada industri. Apabila dalam hal ini terjadi ketidakseimbangan yaitu bahwa satu unsur berubah dengan cepatnya, sedangkan unsur-unsur lainnya yang berhubungan erat atau berubah dengan lambat sekali, maka kemungkinan akan terjadi kegagalan dalam hubungan antara unsur-unsur tersebut diatas sehingga keseimbangan masyarakat terganggu.

Contohnya lagi, apa bila penambahan penduduk berjalan dengan cepat, maka untuk menjaga tata tertib dalam masyarakat diperlukan pula penambahan petugas-petugas keamanan yang seimbang banyaknya. Ketidakseimbangan mungkin akan menaikkan volume kejahatan yang terjadi. Demikian pula bertambah banyaknya sekolah-sekolah, harus diimbangi dengan penambahan tenaga kerja, apa bila terjadi ketidakseimbangan, maka mungkin timbul pengangguran dan seterusnya. Sejauh mana akibatnya keadaan tidak seimbang didalam laju perubahan tersebut. Apabila unsur-unsur dalam masyarakat sangat erat integrasinya seperti halnya dengan bagian-bagian sebuah jam, maka ketidakseimbangan mempunyai akibat-akibat yang sangat jauh. Kalau bagian-bagian dari sebuah jam tidak bekerja dengan semestinya maka jam itu tidak akan dapat berfungsi dengan baik.

Suatu teori yang terkenal didalam sosiologi mengenai perubahan dalam masyarakat adalah teori cultural lag dari William F. Ogburn. Teori tersebut mulai dengan kenyataan bahwa pertumbuhan kebudayaan tidak selalu sama cepatnya dalam keseluruhannya seperti diuraikan di atas, akan tetapi ada bagian yang tumbuh cepat, sedangkan ada yang lambat. Perbedaan antara taraf kemajuan dari berbagai bagian dalam kebudayaan dari suatu masyarakat, dimana cultural lag, artinya ketinggalan kebudayaan. Dapat juga terjadi apa bila laju perubahan dari dua unsur masyarakat atau lebih yang mempunyai korelasi, Tidak seimbang, sehingga unsur yang satu tertinggal dari (oleh) unsur lainnya.

Ketinggalan yang mencolok adalah tertinggalnya alam pikir dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, hal mana dijumpai terutama pada masyarakat-masyarakat yang sedang berkembang seperti Indonesia ini. Contohnya ; penggunaan komputer di Indonesia. Komputer salah satu hasil dari perkembangan teknologi yang pesat di negara-negara yang telah maju, penggunaan alat tersebut di Indonesia untuk keperluan statistik, memerlukan pendidikan khusus bagi mereka yang berurusan dengan alat tersebut, harus pula ada peralatan khusus untuk memperbaikinya dan konstan dan seterusnya. Ini belum tersedia, misalnya listrik penyediaanya kurang dapat menyebabkan macetnya komputer atau bahan dapat merusak alatnya dan untuk memperbaikinya belum tersedia alat-alat dan ahli-ahlinya yang cukup.

Acapkali ketinggalan tersebut dapat menyebabkan kecelakaan pada jiwa manusia. Misalnya penggunaan tangga berjalan (escalator) pada beberapa gedung-gedung bertingkat. Karena belum mengerti cara-cara mempergunakannya dan juga tidak memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada, misalnya harus memakai alas kaki agar tidak terkena aliran listrik. Apabila tidak

diacuhkan, akibatnya dapat mencelakakan orang yang menggunakannya.

Yang kurang diperhatikan adalah penggunaan mobil, sebagai contoh selanjutnya. Mobil dimaksudkan untuk mempermudah kegiatan-kegiatan manusia, terutama menghemat tenaga dan menyingkat waktu. Akan tetapi kebalikannya yang sering terjadi yaitu acapkali terjadi mobil itu memperbudak manusia yang menggunakannya. Mobil memerlukan perawatan yang cermat agar tetap berfungsi. Perawatan memerlukan pengetahuan khusus dan juga biaya yang untuk orang Indonesia pada dewasa ini terasa beratnya. Jarang dengan suka mobilnya setiap hari, apa cukup bensinnya, air accunya baik, dan bahkan jarang pula yang lebih dahulu memanaskan mesin mobil sebelum dipergunakan. Hal ini disebabkan oleh karena belum adanya pengetahuan yang sempurna mengenai hal itu.

Tidak mudah untuk mengatasi persoalan demikian, paling tidak alam pikiran manusia harus mengalami perubahan terlebih dahulu yaitu alam pikiran tradisional ke alam pikiran yang modern. Alam pikiran yang modern ditandai oleh beberapa hal yang diatas telah disebut, sebagai ciri-ciri pribadi manusia modern. Semuanya dapat dicapai dengan pendidikan agar orang dapat berpikir secara ilmiah. Cara berpikir secara ilmiah tersebut harus “ Institutionalized dalam diri manusia terutama pada masyarakat-masyarakat yang sedang berkembang, untuk mencegah terjadinya “cultural lag”.

#### **8. Kepincangan dan Keterbelakangan**

Dapat kita lihat dan rasakan dalam masyarakat dewasa ini, timbulnya masalah sosial secara bertubi-tubi. Banyak individu mengalami isolasi yang membawanya kepada *alienosi* atau keterasingan, yang menjurus kepada sikap asosial dan bahkan anti-sosial yang diungkapkan dengan perilaku yang beringas.

Juga mispersepsi dan miskonsepsi mengenai keadaan masyarakat, tidak hanya dapat menimbulkan sinisme yang menjurus kepada sikap asosial (anti sosial). Apa yang dipersepsikan sebagai kepincangan, dapat pula menimbulkan reaksi sebaliknya, yakni timbulnya utopisme yang mengidam-idamkan hal-hal yang mustahil dapat tercapai, karena kondisi-kondisinya untuk itu tidak ada.

Dan jika hal-hal yang diimpi-impikan itu tidak kunjung menjadi kenyataan, mudah timbul frustasi, yang pada gilirannya dapat pula menimbulkan sikap negatif atau sekurang-kurangnya apatis.

Gejala-gejala semacam ini juga terdapat dalam masyarakat kita. Dalam hal itu perlu kita sadari, bahwa yang menyebabkan kepincangan-kepincangan sosial tidak hanya faktor-faktor subjektif yakni manusia-manusia, melainkan juga faktor-faktor objektif/diluar diri manusia individual. Dalam hal ini faktor objektif yang merupakan kondisi bagi adanya kepincangan-kepincangan sosial pada masyarakat-masyarakat yang sedang berkembang, adalah kondisi keterbelakangan itu sendiri. Dengan demikian, jika ingin mengadakan perbaikan-perbaikan, maka perlu kita mengetahui hal-hal apa yang disebabkan oleh faktor-faktor subjektif dan hal-hal apa yang disebabkan oleh faktor-faktor objektif.

Masalah-masalah sosial yang menarik minat kita atau yang mudah menyentuh rasa keprihatinan kita, adalah masalah-masalah yang menyangkut bidang ekonomi. Memang aspek modernisasi yang paling dramatis adalah aspek pertumbuhan ekonomi.

Mengingat akan gejala-gejala itu dan niat bangsa kita untuk secara berencana memulai industrialisasi dengan Pelita IV (Pembangunan Lima Tahun ke empat) nanti, maka perlulah kita mempunyai persiapan yang tepat mengenai masalah-masalah yang ditimbulkan oleh modernisasi di bidang ekonomi serta titik tolaknya, yakni keterbelakangan di bidang ekonomi. Persepsi subjektif dan moralis terhadap



kepincangan-kepincangan, baik yang menjadi ekspresi daripada keterbelakangan, maupun yang merupakan akibat daripada “the agony of modernization” sudah barang tentu tidak memadai sebagai titik tolak untuk mencapai kemajuan dan perbaikan.

## 9. **Generation Gap**

Hubungan antara anak dengan keluarganya dalam masyarakat sekarang ini terdapat adanya gejala yang wajar, yang disebut sebagai *generation gap* (kesenjangan angkatan). Orang tua mengharapkan agar kelak anaknya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang pada dasarnya sama dengan dia. Perubahan masyarakat yang lambat tidak berpengaruh kepada bentuk-bentuk hubungan antar generasi, dalam masyarakat serupa itu berlangsung hubungan antar angkatan terpelihara dengan baik.

Dalam masyarakat yang relatif statis seorang anak tumbuh berkembang menjadi tidak lain daripada potret ayahnya sendiri. Karena hal-hal tersebut, menurut seorang psikolog bernama Dr. J. Ribery mengatakan bahwa *generation gap* adalah gejala yang timbul dari perbedaan tingkat perkembangan psikologi masing-masing angkatan. Bentuk-bentuk reaksi kepada gejala psikologi ini dapat bermacam-macam, ada berbentuk tindakan positif seperti lari kepada buku-buku dan ide-ide, sehingga membangkitkan minatnya kepada pemikiran-pemikiran spekulatif, filsafat, tasawuf, teologi dan lain-lain, membuat prestasi setinggi-tingginya di sekolah, kegiatan di bidang olahraga, seni dan sebagainya. Tetapi ada pula berbentuk tindakan yang negatif dapat dinilai sebagai anti sosial, seperti perkelahian, ngebut, minuman keras, narkoba, kejahatan-kejahatan yang lain.

Meskipun ketegangan dalam hubungan antar generasi dapat diterangkan dalam kaitan suatu perkembangan psikologi, tidaklah berarti bahwa faktor-faktor perseorangan merupakan satu-satunya sebab. Gejala

yang timbul di kalangan remaja kota-kota besar, maka perhatian dari sistem keluarga pedesaan ke sistem keluarga perkotaan mempunyai pengaruh yang tidak kecil (Nurcholish Madjid di Kota Pasar, Prisma no.5 tahun ke II Oktober 1973 Jakarta halaman 45).

## **BAB V**

# **ARTI, PERANAN SOSIALISME PEMBANGUNAN DAN PERANAN SIKAP MENTAL DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT**

### **A. PENDAHULUAN**

Untuk meningkatkan kesejahteraan bangsanya, maka negara sedang berkembang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Demikian pula negara Indonesia, untuk mengejar ketinggalan di bidang ekonomi, teknologi dan pengetahuan Indonesia melakukan pembangunan.

Pembangunan disusun dalam bentuk program-program pembangunan nasional dengan menganut sistem ekonomi berencana. Dengan bertahap disusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Prioritas diletakkannya dalam bidang ekonomi dengan ditunjang oleh teknologi dan pengetahuan.

Sesuai dengan alasan dasar negara yaitu Pancasila, maka sistem ekonomi Indonesia berlandaskan Pancasila juga, yaitu Demokrasi Ekonomi, yang biasa disebut juga dengan Sistem Ekonomi Pancasila.

Kemerdekaan telah diperoleh sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 maka untuk mengisi kemerdekaan kita harus melaksanakan pembangunan. Pembangunan telah dilaksanakan sejak periode revolusi fisik. Sekarang sampai pada periode Pembangunan Orde Baru sejak tahun 1966, bangsa Indonesia giat-giatnya membangun, dan hasilnya sudah mulai dirasakan oleh seluruh rakyat, sudah memasuki Repelita IV. Maka Orde Baru dapat disebut Orde Pembangunan.

Sistem ekonomi Pancasila adalah konsep ekonomi yang mampu membina kemakmuran setiap orang dalam hubungan kehidupan bersama baik sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara bahkan juga sebagai anggota masyarakat internasional.

Haluan negeri dalam Garis-garis Besar merupakan pernyataan kehendak rakyat yang pada hakikatnya adalah suatu Pola Umum Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional maksudnya adalah mewujudkan Tujuan Nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Walaupun pembangunan sudah disusun demikian rupa, namun keberhasilannya tergantung kepada partisipasi seluruh rakyat. Demikian pula sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia.

Sikap mental adalah keadaan mental di dalam jiwa dan diri seorang individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Sikap mental yang positif dapat mendorong dalam pembangunan. Sebagian besar sikap mental bangsa Indonesia masih belum cocok dengan pembangunan masih berserah kepada nasib, percaya kepada mitos, suka lari kealam kebatinan, kurang berjiwa wiraswasta, bergaya hidup santai, kurang semangat menabung dan lain-lainnya. Sikap mental sukar dirubah tapi dapat diperbaiki dengan melalui pendidikan, tapi memerlukan beberapa generasi lagi. Dengan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil. Maka arah pembangunan jangka panjang tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah juga rohaniah dan keseimbangan antara keduanya. Maka sikap mental termasuk bidang rohani-mental-spiritual, juga menjadi sasaran pembangunan.

### **1. Tujuan Instruksional Umum**

Dengan mempelajari modul ini, anda diharapkan dapat memahami arti peranan sosialisme pembangunan dari peranan sikap mental dalam pembangunan masyarakat.

## 2. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mempelajari modul ini, anda diharapkan dapat :

- a. Menjelaskan sebab-sebab ketinggalan bangsa Indonesia di bidang ekonomi;
- b. Menjelaskan unsur-unsur kebudayaan apa saja yang telah maju;
- c. Menjelaskan kenapa pembangunan diprioritaskan dalam bidang ekonomi;
- d. Menyebutkan macam-macam sistem ekonomi yang ada;
- e. Menjelaskan arti sistem ekonomi berencana;
- f. Menjelaskan arti sistem ekonomi Pancasila;
- g. Menjelaskan ciri-ciri Demokrasi Ekonomi;
- h. Menyebutkan dasar hukum sistem ekonomi pancasila;
- i. Menjelaskan maksud sistem ekonomi yang sesuai dengan Pancasila;
- j. Menjelaskan hubungan Tujuan Nasional dengan Pembangunan Nasional;
- k. Menjelaskan arti sosialisme pembangunan;
- l. Menjelaskan peranan sosialisme pembangunan;
- m. Menjelaskan hakikat pembangunan;
- n. Menjelaskan asas-asas pembangunan;
- o. Menjelaskan arti sikap mental;
- p. Menjelaskan peranan sikap mental dalam pembangunan;
- q. Menjelaskan bagaimana sikap mental bangsa indonesia pada umumnya;
- r. Menjelaskan sikap mental negatif yang dapat menghambat pembangunan;
- s. Menjelaskan sikap mental yang cocok untuk pembangunan;
- t. Menjelaskan cara-cara yang dapat dilakukan untuk merubah sikap mental seseorang.

## B. SISTEM EKONOMI DI INDONESIA

Sistem berarti susunan atau cara, yang mengandung pengertian aktif dan pasif. Kalau dihubungkan dengan ekonomi, maka sistem ekonomi suatu negara berarti susunan

perekonomian suatu negara (pasif) atau cara-cara suatu negara mengatur perekonomiannya (aktif). Kedua pengertian itu berkaitan satu sama lainnya, sehingga kalau membicarakan sistem perekonomian, maka yang dimaksud adalah kedua pengertian itu, baik strukturnya maupun cara-cara mengaturnya.

Terdorong oleh sifat manusia yang selalu tidak puas maka timbullah perjuangan untuk meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap negara atau bangsa di dunia ini selalu berusaha memanfaatkan segala daya dan dana (fund and forces) untuk meningkatkan kemakmurannya. Tidak hanya negara yang masuk kategori dunia ketiga (seperti Indonesia) yang giat melaksanakan pembangunan, akan tetapi bahkan mungkin serius adalah negara-negara yang sudah maju (Developed Countries).

Secara teoritis dikenal adanya dua sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi kapitalis (liberal) dan sistem ekonomi komunis (etatis). Kedua sistem itu bertentangan atau bertolak belakang secara tajam, satu dengan lainnya berada pada kutub yang sangat berlawanan. Sesuai dengan tuntutan zaman, maka penerapan kedua sistem tersebut telah mengalami modifikasi, sehingga waktu ini tidak dijumpai lagi bentuknya yang asli.

Di antara kedua sistem ekonomi tersebut, terdapat berbagai sistem yang oleh negara-negara pemakainya diberikan berbagai nama sesuai dengan selera negara yang bersangkutan. Namun demikian pada dasarnya dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi ini mengambil segi-segi positif dari kedua sistem tersebut terdahulu, disesuaikan dengan kondisi negara yang bersangkutan. Oleh karena itu dikenal adanya sistem ekonomi berencana atau sering juga disebut ekonomi sosialis. Dalam kaitan ini, buat Indonesia barangkali dapat disebut sistem ekonomi Indonesia atau sistem ekonomi Pancasila.

## 1. Sistem Ekonomi Berencana

Diantara dua kutub sistem ekonomi yang sangat bertolak belakang yaitu kapitalis dan nasionalis (komunis), terdapat sejumlah sistem ekonomi yang dilaksanakan oleh berbagai negara khususnya negara-negara sedang berkembang yang kesemuanya dapat disebut sebagai sistem ekonomi berencana. Dengan istilah itu tidak berarti bahwa kedua sistem ekonomi yang disebut terdahulu tidak memakai rencana sama sekali. Keduanya yang menggunakan rencana, hanya tingkat kebebasan dalam kedua sistem itu sangat berbeda. Sistem kapitalis, khususnya setelah mendapat kritik yang bertubi-tubi, merencanakan ekonomi melalui kekuatan pasar, tingkat kebebasan masih sangat tinggi. Sedangkan sistem komunis merencanakan seluruh kegiatan ekonomi secara sentral, sehingga dapat dikatakan tidak ada atau sedikit sekali ada kebebasan, sebab segala sesuatu ditentukan dari pusat penguasa.

Buat negara-negara sedang berkembang, tiada jalan lain baginya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsanya kecuali melalui pembangunan ekonomi berencana. Mereka tidak dapat menyerahkan nasib bangsanya hanya kepada kekuatan pasar semata, yang hanya menguntungkan mereka yang berposisi kuat saja. Sedangkan mereka yang lemah akan tergilas oleh mekanisme pasar, justru mereka inilah yang harus mendapat perhatian utama untuk ditingkatkan kesejahteraannya. Sebaliknya sebagai negara yang baru mengecap kemerdekaan, sudah tentu tidak ingin menerima keadaan serba tertekan dan terkendali, sebagaimana halnya dalam negara-negara komunis. Oleh karena itulah negara-negara berkembang pada umumnya memilih sistem ekonomi berencana sebagai cara untuk membangun ekonominya.

Yang dimaksud dengan sistem ekonomi di sini adalah cara-cara mengatur dan membangun perekonomian bangsa berlandaskan pada rencana yang telah dipersiapkan dengan

matang, dengan menentukan prioritas-prioritas yang menyangkut kehidupan bangsa sebagai keseluruhan dan bersifat sentral bagi perkembangan ekonomi bangsa itu lebih lanjut.

Untuk dapat membuat rencana ekonomi bangsa itu lebih lanjut, dapat melaksanakan dengan berhasil mencapai sasaran yang dimaksudkan, maka harus tersedia data informasi yang cukup tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia beserta dengan adat kebiasaannya, tersedianya tenaga-tenaga pelaksana yang berkemampuan dan berkualitas tinggi. Atau menurut Dr. Azhari Zahri, harus terpenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Tersedianya bahan-bahan statistik mengenai berbagai aktivitas ekonomi dan demografi,
- b. Pemakaian teknik perencanaan,
- c. Adanya pemerintahan yang kuat, jujur dan mampu melaksanakan planning.

Kalau syarat minimal itu tidak terpenuhi, sukarlah dibayangkan akan keberhasilan rencana itu. Bahkan prof. Arthur Lewis, mengatakan, dalam hal di mana tidak terdapatnya administrasi pemerintahan semacam itu (kuat, kompeten dan jujur), seringkali jauh lebih baik bagi pemerintah untuk ber-laisser faire daripada harus berpura-pura berencana.

Buat negara-negara berkembang masalah yang dihadapi cukup banyak dan bahkan cukup berat. Di samping lemahnya atau tiadanya statistik yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, langkanya tenaga ahli baik untuk perencanaan maupun pelaksanaan merupakan hambatan yang serius.

Sebagian besar dari mereka adalah negara-negara yang baru merdeka dari penjajahan yang cukup lama. Setelah merdeka, banyak di antaranya mengalami kekalutan atau pergolakan dalam negeri. Oleh karena itu maka sukar diperoleh data informasi tentang berbagai hal yang sangat diperlukan sebagai titik tolak perencanaan. Sedangkan



kelangkaan tenaga ahli memang disengaja oleh penjajah, guna mengekalkan penjajahannya.

Selanjutnya masalah yang cukup berat adalah pemilihan prioritas sasaran antara pertumbuhan penghasilan nasional (Gross Nasional Product/GNU) dengan pemerataan atau keadilan, masing-masing pilihan untuk membawa konsekuensi sendiri-sendiri baik positif maupun negatif. Jelasnya, kalau aspek pertumbuhan didahulukan, maka konsekuensinya adalah penekanan pada efisiensi dan produktivitas tinggi. Itu berarti penggunaan kapital intensif dengan teknologi tinggi (maju).

Akibatnya ialah tenaga kerja yang diserap hanya tenaga ahli dan yang berketerampilan tinggi, sesuai dengan tuntutan teknologi tersebut. Dengan demikian maka lapangan kerja yang dapat disediakan sangat terbatas, sehingga mungkin sekali timbul pengangguran, yang selanjutnya menyebabkan penghasilan (income) per kapita menjadi timpang. Mereka yang bermodal dan berketerampilan akan makin kaya sedang sebagian besar rakyat miskin dan bodoh akan tetap miskin atau mungkin lebih miskin lagi. Dan kesenjangan hidup makin tajam, suatu keadaan yang sangat negatif bahkan dapat membahayakan persatuan nasional.

Kalau aspek pemerataan atau keadilan yang diutamakan, maka pendekatannya seharusnya employment oriented (berorientasi kepada tenaga kerja) atau Labour intensive. Agar sebanyak mungkin dapat menyerap tenaga kerja. Dengan demikian sebagian besar rakyat menerima penghasilan dari pembangunan, sehingga income per kapita menjadi agak merata. Namun demikian hal seperti itu membawa akibat tidak efisiennya pelaksanaan pembangunan, karena tenaga yang dipakai tidak memenuhi kualifikasi yang diperlukan sehingga biaya pembangunan menjadi tinggi. Akibat GNP atau NNP (Net Nasional Product) tidak cukup besar sehingga pertumbuhan ekonomi lambat. Sudah tentu sukar atau tidak mungkin bagi

perencana (decision maker) untuk memilih/menentukan pertumbuhan cepat sekaligus pemerataan atau full employment. Kondisi objektif menuntut mana harus didahulukan, sebab pemilihan kedua sasaran itu sekaligus akan menggiring kepada kegagalan.

## 2. **Konsep Ekonomi dalam Pancasila**

Telah menjadi kesepakatan bersama bahwa Pancasila adalah ideologi negara, filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia itu berarti bahwa negara dengan segala isinya harus dikelola sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kemudian diarahkan untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut. Demikian juga halnya dengan konsep ekonomi, yang harus bersumber dan sekaligus bermuara pada Pancasila.

Yang dikehendaki adalah konsep ekonomi yang mampu membina kemakmuran setiap orang dalam hubungannya dengan kehidupan bersama, baik sebagai individu, sebagai anggota masyarakat maupun sebagai warga negara, bahkan juga sebagai anggota masyarakat internasional.

## 3. **Prinsip-prinsip Ekonomi dalam Pancasila**

Untuk memahami prinsip ekonomi dalam Pancasila terlebih dahulu perlu dikaji dan dihayati hakikat sila-sila dari Pancasila itu sendiri. Dilihat dari segi ekonomi, prinsip apa yang terkandung dalam setiap sila Pancasila itu.

### a. *Ketuhanan Yang Maha Esa*

Tuhan adalah Maha Pengasih dan Penyayang, oleh karena itu Tuhan menghendaki supaya umat-Nya hidup berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Kesengsaraan dan penderitaan itu adalah akibat tingkah polah manusia yang tidak disiplin dalam menjalankan ajaran Tuhan.

Dalam rangka membahagiakan hidup manusia, maka Tuhan menciptakan dunia dengan segala isinya.

Terserah manusia memanfaatkan isi dunia ini, apakah akan dikelola dengan baik sehingga benar-benar membuat manusia berbahagia, ataukah akan disalahgunakan sehingga menyengsarakan atau bahkan membahayakan diri manusia itu sendiri.

Alam memang kikir, tidak begitu saja memberikan hasil untuk dinikmati oleh manusia. Alam adalah ciptaan Tuhan segala sesuatu yang diperlukan manusia, telah tersedia, hanya diperlukan usaha untuk menggantinya. Berarti bahwa manusia harus bekerja giat dan jujur atau menyalahgunakan karunia Tuhan, akan menyengsarakan atau membahayakan diri manusia itu sendiri.

Dalam hubungan hidup bersama, Tuhan mengajarkan supaya manusia saling asah, saling asih dan saling asuh, itu berarti bahwa manusia harus hidup saling tolong menolong, sebab apa arti hidup berkecukupan sendiri di tengah-tengah orang kelaparan. Kondisi demikian tidak memberikan kebahagiaan lahir batin, perasaan selalu was-was.

Berdasarkan gambaran tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa dalam memenuhi kebutuhan, manusia harus bekerja giat, jujur dan tolong menolong. Yang diutamakan adalah kemakmuran bersama, bukan kemakmuran orang seorang. Hal ini merupakan prinsip yang harus dipegang oleh ekonomi Pancasila.

*b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*

Walaupun secara keseluruhan, Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dalam arti setiap silanya mengandung makna sila-sila lainnya, akan tetapi sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, paling erat hubungannya dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Perikemanusiaan adalah salah satu ajaran Ketuhanan yang mengharuskan manusia hidup bermoral, mencintai sesama manusia lainnya, berperilaku sesuai dengan

norma-norma kemanusiaan, tidak melakukan penipuan/pemerasan terhadap manusia lainnya.

Makna sila kedua ini adalah anti penjajahan, penghisapan manusia oleh manusia lainnya, sebab bertentangan dengan perikemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan jangan dipakai sebagai alat penipuan, pemerasan, tetapi harus saling menguntungkan.

Jelas bahwa prinsip yang terkandung dalam sila kedua ini adalah memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat dan sebagai kawan dalam usaha bersama untuk mencapai kemakmuran.

c. *Persatuan Indonesia*

Nasionalisme waktu lampau adalah untuk menentang penjajahan, dewasa ini untuk mengisi kemerdekaan dan membinanya. Perjuangan nasionalisme Indonesia mengandung perjuangan politik dan ekonomi secara bersama-sama.

Dalam hubungan ini pemerintah Orde Baru berkali-kali menekankan baha pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan dewasa ini adalah untuk kepentingan nasional menuju kepada masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu pembangunan dilaksanakan menyeluruh di seluruh tanah air, meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan nasional (poleksosbud hankamnas).

Biasanya erosi semangat nasionalisme disebabkan oleh kesenjangan hidup yang tajam diantara para warga negara. Tiadanya perasaan senasib dan sepenanggungan sangat melemahkan semangat persatuan. Oleh karena itu maka masalah pemerataan pembangunan menjadi sangat penting untuk benar-benar dilaksanakan dengan konsekuen. Melalui asas pemerataan dapat diharapkan, teratasinya masalah kesenjangan hidup selanjutnya,

diharapkan tertanamnya perasaan senasib dan sepenanggungan sebangsa dan setanah air. Sehingga akhirnya dapat membangkitkan semangat persatuan nasional yang lebih kuat.

Jadi jelaslah bahwa tingkah laku ekonomi terkandung dalam sila ke tiga ini, adalah usaha bersama yang menuju kepada kemakmuran bangsa dalam pergaulan dunia.

*d. Kerakyatan Yang Di Pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan*

Makna sila keempat ini jelas adalah demokrasi yang berlandaskan pikiran sehat (*common sence*), bukan demokrasi liberal dan bukan demokrasi rakyat seperti di Rusia. Ini adalah khas Indonesia yang disebut Demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila ini tidak hanya mengandung makna politis juga ekonomis, yaitu bahwa setiap rakyat Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum, pemerintahan dan pertahanan keamanan, juga mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam pekerjaan, jabatan, jaminan sosial, pokoknya kewajiban dan hak yang sama dalam sumber-sumber penghidupan dan menikmati hidup yang layak sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat. Itu berarti bahwa pembangunan harus mengikutsertakan rakyat dan ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat banyak. Pembangunan yang tidak berorientasi pada partisipasi dan kepentingan rakyat banyak, dengan sendirinya tidak cocok dengan makna sila ke empat ini.

Partisipasi rakyat secara formal dan politis dalam permusyawaratan perwakilan dan secara praktis tampak dalam rencana yang disepakati berupa Proyek yang menyentuh kehidupan rakyat banyak. Kalau rencana pembangunan bertitik berat pada sektor-sektor yang menyangkut kehidupan rakyat banyak, maka dapat diharapkan rakyat akan berpartisipasi aktif. Sedangkan

kalau orientasinya pada segelintir lapisan masyarakat elit dengan konsumsi mewahnya, maka tidak bisa disalahkan kalau rakyat pasif atau bahkan menentanginya, karena memang berlawanan dengan maksud sila ke empat ini.

Jelas kiranya bahwa prinsip yang dikehendaki disini adalah tingkah laku ekonomi berencana yang mengikutsertakan dan berorientasi pada kepentingan rakyat banyak, demi kemakmuran hidup bersama.

*e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*

Telah menjadi kesepakatan bersama (melalui MPR), bahwa sasaran pembangunan adalah masyarakat adil makmur material dan spiritual. Namun demikian, terhadap langkah-langkah yang menuju kepada sasaran itu masih terdapat perbedaan pendapat yang kadang-kadang menjadi perdebatan cukup sengit, baik di kalangan para ahli maupun administrator-administrator pembangunan. Khususnya mengenai masalah adil dengan makmur, manakah yang harus didahulukan. Sebagian pendapat bahwa

- 1) Perekonomian harus tumbuh dengan cepat terlebih dahulu sebelum program-program pemerintah untuk mencapai keadilan sosial dapat dilaksanakan.
- 2) Keadilan harus didahulukan, karena keadilan lebih fundamental dan dicantumkan terlebih dahulu dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Tambahan pula kecukupan materi semata tanpa disertai rasa cukup/puas tidak akan terjamin kemakmuran. Oleh karena itu harus ada pengendalian diri atau pengendalian hawa nafsu untuk dapat menikmati kemakmuran, sebab nafsu manusia tidak ada batasnya, terpenuhi satu timbul yang lain atau berkembang melampaui kemampuan memenuhinya. Dengan demikian maka keadilan harus didahulukan atau setidaknya-tidaknya bersamaan dengan aspek kemakmuran.

Prinsip ekonomi yang terkandung dalam sila ke lima Pancasila adalah prinsip keadilan yang bersifat menyeluruh bagi seluruh rakyat, lapisan masyarakat. Itu berarti bahwa hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat dan pendekatannya mengarah pada penciptaan lapangan kerja yang menuju full employment. Oleh karena itu maka secara taktis selalu diusahakan teknologi tepat guna sedangkan teknologi maju hanya dipakai kalau memang tidak ada pilhan lain, maksudnya karena sifat sasaran, kondisi pekerjaan dan jenis objeknya memang mengharuskan demikian. Tegasnya kalau tanpa teknologi maju memang tidak mungkin dapat menggarap objek termasuk dengan berhasil.

#### **4. Demokrasi Ekonomi**

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampak produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ditangan perseorangan.

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 pasal ini, merupakan pasal yang amat penting karena pasal ini menjadi landasan dan pangkal tolak bagi pembangunan ekonomi. Bahwa masalah perekonomian dicantumkan dalam suatu pasal dibawah bab mengenai makna yang dalam dan menunjukkan dengan jelas bahwa tujuan ekonomi nasional adalah untuk kesejahteraan sosial dan kemakmuran bagi rakyat banyak dan bukan untuk orang

perorangan atau sesuatu golongan. Dalam pasal 33 ini pula ditegaskan asas demokrasi ekonomi dalam perekonomian Indonesia.

Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut GBHN menggariskan bahwa pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan kepada Demokrasi Ekonomi mencantumkan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pengarahannya dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pergerakan dan bimbingan serta kegiatan-kegiatan yang nyata.

Demokrasi Ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri positif yang perlu terus menerus dipupuk dan dikembangkan. Ciri-ciri positif tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- d. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaan ada pada Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat pula.
- e. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- f. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.



- g. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
- h. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Sebaliknya, dalam Demokrasi Ekonomi harus dihindarkan timbulnya ciri-ciri negatif sebagai berikut:

- a. Sistem free fight liberalism yang menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
- b. Sistem etatis dalam mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
- c. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Selanjutnya dalam Demokrasi Ekonomi, sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 seperti telah diuraikan di atas, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bangun perusahaan yang sesuai dengan asas kekeluargaan tadi ialah koperasi. Perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan perseorangan.

Dengan demikian terdapat tiga unsur penting dalam tata perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dalam Demokrasi Ekonomi yaitu sektor negara, sektor swasta dan koperasi. Ketiga sektor ini harus dikembangkan secara serasi dan mantap.

Berdasarkan deskripsi ciri-ciri Demokrasi Ekonomi atau disebut sistem Ekonomi Pancasila, maka semakin jelaslah watak dan hakikat dari Sistem Ekonomi Pancasila, yang menurut Prof. Dr. Mubyarto dikatakan sebagai sistem

ekonomi campuran dari kedua sistem (ekstrim) ekonomi yang dikenal yaitu liberal-kapitalis di satu pihak dan sosialis-komunis di lain pihak, dengan ciri-cirinya yang negatif (Prof. Dr. Mubyarto, Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan, 1980: 84).

Dalam Sistem Ekonomi Pancasila martabat manusia sangat dihargai, manusia dipandang sebagai subjek dan objek ekonomi. Produksi dilakukan bersama atas dasar kekeluargaan dan hasilnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Setiap orang bebas memilih pekerjaan dan berhak menikmati hasil pekerjaannya dalam rangka kemakmuran bersama. Kemakmuran bersama inilah yang menjadi tujuan utama Ekonomi Pancasila. Untuk mencapai kemakmuran bersama diperlukan kerja sama. Oleh karena itu maka Sistem Ekonomi Pancasila lebih mengutamakan kerja sama daripada persaingan. Perlu disadari ialah bahwa Sistem Ekonomi Pancasila akan berkembang kalau didukung oleh kondisi masyarakat yang relevan, semangat kebersamaan.

Untuk itu maka diperlukan pengembangan potensi, inisiatif dan daya kreasi seluruh rakyat termasuk pengusaha swasta. Buat rakyat yang bukan pengusaha, mereka dapat menghimpun dirinya dalam wadah koperasi. Di dalam dan melalui koperasi mereka dapat berkreasi dan berproduksi serta memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara lebih mudah dan lebih murah.

Jelas kiranya bahwa Sistem Ekonomi Pancasila mengutamakan kerja sama seluruh bangsa bahkan juga kerja sama internasional. Sebab kerja sama itulah timbulnya kemakmuran bangsa dan juga kemakmuran manusia di seluruh jagad raya.

### C. SOSIALISME PEMBANGUNAN

Sosialisme adalah suatu aliran politik yang dengan tujuan tertentu hendak mencapai kemakmuran untuk seluruh lapisan masyarakat. (Drs. Khoe Soe Kim, *Sendi-sendi Sosiologi*, 1963, hal 20).

Dalam buku *Glossarium Sekitar Pancasila* mengatakan, bahwa istilah Sosialisme mengandung arti, golongan-golongan yang bertujuan mencapai suatu susunan masyarakat baru berdasarkan konsepsi ekonomi dan sosial tentang hak-hak manusia. Tapi menurut sosialisme ilmiah, artinya dari setiap orang diminta sesuai dengan kemampuannya, kepada tiap-tiap orang diberikan menurut hasil karyanya.

Arti pembangunan ialah usaha secara sadar untuk mengubah nasib. Maksudnya adalah pembangunan adalah ikhtiar untuk mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik. Juga suatu usaha yang terus menerus membuat yang lebih baik lagi. Di dalamnya terkandung pula niat untuk mewariskan masa depan yang lebih membahagiakan generasi yang akan datang.

Berarti juga pembangunan adalah suatu jenis perubahan sosial yang sengaja diadakan, disadari dilakukan, diarahkan ke suatu tujuan yang ditentukan bersama. Dalam proses semacam itu dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa prakarsa masyarakat dengan tanggung jawab pemerintah untuk membantu mendorongnya.

Dengan demikian segala usaha kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi warga negara. Untuk melaksanakannya agar tercapai segala cita-cita dan aspirasi bangsa harus merupakan usaha bersama dari bangsa dan seluruh rakyat yang dilakukan secara gotong royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Selanjutnya segala hasil-hasil baik material maupun spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh bangsa dan berarti setiap warga negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang layak

diperlukan bagi kemanusiaan dan sesuai dengan darma bhaktinya yang diberikan kepada Bangsa dan Negara. Sehingga akhirnya terwujudlah suatu masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual yang berdasarkan Pancasila, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Sebaliknya berhasilnya pembangunan tergantung pula kepada partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat (Sosialisme Pembangunan).

#### **1. Pembangunan sebagai Jawaban Ampera**

Satu-satunya jalan menuju tercapainya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur adalah pembangunan. Pembangunan memang telah diusahakan sekalipun terdapat perbedaan dalam tingkatan intensitas dan ruang lingkup, selama kemerdekaan ini. Pembangunan dapat dibedakan menjadi lima periode, yaitu:

- a. Pembangunan selama periode revolusi fisik (1945-1949)
- b. Pembangunan selama periode konsolidasi (1950-1955)
- c. Pembangunan dalam periode Rencana Lima Tahun (1956-1960)
- d. Pembangunan dalam Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun (1961-1969), yang berhenti dengan adanya G30S/PKI tahun 1965
- e. Pembangunan sesudah Orde Baru (1966- dan seterusnya)

- a. Pembangunan Selama Periode Revolusi Fisik (1945-1949)

Keadaan sosial diwarisi dari pendudukan Jepang benar-benar dalam keadaan porak-poranda, uang yang beredar tak terkendalikan, baik yang dikeluarkan oleh Jepang maupun oleh Hindia Belanda melalui De Javasche Bank. Pengaturan ekonomi dan peredaran

uang haruslah mendapat prioritas utama menuju pada cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui Maklumat Pembangunan Negara Indonesia, pemerintah telah mencanangkan pembangunan sesuai dengan kehendak rakyat. Ini baru tekad saja. Sebab pemerintah belum mempunyai dana. Untuk memperoleh dana pemerintah terpaksa mengadakan pinjaman nasional. Pada tahun 1946 terkumpul dana.

Untuk mengatasi masalah peredaran uang, pemerintah telah mempersiapkan berdirinya Bank Sirkulasi. Pada tanggal 5 Juli 1946 didirikan Bank Negara Indonesia (BNI 46) berdasarkan Perpu No. /1946. uang pendudukan Jepang mulai ditarik dari peredaran, diganti dengan ORI. Persetujuan Konferensi Meja Bundar antara lain menetapkan De Javasche Bank sebagai bank sirkulasi Indonesia, mengakibatkan tertutupnya kemungkinan bagi BNI untuk menjadi Bank Central. Namun demikian jasa BNI cukup besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah, mengorganisasikan berdirinya NV, Maskapai Asuransi Indonesia, Indonesia Service Company, galangan kapal di Sumatera Barat, dan sebagainya. Sementara itu struktur perekonomian Indonesia masih bercorak kolonial dan berada di tangan bangsa asing, terutama Belanda. Ekspor hasil produksi pertanian mengalami hambatan karena adanya blokade Belanda. Dalam keadaan seperti itu di bawah tekanan agresi Belanda, koperasi masih tetap hidup di kalangan rakyat. Bahkan berhasil menyelenggarakan Kongres Koperasi Seluruh Indonesia pada tahun 1947.

Keadaan ekonomi pada masa perjuangan ini benar-benar memprihatinkan. Bukan saja karena baru merdeka dan menghadapi kekuasaan modal asing yang tertanam kuat di bumi Indonesia, tetapi juga karena blokade dan agresi Belanda.

b. Pembangunan selama Periode Konsolidasi (1950-1955)

Setelah kedaulatan dipulihkan kembali melalui persetujuan KMB dan negara Federal Republik Indonesia Serikat beberapa bulan kemudian berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka mulailah periode pasca revolusi fisik. Struktur ekonomi kolonial belum dapat dirombak. Perdagangan dikuasai oleh Lima Besar seperti Borsumij, Internatio, Jacobson van den Berg, Geo Wehry dan Lindetives. Kecuali Lindetives, perusahaan-perusahaan itu juga bergerak di bidang perkebunan dan industri pengolahan hasil bumi.

Untuk menyehatkan keuangan, maka pada tahun 1950 Kabinet Saffrudin melakukan sanering. Mata uang yang 2,50 rupiah ke atas dipotong menjadi dua. Setengahnya ditukar dengan uang baru. Perang Korea meletus pada tahun 1950 dan harga barang-barang hasil pertanian menanjak sehingga terkenal dengan sebutan "Korea Boom". Selain dari pada itu diperoleh pinjaman dari Exim Bank of Washington sebesar \$ 100 juta dan dari kerajaan Belanda sebesar Rp 200 juta. Dana-dana ini digunakan untuk membiayai pembangunan.

Pada masa ini oleh Biro Perancang Negara yang dibentuk pada tahun 1952, menyusun perencanaan pembangunan. Biro ini dipimpin oleh Ir. H. Juanda. Tugas biro ini adalah:

- 1) Perencanaan asas-asas ekonomi nasional yang sehat yang sesuai dengan konstitusi negara.
- 2) Merancangkan suatu rencana pembangunan jangka panjang dengan tujuan untuk menaikkan tingkat hidup bangsa.
- 3) Merencanakan suatu program transmigrasi sebagai salah satu usaha untuk mengatasi masalah penduduk di Indonesia.

Penyusunan perencanaan dibantu oleh para ahli dari PBB, yaitu Dr. Benyamin Haggins, Dr. S.D. Neumark dan Dr. Nathan Keyfitz. Biro Perancang Negara telah

berhasil menyusun rencana pembangunan 1956-1960. Melalui pembangunan ini diharapkan dapat mengubah struktur ekonomi yang masih pincang dan menaikkan tingkat pendapatan masyarakat. Keadaan yang pincang ini dapat dibuktikan dari data sebagai berikut:

- 1) Keadaan per kepala pada tahun 1952 adalah \$ 90,-
- 2) Kira-kira 70% penduduk hidup dari sektor agraria dan sektor-sektor yang langsung berhubungan dengan agraria.
- 3) Kira-kira 57% dari produksi nasional bruto berasal dari sektor agraria, perikanan dan kehutanan.

Untuk menimbulkan dan memperkuat pengusaha nasional, pemerintah melancarkan Program Politik Benteng. Bantuan Kredit diberikan kepada pengusaha pribumi. Begitu pula bantuan dalam bentuk keterampilan teknis dan manajemen. Sayang sekali maksud baik pemerintah tidak mencapai hasil sebagaimana diharapkan. Timbul jual beli lisensi, perusahaan "Ali Baba" dan sebagainya.

c. Pembangunan dalam Periode Rencana Lima Tahun (1956-1960)

Proses konsolidasi ternyata belum dapat berjalan dengan mantap, baik karena situasi dalam negeri (instabilitas politik dan pemerintah) maupun situasi luar negeri (merosotnya impor setelah perang Korea, tegangnya hubungan kita dengan Belanda dan lain-lain). Tetapi pemerintah tetap bertekad untuk memulai pembuatan rencana pembangunan. Bahkan hubungan Indonesia-Belanda semakin buruk. Pada tahun 1956 Uni Indonesia-Belanda diputuskan secara sepihak. Perusahaan-perusahaan Belanda dinasionalisasi. Sayang sekali usaha mengalihkan kendali ekonomi ke tangan bangsa Indonesia ternyata tidak berhasil. Terjadi salah urus sehingga akhirnya bangkrut.

Sementara itu Pemerintah menyetujui Rencana Lima Tahun yang telah disusun oleh Biro Perancang Negara. Rencana itu terdiri dari tiga jilid. Jilid pertama memuat rancangan undang-undang yang mengatur organisasi dan perencanaan itu sendiri. Jilid kedua memuat garis-garis besar rencana dan proyek-proyek utama. Dan jilid ketiga berisikan spesifikasi masing-masing proyek. Sasaran utama penyusunan Rencana itu adalah menaikkan pendapatan per kepala.

Sayang sekali bahwa Rencana tersebut memakan waktu yang sangat lama untuk memperoleh persetujuan DPR. Ditambah dengan adanya instabilitas politik, pemerintah dan keamanan maka Rencana tersebut praktis gagal. Kemacetan ini akhirnya ditebus dengan Dekrit 5 Juli 1959.

- d. Pembangunan dalam Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun (1961-1969), yang Berhenti dengan Adanya G30S/PKI Tahun 1965

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri periode ekonomi dan demokrasi liberal, dan mengawali sistem ekonomi dan demokrasi terpimpin. Dengan gagalnya pelaksanaan Rencana Lima Tahun, maka struktur ekonomi masih tetap pincang dan pendapatan nasional masih tetap rendah. Apalagi dengan adanya biaya operasi militer untuk memulihkan keamanan dan keretakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, akibat pemberontakan-pemberontakan seperti PRRI/Permesta, DI/TII. Defisit anggaran belanja semakin besar.

Namun demikian pemerintah tetap bertekad bulat untuk menyusun rencana pembangunan. Biro Perancang Negara diubah menjadi Dewan Perancang Nasional (DEPERNAS) pada tahun 1960. Tugas DEPERNAS adalah menyusun, mengawasi pelaksanaan dan menilai kemajuan pelaksanaan rencana tersebut. DEPERNAS diketuai oleh Mr. Muhammad Yamin. Rencana itu harus



disesuaikan dengan “Sosialisme ala Indonesia” dan dikukuhkan dengan ketetapan MPR No. II/MPRS/1960. Setelah Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun dilaksanakan, maka DEPERNAS berubah menjadi BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).

Karena adanya Dwikora, Trikora dan inflasi yang semakin mengganas, maka tidak seluruh Rencana tersebut dapat dilaksanakan. Apalagi dengan meletusnya G30S/PKI maka rencana tersebut kandas sama sekali. Karena adanya operasi militer, maka defisit pemerintah menjadi semakin besar. Selain daripada itu tingkat hidup semakin merosot. Harga-harga naik melonjak, terjadi inflasi terbuka. Hal ini dipengaruhi pula oleh spekulasi yang semakin menjadi-jadi. Persediaan bahan pokok semakin tipis, transportasi sangat sulit, sehingga menghambat pula distribusi barang-barang.

e. Pembangunan Sesudah Orde Baru (1966- Dan Seterusnya)

Keadaan sosial, politik dan ekonomi yang diwarisi oleh pemerintah Orde Lama (ORLA) benar-benar sangat parah. Beberapa masalah parah di bidang ekonomi ialah:

- 1) Inflasi
- 2) Distorsi harga
- 3) Aparat produksi yang hampir lumpuh
- 4) Turunnya volume ekspor, yang berakibat negatif pada neraca pembayaran
- 5) Buruknya prasarana angkutan
- 6) Langkanya barang-barang kebutuhan pokok, bahan baku, dan suku cadang
- 7) Rendahnya pendapatan nasional

Untuk mengatasi keadaan ekonomi ini, Tap MPR No. XXIII/MPRS/1966 memberikan dasar kebijaksanaan ekonomi, keuangan dan pembangunan sebagai berikut:

- 1) Sistem ekonomi terpimpin didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menuju masyarakat adil dan makmur
- 2) Sistem ekonomi Pancasila harus mempunyai ciri-ciri positif yang harus dikembangkan dan ciri-ciri yang negatif akan dihindari
- 3) Defisit sebagai penyebab inflasi harus dihentikan
- 4) Anggaran belanja harus seimbang dengan menaikkan penerimaan dan mengarahkan pengeluaran dengan lebih efektif (program penghematan)
- 5) Peningkatan ekspor dan pengurangan impor untuk bahan-bahan dasar dan barang-barang kebutuhan pokok
- 6) Kredit dan modal luar negeri diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi nasional
- 7) Program pembangunan ekonomi jangka pendek diarahkan kepada usaha untuk mengendalikan inflasi (stabilitas ekonomi) dan pemulihan sarana produksi (rehabilitasi) dengan prioritas:
  - a) Pengendalian inflasi
  - b) Pemenuhan kebutuhan pokok pangan dan sandang
  - c) Rehabilitasi infra-struktur ekonomi
  - d) Meningkatkan kegiatan ekspor
- 8) Program pembangunan ekonomi jangka panjang harus didasarkan pada prioritas:
  - a) Bidang pertanian
  - b) Bidang infra-struktur
  - c) Bidang industri, pertambangan dan perminyakan

Program stabilitas dan rehabilitasi telah dapat memulihkan kehidupan ekonomi. Inflasi yang mengganas pada tahun 1966 hingga mencapai 638,8%; pada tahun 1967 laju inflasi telah turun menjadi 112,1%. Tahun 1968 ditekan menjadi 85,1% dan pada tahun 1969 turun hingga 9,0%. Keadaan ini telah memberikan dasar yang kuat untuk memulai rencana

pembangunan. Maka dicanangkan era pembangunan 25 tahun, yang dibagi atas program lima tahunan (PELITA).

#### **D. PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dicanangkan tujuan bangsa Indonesia Merdeka, yang disebut Tujuan Nasional. Tujuan Nasional perlu dicapai dengan pembangunan. Pembangunan telah dimulai sejak revolusi fisik, sampai saat sekarang dan seterusnya, dimana dibagi atas lima periode. Tetapi melaksanakan pembangunan bukanlah hanya perumusan cita-cita dan pernyataan niat saja. Niat dan cita-cita yang demikian itu harus dirumuskan dan disusun dalam suatu rencana dan program-program pembangunan. Dengan memiliki rencana pembangunan itu akan tampak dengan jelas arah mana yang dituju, sasaran apa yang ingin dicapai. Juga dapat diperkirakan apa yang harus dikerjakan sekarang, apa yang dapat dicapai dihari esok dan harapan-harapan apa kiranya pantas dinikmati di masa datang di samping perlunya disadari sejak semula apa yang belum dicapai dengan segera.

Karena itu rencana pembangunan harus disusun berdasarkan kenyataan-kenyataan masa kini dengan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan pengembangan nanti tanpa kehilangan arah yang dicita-citakan. Dengan rencana pembangunan yang berdasarkan kenyataan dan secara teknis mungkin dikerjakan maka dapat dihindarkan kemungkinan kegagalan yang dapat menjadi sumber kekecewaan dan keputusasaan. Rencana pembangunan yang dapat dilaksanakan juga akan menambah kepercayaannya pada diri sendiri, suatu unsur yang harus dipelihara dan dipupuk untuk memelihara gerak dan kegairahan membangun selanjutnya.

Berdasarkan penelaahan yang menyeluruh terhadap kemacetan pembangunan bangsa Indonesia, di masa lampau, maka rakyat Indonesia melalui sidang MPR menetapkan

bahwa pembangunan ekonomi ini harus ditempatkan dalam urutan pertama dari seluruh usaha pembangunan. Berbagai masalah sosial ekonomi yang ada dewasa ini sesungguhnya disebabkan oleh diabaikannya pembangunan ekonomi dalam kurun waktu yang cukup lama setelah Indonesia merdeka.

Disamping itu perbaikan mutu kehidupan dalam masyarakat maju yang berkeadilan sosial yang menjadi tujuan utama dari pembangunan Indonesia hanya dapat dicapai apabila kita dapat mencapai kemajuan dibidang ekonomi.

Dalam rangka pembangunan ekonomi sekaligus terkait usaha-usaha untuk lebih meratakan pembagian kembali hasil pembangunan baik berupa penyebaran pelaksanaan pembangunan yang merata ke seluruh daerah maupun berupa peningkatan penghasilan anggota masyarakat karena kegiatan mereka yang produktif. Dengan secara bertahap diusahakan mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan dan mempersempit jurang antara kaya dan yang miskin.

Meningkatkan pendapatan yang semakin merata melalui perluasan kesempatan kerja yang produktif memungkinkan keikutsertaan lebih luas di dalam proses pembangunan bangsa, meningkatkan harkat dan derajat kemanusiaan dan dengan demikian meningkatkan keadilan sosial dan mutu kehidupan.

Karena pembangunan ekonomi ditempatkan sebagai pusat penggerak pembangunan bangsa dalam arti luas, ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Sebaliknya pertumbuhan ekkonomi saja tidak dengan sendirinya menjamin perbaikan mata kehidupan dan keadilan sosial. Dari kerangka yang demikian tampak bahwa pembangunan ekonomi tidaklah berdiri sendiri terpisah dari kaitannya dengan pembangunan bidang-bidang yang lain. Dilain pihak pembangunan di luar bidang ekonomi itu harus pula dapat memberi arah dan menunjang pembangunan ekonomi.

Sesuai dengan asas perikehidupan dalam keseimbangan maka harus ada keseimbangan pula antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial budaya. Akan tetapi

pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial budaya tidak boleh dilihat secara terpisah atau masing-masing berdiri sendiri. Keduanya bertemu dan berintegrasi dalam pembangunan nasional.

Namun demikian pembangunan sosial budaya mempunyai tujuan-tujuannya tersendiri yang otonom, yaitu usaha mewujudkan hidup yang bernilai tinggi, dalam arti mutu hidup yang memberikan kebahagiaan rokhaniah dan jasmaniah. Di dalamnya juga terkandung pembangunan manusianya agar menjadi manusia yang berbudi luhur dan berbudaya tinggi.

Pembangunan sosial budaya bertujuan menimbulkan perubahan-perubahan yang meningkatkan mutu kehidupan. Hal ini ada hubungan serta pertaliannya dengan penyebaran yang lebih merata dari pendapatan dan kekayaan serta kesempatan-kesempatan dalam turut menikmati hasil pembangunan, sebagai wujud daripada pelaksanaan asas keadilan sosial.

Aspek-aspek keadilan menampakkan diri serta harus ditanggapi dalam pembangunan daerah yang ketinggalan perkembangannya dan dalam pembangunan daerah pedesaan. Demikian pula dalam usaha memelihara keseimbangan antara kota dan desa. Kecuali itu juga rasa perlindungan hukum serta bekerjanya proses peradilan yang baik. Hal-hal lain di mana aspek keadilan sosial ini terasa adalah dalam penyediaan kesempatan yang sama kepada rakyat kecil untuk memperoleh pendidikan, perawatan, kesehatan, perumahan, kesempatan berusaha dan sama-sama memikul beban pembangunan.

Dengan memberi perhatian kepada asas keadilan sosial ini maka akan lebih terjamin diarahkan dan terpelihara serta tergalangnya rasa solidaritas nasional.

Sejalan dengan pembangunan bidang ekonomi maka pembangunan bidang politik diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

## E. HAKIKAT PEMBANGUNAN

Pada hakikatnya pembangunan sedang giat-giatnya dilakukan bangsa Indonesia dewasa ini adalah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk itu maka diperlukan pengetahuan yang cukup mendalam tentang hakikat manusia khususnya manusia Indonesia, bagaimana mereka berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan bersama untuk membentuk masyarakat yang dicita-citakan. Di samping itu harus juga diperhatikan keanekaragaman suku dengan berbagai agama dan adat kebiasaan, yang hidup bersatu sebagai bangsa Indonesia yang berkepribadian Pancasila.

Manusia adalah makhluk Tuhan yang berwatak individu dan sekaligus sosial. Maksudnya, manusia mempunyai harga diri, bangga dan mencintai dirinya serta berhasrat untuk memajukan diri pribadinya atau singkatnya mempunyai kepribadian tersendiri. Di samping itu, baik naluriah maupun dengan kesadaran sendiri, mereka tidak bisa hidup menyendiri tanpa bantuan kesadaran sendiri, mereka tidak bisa hidup menyendiri tanpa bantuan atau kerja sama dengan manusia lainnya. Justru untuk memenuhi hasrat individual itu manusia harus hidup bersama dalam suatu masyarakat.

Manusia hanya mempunyai arti dan dapat hidup di antara manusia lainnya. Tanpa ada manusia lainnya atau tanpa hidup bermasyarakat seseorang tidak akan dapat berbuat apa-apa. Dalam mempertahankan hidup dan usaha mengejar kehidupan yang lebih baik, maka mustahil hal itu dikerjakan sendiri tanpa bantuan dan bekerja sama dengan orang lain dalam masyarakat.

Kekuatan manusia pada hakikatnya tidak terletak pada kemampuan fisiknya atau kemampuan jiwanya semata-mata, melainkan kekuatan manusia terletak dalam kemampuannya untuk bekerja sama dengan manusia lainnya.

## F. TUJUAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN

Tujuan pembentukan negara atau lebih dikenal dengan sebutan tujuan nasional, sebagai tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah :

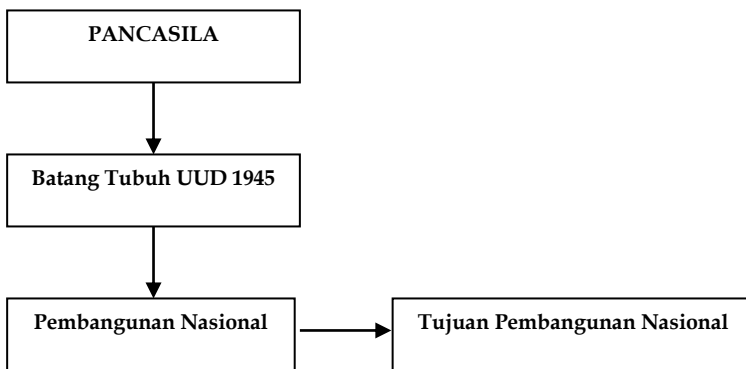
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencederdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan yang diidam-idamkan itu, diperlukan adanya pedoman yang berisikan arah, usaha dan ukuran yang menjadi tolok ukur dalam pembangunan bangsa. Pedoman itulah yang disebut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pedoman ini perlu dikaji dan dievaluasi setiap lima tahun jangan memperhatikan apa yang telah dicapai selama periode lima tahun terdahulu dan apa yang ingin dicapai untuk periode lima tahun mendatang. Ini berarti proses pembangunan harus dilakukan secara bertahap lebih jauh pedoman itu harus dijabarkan dalam rencana pembangunan yang jelas arah dan sasarannya. Selain dari pada itu terbatasnya dana dan kemampuan mengharuskan adanya pentahapan dalam mencapai tujuan yang begitu luas. Adalah merupakan tugas MPR sebagai lembaga tertinggi pemegang kedaulatan rakyat, untuk menetapkan pola umum pembangunan nasional agar dapat dicapai tujuan nasional tersebut di atas. Oleh karena itu pola umum pembangunan nasional merupakan rangkaian-rangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus.

Apa yang menjadi tujuan nasional pada hakikatnya adalah pancaran dasar falsafah negara Pancasila. Oleh karena itu Pancasila adalah landasan Ideal pembangunan nasional dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusional pembangunan nasional.

Tujuan yang begitu luas tidak mungkin dapat dicapai dalam satu atau dua generasi. Tetapi setiap tahap (periode) pembangunan harus secara strategis merupakan kecenderungan yang semakin mendekati kepada tujuan itu. Dengan lain perkataan, setiap generasi harus mewariskan kepada generasi berikutnya keadaan yang makin jelas menuju pada cita-cita perjuangan bangsa.

Kalau gambaran hubungan antara Pancasila, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan pembangunan nasional nampak berikut :



#### **G. PERANAN SIKAP MENTAL DALAM PEMBANGUNAN**

Kita harus menyadari bahwa masyarakat nusantara berabad-abad yang lalu tentu saja berbeda dengan masyarakat nusantara abad kedua puluh. Perbedaan ini secara kultural mempunyai efek yang berat. Situasi lingkungan hidup masyarakat nusantara sudah berubah. Pertama jumlah penduduk semakin banyak, semakin padat. Kedua alam yang menjadi lebih terbatas kemampuan memberi, sehingga masyarakat Indonesia tidak lagi dimanja oleh alam. Ketiga perkembangan dunia modern memaksa adanya perkembangan-perkembangan baru. Ini semua bertumpuk menjadi salah satu pada abad kedua puluh yang kita alami sekarang ini.



Memang kadang-kadang orang masih belum menyadari perubahan situasi tersebut. Kadang-kadang orang masih tetap hidup di dalam suasana masyarakat nusantara yang dimanja, sehingga kita masih hidup di dalam gaya budaya manja, gaya kebudayaan santai yang nampaknya menjadi sumber utama dari bermacam-macam hambatan mental yang kita alami sekarang, padahal situasi sekarang meminta agar masyarakat nusantara hidup dengan pola kebudayaan kerja, bahkan pola kebudayaan kerja keras. Sekaranglah saatnya manusia Indonesia harus memikirkan hubungan manusia dengan alamnya, supaya dengan demikian alam akan tetap memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Dengan perkataan lain sekaranglah saatnya masyarakat Indonesia mendapat tugas mengembangkan ekonomi, teknologi, dan pengetahuan.

Mengapa bidang ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan saja yang perlu kita kembangkan sekarang? Bagaimana dengan unsur kebudayaan lainnya seperti, bahasa, kesenian, sistem masyarakat dan religi? Sampai periode Orde Baru ini, kalau kita adakan penelitian, dapat diketahui bahwa perkembangan kebudayaan nusantara dalam sektor sistem kemasyarakatan, bahasa, seni dan religi dapat cukup berkembang, sedangkan sektor pengetahuan, ekonomi, dan teknologi masih kurang berkembang.

Ini perlu kita teliti, terutama karena masalah kebudayaan yang harus kita kembangkan dengan konsep strategis kebudayaan pada saat ini adalah usaha memperkaya diri kita dengan perkembangan pengetahuan teknologi dan ekonomi. Ada beberapa pendapat untuk menjawab persoalan itu. Ada yang tegas memberikan jawaban, memang bangsa Indonesia tidak memiliki bakat-bakat teknologi, tidak mampu dalam bidang pengetahuan dan tidak berbakat ekonomi. Pendapat lain mengatakan bahwa alam memanjakan masyarakat Indonesia sehingga cara berpikir dan bertindak laku berbeda dengan cara berpikir masyarakat Barat yang bersifat materialistis, karena selalu ditantang oleh alam, sehingga mereka selalu berusaha menguasai alam.

Situasi demikian berlangsung cukup lama mungkin beratus tahun, dan dengan demikian situasi tersebut membentuk sikap tubuh, nilai hidup, cara berpikir dan cara kerja masyarakat nusantara. Dia ikut membentuk dasar kultural masyarakat Indonesia. Ia ikut membentuk kualitas manusia nusantara.

Untuk memanfaatkan lingkungan alam yang begitu baik, dan begitu memanjakan orang tentu saja tidak dipaksa berpikir mengenai alam, tetapi lebih didesak untuk berpikir tentang kebahagiaan bersama. Itulah sebabnya maka kekerabatan, kekeluargaan merupakan masalah-masalah yang penting. Gotong royong menjadi tulang punggung, bukan saja gotong royong sebagai kerja, gotong royong sebagai nilai.

Di dalam lingkungan alam yang demikian itu, kesibukan manusia menghadapi alam relatif dapat dikatakan kecil. Orang tidak perlu memutar otak untuk menguasai alam. Tetapi kerja berpikir itu ditujukan untuk tema-tema lain. Di dalam situasi ini perhatian dan pikiran manusia ditujukan kepada hidup masyarakat Indonesia sudah sangat maju di dalam perkembangan pemikiran-pemikiran dan menyusun refleksi-refleksi mengenai hidup, kehidupan, budi pekerti, moralitas, khususnya mengenai hubungan manusia dengan manusia. Ini menjadi tema yang sangat pokok. Di samping itu manusia juga mengembangkan refleksi mengenai hubungan dengan Yang Maha Esa, Maha Kuasa.

Oleh karena situasi lingkungan hidup masyarakat nusantara itu membuat orang lebih banyak mengembangkan pemikiran mengenai hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhannya, maka pola berpikir masyarakat nusantara masyarakat Indonesia, adalah pola kekerabatan, pola kekeluargaan, pola keseimbangan, dan pola religius. Kebudayaan mempunyai tiga dimensi yaitu:

1. Hubungan manusia dengan alam
2. Hubungan manusia dengan manusia
3. Hubungan manusia dengan Tuhan.

Dalam perkembangan dimensi pertama tidak pernah terjadi konflik, maka tidak dikembangkan sehingga konstan, sedangkan dimensi ke dua dan ke tiga dirasakan adanya konflik tersebut maka usaha mengatasinya demi perkembangan lebih diusahakan secara sungguh-sungguh. Pola kekeluargaan, pola keselarasan, pola ketenteraman, menjadi lebih ditekankan, untuk menjaga agar kerawanan sosial maupun kerawanan religius tidak merusak kehidupan masyarakat.

Hubungan manusia dengan alam tidak banyak direfleksikan, karena orang tidak dipaksa untuk mengembangkan itu. Konflik dengan alam mungkin tidak banyak dialami, sementara konflik didalam masalah hubungan manusia dengan manusia ataupun di dalam refleksi hubungan manusia dengan Tuhannya lebih kerap dirasakan pola kekeluargaan, pola keselarasan, pola ketentraman, menjadi lebih ditekankan untuk menjaga agar kerawanan sosial maupun kerawanan religius tidak merusak kehidupan masyarakat.

Dengan demikian dapat kita pahami mengapa dinamika kebudayaan itu lebih nyata berkembang di sektor kemasyarakatan, sektor bahasa (termasuk kesusasteraan di dalamnya), sektor kesenian dan sektor religi. Pengaruh Hindu maupun pengaruh Islam yang masuk ke Indonesia ini melewati keempat unsur ini dan memperkuatnya. Akan tetapi perjumpaan masyarakat nusantara dengan sejarah modern membawa masalah baru.

### **1. Kebangkitan Orde Baru, Orde Pembangunan**

Pada tahun 1966, setelah bangsa Indonesia berhasil menumpas G30S/PKI, mengadakan intropeksi mawas diri untuk mencari sebab-sebab mengapa terjadi peristiwa demikian. Akhirnya terdapatlah kesimpulan bahwa kelahiran masyarakat negara bangsa Indonesia di tengah-tengah dunia modern yang penuh pertentangan dan persaingan antara kekuatan raksasa atau super power ini,

tidak luput dari pengaruh perkembangan dunia modern ini. Keadaan ini menyadarkan kita atas kondisi posisi geografis tanah air kita.

Dari hasil mawas diri itu bangsa Indonesia menemukan terapinya yaitu Bangsa Indonesia harus kembali kepribadiannya sendiri. Harus kembali kepada kepribadiannya sendiri. Harus kembali kepada jiwa budaya sendirinya sendiri. Harus kembali kepada sumber revolusinya sendiri yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945. Kepribadian bangsa, jiwa budaya bangsa, jiwa Proklamasi, yang sudah tentu adalah Pancasila yang sekaligus menjadi jiwa konstitusi.

Setelah menemukan kesimpulan demikian, maka lahirlah Orde Baru yang menegaskan dan menggariskan bahwa perkembangan dan jalannya sejarah masyarakat Indonesia harus diletakkan di atas pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Penegasan itu mengandung arti bahwa Orde Baru bertekad mempertahankan Pancasila dan akan melaksanakan secara murni dan konsekuen dan akan melaksanakan pembangunan nasional sebagai sarana mengisi kemerdekaan guna mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dengan penegasan itu, Orde Baru telah memberikan arah yang tepat kedepan, agar perkembangan masyarakat bangsa sebagai subjek kebudayaan tidak macet. Orde Baru adalah gerakan kebudayaan jadi merupakan proses kebudayaan. Ia merupakan manifestasi baru dari dinamika dasar masyarakat Nusantara yang mengawali lahirnya Indonesia merdeka. Ia merupakan dinamika dasar dari kebudayaan nusantara, karena pada hakikatnya Orde Baru adalah sikap mental konsisten dan konsekuen kepada jiwa bangsa, budaya bangsa, kepada sumber revolusi bangsa yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Orde Baru mengemban tugas yang amat berat. Ia harus mampu menyelesaikan tugas dihadapinya yaitu masyarakat negara Indonesia ini menjadi subjek budaya mantap. Subjek yang kuat di dalam ukuran perkembangan dunia modern. Hanya dengan menjadi sumbjek yang demikianlah bangsa Indonesia akan dapat melaksanakan tugasnya, melaksanakan Ampera dan dapat mencapai cita-citanya. Sebaliknya bila bangsa Indonesia tidak demikian ia akan ditekan oleh gelombang samudra dunia modern yang penuh dengan pertentangan dan persaingan yang maha dasyat itu. Bangsa Indonesia harus memperkokoh dirinya dengan berdiri tegak diatas kepribadiannya sendiri yaitu Pancasila, sehingga di dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan dunia modern ini dapat melaksanakan tugas kultural yaitu mengadakan akulturasi secara selektif. Dengan semangat Orde Baru ini bangsa Indonesia harus dapat merancang perkembangannya termasuk politiknya, pembangunan ekonomi, pengembangan pengetahuan dan teknologinya, pengembangan bahasa, kesenian dan pembangunan yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah kita ketahui sektor-sektor kehidupan kultural, maka perlu kita ketahui kondisi, kehidupan masyarakat kita, agar dengan semangat Orde Baru itu mengetahui kekuatan dan kelemahan kita sendiri selanjutnya mengembangkannya sesuai dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan kepribadian, tanpa kehilangan identitas, tanpa kehilangan subjektivitas.

Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk perkembangan selanjutnya demi meningkatnya derajat manusia Indonesia di dalam lingkungan hidup dan sejarah dewasa ini, maka masyarakat Indonesia harus menyelesaikan tugas akulturasi dengan memperkuat dan memperkaya perkembangan ekonomi, teknologi dan pengetahuan. Jadi berdasarkan konsep kebudayaan yang besar dan menyeluruh, dengan mengingat perkembangan

sejarah masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia harus mengadakan pembangunan nasional dengan terutama menekankan sektor ekonomi yang ditompang oleh teknologi dan ilmu pengetahuan, tanpa mengabaikan sektor yang lain. Dengan demikian dapat kita mengerti bagaimana perjuangan Orde Baru yang melancarkan gagasan, membulatkan tekad melaksanakan program pembangunan nasional dengan mengutamakan ekonomi mengapa demikian? Karena ekonomi adalah sarana yang penting untuk mempertinggi derajat manusia, ekonomi adalah sarana penting di dalam proses humanisme masyarakat Indonesia. Di samping itu, karena ternyata bidang ekonomi adalah bidang yang masih lemah di dalam kerangkanya unsur-unsur kebudayaan nasional kita. Apalagi kalau Indonesia harus bertahan dan berkembang sebagai subjek budaya di dalam perkembangan dunia modern pada masa mendatang. Kelemahan di bidang ekonomi jelas akan mendatang dehumanisasi bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan Ekonomi, teknologi, dan ilmu pengetahuan sebagai faktor yang belum kita kembangkan merupakan tuntutan yang harus kita jawab dengan usaha nyata. Sektor tersebut sebagai sektor yang lemah karena alam Nusantara telah memanjakan kita di masa-masa yang silam.

Dengan pembangunan ekonomi yang ditunjang oleh teknologi dan pengetahuan itu berarti Orde Baru melaksanakan akulturasi modern. Kiranya akulturasi adalah terpenting dalam pembangunan ekonomi kebudayaan kita. Dengan akulturasi masyarakat budaya Indonesia memperkaya dan memperkuat diri dari pengaruh unsur yang datang dari luar tanpa kehilangan identitas, tanpa kehilangan subjektivitas. Maka dari itu harus dijaga agar masuknya pengaruh unsur-unsur tersebut dari luar jangan sampai merusak dan menghancurkan sendi-sendi masyarakat sendiri. Apa yang sudah dikembangkan secara kuat dan baik oleh masyarakat, dasar kultural yang sehat dalam bidang-bidang kemasyarakatan, bahasa, seni, religi,

jangan sampai menjadi kacau, goncang oleh ekonomi dan teknologi serta pengetahuan itu. Untuk inilah maka proses akulturasi yang diperlukan adanya proses kepemimpinan nasional yang mantap, yang konsisten agar proses akulturasi itu selalu disertai dengan proses enkulturasi dinamika masyarakat nasional sehat. Enkulturasi artinya pembudayaan.

Berakulturasi di bidang ekonomi tetapi tetap ekonomi Pancasila. Pembangunan masyarakat budaya yang berpegang kepada wawasan nusantara merupakan pelestarian dan pembangunan Pancasila. Karena Pancasila sebagai konsep kebudayaan telah menemukan bentuknya sebagai konsep kenegaraan pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 maka pembangunan masyarakat budaya Pancasila merupakan pelestarian negara Proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan di bidang ekonomi berarti masyarakat Indonesia harus banyak mengembangkan potensi manusia modern. Untuk memperkuat diri dalam perkembangan sebagai subjek budaya, dengan proses enkulturasi, maka bangsa Indonesia mempunyai wawasan Nusantara yaitu memandang terhadap lingkungan tanah air nusantara ini. Jadi wawasan itu ialah perwujudan kepulauan nusantara ini merupakan satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi dan sebagai satu pertahanan keamanan.

Dengan wawasan nusantara ini dimaksudkan bahwa masyarakat Indonesia sebagai subjek kebudayaan ini, meskipun keadaannya majemuk (berbhineka), namun hakikatnya satu yaitu bangsa Indonesia yang berkepribadian satu, yang bersemangat satu, yang berpandangan hidup satu, yang bercita-cita satu yaitu Pancasila.

## 2. Masyarakat Indonesia dalam Negara Pancasila

Masyarakat Indonesia sebagai subjek budaya setelah mencapai kemerdekaan mengalami suka dukanya sejarah perkembangan selama lebih kurang dua puluh tahun kemerdekaannya dengan kelahiran Orde Baru ingin membangun suatu masyarakat yang maju yaitu; masyarakat adil makmur lahir bathin, fisik material, dan mental spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Nasional memprioritaskan bidang ekonomi, karena bidang ini seperti telah disebutkan di atas merupakan bidang yang paling lemah dan amat menentukan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu pemerintah bersama seluruh warga masyarakat dengan segenap lingkungannya harus bertekad menyingsing lengan baju untuk bekerja keras guna meningkatkan kehidupan ekonomi dengan ditunjang oleh teknologi dan pengetahuan modern untuk mewujudkan masyarakat yang tiada kekurangan sandang pangan dan papan pemukiman. Kita mesti menggali dan mengolah kekayaan alam kita yang masih bersifat potensil itu menjadi kenyataan yang efektif. Untuk itulah juga harus ada pembangunan sikap mental masyarakat. Banyak ahli mengatakan bahwa sikap mental penduduk Indonesia dari semua suku bangsa, masih belum cocok dengan kebutuhan pembangunan sehingga masih bersifat menghambat (Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan 1983: 369). Kelemahan-Kelemahan dan mentalitas kita untuk pembangunan, perlu dibedakan antara dua hal ialah:

- a. Konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan sikap terhadap lingkungan kita yang sudah lama mengendap dalam alam pikiran kita karena terpengaruh atau bersumber kepada sistem nilai budaya kita sejak beberapa generasi yang lalu.
- b. Konsepsi-Konsepsi, pandangan-pandangan dan sikap mental terhadap lingkungan kita yang baru timbul sejalan



zaman revolusi dan yang sebenarnya tidak bersumber pada sistem nilai budaya kita.

Mengenai yang pertama, sikap mental bangsa Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh sistem nilai budaya yang telah mendarah daging, yang menyangkut masalah pokok dalam hidup seperti hakikat hidup dan karya manusia, persepsi manusia mengenai waktu, hakikat hubungan manusia dengan alam dan mengenai hubungan manusia dengan sesamanya.

Sebagian besar masyarakat Indonesia (petani) mereka berkarya, bekerja keras hanya untuk dapat makan. Adapun mentalitas priyayi Jawa menghubungkan hakikat karya dengan konsep amal, sehingga karyanya dapat mewujudkan kebahagiaan. Seperti kedudukan, kekuasaan, lambing-lambang lahiriah dari kemakmuran, merupakan sikap mental yang tidak cocok dengan jiwa pembangunan. Dalam hal persepsi mengenai waktu, sebagian besar dari keputusan-keputusan penting dan arah orientasi hidup petani ditentukan oleh keadaan masa kini, sedangkan mentalitas priyayi mempunyai persepsi waktu masa lampau terlalu mengagung-agungkan masa lampau sehingga akan melemahkan kemampuan seseorang untuk melihat ke masa depan, juga melemahkan kemampuan seseorang untuk melihat ke masa depan, juga melemahkan motivasi untuk menabung dan hidup hemat. Unsur mentalitas terakhir inilah yang kurang cocok dengan keperluan pembangunan.

Konsep mengenai pengaruh nasib yang amat kuat dalam mentalitas petani Indonesia pada umumnya bersumber kepada suatu nilai budaya yang tidak aktif terhadap alam sekelilingnya. Namun petani Indonesia biasanya tidak merasa tunduk terhadap alam, sebaliknya mereka juga tidak merasa mampu menguasai alam. Konsepsi bahwa orang harus hidup selaras dengan alam adalah suatu konsepsi yang lazim dalam mentalitas petani di Indonesia. Adapun priyayi di kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang hidupnya sebagai pegawai negeri

tentu tidak banyak sangkut pautnya dengan alam. Walaupun demikian mereka toh suka banyak berspekulasi tentang masalah hubungan antara manusia dengan alam, serta arti dari konsep nasib. Pelarian dari dunia nyata ke dunia kebatinan, menjadi suatu unsur penting dalam gaya hidup seorang priyayi. Mentalitas demikian tidak cocok dengan jiwa rasionalisme yang kita perlukan untuk mempercepat pembangunan, juga mentalitas yang terlampau banyak menggantungkan diri kepada nasib.

Terakhir mengenai mentalitas petani Indonesia menilai tinggi konsep sama rata sama rasa. Konsep ini adalah baik seperti gotong royong, tetapi ada segi negatifnya di mana dengan konsep ini mewajibkan suatu sikap konformisme yang besar artinya. Orang sebaiknya menjaga agar jangan dengan sengaja berusaha untuk menonjol diatas yang lain harus selalu menyesuaikan diri. Sikap inilah agak bertentangan dengan jiwa pembangunan yang justru memerlukan usaha jerih payah dengan sengaja dari pihak individu untuk maju dan menonjol diatas yang lain.

Sedangkan adat sopan santun pegawai di seluruh Indonesia amat berorientasi ke arah atasan. Segi negatifnya tidak ada usaha untuk berdiri sendiri, rasa disiplin pribadi yang murni tidak ada. Karena orang hanya akan taat apabila ada pengawasan dari atasan. Mentalitas ini tidak cocok dengan pembangunan.

Mengenai yang kedua, yaitu sikap mental bangsa Indonesia bukan karena berorientasi pada sistem nilai budaya tetapi sebagai akibat revolusi. Dalam masa sesudah revolusi kalau kemerdekaan secara resmi (formal) telah tercapai, timbul masalah lain dan biasanya dengan segera mulai suatu proses yang oleh para ahli ilmu politik disebut proses dekolonisasi. Dalam proses ini norma-norma serta peraturan-peraturan lama yang dianggap feodal dan colonial dijebol dengan maksud untuk diganti dengan norma-norma dan peraturan-peraturan yang baru. Namun

biasanya fungsi semula dari anjuran-anjuran supaya meninggalkan norma-norma lama menjadi kabur, penjabolan norma-norma lama itu sendiri menjadi tujuan utama dan norma-norma serta peraturan-peraturan baru tak dibina dan tidak disusun. Dengan demikian keragu-raguan dalam kehidupan tanpa pedoman bertambah lagi.

Masalah post-revolusi dan proses dekolonisasi dalam negara kita berlangsung terlampau lama, telah mengakibatkan usaha untuk merehabilitasi prasarana ekonomi diabaikan. Jalan-jalan, jambatan-jembatan, peralatan kereta api, terusan-terusan, pelabuhan-pelabuhan dan sebagainya semakin rusak. Dengan demikian ekonomi bertambah berantakan.

Adapun keberantakan dalam bidang ekonomi tersebut berjalan sejajar dengan kemunduran-kemunduran dalam sektor-sektor kehidupan sosial budaya yang lain seperti krisis otoritas, kemacetan administrasi dan korupsi. Hal yang amat serius adalah bahwa di belakang kemunduran-kemunduran dalam kehidupan ekonomi dan sosial budaya yang tampak lahir, tumbuh juga beberapa sifat kelemahan dalam mentalitas banyak orang Indonesia, yang lebih menjauhkan kita lagi dari jiwa pembangunan. Sifat-sifat kelemahan itu adalah yang bersumber pada kehidupan penuh keragu-raguan dan kehidupan tanpa pedoman tanpa orientasi yang tegas yaitu:

- a. Sifat mentalitas yang meremehkan waktu
- b. Sifat mentalitas yang suka menerobos (mencari jalan yang paling gampang)
- c. Sifat tidak percaya kepada diri sendiri
- d. Sifat tak berdisiplin murni
- e. Sifat mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh. (Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, 1984: 45)

### 3. Sikap Mental dan Pembangunan

Sikap mental adalah suatu disposisi atau keadaan mental di dalam jiwa dan diri seorang individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya (baik lingkungan manusia atau masyarakatnya, baik lingkungan alamiahnya, maupun lingkungan fisiknya). (Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, 1984: 26).

Walaupun berada dalam diri seorang individu, sikap itu biasanya dipengaruhi juga oleh nilai budaya dan bersumber kepada sistem nilai budaya. Bagaimanakah sikap mental bangsa Indonesia dalam pembangunan? Sikap mental ini memegang peranan penting dalam pembangunan.

Dari uraian diatas tadi, tampaklah bahwa ruparupanya sikap mental sebagian besar dari orang Indonesia belum cocok untuk pembangunan, kecuali mungkin diantara beberapa golongan-golongan atau pada sementara tokoh tertentu di kota-kota besar. Hal ini tentu juga tidak berarti bahwa di luar beberapa kota besar tadi diantara massa rakyat Indonesia, golongan-golongan kecil atau golongan-golongan minoritas atau individu-individu tertentu sebenarnya sudah mempunyai sikap mental yang cocok dengan pembangunan. Hanya saja golongan-golongan atau individu-individu itu belum mendapat cukup kesempatan untuk maju ke depan dan ikut melaksanakan pembangunan. Masalahnya sekarang, apakah dari uraian diatas tadi berarti, bahwa kita belum bisa mulai membangun, sebelum sikap mental manusia Indonesia itu dirubah, dicocokkan dan dimatangkan untuk pembangunan? Sudah tentu, itu suatu pendirian yang tidak benar. Karena merombak suatu sistem nilai budaya itu adalah suatu proses yang akan memakan waktu yang amat lama. Caranya adalah terutama melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah, tetapi justru terutama dengan pendidikan dan pengasuhan di dalam rumah tangga. Merubah adat-adat dan cara-cara pendidikan dan

pengasuhan di dalam rumah tangga, agar dapat ditanam dan dikembangkan kesadaran untuk kualitas, karya dan hasil karya, rasa disiplin sejati dan rasa tanggung jawab dalam jiwa sebanyak mungkin anak-anak Indonesia, bukan suatu hal yang dapat dilaksanakan dengan segera. Apalagi hasilnya mungkin baru tampak satu generasi lagi.

Teranglah bahwa kita tidak dapat menunggu selama itu, untuk mulai membangun. Sebaliknya suatu pendirian dari sementara ahli lain yang sama sekali berlawanan, yang berkata bahwa sebaiknya kita membangun saja tanpa mempersoalkan masalah sikap mental itu, karena sikap mental itu dengan sendirinya akan ikut terseret menjadi cocok dengan modernisasi, terbukti juga tidak benar. Dengan mengabaikan masalah sikap mental itu partisipasi dari rakyat banyak dalam pembangunan di Indonesia terbukti tidak bisa dibangkitkan dan kecepatan pembangunan akan sangat terlambat dan terganggu.

Kebenaran sebenarnya terletak diantara kedua ekstrim tadi. Memang kita tidak bisa menunggu lagi, kita harus membangun, tetapi di samping itu suatu perhatian yang amat besar harus kita curahkan kepada perubahan sikap mental itu dan berusaha juga mempercepat perubahannya. Di dalam hal itu tidak usah seluruh kelima konsep-konsep dasar yang merupakan unsur-unsur dari sistem nilai budaya yang lama itu dirubah semuanya. Dalam kenyataan hal itu juga tidak mungkin, tetapi kita harus memupuk beberapa dari ciri-ciri yang berpedoman kepada konsep-konsep dasar dari sistem nilai budaya itu pada sebanyak mungkin manusia Indonesia, tidak hanya yang masih kanak-kanak dan yang masih pemuda, tetapi juga yang sudah dewasa. Diantara ciri-ciri sikap mental yang diperlukan untuk mendapatkan lebih banyak kegairahan pembangunan adalah:

- a. Suatu kesadaran akan pentingnya kualitas dalam karya, yang berdasarkan konsep bahwa manusia berkarya itu guna menghasilkan lebih banyak karya lagi.

- b. Suatu keinginan untuk menabung berdasarkan orientasi waktu ke masa depan.
- c. Suatu disiplin dan rasa tanggung jawab yang murni, yang juga disadari kalau tidak ada pengawasan dari atas.

Proses untuk mempercepat berkembangnya ciri-ciri sikap mental seperti itu dapat dipercepat dengan membuat perangsang-perangsang yang tepat, untuk mendorong maupun menarik timbulnya ciri-ciri tersebut, tetapi untuk bisa mengadakan perangsang-perangsang yang tepat kita memang harus lebih banyak mengetahui dahulu tentang kenyataan dari variasi sistem nilai budaya yang hidup dalam mentalitas dari berbagai suku bangsa, golongan dan lapisan masyarakat penduduk.

Dengan singkat dapat disimpulkan. Suatu bangsa yang hendak mengintensifkan usaha untuk membangun harus berusaha agar banyak dari warganya:

- a. Lebih menilai tinggi orientasi ke masa depan, dan demikian bersifat hemat untuk bisa lebih teliti memperhitungkan hidupnya di masa depan,
- b. Lebih menilai tinggi hasrat eksplorasi untuk mempertinggi kapasitas berinovasi,
- c. Lebih menilai tinggi orientasi ke arah achievement (keterampilan) dari karya,
- d. Menilai tinggi mentalitas berusaha atas kemampuan sendiri, berdisiplin murni dan berani bertanggung jawab sendiri.

## **BAB VI**

### **TRANSMIGRASI DAN KELUARGA BERENCANA**

#### **A. PENDAHULUAN**

Setelah mengetahui hahwa di negara-negara yang maju juga ada kebijaksanaan, maka sudah waktunya Indonesia juga mempunyai kebijaksanaan kependudukan.

Indonesia termasuk lima negara dengan jumlah penduduk tertinggi di dunia setelah RRC, Uni Sovyet, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang demikian besar dengan tingkat pertumbuhan yang cukup pesat, menuntut adanya usaha dan kebijaksanaan kependudukan yang tepat, karena segala jernih payah yang dicapai dalam pembangunan akan habis dihisap oleh pertumbuhan penduduknya..

Masalah yang lebih kompleks bukan saja karena angka pertumbuhan yang tinggi, tetapi persebaran penduduk itu sangat tidak seimbang. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Jawa, suatu pulau yang hanya 7% dari luas seluruh wilayah Indonesia. Selain itu kota-kota makin deras dibanjiri arus urbanisasi yang tidak terbendung. Masalah yang lebih mencemaskan adalah struktur dan komposisi umur penduduk sebagai akibat baby boom ditahun 1950-an ternyata 60,4% penduduk Indonesia berumur 24 tahun. Komposisi umur penduduk yang muda mengakibatkan besar dari pesatnya tambahan angkatan kerja tiap tahun, yang menuntut dan membutuhkan pendidikan dan kesempatan kerja dalam skala raksasa dan perlu disediakan dalam tempo yang sangat singkat. Dilihat dari segi pendapatan ternyata bahwa sebagian terbesar penduduk Indonesia masih dalam taraf penghasilan yang rendah dan pihak lain sumber-sumber alam dan kekayaan negara ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Menyadari gambaran masa.lah kependudukan yang dihadapi Indonesia tersebut perlu adanya kebijaksanaan kependudukan, yang meliputi hampir segala aspek

kebijaksanaan pembangunan itu sendiri dan menjadi urusan dan tanggungjawab setiap anggota masyarakat.

Dalam modul ini dibicarakan masalah kebijaksanaan kependudukan hanya pada soal bagaimana mengatur pembatasan kelahiran yang bisa disebut keluarga berencana dan migrasi penduduk atau disebut transmigrasi.

Dengan mempelajari modul ini Anda diharapkan dapat memahami tujuan program transmigrasi dan keluarga berencana.

### 1. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mempelajari modul ini diharapkan Anda dapat:

- a. Menjelaskan pengertian problema sosial;
- b. Menyebutkan contoh-contoh yang termasuk problema sosial;
- c. Menjelaskan apa sebabnya sosiologi juga membicarakan masalah kependudukan;
- d. Menjelaskan apa arti kata Demografi;
- e. Menjelaskan kegunaan Demografi;
- f. Menjelaskan apa arti kata Mortalitas;
- g. Menjelaskan apa arti kata fertilitas;
- h. Menjelaskan cara menghitung pertumbuhan penduduk;
- i. Menjelaskan tujuan kebijaksanaan kependudukan;
- j. Menjelaskan apa arti kata transmigrasi;
- k. Menjelaskan sejak kapan program transmigrasi dilaksanakan;
- l. Menjelaskan tujuan transmigrasi;
- m. Menjelaskan jenis-jenis bentuk transmigrasi;
- n. Menyebutkan dasar hukumnya mahasiswa perlu mendapat pendidikan kependudukan;
- o. Menjelaskan dua ciri pokok masalah kependudukan yang dihadapi Indonesia pada Repelita IV;
- p. Menyebutkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1983;
- q. Menyebutkan perkiraan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1988;



- r. Menjelaskan sebab-sebab pertumbuhan penduduk Indonesia tidak merata penyebarannya;
- s. Menjelaskan tujuan ganda program keluarga berencana;
- t. Menjelaskan arah dan sasaran pokok kebijaksanaan kependudukan Indonesia dalam jangka panjang; dan
- u. Melaksanakan Keluarga berencana secara sadar.

## **B. MASALAH PERKEMBANGAN PENDUDUK**

Sosiologi menyelidiki persoalan-persoalan yang umum dalam masyarakat dengan maksud untuk menemukan dan menafsirkan kenyataan-kenyataan kehidupan kemasyarakatan, sedang usaha-usaha perbaikannya merupakan bagian dari pekerjaan sosial (social work). Maka sosiologi berusaha untuk memahami kekuatan-kekuatan dasar yang berada di belakang tata kelakuan sosial, sedangkan pekerjaan sosial berusaha untuk menanggulangi gejala-gejala abnormal dalam masyarakat, atau untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

Problema-problema masyarakat (sosial) menyangkut nilai-nilai sosial dan moral, Oleh karena itu problema sosial tak mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, tentu dengan berdasarkan sistem nilai budaya yang dianutnya. Sosiologi menyangkut teori yang namanya dalam batas tertentu menyangkut nilai-nilai sosial dan moral, yang terpokok adalah tiga aspek ilmiahnya.

Walaupun pada pokoknya sosiologi meliputi gejala-gejala kemasyarakatan namun sosiologi juga perlu untuk mempelajari problema-problema sosial, oleh karena problema-problema tersebut merupakan aspek-aspek dari tata kelakuan sosial. Dengan demikian sosiologi juga berusaha dengan problema-problema sosial seperti kejahatan, konflik antar ras, kemiskinan, perceraian, pelacuran, kejahatan anak-anak, dan seterusnya. Hanya dalam hal ini sosiologi bertujuan untuk menemukan sebab-sebab terjadinya problema tersebut, sosiologi tidak terlalu menekankan pada pemecahan atau jalan

keluar dari problema-problema tersebut. Tetapi usaha-usaha untuk mengatasi problema - problema sosial hanya mungkin berhasil apabila didasarkan pada kenyataan serta latar belakangnya, maka dalam hal ini sosiologi dapat pula ikut serta untuk membantu mencari jalan keluar yang efektif.

Semula para ahli sosiologi tidak menaruh perhatian pada problema-problema sosial tersebut bahkan ada pula yang berpendapat bahwa aspek tersebut bukan merupakan bagian dari teori sosiologi. Akan tetapi dengan meningkatnya perhatian terhadap dinamika masyarakat, maka timbul pendapat-pendapat bahwa problema-problema sosial merupakan bagian dari teori sosiologi. Sebenarnya problema-problema sosial merupakan hasil-hasil dari proses perkembangan masyarakat, artinya problema-problema tadi memang sewajarnya timbul, apabila tidak diinginkan adanya hambatan-hambatan terhadap penemuan-penemuan baru atau ide-ide baru.

Untuk mempelajari apa sebenarnya definisi problema sosial (*Social Problems*) yang didalam bahasa latinnya disebut *Amelio Restive*, bahwa: problema sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur dalam kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok dari warga-warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan rusaknya ikatan sosial. (Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 1969 : 262). Ahli Antropologi yang bernama JL Gillin dan anaknya JP Gillin dengan istilah lain yaitu *Social Patnology*.

Dapat pula diartikan secara sempit bahwa problema-problema sosial merupakan persoalan-persoalan yang timbul secara langsung pada kondisi-kondisi maupun proses-proses sosial. Yang pokok bahwa akibat dari gejala-gejala baik gejala sosial (perbuatan manusia) maupun gejala bukan sosial (misalnya bencana alam) menyebabkan problema-problema sosial, inilah yang menjadi ukuran bagi sosiologi. Maka sesuai dengan pertumbuhan penduduk dapat dikatakan pertumbuhan penduduk terutama mengenai penambahan

penduduk dapat menyebabkan problema sosial yang oleh Drs. Koe Soe Khian dalam bukunya *Sendi Sendi Sosiologi*, 1959: 1976 menyebutkan dengan istilah ketegangan sosial, yang tidak timbul (berasal) dari luar masyarakat tetapi gejala dalam diri manusianya.

Masalah penambahan penduduk telah menjadi pemikiran para ahli ekonomi di Barat. Diantaranya yang populer adalah Thomas Robert Malthus seorang ahli ekonomi dan ahli politik bangsa Inggris yang pada tahun 1798 menerbitkan bukunya yang berjudul *Principles of Population*. Menurut pendapatnya sesuai dengan keadaan pada waktu itu di Inggris bahwa penduduk, bertambah menurut deret ukur sedangkan hasil produksi bertambah menurut deret hitung ialah sebagai berikut:

1. Tambah penduduk: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 46, dan seterusnya.
2. Tambah hasil peroduksi : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya.

Oleh karena bertambahnya penduduk yang keras ini sedangkan hasil produksi tidak mengikuti maka pasti bahwa kelebihan penduduk mendatangkan kemiskinan umum. Tetapi menurut Malthus ialah perang, malapetaka banjir, penyakit menular, dan sebagainya selalu menjadi imbalan terhadap kelebihan penduduk ini. Selanjutnya Malthus berpendapat, bahwa mengurangi kelahiran adalah baik untuk mencegah kelebihan penduduk ini.

Malthus dalam teorinya banyak sekali mendapat pengikutnya, tetapi selebihnya juga menentang dan membuktikan bahwa teori ini berarti "Pembunuhan bangsa". Selanjutnya golongan yang menentang teori Malthus ini mengatakan, bahwa tiada benar kalau dikatakan bahwa bertambahnya bahan makanan dari hasil produksi tidak bersamaan naiknya dengan bertambahnya penduduk. Karena dengan bertambahnya mesin-mesin dan cara produksi baru, pembukaan tanah, pemakaian rabuk yang melipat gandakan hasil bumi dan sebagainya dapatlah kiranya menencukupi segala kebutuhan tamhahan penduduk, asal saja pembagian yang tepat dijalankan. Selanjutnya pengendalian kelahiran

ketika itu sangat dicela oleh ahli-ahli kesehatan bagi kebangsaan dan keturunan, sedangkan pandangan agama Katolik menghukum tindakan yang membatasi kelahiran.

Nyata bahwa menurut teori Malthus (mengurangi jumlah penduduk secara alamiah) tidak dapat disetujui sebagai kemiskinan umum, sekalipun pendapat tentang meningkatnya penduduk yang jauh lebih pesat daripada meningkatnya produksi makanan tidak dapat dibantah. Sebagai diketahui orang dianjurkan ber-KB ialah:

1. Mencegah kelaparan dan kemiskinan bagi golongan terbesar yang selalu hidup berkekurangan (miskin) dengan membatasi jumlah anak, cukup satu atau dua, orang saja.
2. Menjaga supaya kenaikan penduduk maksimal naik 2,6% per tahun, selangkah dengan kenaikan produksi nasional bahan makanan, dengan demikian ikut mengimbangi keadaan internasional.

Walaupun dalam soal-soal di atas ini, kritik terhadap Malthus dapat diterima, namun kini sudah menjadi pendapat umum, (Communis opini) di seluruh dunia, bahwa bahan makanan hanya terbatas, dan di negara manapun juga ancaman kelaparan merupakan suatu ketakutan, sehingga negara tersebut telah merencanakan untuk membatasi kelahiran anak satu ketakutan, sehingga negara tersebut telah merencanakan untuk membatasi kelahiran anak.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang maka kemiskinan merupakan masalah masyarakat, Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri yang sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya. Keadaan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga di Indonesia hingga kini belum mencapai tingkat yang wajar karena berbagai macam faktor; salah satu faktor yang penting ialah besarnya jumlah suatu keluarga. Bagi suatu keluarga dengan jumlah anggota keluarga yang tidak besar, terbuka kemungkinan untuk menyediakan sarana-sarana kehidupan yang lebih baik, misalnya dalam hal pangan, sandang, pendidikan dan lain-

lain. Demikian pula halnya dengan keadaan kesehatan, baik kesehatan para ibu maupun kesehatan anak-anak. Perencanaan kelahiran membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu, dan sekaligus memungkinkan para ibu untuk menyelenggarakan perawatan kesehatan anak-anak dengan lebih baik.

## 1. Demografi

Keterangan - keterangan tentang pertambahan penduduk termasuk dalam ilmu pengetahuan demografi (dari demos = penduduk, grafein = lukisan, uraian) jadi demografi berarti pengetahuan yang merupakan sebagian dari statistik penduduk dan mempelajari gejala-gejala kelompok. Menurut definisi yang tercantum dalam United Nations Multilingual Demographic Dictionary, demografi ialah studi ilmiah yang menyangkut masalah kependudukan, terutama dalam kaitannya dengan jumlah, struktur maupun perkembangannya. Subjek permasalahannya demografi pada hakikatnya lebih dititikberatkan kepada studi kuantitatif mengenai berbagai faktor seperti fertilitas, mortalitas maupun migrasi yang selalu mempengaruhi penduduk secara kontinu, serta menentukan jumlah maupun pertumbuhan penduduk dan disebut sebagai "Komponen Pertumbuhan Penduduk". Bersama-sama dengan faktor lain, misalnya perkawinan, perceraian mobilitas sosial (yaitu perubahan status sosial), maka ketiga faktor tersebut di atas akan menentukan juga struktur atau komposisi penduduk. Dalam hal ini perlu diperhatikan dua segi yang penting, pertama, demografi, selalu menyangkut data menurut urutan angka (numerical data) mengenai karakteristik penduduk. Data tersebut pada umumnya disebut "data demografis" atau "statistik demografi". Kedua, analisa demografi biasa disusun menurut tingkat mikro dan bukan tingkat makro, dengan perkataan lain demografi lebih terarah kepada studi kelompok-kelompok, dan bukan studi mengenai penduduk secara perorangan.

Tidak dapat diragukan lagi bahwa perubahan dalam jumlah maupun komposisi akan memberikan pengaruh sosial, ekonomi, politis, maupun yang lain-lainnya terhadap penduduk yang tinggal di suatu negara. Sayang hampir semua negara yang masih berkembang di Asia Afrika dan Amerika Latin kenyataan masih belum memiliki statistik demografi yang memadai maupun hampir semua jenis statistik lain yang berkaitan dengan masalah itu. Semua kekurangan itu merupakan tantangan bagi para ahli demografi, sehingga akibatnya tugas dibidang perencanaan sosial dan sektor ekonomi di negara-negara tersebut malah makin rumit.

Keterangan-keterangan demografi kini sangat penting sekali, karena untuk dapat mengadakan analisa dari sebuah masyarakat, kita membutuhkan susunan penduduk menurut kelamin dan lain-lain, yang biasanya disebut angka demografis, terdiri dari angka kelahiran, kematian, perkawinan, emigrasi, imigrasi, transmigrasi, dan lain-lain). Angka kematian ialah jumlah orang yang meninggal setahun diantara 1000 orang, umpamanya : di suatu negara penduduknya berjumlah 60 juta orang dan setahun 1.200.000 orang yang meninggal, itu berarti bahwa per 1000 orang mati ialah:

$1.200.000 = 20$ ; angka kematian = 20 dan kita juga dapat mengatakan, 60.000

Bahwa angka kematian 20 %.

Kita juga mengenal angka kelahiran, yaitu jumlah anak-anak yang terlahir hidup setahun per 1000 orang; jika jumlah penduduk besarnya 60 juta, dan anak-anak yang dilahirkan berjumlah 2.280.000 orang maka angka kelahiran di negeri itu berjumlah

$$238 \frac{2.280.000}{60.000}$$

Dari angka kelahiran dan kematian kita dapat angka pertambahan penduduk, karena angka menunjukkan jumlah anak-anak yang dilahirkan setahun dan angka

kematian jumlah orang-orang yang meninggal setahun, perbedaan antara 2 angka ini, menunjukkan pertambahan penduduk setahun, pada contoh di atas, kita mendapat sebagai angka pertambahan setahun  $38 - 20 = 18$ ; pertambahan penduduk setahun maka berjumlah  $18\% / 100$  atau  $1,8\%$  dari  $60.000.000 = 1,080.000$  orang.

Untuk mendapat angka yang mendekati kebenaran seharusnya juga diperhitungkan angka emigrasi dan imigrasi yaitu angka-angka dari mereka yang menetap di luar negeri, dan mereka yang kembali dari luar negeri,

## 2. Kebijakan Kependudukan

Pada dasarnya kebijakan suatu negara menyangkut kemakmuran penduduknya dan digolongkan dalam kebijakan kependudukan. Akan tetapi biasanya yang dimaksud hanyalah kebijakan yang menyangkut perubahan kuantitas dan kualitas dari penduduk dan pemencaran geografisnya. Jadi jumlah jiwanya dan permukiman dalam hubungan dengan sumber-sumber yang tersedia bagi setiap orang.

Bahwa masih banyak ahli yang menganut pendapat bahwa segala kebijakan, termasuk kebijakan kependudukan, seperti kebijakan-kebijaksanaan politik, sosial, ekonomi, sudah tentu tidak dapat disangkal lagi. Negara-negara sosialis pada umumnya menganut pendapat ini. Memang sukar untuk memisahkan kebijakan kependudukan dengan kebijakan-kebijaksanaan dibidang politik ekonomi dan sosial.

Agar supaya jelas tidak salah mengerti tentang kebijakan kependudukan ini maka di bawah ini disalin beberapa batasan yang beberapa penulis.

Suatu kebijakan kependudukan nasional dapat disebut sebagai setiap tindakan dari bagian pemerintah negara berdaulat yang membuat kuantitas atau kualitas pemencaran penduduk negara tersebut berlainan dengan yang akan terjadi tanpa adanya pelaksanaan - pelaksanaan tindakan itu.

### 3. Pembangunan dan Faktor Kenaikan penduduk

Faktor yang jumlah penduduk yang besar dan laju kenaikan penduduk yang makin lama makin cepat adalah suatu faktor penghambat pembangunan yang memang masih belum kita sadari dengan benar-benar. Secara mudahnya; mengurus 50 juta orang terang lebih. mudah dari pada mengurus 100 juta orang; kalau kekayaan negara dibagi antara 50 juta, tiap orang masing-masing tentu akan mendapat lebih banyak dari pada kalau kekayaan itu dibagi 100 juta.

Memang negara Indonesia, merupakan salah satu diantara sejumlah negara di dunia yang jumlah penduduknya itu paling besar. Ke 105 juta penduduk yang diperkirakan untuk tahun 1966 itu, merupakan lebih dari 40% dari seluruh penduduk dari seluruh Asia Tenggara termasuk Burma, Kiang Thai, Laos, Kamboja, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura.

Laju kenaikan penduduk di Indonesia adalah salah satu diantara paling banyak cepat di dunia. Memang ada satu negara yang laju kenaikannya itu dalam masa setengah abad terakhir ini terbukti lebih cepat dari Indonesia ialah negara kecil Republik Khmer yang jumlah penduduknya hanya kira-kira tujuh juta orang. Tabel di bawah ini menggambarkan hal itu. Dalam tabel itu tampak bahwa laju kenaikan penduduk untuk Indonesia tidak sama dengan semua periode.

TABEL 1 Laju Kenaikan Penduduk Dalam Empat Negara  
Tahun 1920 1970

Negara.	1920-1930	1930-1940	1940-1950	1950-1960	1960-1970
Kamboja	16,7%	21,4-/.	19,8%	37,5%	30,9%
Indonesia	16,2%	16%	8,8%	22,9%	25,5%
India	11%	14%	13,3%	20,5%	25,5%
Amerika Serikat	15,8%	7,3%	14,6%	18,7%	14,9%



Dalam zaman Perang Dunia ke II dan Revolusi misalnya (1940-1950) laju kenaikan selama itu sekonyong-konyong meloncat tinggi (babby rom). Laju kenaikan yang melambat menyebabkan bahwa sekitar tahun 1960, Indonesia mengalami keadaan bahwa penduduk Indonesia dalam tingkat umur 10 - 19 tahun sedikit jumlahnya dibandingkan dengan umur yang lain, sedangkan laju yang naik dengan meloncat dalam tahun 50an, menyebabkan bahwa dalam tahun-tahun sekitar 1970 justru pada masa Indonesia mulai pembangunan ekonominya, orang Indonesia dari tingkat umur 15 - 20 tahun, yang membutuhkan sekolah dan lapangan pekerjaan, amat besar jumlahnya.

Kecuali perbedaan dalam kecepatan dari laju kenaikan penduduk dalam zaman-zaman yang berbeda ada pula perbedaan dalam daerah -daerah yang berbeda. Laju kenaikan di Jawa misalnya pada seluruh tahun terakhir ini (1,6% tiap tahun), tidak secepat seperti di pulau-pulau lain (3,9% tiap tahun). Walaupun demikian untuk keseluruhannya laju kenaikan penduduk untuk Indonesia masih tetap tinggi menurut para ahli demografi kira-kira 2,6% tiap tahun terakhir(lihat tabel 2).

Laju kenaikan penduduk yang amat dapat di banyak negara yang sedang berkembang itu disebabkan karena negara-negara serupa itu, telah melepaskan diri dari keseimbangan alamiah. Dalam keadaan keseimbangan alamiah, jumlah bayi yang dilahirkan dalam suatu masyarakat itu, dapat diimbangi dengan suatu jumlah kematian anak yang tinggi, sehingga jumlah penduduk masyarakat itu pada keseluruhannya tetap seimbang, atau hanya naik dengan amat lambat.

TABEL 2 Laju Kenaikan Penduduk di Indonesia

	1961 (sensus)	1964 (survey)	Laju kenaikan tiap Tahun
Indonesia *)	90,6	9-/,6	2,6
Jawa & Madura **)	60,1	63,4	1,8
Pulau-pulau lain		34,2	3,9

\*) Jakarta Raya (2,9), Nusa Tenggara Timur (2,0) Maluku (0,8) dan Irian Barat (0,8) tidak di hitun.

\*\*) Jakarta Raya (2,9) tidak dihitung.

sumber: W. Brand, "Stitistical Data on Indonesia" Bijdragen total Teal, Landen Volkennkude, CXXV (1969): hlm. 307

Pada tingkat-tingkat permulaan dari pembangunan, kalau masyarakat dalam suatu negara tertentu, mulai menetapkan teknologi Barat dan ilmu kedokteran Barat, maka angka-angka jumlah bayi dan anak-anak yang mati menurun dengan cepat, padahal kelahiran yang tetap naik itu, menyebabkan suatu laju kenaikan penduduk yang cepat. Nanti kalau masyarakat itu sudah maju dalam membatasi jumlah kelahirannya maka keadaan akan menjadi seimbang kembali. Zaman antara kedua keadaan keseimbangan itu para ahli demografi disebut zaman transisi demografis.

Laju kenaikan penduduk. yang lebih kecil di Jawa kalau dibandingkan dengan laju kenaikan di pulau-pulau di luar Jawa itu mungkin disebabkan karena di tahap-tahap pertama dari transisi demografis itu telah dimulai sejak abad ke 19 yang lalu sebagai akibat dari peningkatan pengawasan kesehatan rakyat oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebaliknya di luar Jawa, proses itu sebenarnya baru mulai dalam abad ini, bahkan di beberapa daerah baru sesudah Perang Dunia ke II.

Adapun perbedaan laju kenaikan penduduk di Jawa dan Luar Jawa itu juga tampak kalau angka padat penduduk 1930 dibandingkan dengan 1961 dari tiap-tiap propinsi. Ke dua daerah di Indonesia tersebut. Angka padat penduduk dari tiap-tiap propinsi tahun dapat kita ketahui dari sensus tahun 1930, sedangkan angka-angka padat penduduk dari tahun 1961 dari sensus tahun 1961. Dari angka-angka yang tersusun dalam tabel

Dibawah, tampak bahwa penduduk Jawa, Madura, dan Bali jauh lebih padat kalau dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Luar Jawa., Madura dan Bali, tetapi kalau kita bandingkan dengan angka-angka padat penduduk 1930 dari misalnya propinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dan angka-angka dari tahun 1961, maka tampak laju kenaikan penduduk yang besar bagi daerah-daerah tersebut.

TABEL 3 Jumlah Laju Pertambahan dan Padat penduduk di Indonesia

Daerah	Jumlah dalam Jutaan		Laju per tumbuhan tiap tahun	Kepadatan Per 1 Km2	
	1961	1971		1961	1971
Jawa - Madura	63,0	76,1	1,9%	477	565
Sumatera	15,7	20,8	2,8%	33	38
Kalimantan	4,1	5,2	2,3%	7,6	9
Sulawesi	7,1	8,5	1,9%	31	37
Nusa Tenggara	5,6	6,6	1,8%	76	-
Maluku	0,8	1,1	2,5%	11	14
Irian Jaya	(0,7)	0,9	-	1,8	-
Indonesia	97,0	119,2	2,5%	51	58

Perbedaan jumlah penduduk di berbagai propinsi di Indonesia itu, akan menyebabkan aneka warna hambatan terhadap pembangunan daerah yang tidak padat dan yang kecil penduduknya, akan kekurangan tenaga kerja, sehingga

di daerah-daerah serupa itu akan ada gejala pengangguran dan setengah pengangguran. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa perbedaan antara daerah yang tidak padat dan daerah yang padat, tidak secara otomatis menyebabkan suatu mobilitas pemindahan penduduk dari yang pertama ke yang kedua. Kenyataan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di lain-lain negara di dunia, menunjukkan bahwa justru ada kecondongan sebaliknya, ialah bahwa orang pindah dari daerah yang tak padat ke daerah yang padat. Hal itu karena daerah yang sudah padat itu biasanya mempunyai daya menyedot, karena sudah ada industri dan lapangan-lapangan yang menarik orang.

Di Indonesia ini sudah ada usaha sejak zaman pemerintah kolonial dulu, untuk memindahkan orang Jawa ke luar Jawa, khususnya ke Lampung Sumatera Selatan, usaha itu terkenal dengan istilah transmigrasi, tetapi usaha itu tidak pernah dapat memindahkan lebih dari 50.000 orang tiap tahun. Sebaliknya orang yang pindah dari luar Jawa ke Jawa, karena anggapan bahwa di Jawa orang akan dapat mencari nafkah dengan lebih mudah, tiap tahun juga mendekati jumlah yang hampir sama. Hanya proyek-proyek pertambangan yang dapat memberi lapangan pekerjaan yang luas dan lingkungan hidup yang menarik, diberbagai tempat di luar Jawa akan dapat memecahkan masalah kepadatan penduduk di Jawa.

### **C. TRANSMIGRASI DAN PENYEBARAN PENDUDUK YANG MERATA**

Kesadaran akan kekurangan tanah di Pulau Jawa yang menimbulkan kemelaratan bagi mereka yang tidak mempunyai tanah, telah berumur lebih dari 70 tahun, ketika penduduk di Pulau Jawa belum lebih daripada 30 juta jiwa. Setelah terjadi serangkaian peristiwa termasuk usul Van Deventer agar "pendidikan, irigasi dan emigrasi" dimajukan untuk memperbaiki tarap hidup penduduk Pulau Jawa, Residen Sukabumi H.G Heyting memperoleh instruksi pada bulan

Sepetember 1902 dari Pemerintah Hindia Belanda untuk mempelajari sedalam-dalamnya perihal pemindahan penduduk Jawa ke daerah seberang. Tiga tahun kemudian, dalam bulan November 1905, diberangkatkan rombongan transmigran (kolonis) pertama sebanyak 155 keluarga ke Gedong, Tataan Keresidenan Lampung.

Dengan kadar yang berbeda-beda dari masa kekhawatiran akan tekanan penduduk tersebut terus hidup dan program transmigrasi senantiasa mendapat tempat yang penting di dalam program pembangunan di Indonesia. Skala prioritasnya juga tidak menurun setelah program keluarga berencana dimulai sejak tahun 1969 (Pelita I). Keduanya saling menunjang di dalam usaha menanggulangi masalah kependudukan di Indonesia (disamping usaha pembangunan lainnya), tetapi untuk jangka waktu panjang sumbangan program keluarga berencana tentunya akan lebih penting, ditinjau dari pengendalian jumlah penduduk dan perubahan struktur umur penduduk.

Program transmigrasi merupakan salah satu program pembangunan di Indonesia. Program transmigrasi ditempuh oleh pemerintah, karena penyebaran penduduk yang tidak merata antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Hal ini terutama tidak seimbang kepadatan penduduk antara pulau Jawa dengan pulau-pulau diluar Jawa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel mengenai kepadatan penduduk di tiap propinsi di Indonesia.

Dilihat dari tiap propinsi, kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan Bali dengan luar Jawa dan Bali menunjukkan perbedaan yang menyolok. Terlihat bahwa kepadatan penduduk menunjukkan tidak seimbang, dan cenderung lebih banyak di Pulau Jawa dan Bali. Hal ini bila dibiarkan terus - menerus akan mengakibatkan berbagai masalah yang negatif, terutama bagi Pulau Jawa dan Bali. Oleh karena itu pemerintah mengambil kebijaksanaan, yaitu Transmigrasi.

## 1. Tujuan Transmigrasi

Pada zaman Hindia Belanda, kolonisasi bertujuan memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa, untuk membuat koloni-koloni pertanian di daerah yang baru (daerah penerimaan). Kolonialisasi bertujuan agar tidak terjadi kepincangan-kepincangan dalam kehidupan terutama dari Pulau Jawa. Tetapi pada waktu itu tidak luput dari kepentingan pemerintah Hindia Belanda, yakni menambah tenaga kerja dalam perkebunan sehingga memberi keuntungan bagi pemerintah Hindia Belanda.

Pemerintah Indonesia sejak tahun 1950, mulai melaksanakan pemindahan penduduk dari pulau Jawa keluar pulau Jawa, yang dikelola oleh Jawatan Transmigrasi. Transmigrasi bertujuan mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang ditujukan ke arah pembangunan perekonomian. Pembangunan tidak hanya untuk para transmigran, tetapi juga untuk pembangunan daerah pertanian, jadi tujuannya lebih luas dari pada zaman Hindia Belanda. Pada tahun 1972 pemerintah membuat kebijaksanaan umum transmigrasi dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya.
- b. Meratakan penyebaran penduduk di semua daerah tanah air.
- c. Pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
- d. Pembangunan daerah.
- e. Perluasan lapangan kerja..
- f. Pemanfaatan sumber-sumber alam yang ada di daerah.
- g. Menambah produksi.
- h. Memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.
- i. Memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional.

Jika tujuan tersebut di atas dibandingkan dengan transmigrasi pada zaman kemerdekaan, lebih menguntungkan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

## 2. Pengertian dan Jenis-jenis Transmigrasi

- a. Migrasi: ialah perpindahan penduduk yang melewati batas wilayah di dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan menetap.
- b. Transmigrasi: merupakan istilah yang digunakan oleh pemerintah Indonesia, yang artinya perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau lain dalam satu negara, terutama dari pulau Jawa ke pulau-pulau lain.
- c. Transmigran: adalah orang yang dipindahkan dari daerah padat penduduknya ke daerah yang kurang padat penduduknya (orang yang melakukan/menjalankan transmigrasi).
- d. Kolonisasi: adalah istilah transmigrasi yang digunakan pada zaman Hindia Belanda.
- e. Transmigrasi umum: adalah transmigrasi yang seluruh biayanya ditanggung/dibebankan oleh pemerintah.
- f. Transmigrasi Spontan: adalah transmigrasi yang seluruh biayanya di tanggung oleh transmigran, biasanya atas kehendak/kemauan sendiri.
- g. Tups: adalah penempatan transmigrasi di daerah pasang surut.
- h. Tunps: adalah penempatan transmigrasi di daerah bukan pasang surut.

Menurut peraturan pemerintah N0 42 tahun 1973, jenis-jenis transmigrasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Transmigrasi Umum
  - b. Transmigrasi Spontan
- a. Transmigrasi Umum: ialah transmigrasi yang biaya seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Mereka mendapat bantuan tanah seluas 2 Ha dengan perincian  $\frac{1}{4}$  Ha untuk perumahan, dan pekarangan untuk  $1\frac{3}{4}$  Ha untuk perladangan. Disamping itu juga mendapat bantuan biaya perjalanan, alat-alat pertanian, bahkan pakaian dan jaminan hidup selama enam sampai delapan bulan di daerah transmigrasi, selama menunggu hasil panen pertama. Transmigrasi Umum dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Transmigrasi Umum pasang surut (Tups)
  - 2) Transmigrasi Umum non pasang surut (Tunps)
- b. Transmigrasi Spontan: ialah transmigrasi atas kehendaknya /kemaumannya sendiri, segala biaya pelaksanaannya ditanggung sendiri, pemerintah tidak menanggung biaya apapun kecuali fasilitas tanah. Pada umumnya transmigrasi spontan ini lebih berhasil dari pada transmigrasi umum, dikarenakan merupakan tekad sendiri, yang bertujuan untuk bersungguh-sungguh meningkatkan taraf hidup dengan bercocok tanam/bertani.

### 3. Syarat-syarat Transmigrasi

Penduduk dapat di-transmigrasikan dengan biaya pemerintah ialah penduduk yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus berwarga negara Republik Indonesia.
- b. Tidak terlibat gerakan G. 30 S/PKI dan tidak termasuk orpol atau ormas terlarang.
- c. Berbadan sehat.
- d. Kepala keluarga berusia 18-40 tahun.
- e. Umur anggota keluarga tidak kurang dari 6 tahun dan tidak boleh lebih dari 60 tahun.
- f. Harus sudah menikah /berkeluarga.
- g. Harus betul-betul petani dan mempunyai ketrampilan khusus, misalnya: menjadi pandai besi, tukang cukur, penjahit, tukang batu, tukang kayu dan sebagainya.
- h. Belum pernah di transmigrasikan.
- i. Isteri tidak dalam keadaan mengandung lebih dari 3 bulan.

Selain persyaratan di atas, masih ada persyaratan lain yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu:

- a. Para petani yang tidak mempunyai tanah garapan yang luas.
- b. Buruh tani yang menghendaki tanah garapan
- c. Anggota ABRI yang menghadapi masa pensiun.



d. Para penduduk yang tertimpa bencana alam di daerahnya.

#### 4. Kebijakan dan Program Transmigrasi

Banyak tujuan yang terkait secara langsung dengan kegiatan transmigrasi. Dengan demikian program transmigrasi bukan terutama ditujukan untuk menyebarkan penduduk, tetapi diantaranya diarahkan agar mempunyai akibat yang sebesar mungkin terhadap penyebaran penduduk di berbagai daerah di Indonesia. Transmigrasi merupakan bagian dari usaha untuk mendorong mengembangkan pembangunan daerah yang karena tipisnya penduduk, tidak dapat mengelola kekayaan alam yang tersedia. Selain itu juga merupakan usaha memperluas kesempatan kerja terutama dengan membangun desa-desa baru dan dengan demikian merupakan bagian usaha pembangunan pedesaan. Usaha transmigrasi khususnya disektor pertanian diharapkan pula memperluas areal produksi pertanian yang akan membantu peningkatan produksi dan ekspor. Transmigrasi sebagai usaha mendorong perpindahan penduduk dari Jawa, Bali dan Lombok, dalam jangka panjang diharapkan selain dapat memperbaiki pola penyebaran penduduk Indonesia, juga meningkatkan integrasi nasional dalam arti ekonomi dan sosial budaya, serta meningkatkan ketahanan nasional.

Dalam REPELITA II sasaran kebijakan transmigrasi adalah meningkatkan jumlah transmigrasi sebesar mungkin dari pulau Jawa, Bali, dan Lombok ke luar dari daerah dari tiga pulau tersebut. Untuk ini pendapatan per kapita di daerah transmigrasi harus lebih tinggi dari pendapatan di tempat asal transmigran. Oleh karena itu kebijakan dalam REPELITA II akan ditujukan kepada pembangunan satuan-satuan desa yang nantinya menjadi satuan ekonomi yang berkembang terus dan menjadi inti dari pembangunan wilayah yang pembinaannya dikaitkan dengan rencana pembangunan daerah. Koordinasi dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembinaan wilayah transmigrasi ditingkatkan bersama pemerintah daerah setempat maupun program pembangunan diberbagai sektor. Sasaran pokok usaha koordinasi ini ialah mewujudkan agar transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan daerah secara organisator maupun geografis. Dengan demikian sarana-sarana administrasi, sosial, kultural dan ekonomi bagi daerah transmigrasi dapat diciptakan secara lebih efektif.

Usaha mendorong perpindahan penduduk secara spontan dalam jumlah lebih besar dari daerah-daerah padat penduduk ke daerah tipis penduduk, akan disertai dengan peningkatan fasilitas-fasilitas pengangkutan yang menghubungkan daerah-daerah tersebut. Ini meliputi usaha peningkatan kemampuan daya angkut jalan dan kereta api antara Merak dan kota lain di Jawa, daya angkut antara Merak dan pelabuhan Panjang, pembangunan ferry antara Merak dan Kotabumi, pembangunan jalan antara Bakahuni dan Gayam, serta peningkatan jalan antara Gayam dan Panjang yang akan memperpendek waktu perjalanan dari Jawa ke daerah-daerah transmigrasi di Sumatera bagian Selatan (Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatera selatan) yang akan menampung sebagian besar dari arus transmigrasi. Sarana pengangkutan dan prasarana perhubungan ke daerah penerima transmigrasi lainnya, berangsur-angsur akan ditingkatkan.

Dalam menentukan daerah asal transmigrasi, prioritas diberikan kepada pulau Jawa, Bali dan Lombok dengan mengutamakan kepada daerah-daerah kritis yang harus direhabilitir, daerah yang terancam bencana alam dan daerah-daerah yang kepadatan penduduknya melebihi 1000 jiwa perkilometer persegi daerah-daerah yang perlu dihindarkan dan daerah-daerah reboisasi. Adapun daerah tujuan transmigrasi adalah Sumatera bagian Selatan, Kalimantan bagian tenggara di sepanjang jalan yang akan dibangun diantara Banjarmasin, Balikpapan dan Samarinda,

Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Dalam REPELITA II direncanakan akan dipindahkan 250.000 kepala keluarga. Dalam tahun 1974/75 jumlah transmigrasi umum dan swakarsa yang diharapkan dapat ditempatkan adalah 30.000 kepala keluarga. Sementara itu jumlah desa baru yang akan diciptakan serta dibina selama REPELITA II diperkirakan berjumlah sekurang-kurangnya 500 desa, sedangkan pembinaan desa-desa lama yang belum terselesaikan selama REPELITA I dilanjutkan dalam REPELITA II.

Agar pembinaan wilayah transmigrasi dapat berhasil dengan baik, diperlukan tinjauan yang teliti mengenai daerah proyek transmigrasi. Untuk ini dilaksanakan berbagai survey dan penelitian mengenai kesanggupan tanah, sumber-sumber air serta aspek-aspek sosial lingkungan daerah proyek transmigrasi. Pengaturan tata guna tanah di daerah proyek transmigrasi adalah penting. Di daerah tanah kering, satu unit desa minimal memerlukan 5000-6000 ha tanah garapan, dan setiap kepala keluarga menggarap 4-5 ha tanah garapan. Untuk daerah yang sudah ada pengairan, luas minimum unit desa bisa lebih kecil, yaitu 3000 ha tanah garapan masing-masing kepala keluarga mengusahakan 2 ha tanah garapan. Jika prasarana irigasi belum tersedia, maka usaha pemindahan penduduk dikoordinasikan dengan usaha-usaha pembangunan irigasi. Sedangkan pola pembangunan tanah tidak saja memperhatikan tanah garapan dan rumah tempat tinggal, tapi juga sarana-sarana umum seperti jalan, kantor, pasar dan lain-lain keperluan yang dibutuhkan tersedianya kredit, fasilitas pemasaran, usaha koperasi, alat-alat pertanian dan lain-lain barang kebutuhan pertanian.

## 5. Pelaksanaan Transmigrasi

Apa yang dinamakan daerah asal transmigrasi dan daerah penerima transmigrasi? Daerah asal transmigrasi di Indonesia adalah daerah asli/daerah tempat tinggal sebelum pindah. Di Indonesia daerah asal transmigran meliputi pulau Jawa, Bali dan Lombok. Sedang yang dimaksud dengan daerah penerima transmigran ialah: daerah pemukiman baru bagi transmigran. Di Indonesia yang termasuk daerah pemukiman baru/daerah penerima ialah pulau-pulau diluar Jawa, Bali dan Lombok. Diantaranya pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya dan pulau-pulau lainnya.

Menurut Prof. Soetami yang pernah menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL), mengatakan "Sebaiknya pulau Jawa dengan keadaan geografisnya dan tingkat pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini, hanya dihuni penduduk sekitar antara 60-70 juta jiwa, sehingga memungkinkan kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian pulau Jawa ini pada tahun 1979 telah kelebihan penduduk kurang lebih 18 juta jiwa.

Dr. Masri Singarimbun mengatakan bahwa usaha untuk mengurangi jumlah penduduk pulau Jawa sekarang ini dapat dikatakan belum berhasil. Usaha pemindahan penduduk selama ini dapat kita lihat sebagai berikut.

Dari tahun 1950 sampai 1968 dipindahkan 424.350 jiwa melalui program transmigrasi, jadi rata-rata 22,336 jiwa pertahun. Pada periode 1969-1973 (pelita 1) dipindahkan sebanyak 205.902 jiwa, jumlah rata-rata pertahun 41,180 jiwa. Selanjutnya pada periode 1954-1978 (pelita II).

Menurut rencana pemerintah selama Pelita III tahun 1971 /79 -1982/1983, akan dipindahkan sebanyak, 500.000 kepala keluarga atau kurang lebih 2,5 juta jiwa. Berdasarkan data yang ada, maka pulau Jawa akan terus bertambah padat penduduknya. Oleh karena itu selain program kependudukan dan keluarga berencana harus berhasil, perlu ditingkatkan pula program transmigrasi secara besar-

besaran, sehingga mengurangi masalah penyebaran penduduk yang tidak merata di setiap pulau dan masalah penduduk lainnya.

## 6. Kesulitan dalam Pelaksanaan Transmigrasi

### a. Kekurangan Dana

Faktor biaya yang sangat menentukan dalam pelaksanaan transmigrasi, oleh karena hal tersebut menyangkut pembiayaan dari tempat asal pembiayaan dari daerah penempatan selama mereka belum mampu untuk menghasilkan sendiri untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menyangkut masalah pembiayaan ini administrasi pelaksanaan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pejabat yang berwenang.

### b. Keengganan Penduduk untuk Ditransmigrasikan

Perbedaan sosial budaya antara daerah asal para calon transmigran dengan daerah penempatan adalah merupakan salah satu faktor keengganan untuk bertransmigrasi. Faktor lain mungkin juga disebabkan oleh kuatnya ikatan batin keluarga, sanak/famili dan adanya ikatan yang kuat dengan daerah kelahiran. Sebagai contoh dapat dikemukakan pertanyaan apakah yang menyebabkan penduduk di beberapa daerah Ciamis yang slalu dilanda banjir setiap tahun tidak mau di transmigrasikan? apakah hal ini disebabkan karena adanya kesenangan? Toh setiap banjir- mereka pasti mendapat bantuan atautkah ada faktor-faktor lainnya.

### c. Faktor kesuburan tanah untuk pertanian

Berdasarkan data yang telah diperoleh, hanya 10% saja tanah di luar Jawa yang baik untuk bercocok- tanam dan selebihnya adalah daerah rawa., payau, minyak, alang-alang dan karang. Tentu hal ini menimbulkan keengganan, kecuali kalau bidang teknologi dikembangkan, yang sudah barang tentu memerlukan biaya yang besar.

d. Komunikasi dan Transportasi

Persoalan lain yang dihadapi oleh para transmigran setelah mereka tahu di daerah yang dituju adalah sulitnya komunikasi dan transportasi bila dibandingkan dengan apa yang mereka alami di pulau Jawa. Kesulitan ini menyebabkan mereka menjadi bosan karena waktu mereka dapat menghasilkan panennya maka hasil pertanian dan peternakan sulit dipisahkan dan justru mengakibatkan kekecewaan besar.

#### **D. KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA**

Masalah-masalah pokok di bidang kependudukan dan keluarga berencana dalam Repelita IV terutama berupa jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang tinggi, penyebaran yang tidak merata, dan struktur umur yang kurang seimbang serta masalah kualitas yang perlu ditingkatkan. Keadaan penduduk yang demikian, disatu pihak memberi peluang bagi peningkatan pembangunan disegala bidang tetapi di lain pihak memberikan tantangan -tantangan permasalahan yang perlu diatasi.

Dalam rangka menangani masalah-masalah pokok kependudukan dan keluarga berencana tersebut, Garis-garis Besar Haluan Negara memberi pengarahannya sebagai berikut:

1. Kebijakan kependudukan yang menyeluruh dan terpadu perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan, serta diarahkan untuk menunjang peningkatan taraf hidup, kesejahteraan dan kecerdasan bangsa serta tujuan-tujuan pembangunan lainnya.
2. Pelaksanaan kebijakan dan program-program kependudukan yang meliputi antara lain pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian terutama tingkat kematian anak-anak, perpanjangan harapan hidup, penyebaran penduduk dan tenaga kerja yang lebih serasi dan seimbang, perlu lebih ditingkatkan.

3. Program keluarga berencana bertujuan ganda, ialah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan pengendalian, kelahiran, dan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk Indonesia.
4. Dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk perlu diambil langkah-langkah untuk mempercepat turunnya tingkat kelahiran. Untuk itu pelaksanaan program keluarga berencana makin diperluas dan diintensifkan ke wilayah dan lapisan masyarakat termasuk daerah-daerah pemukiman baru.
5. Jumlah peserta keluarga berencana perlu makin ditingkatkan atas dasar kesadaran dan secara sukarela dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu tetap dipelihara kelestarian peserta keluarga berencana yang telah ada. Untuk itu perlu ditingkatkan tersedianya fasilitas keluarga berencana yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Dengan demikian pula perlu makin didorong peranan dan tanggung jawab masyarakat melalui organisasi-organisasi masyarakat dan pemuka-pemuka masyarakat, dalam rangka mensukseskan program keluarga berencana.
6. Penerangan dan pendidikan mengenai masalah kependudukan bagi seluruh lapisan masyarakat baik wanita maupun pria, terutama generasi muda, perlu ditingkatkan dan lebih diperluas agar makin disadari mendesaknya masalah kependudukan serta pentingnya keluarga kecil sebagai cara hidup yang layak dan bertanggung jawab.

Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang tinggi dan struktur umur yang muda berarti tersedianya penduduk usia kerja yang berumur muda dan penuh fasilitas serta keterbukaan perubahan-perubahan dalam rangka meningkatkan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Demikian pula, penyebaran penduduk Indonesia di antara

pulau-pulau yang lebih seimbang akan memberi peluang bagi pemanfaatan sumber alam dan lingkungan yang lebih optimal serta pembauran berbagai suku bangsa yang jangka panjang dapat meningkatkan modal budaya bangsa bagi pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menuntut usaha besar dalam meningkatkan penentuan kebutuhan pokok khususnya di bidang pangan, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan dan perumahan. Usaha yang lebih besar lagi akan dibutuhkan bilamana kesejahteraan dan pemerataan ingin ditingkatkan terus.

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan memanfaatkan jumlah penduduk yang besar sebagai potensi pembangunan bangsa maka perlu ditingkatkan usaha-usaha pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya manusia dengan meningkatkan pembangunan di berbagai sektor antara lain dengan mengutamakan pembangunan yang meningkatkan perluasan lapangan kerja, meningkatkan pengadaan pangan dan mutu gizi, memperluas fasilitas dan memperbaiki mutu pendidikan dan latihan kerja serta meningkatkan pelayanan kesehatan. Dengan usaha-usaha tersebut diharapkan dapat tercipta manusia-manusia pembangunan yang tangguh, berbudi luhur, cakap, terampil, percaya pada diri sendiri dan bersemangat membangun.

Sebagian besar penduduk berada di pulau Jawa yang merupakan sebagian kecil wilayah Indonesia. Dalam pada itu, pertumbuhan penduduk kota relatif lebih cepat dibanding penduduk desa, walaupun jumlah penduduk desa melebihi jumlah penduduk kota. Penyebaran penduduk yang tidak merata mengurangi peluang untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, Sedangkan kepadatan penduduk yang tinggi di daerah mengakibatkan pengurusan sumber daya alam secara berlebihan. Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan langkah-langkah dan kebijaksanaan dalam berbagai bidang pembangunan seperti transmigrasi, pembangunan daerah dan lain-lain.



Langkah-langkah di bidang Kependudukan dan keluarga berencana dalam Repelita IV merupakan bagian dari usaha jangka panjang dalam pembinaan kependudukan. Pembinaan kependudukan diarahkan agar mereka merupakan modal yang efektif dan menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan. Dalam kaitan ini, maka kebijaksanaan kependudukan yang menyeluruh dan terpadu ditujukan bagi peningkatan mutu penduduk disatu pihak dan pengendalian jumlahnya dilain pihak. Usaha-usaha peningkatan penduduk dan pengendalian jumlah penduduk merupakan usaha yang saling berkaitan yang saling berkaitan satu sama lain.

Dalam hubungan ini pelaksanaan keluarga berencana yang telah memberikan hasil-hasil yang cukup membesarkan hati perlu terus ditingkatkan dalam Repelita IV. Melalui usaha pengendalian kelahiran, maka bukan saja kelahiran dapat dicegah tetapi sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Dengan demikian penduduk yang besar jumlahnya dapat dijadikan modal yang bermanfaat bagi pembangunan.

Pelaksanaan kebijaksanaan kependudukan dalam kaitan dengan lingkungan hidup, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial tetap memegang teguh pelaksanaan prinsip keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Penduduk perlu ditingkatkan kemampuannya untuk memanfaatkan alam dan lingkungan guna kepentingan pembangunan, sementara lingkungan hidup perlu ditingkatkan pula kemampuannya untuk menunjang pembangunan yang berlanjut dalam jangka panjang.

Dengan ditanganinya masalah-masalah kependudukan baik dalam jumlah, mutu dan penyebarannya dalam rangkaian kebijaksanaan kependudukan yang bersifat menyeluruh dan terpadu, diharapkan potensi penduduk sebagai modal dasar pembangunan dapat dikembangkan ke arah peningkatan tarap hidup, kesejahteraan dan kecerdasan bangsa serta tujuan-tujuan pembangunan nasional lainnya.

## 1. Keadaan dan Masalah

Masalah kependudukan yang dihadapi dalam Repelita IV terutama mempunyai dua ciri pokok. Pertama keadaan dan masalah kependudukan dalam Repelita IV merupakan bagian dari masalah jangka panjang yang pemecahannya hanya dapat terlaksana dalam waktu melebihi satu atau dua Repelita. Kedua, sebagaimana yang ditegaskan dalam GBHN, berbagai segi masalah dan keadaan kependudukan amat erat kaitannya satu dengan yang lain. Oleh karena itu langkah-langkah kebijaksanaan mengulangi masalah-masalah kependudukan perlu dilaksanakan secara lebih terpadu dan terkoordinasi dalam perspektif jangka panjang.

Sejalan dengan pokok pikiran di atas maka dapatlah dikemukakan bahwa masalah kependudukan dalam Repelita IV sesungguhnya bersumber dari dua ciri pokok kependudukan Indonesia dewasa ini yaitu pertumbuhan yang masih relatif belum cukup rendah, dan penyebaran yang tidak seimbang antara daerah, serta kualitas (mutu) penduduk yang perlu ditingkatkan.

## 2. Pertumbuhan penduduk

Pada akhir tahun 1983 penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 158,1 juta. Pada akhir tahun 1988 penduduk Indonesia diperkirakan akan berjumlah 175,6 juta. Dengan demikian berarti bahwa selama Repelita IV pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun diperkirakan sekitar 2%. Dalam tahun terakhir Repelita IV pertumbuhan penduduk diperkirakan berada di bawah 2% yaitu sebesar 1,97%. Lihatlah Tabel dibawah ini!

TABEL 4 PERKIRAAN JUMLAH PENDUDUK  
INDONESIA 1983 - '1988 (juta)

TAHUN	JUMLAH
1983	158,1
1984	161,6
1985	165,2
1986	168,7
1987	172,2
1988	175,6

Tingkat pertumbuhan penduduk ini lebih kecil dari tingkat rata-rata pertumbuhan penduduk selama 1971-1980 yaitu sebesar rata-rata 2,3% dan tahun 1980-1983 rata-rata sebesar 2,2% per tahun.

Pertumbuhan penduduk sekitar 2% per tahun selama Repelita IV adalah hasil akhir dari dua hal penting, yaitu jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Migrasi internasional dianggap tidaklah begitu besar untuk mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Pada tahun 1983, jumlah kelahiran kasar per seribu penduduk diperkirakan 33,46 dan jumlah kematian kasar adalah 11,69 per seribu. Dengan demikian pertumbuhan penduduk secara alami adalah 2,177%. Pada tahun 1988, angka kelahiran, kematian dan pertumbuhan penduduk masing-masing adalah 31,02 per seribu penduduk, 10,12 per seribu penduduk dan 2,09%.

Perkiraan-perkiraan mengenai tingkat kelahiran dan tingkat kematian seperti yang dikemukakan di atas didasarkan pada kecenderungan penurunan besar-besaran tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Kecenderungan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi dan tingkat kematian yang menurun lebih pesat terutama dalam dekade 1970-an.

### 3. Struktur Umur Penduduk

Tingkat kelahiran berhubungan erat dengan masalah struktur umur penduduk. Tingkat kelahiran yang tinggi akan menghasilkan dengan struktur umur muda. Walaupun tingkat kelahiran sudah menurun dalam satu dekade-dekade terakhir, tetapi pengaruh terhadap struktur umur penduduk belum begitu berarti. Diperkirakan pada tahun 1983 jumlah penduduk berumur 0-14 tahun berjumlah 62,6 juta atau 39,6% dan pada tahun 1988 menjadi 67,2 juta atau, 38,3% dari seluruh penduduk. Perubahan yang nyata dari struktur umur penduduk diperkirakan akan terlihat dalam jangka panjang, berupa pergeseran struktur penduduk yang berangsur-angsur menjadi lebih tua. Tingkat kelahiran pada waktu itu diperkirakan akan berada relative jauh di bawah 2%. Dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL 5 PERKIRAAN PENDUDUK MENURUT  
GOLONGAN UMUR 1983 - 1988 (dalam juta)

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk 1983	Jumlah Penduduk 1988	Prosentase Pertambahan penduduk 1983 - 1988
0 - 4	23,1	24,3	5,2
5 - 9	20,8	22,4	7,7
10 - 14	18,7	20,5	9,6
15 - 19	16,6	18,4	10,8
20 - 24	14,7	16,3	10,9
25 - 29	12,7	14,4	13,4
30	51,5	59,3	15,1
Jumlah	158,1	175,6	11,1

Masih besarnya penduduk berumur muda membawa akibat antara lain pada peningkatan kebutuhan pangan. Peningkatan jumlah pangan bukan hanya karena adanya unsur pertambahan penduduk tetapi juga penduduk usia

muda membutuhkan banyak pangan bagi pertumbuhan fisiknya. Dalam pada itu, besarnya penduduk dalam usia di bawah lima tahun (balita) akan meningkatkan kebutuhan pelayanan, perbaikan gizi dan pelbagai kebutuhan hidup lainnya. Dengan demikian usaha-usaha pembangunan di bidang pangan, kesehatan pendidikan dan kebutuhan lainnya perlu ditingkatkan dalam Repelita IV.

Masalah lain yang dihadapi sebagai akibat besarnya penduduk berusia muda adalah peningkatan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 1983 jumlah angkatan kerja, yaitu penduduk berumur 10 tahun atau lebih yang bekerja atau mencari pekerjaan adalah 63,5 juta orang dan pada tahun 1988 meningkat menjadi 72,8 juta atau meningkat dengan rata-rata 2,8% per tahun, jauh di atas perkiraan pertumbuhan penduduk. Dengan demikian salah satu masalah pokok yang dihadapi dalam Repelita IV adalah penyediaan lapangan kerja bagi sekitar 9,3 juta tambahan angkatan kerja.

#### **4. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk**

Salah satu ciri daripada penduduk Indonesia adalah penyebarannya yang tidak merata, khususnya antara pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Jumlah penduduk pulau Jawa dalam tahun 1983 adalah kira-kira 96,9 juta orang dan meningkat menjadi 106,0 juta pada tahun 1988, suatu peningkatan sebesar 1,8% per tahun. Kepadatan penduduk di pulau ini meningkat dari 733 orang per kilometer persegi pada tahun 1983 menjadi 801 orang pada tahun 1988. Penduduk Sumatera diperkirakan akan meningkat dari 31 juta pada tahun 1983 menjadi 36 juta pada tahun 1988, suatu peningkatan sebesar 3%; penduduk Kalimantan meningkat dari 7,4 juta menjadi 8,4 juta atau 2,6% per tahun; Sulawesi dari 11,1 juta menjadi 12,3 juta atau 2,1% per tahun; Bali dan Nusa Tenggara dari 8,9 juta menjadi 9,8 juta atau 1,9% per tahun; Maluku dan Irian Jaya dari dan 2,8 juta. menjadi 3,1 juta atau meningkat 2,1% pertahun selama Revelita IV.

Kepadatan penduduk di Sumatera meningkat dari 66 orang per km<sup>2</sup> pada tahun 1983 menjadi 76 orang per km<sup>2</sup> pada tahun 1988, Kalimantan dari 14 menjadi 16, Sulawesi dari 59 menjadi 65, Bali dan Nusa Tenggara dari 101 menjadi 111, Maluku dan Irian Jaya dari 5 menjadi 6 orang per km<sup>2</sup> pada jangka waktu yang sama. Untuk seluruh Indonesia kepadatan penduduk meningkat dari 82 orang pada tahun 1983 menjadi 92 orang per kilometer persegi pada tahun 1988. Dengan demikian kepadatan penduduk daerah luar Jawa lebih rendah baik dari kepadatan penduduk pulau Jawa maupun kepadatan penduduk secara nasional.

Ketimpangan kepadatan penduduk ini mempunyai pengaruh terhadap luas pemilikan tanah pertanian yang cenderung semakin berkurang dan menyempit terutama di Jawa. Sebagai akibatnya, penyediaan lapangan kerja pertanian di pulau Jawa semakin terbatas. Petani penggarap dan petani yang mempunyai sedikit lahan pertanian semakin besar jumlahnya. Sementara itu, di luar Jawa tenaga masih langka dan sumber masih cukup tersedia. Lahan pertanian dan sumber-sumber alam lainnya banyak yang belum dimanfaatkan. Selain itu penyebaran yang kurang serasi dan kurang seimbang akan menyebabkan usaha pemeliharaan kelestarian dan pengaturan ekosistem menjadi sulit. Kepadatan penduduk di Jawa dan kelangkaan penduduk di luar Jawa pada hakikatnya mempunyai pengaruh langsung terhadap keserasian hubungan antara manusia dan antara manusia dengan lingkungan.

Masalah penting lainnya adalah penyebaran penduduk yang kurang seimbang antara kota dan desa. Tingkat pertumbuhan penduduk di kota lebih cepat daripada di desa, namun jumlah penduduk desa jauh lebih besar daripada penduduk kota. Pada tahun 1971 penduduk desa adalah 83% dan penduduk kota adalah 17% dari seluruh penduduk Indonesia, dan pada tahun 1980, prosentase tersebut berubah menjadi 78% dan 22%. Dalam Repelita IV diperkirakan jumlah penduduk kota akan

meningkat dari 37,9 juta pada tahun 1983 menjadi 48,4 juta pada tahun 1988 (lihat tabel berikut ini):

TABEL 6 JUMLAH DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK  
KOTA DAN DESA 1983 - 1984 (dalam juta)

	1971 <sup>1/</sup> (1)	1980 <sup>1/</sup> (2)	1983 <sup>2/</sup> (3)	1988 <sup>2/</sup> (4)
Kota	20,7 (17%)	32,8 (22%)	37,9 (24%)	48,4 (28%)
Desa	98,5 (83%)	113,9 (78%)	120,2 (76%)	127,2 (72%)
Jumlah	119,2 (100%)	146,7 (100%)	158,1 (100%)	175,6 (100%)

1/ Berdasarkan Sensus 1971 dan 1980

2/ Perkiraan

Lebih cepatnya pertumbuhan penduduk kota antara lain disebabkan oleh adanya perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Adanya pemusatan penduduk pada beberapa daerah yang relatif kecil menimbulkan berbagai masalah. Masalah ini menyangkut lingkungan hidup, keadaan pemukiman yang kurang sehat dan kebutuhan pembukaan lapangan kerja yang semakin mendesak.

Selain perpindahan penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen, perpindahan penduduk yang bersifat nonpermanen juga memerlukan perhatian. Perpindahan penduduk yang nonpermanen dapat mengambil bentuk perpindahan musiman. Penduduk pedesaan dalam musim tidak sibuk di daerah pedesaan pindah ke kota untuk mendapatkan lapangan kerja yang pada umumnya di sektor "informal" di kota. Selain itu, dengan meningkatnya pertumbuhan kota maka jumlah angkatan kerja yang bekerja di kota tetapi bertempat tinggal di luar kota bersangkutan akan semakin besar. Dengan demikian gejala perpindahan yang bersifat ulang-alik akan membutuhkan lebih banyak perhatian.

Pertumbuhan penduduk dan penyebaran mempengaruhi secara langsung masalah-masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan mutu dan pemanfaatan

sumber daya manusia. Pertumbuhan penduduk merupakan sumber utama peningkatan jumlah sumber daya manusia yang memerlukan pembinaan, pengembangan serta pemanfaatan. Masalah-masalah yang timbul oleh penyebaran sumber daya manusia yang kurang seimbang dipertajam dengan adanya pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, termasuk masalah tekanan kepada sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Perusakan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup baik lingkungan hidup fisik maupun sosial bukan hanya berkaitan dengan bertambahnya jumlah manusia, tetapi juga dengan belum meluasnya kesadaran dan penghayatan mengenai azas keseimbangan dan keselarasan dalam peri kehidupan bermasyarakat. Masih belum meluasnya kesadaran ini antara lain diakibatkan oleh karena kekurangan pengetahuan dan informasi mengenai berbagai segi kependudukan dan lingkungan hidup dan keserasian kependudukan dan lingkungan hidup serta terbatasnya penyebaran informasi yang ada. Oleh karena itu pendidikan dibidang kependudukan penting perannya dalam upaya menanggulangi masalah-masalah kependudukan lingkungan hidup. Selain daripada itu penelitian di bidang kependudukan terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan dan lingkungan hidup baik fisik maupun sosial juga perlu dikembangkan dalam usaha meningkatkan kesadaran dan pengetahuan di bidang kependudukan dan lingkungan hidup, dan sekaligus dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan pembangunan.

Pertumbuhan penduduk berperan besar dalam keseluruhan usaha pembangunan. Dalam kaitan inilah pentingnya peranan keluarga berencana sebagai usaha untuk mengendalikan kelahiran dan mutu sumber daya manusia dan lingkungan hidup.



## 5. **Kualitas Penduduk**

Dengan pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi dan jumlah penduduk besar serta penyebaran yang tidak merata, maka kualitas penduduk menjadi masalah yang makin meningkat. Untuk dapat mendayagunakannya sebagai pembangunan, penduduk perlu mempunyai produktifitas dan kualitas yang memadai, baik dari segi fisik dan non fisik. Tanpa peningkatan ini penduduk yang besar akan dapat menimbulkan berbagai masalah di masa depan dan merupakan beban pembangunan.

Kualitas fisik menyangkut kualitas fisik manusia itu sendiri dan indikator-indikator fisik kependudukan lainnya seperti angka kematian, harapan hidup dan sebagainya.

Angka kematian kasar dan kematian bayi Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara berkembang lainnya dikawasan Asia Tenggara ini. Hal ini disebabkan karena oleh lemahnya kondisi kualitas fisik penduduk, belum sehatnya lingkungan sehingga menimbulkan penyakit menular, sehingga hal ini memerlukan penanganan yang makin meningkat dalam Repelita IV.

Kualitas non fisik menyangkut segi-segi produktifitas penduduk, kesetiakawanan sosial, martabat dan kemampuan penduduk untuk hidup dalam hubungan keselarasan dengan lingkungan. Dalam Repelita IV berbagai segi kualitas non fisik kependudukan ini perlu ditingkatkan.

Proses pembangunan disamping menghasilkan dampak yang positif juga dapat menghasilkan dampak negatif pada kehidupan sosial. Begitu pula pembangunan membawa perubahan yang berlangsung cepat, sehingga memerlukan penyesuaian sosial budaya dalam masyarakat.

Dalam hubungan ini perlu diadakan penelitian dan pengkajian secara cermat tentang hal-hal tersebut, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dampak positif pembangunan dan mengurangi atau memperkecil dampak negatif pembangunan kepada kehidupan penduduk dan masyarakat.

## 6. Keluarga Berencana

Dalam GBHN dikemukakan bahwa program keluarga berencana bertujuan ganda, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Dalam Repelita I jumlah peserta baru, secara kumulatif adalah 4 juta, dalam Repelita II, 8,8 juta, dan dalam Repelita III berjumlah sekitar 1,6 juta. Dengan demikian selama tiga Repelita, jumlah peserta baru secara kumulatif 27,4 juta orang. Dalam pada itu, jumlah peserta lestari, yaitu peserta yang secara terus melaksanakan keluarga berencana dalam Repelita I adalah 1,7 juta, dan Repelita II 5,5 juta, dan dalam Repelita III sekitar 12,3 juta orang. Selama tiga Repelita jumlah peserta lestari secara kumulatif adalah 19,5 juta. Semakin banyak jumlah peserta semakin besar kemungkinan kelahiran dapat dicegah dalam Repelita III diperkirakan dapat tercegah 13,9 juta kelahiran.

Sasaran program keluarga berencana ke seluruh wilayah Indonesia dilakukan setahap demi setahap. Dalam Repelita I program ini hanya dilaksanakan di Jawa dan Bali, dalam Repelita II diperluas ke seluruh propinsi di luar Jawa dan Bali, dan dalam Repelita III diperluas lagi keseluruhan propinsi yang belum dijangkau oleh program keluarga berencana sebelumnya. Dengan demikian program keluarga berencana kini telah meliputi seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Pelaksanaan program keluarga berencana mempunyai pengaruh yang berarti angka kelahiran, perubahan struktur umur, usia kawin, angka kematian dan harapan hidup waktu lahir. Dari hasil-hasil sensus penduduk 1971 dan 1980 diperkirakan bahwa angka kelahiran kasar pada tahun 1971 adalah 44 per seribu penduduk dan pada tahun 1980 turun 18% yaitu menjadi 36 per seribu penduduk. Jumlah angka kelahiran pada tahun 1971 sebesar 5,6 per wanita pada tahun 1980 turun menjadi

18% menjadi 4,6 per wanita. Perubahan struktur umur dimana penduduk usia muda kurang dari 15 tahun yang pada tahun 1971 sebanyak 44% dari seluruh penduduk, maka pada tahun 1980 turun menjadi 41%. Rata-rata usia perkawinan pertama untuk daerah kota naik dari 21,1 tahun pada tahun 1971, menjadi 218 pada tahun 1980, dan di daerah pedesaan naik dari 18,6 menjadi 19,4 tahun selama jangka waktu yang sama. Sebagai akibatnya prosentase wanita, kawin umur 15 - 49 tahun pada tahun 1971 sebesar 72% dari seluruh jumlah wanita pada kelompok umur yang sama telah turun menjadi 70% pada tahun 1980.

Sementara itu, angka kematian kasar pada tahun 1971 sebesar 19,00 per seribu penduduk telah turun menjadi 12,5 pada tahun 1980. Angka kematian bayi yang pada tahun 1971 sebesar 140 per seribu telah turun 29% menjadi 100 pada tahun 1960. Penurunan angka di atas membawa pengaruh pada peningkatan umur harapan hidup waktu lahir yang dalam tahun 1971 adalah 46 tahun maka pada tahun 1980 telah naik menjadi 53 tahun.

Program keluarga berencana telah memberikan sumbangan besar bagi tercapainya hasil-hasil yang dikemukakan di atas. Hasil ini dimungkinkan karena adanya peningkatan dalam sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan program, baik langsung maupun tidak secara langsung, dan juga daya. mekanisme koordinasi yang mantap disemua tingkat pelaksana. Serta adanya kegiatan penunjang lainnya seperti usaha dibidang kesehatan, gizi, dan lain-lain. Namun masih banyak masalah yang dihadapi, baik masalah yang baru muncul maupun masalah lama yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Pertama walaupun tingkat pertumbuhan penduduk cenderung menurun tetapi pertambahan jumlah penduduk secara alamiah masih tetap besar. Adanya pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan pertambahan pada jumlah pasangan usia subur yaitu wanita kawin berumur antara 15 - 44 tahun. Pasangan usia subur diperkirakan

bertambah dari kira-kira 24,6 juta pada tahun pertama Repelita IV menjadi 27,5 juta pada akhir tahun Repelita IV. Dengan adanya penambahan jumlah pasangan usia subur berarti adanya penambahan kebutuhan pelayanan keluarga berencana.

Kedua, pengalaman keberhasilan pelaksanaan keluarga berencana dalam hal penurunan kelahiran di Jawa dan Bali pada dasawarsa tujuh puluhan merupakan suatu hasil yang menggembirakan. Namun di beberapa daerah di Jawa dan Bali jumlah mereka yang pernah menjadi peserta kini dikhawatirkan cenderung mendekati titik jenuh. Dalam rangka mempertahankan kelanggengan para peserta diperlukan usaha lebih besar, baik dibidang program keluarga berencana, maupun dibidang kependudukan pada umumnya serta sektor-sektor pembangunan lainnya.

Ketiga, jangkauan pelayanan keluarga berencana dalam awal dasawarsa delapan puluhan telah mulai berkembang ke seluruh wilayah Indonesia, namun di beberapa daerah di Luar Jawa dan Bali masih mengalami masalah keterbatasan sarana, prasarana dan komunikasi.

Keempat, meningkatkan peran serta masyarakat di dalam pelaksanaan keluarga berencana, masalah yang dihadapi adalah pemantapan kelembagaan untuk mendapatkan keluarga berencana baru dan menjaga kelangsungan peserta lestari, serta membantu meningkatkan koordinasi di lapangan.

Kelima, dalam rangka memanfaatkan asas sukarela dan kesadaran di dalam melaksanakan keluarga berencana diperlukan peningkatan penerapan pendidikan mengenai masalah-masalah kependudukan berikut cara-cara pemecahannya. Kegiatan ini perlu didorong mengingat beberapa daerah masih terdapat adat istiadat masyarakat yang kurang mendukung nilai keluarga kecil yang bertanggung jawab.

Keenam, dengan semakin meningkatnya sarana-sarana keluarga dan semakin meluasnya jangkauan wilayah pelaksanaan, maka diperlukan pengembangan sistem pengumpulan, pengolahan penyajian dan pemanfaatan informasi kependudukan dan keluarga berencana dalam rangka mewujudkan sistem pelaksanaan yang terpadu.

## **7. Kebijakan dan Langkah-langkah di Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana**

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dikemukakan bahwa kebijakan kependudukan yang menyeluruh dan terpadu perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan serta diarahkan untuk menunjang peningkatan taraf hidup, kesejahteraan dan kecerdasan bangsa serta tujuan pembangunan lainnya. Pelaksanaan kebijakan dan program-program kependudukan yang meliputi antara lain pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian anak-anak, perpanjangan harapan hidup, penyebaran penduduk dan tenaga kerja yang lebih serasi dan seimbang, pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan perlu makin ditingkatkan. Dengan demikian maka arah dan sasaran-sasaran pokok kebijakan kependudukan dalam jangka panjang meliputi:

- a. Menurunkan tingkat kelahiran yang akan dilaksanakan melalui usaha-usaha langsung maupun usaha-usaha tidak langsung. Usaha-usaha langsung meliputi antara lain kegiatan-kegiatan penyebarluasan dan penyediaan sarana-sarana keluarga berencana serta usaha meningkatkan pengetahuan dan praktek pelaksanaan keluarga berencana. Usaha-usaha tidak langsung meliputi antara lain berbagai kegiatan dan usaha yang mendorong para keluarga untuk melaksanakan norma keluarga kecil, sehat dan sejahtera.
- b. Menurunkan tingkat kematian terutama kematian anak-anak yang akan dilaksanakan melalui berbagai upaya

yang meliputi upaya dibidang kesehatan, pangan dan gizi, pendidikan, perumahan dan penyediaan air bersih dan lain-lain. Usaha-usaha menurunkan tingkat kematian terutama tingkat kematian anak-anak berkaitan erat dengan upaya menurunkan tingkat kelahiran.

- c. Meningkatkan tingkat hidup, yaitu meningkatkan umur rata-rata penduduk Indonesia. Hal ini akan dapat dicapai dengan berhasilnya dilaksanakan penurunan tingkat kematian dan tingkat kelahiran yang kesemuanya itu merupakan hasil upaya pembangunan di berbagai bidang.
- d. Menyebarkan penduduk dan tenaga kerja yang lebih serasi dan seimbang yang akan dilaksanakan melalui berbagai usaha dibidang transmigrasi, pembangunan daerah, pembangunan kota dan desa, pembangunan prasarana perhubungan dan jasa angkutan, dan penyebaran kegiatan pembangunan antar daerah yang lebih serasi, dan lain-lain.

Dalam Repelita IV pelaksanaan program keluarga berencana ditujukan untuk

- a. Membantu tercapainya sasaran penurunan tingkat kelahiran dalam jangka panjang, yaitu menurunnya dengan 50% tingkat kelahiran dalam jangka panjang. Dalam kaitan ini maka dalam Repelita IV tingkat kelahiran diperkirakan akan turun dari 33,46 per seribu penduduk menjadi 31,02 per seribu penduduk.
- b. Meningkatkan jumlah peserta keluarga berencana atas kesadaran dan sukarela dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta memelihara peserta keluarga berencana lestari.
- c. Mengembangkan usaha-usaha untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, memperpanjang harapan hidup, menurunkan tingkat kematian bayi dan anak di bawah lima tahun, serta memperkecil kematian ibu karena kehamilan dan persalinan.

- d. Menghimpun bahan-bahan bagi penyusunan kebijaksanaan kependudukan yang menyeluruh dan terpadu baik tingkat nasional maupun daerah yang diarahkan untuk mewujudkan penduduk Indonesia dengan ciri perilaku demografis yang menguntungkan bagi pelaksanaan pembangunan nasional.
- e. Meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat terhadap masalah kependudukan yang menjurus ke arah penerimaan dan penghayatan norma keluarga kecil dan bahagia sejahtera yang sebagai cara hidup yang layak dan bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan peranan dan tanggung jawab wanita dan generasi muda dalam pelaksanaan upaya-upaya untuk menanggulangi masalah kependudukan..
- g. Meningkatkan kesadaran, peranan dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat dalam pengelolaan program keluarga berencana.
- h. Meningkatkan usaha-usaha peningkatan mutu sumber daya manusia untuk perbaikan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dalam rangka mempercepat pelebagaan nilai-nilai keluarga kecil.
- i. Meluaskan dan mengintensifkan program keluarga berencana di seluruh wilayah tanah air dan lapisan masyarakat di daerah pemukiman baru dan masyarakat Indonesia keturunan asing.

Secara operasional tujuan-tujuan di atas dapat dicapai dengan cara:

- a. Mendorong pasangan usia subur yang isterinya belum usia 30 tahun dan atau jumlah anak kurang dari 3 orang agar mempunyai anak maksimal 2 orang.
- b. Membantu pasangan usia subur yang isterinya lebih dari 30 tahun atau anaknya 3 orang atau lebih agar tidak menambah anak yang dimilikinya.
- c. Mengarahkan generasi muda untuk menghayati nilai keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera serta

mendorong mereka untuk lebih banyak bahagia dalam bidang pendidikan, keterampilan, kepramukaan, olahraga, kesenian dan sebagainya.

- d. Memperkuat proses pelebagaan secara fisik dalam usaha keluarga berencana secara kelompok proses penanganan program semakin menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan masyarakat sendiri.
- e. Memperkuat proses pelebagaan yang bersifat mental spiritual dan lebih bersifat dukungan psikologis.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2002. *Sistematika, Teori, dan Terapan*. Bumi aksara: Jakarta.
- Bertrand, Alvin L. 1982. *Social Organization*. UEFA.
- Etzioni, Amitai. 1984. *Organisasi-organisasi Modern*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Firth, Raymond. 1981. *Elements of Social Organization*. Sage Publish: Perancis.
- Gunawan, Ary. 2000. *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi tentang Berbagai Problem Pendidikan*. Rineka cipta: Jakarta.
- Goldthorpe, J.E. 1992. *Sosiologi Dunia Ketiga, Kesenjangan, dan Pembangunan (Alih bahasa Suhadijo)*. Jakarta: Gramedia.
- Hendropuspito, D.O.C. 1990. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Horton, Paul B. & Chester. L. Hunt. 1992. *Sociologi*. Jilid 1 & 2. Terjemah Aminuddin Ram dkk. Jakarta: Gramedia.
- L. hunt, Chester dan Paul B. Horton. 1999. *Sosiologi I*. Erlangga: Jakarta.
- Sanderson, S.K. 1993. *Makrososiologi*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Schaefer, Richard T. 2001. *Sociology Seventh Edition*. McGraw Hill: New York.
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali: Jakarta.
- Sunarto, Kamanto. 1993. *Pengantar Sosiologi*. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Yukl, Gary. 2000. *Kepemimpinan Organisasi*. Erlangga: Jakarta.